PENERBIT
UNIVERSITAS
CIPUTRA

TIONGHOA MERAJUT KEINDONESIAAN

PERSEMBAHAN 80 TAHUN LEO SURYADINATA

EDITOR: DIDI KWARTANADA

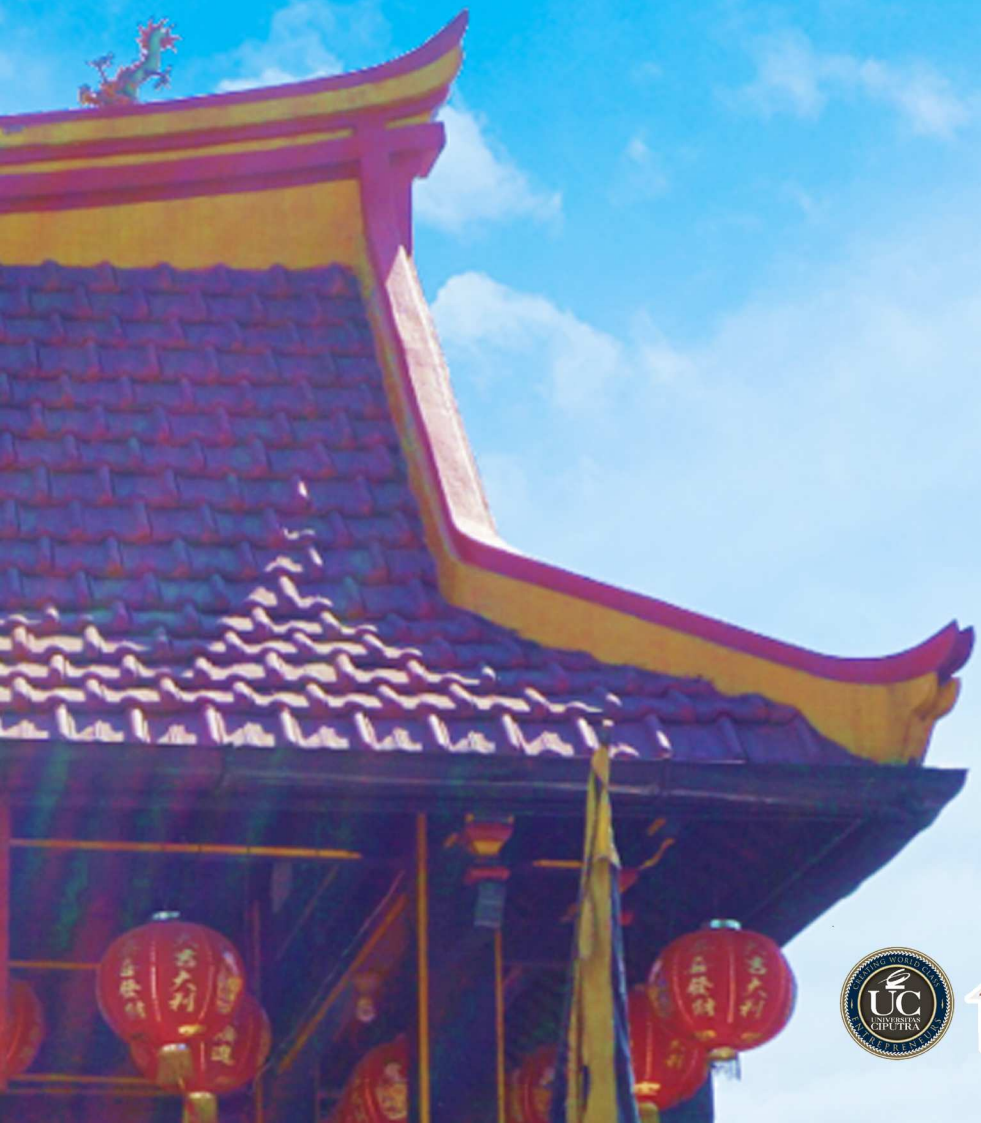

roemah bhinneka

BHINNEKA TUNGGAL IKA

TIONGHOA MERAJUT KEINDONESIAAN

Persembahan 80 Tahun Leo Suryadinata

Editor :
Didi Kwartanada

PENERBIT
UNIVERSITAS
CIPUTRA

TIONGHOA MERAJUT KEINDONESIAAN

Persembahan 80 Tahun Leo Suryadinata

ISBN	:	978-623-7636-81-6
Editor	:	Didi Kwartanada
Penulis	:	Aan Anshori, Alex Cheung, Didi Kwartanada, Evi Lina Sutrisno, Johan Hasan, Michael Andrew, Ravando, Rojil Nugroho Bayu Aji, Shinta Devi Ika Santhi Rahayu, Surya Samudera Giamsjah, Sutrisno Murtiyoso, Yerry Wirawan
Layout Cover	:	Yehuda Abiel
Foto Cover	:	Chrisyandi Tri Kartika
Jumlah Halaman	:	276 halaman
Ukuran Buku	:	15,5 cm X 23 cm

Buku ini dapat diunduh secara gratis maupun dicetak tanpa mengubah tata letak atau kalimatnya. Pengutipan atas tulisan dalam buku ini dapat digunakan untuk keperluan akademis, referensi, publikasi atau kebutuhan non-komersial lainnya dengan menyebutkan sumber dan penulisnya. Hak cipta tetap dimiliki oleh masing-masing penulis, sedangkan hak ekonomi buku ini dilepaskan oleh penulis dan penerbit, dipersembahkan secara *pro bono publico*, demi pendidikan publik masyarakat Indonesia.

Penerbit Universitas Ciputra
Citraland CBD Boulevard, Kel. Made, Kec. Sambikerep, Surabaya
Jawa Timur, 60219

TIONGHOA MERAJUT KEINDONESIAAN

Persembahan 80 Tahun Leo Suryadinata

Editor :
Didi Kwartanada

Surabaya
Roemah Bhinneka dan Universitas Ciputra Surabaya
2021

SAMBUTAN

ROEMAH BHINNEKA

Perkenankanlah saya dan segenap keluarga besar Roemah Bhinneka mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Leo Suryadinata atas dedikasinya selama ini terhadap isu ketionghoaan yang sangat luar biasa, khususnya yang berkaitan dengan keindonesiaan.

Kita semua tahu bahwa identitas Tionghoa dan Indonesia --baik sebagai negara maupun bangsa -- telah memicu dinamika tersendiri, bahkan hingga saat ini. Banyak orang berkeinginan agar relasi Tionghoa dengan keindonesiaan bisa segera "tuntas," "paripurna," dan "melegakan" bagi semua pihak. Namun saya tidak terlalu yakin hal itu bisa terjadi, setidaknya dalam waktu dekat ini. Alih-alih, saya menyadari bahwa sangat mungkin isu ini akan terus menggelinding, *unfinished*, seperti konsep Indonesia yang hingga saat ini juga dalam proses pencarian (*in quest*). Bagi saya, hal ini bisa dipandang secara positif.

Di titik ini, saya memiliki keyakinan banyak karya Prof Leo Suryadinata yang telah dihasilkan dan sangat berkontribusi untuk memahami ketionghoaan dalam konteks keIndonesiaan. Karya-karya ini jelas akan sangat membantu proses *national building* yang, sayangnya, seringkali terjebak dalam situasi politik yang kadang tidak kita idealkan.

Buku yang ada di tangan para pembaca ini adalah suatu bentuk penghargaan yang bisa kami berikan terhadap proses di atas, secara umum. Dan secara khusus, buku ini juga dimaksudkan untuk mengapresiasi kontribusi serta melestarikan nama besar seorang Leo Suryadinata. Menurut saya, beliau adalah salah satu pejuang pemikiran yang dihadirkan oleh zamannya. Kami sangat terinspirasi dengan kehadiran karya-karyanya.

Di usianya yang sudah tidak bisa dikatakan muda ini, beliau masih aktif mengajar dan menulis. Pemikirannya masih sangat relavan. Pencapaian dan dedikasi ini sungguh merupakan hal yang tidak hanya mengagumkan namun juga patut ditiru, diteladani. Itu sebabnya, sosok Leo Suryadinata sangatlah perlu dihadirkan terutama di kalangan anak muda, apa pun identitasnya.

Tak lupa saya mengucapkan penghargaan kepada Universitas Ciputra dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan sampai terbitnya buku ini. Semua kontribusi ini, saya yakini, akan mendapatkan tempatnya sendiri dalam panggung sejarah Indonesia

Sekali lagi, selamat dan proficiat atas terwujudnya buku ini. Tetap semangat berkarya. Tetap sehat buat Prof Leo Suryadinata

Ciayo Ciayo ..... !!!!!!

Surabaya, Februari 2021
Iryanto Susilo
***Founder* Roemah Bhinneka**

SAMBUTAN

UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

"*To the victor is the privilege to re-write the history*"
--Churchill--

Catatan sejarah tentang peranan suku Tionghoa Indonesia mudah diabaikan dan bahkan sebagian dihapus dari buku sejarah resmi. Sepanjang 76 tahun sejarah Republik Indonesia, terlihat bahwa rezim pemerintah yang dianggap terbaik pun kelihatan belum mampu melawan kecenderungan pengabaian ini. Generasi muda Tionghoa Indonesia menjadi lupa akan akar sejarahnya. Padahal memiliki akar sejarah itu penting peranannya dalam menginspirasi dan memotivasi anak-anak muda tersebut untuk melakukan kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.

Leo Suryadinata adalah sedikit dari mereka yang berjuang untuk melawan lupa. Daftar publikasinya yang panjang, termasuk sebagian karyanya yang masih belum terdata dalam daftar tulisan di buku ini, menunjukkan kegigihannya tersebut.

Leo bukan sejarawan biasa. Ia adalah ahli Ilmu Politik. Publikasinya tentang topik Tionghoa di Indonesia melingkupi area yang sangat luas tentang peran Tionghoa Indonesia di pelbagai bidang: mulai dari politik, ekonomi, budaya, sastra, hingga cerita silat. Dengan demikian, seharusnya generasi muda Tionghoa Indonesia tidak kekurangan teladan dan inspirasi untuk mereka berperan dalam bidang apa saja untuk bangsa Indonesia.

Bukan saja orang Tionghoa Indonesia, saya kira semua orang Indonesia selayaknya berterima kasih atas usaha yang dilakukan oleh Leo ini. Tulisan-tulisannya itu menyebabkan kontribusi dan

peran suku Tionghoa Indonesia dalam membentuk dan mengisi Republik Indonesia tidak dilupakan. Anak-cucu keturunan Tionghoa Indonesia tetap memiliki akar sejarahnya, dapat mengetahui dan terinspirasi dari tulisan Leo. Hal ini saya kira, telah membuat nama Leo Suryadinata menjadi *immortal*.

Dengan ini, saya menyambut penerbitan buku *Tionghoa Merajut Keindonesiaan, Persembahan 80 Tahun Leo Suryadinata* dengan Editor Didi Kwartanada, sejarawan Indonesia. Buku yang dibagikan secara cuma-cuma ini adalah buah kerja sama Roemah Bhinneka dan Universitas Ciputra dengan para penulis yang berkontribusi secara sukarela bagi pendidikan masyarakat sekaligus memberikan apresiasi bagi pengabdian total seorang Leo Suryadinata.

Surabaya, Februari 2021

Yohannes Somawiharja
Rektor Universitas Ciputra Surabaya

DAFTAR ISI

Sambutan I: Roemah Bhinneka **4**

Sambutan II: Universitas Ciputra Surabaya **6**

Pengantar Editor **10**

Wacana Pembuka **15**

Leo Suryadinata dan Kajian Tionghoa di Indonesia
Didi Kwartanada **16**

Publikasi Selektif Leo Suryadinata **48**

Bagian I: Stereotip, Identitas dan Nasionalisme **63**

Leo Suryadinata dan Cerita Tionghoa di Mulut Harimau-Buaya
Aan Anshori **64**

Pelajaran dari Perjalanan
Surya Samudera Giamsjah **70**

Menuju Nasionalisme Indonesia yang Berkesetaraan
Johan Hasan **80**

Pentingnya Peranan Orang Tionghoa dalam Administrasi Publik Indonesia
Michael Andrew **97**

Bagian II: Agama dan Kepercayaan **103**

Moral is Political: Notions of Ideal Citizenship in Lie Kim Hok's Hikajat Khonghoetjoe
Evi Lina Sutrisno **104**

DAFTAR ISI

Kisah Dua Punden: Kajian Mengenai Punden pada Dua Kelenteng di Parakan dan Magelang
Sutrisno Murtiyoso **150**

Bagian III: Edukasi **171**

Dilema Etnis Tionghoa: Kebijakan Jepang terhadap Pendidikan Etnis Tionghoa Surabaya 1942-1945
Shinta Devi Ika Santhi Rahayu **172**

Bagian IV: Olahraga **187**

The Magnificent Seven*: Pionir Prestasi Bulutangkis Indonesia*
Ravando **188**

Berjumpa Leo Suryadinata Saat Heuristik Sejarah Sepak Bola Tionghoa
Rojil Nugroho Bayu Aji **204**

Bagian V: Historiografi dan Sejarah Lokal **213**

Historiografi Etnik Tionghoa Pasca-1998: Suatu Tinjauan Awal
Didi Kwartanada **214**

A Preliminary Research on Wilson Tjandinegara: A Chinese Writer in the Reformasi *Era*
Yerry Wirawan **242**

Penutup **255**

Memperkenalkan "NGGOTIO" (NGGOsipin TIOnghoa).
Alex Cheung **256**

Biodata Kontributor **270**

PENGANTAR EDITOR

Siapa pun yang meneliti masyarakat Tionghoa Indonesia, pasti pernah bertemu dan berkenalan dengan nama Leo Suryadinata maupun karya-karyanya. Tak terhitung berapa pastinya jumlah karya beliau (terbit dalam tiga bahasa: Inggris, Tionghoa dan Indonesia)[1], yang memulai publikasinya di kancah internasional dalam bahasa Inggris sejak 1970-an.

Karyanya mulai hadir dalam bahasa Indonesia di dekade 1980-an, termasuk publikasi dalam jurnal terkemuka *Prisma* tentang biografi beberapa tokoh Tionghoa yang terlupakan sejarah. Bukunya, *Dilema Minoritas Tionghoa* (1984, 1986) telah membantu banyak sekali mahasiswa --termasuk diri saya--maupun khalayak umum untuk lebih memahami sejarah sosial politik dan ekonomi Tionghoa di Indonesia dari sekitar akhir abad ke-19 hingga 1970-an. Beliau pernah bercerita kepada kami, bagaimana harus bersikeras agar judul buku tersebut memakai "Tionghoa", bukannya "Cina", suatu istilah yang dilazimkan oleh Orde Baru.

Tidak diragukan lagi, bahwa Pak Leo --demikian kami memanggil beliau-- adalah seorang peneliti senior yang masih terus berkarya di jagad kajian Tionghoa Indonesia dewasa ini. Satu hal yang membuat kami kagum adalah beliau yang telah memiliki segudang pengalaman, mau berbagi dengan kami dan khalayak ramai melalui acara webinar NGGOsipin TIOnghoa (NGGOTIO). Beliau selalu menyambut hangat ajakan kami untuk tampil sebagai narasumber pro bono maupun sebagai audiens (dan kadang kami minta tanggapannya *on the spot*).

Dengan latar belakang seperti itu, ketika mendapatkan kabar, bahwa pada 21 Februari 2021 ini Pak Leo (demikian kami memanggilnya) akan merayakan ulang tahunnya ke-80, maka saya segera menyampaikan ide membuat semacam *festchsrift* untuk merayakan pencapaian usia tersebut kepada rekan-rekan NGGOTIO.

[1] "Daftar Karya" yang dimuat dalam buku ini hanya berisi karya elektif saja, hingga November 2021.

Usulan ini disambut dengan antusias, karena rekan-rekan juga memiliki pengalaman yang kurang lebih sama dengan saya, yaitu terbantu dengan karya-karya Pak Leo. Di samping itu juga mereka ingin mengapresiasi dukungan beliau pada acara webinar NGGOTIO yang kami selenggarakan.

Dalam waktu singkat rekan-rekan mengirimkan tulisannya. Ada yang berupa tulisan baru, ada juga tulisan lama, karena penulisnya tidak sempat meng-*update* karyanya. Totalnya ada 11 artikel yang kami klasifikasikan ke dalam lima bagian:

(1) **Stereotip, Identitas dan Nasionalisme** (Aan Anshori, Surya Samudera Giamsjah, Johan Hasan dan Michael Andrew);
(2) **Agama dan Kepercayaan** (Evi Lina Sutrisno dan Sutrisno Murtiyoso);
(3) **Edukasi** (Shinta Devi Ika Santhi Rahayu);
(4) **Olahraga** (Ravando dan Rojil Nugroho Bayu Aji), dan
(5) **Historiografi dan Sejarah Lokal** (Didi Kwartanada dan Yerry Wirawan).

Semua merupakan tulisan awak NGGOTIO yang ingin mempersembahkan kado ulang tahun delapan dasawarsa Pak Leo. Untuk mendapatkan *moment*-nya, versi awal buku ini sudah kami hadiahkan secara virtual kepada Pak Leo dalam episode NGGOTIO ke-28 (22 Februari 2021).[2] Intinya kami semua sepakat, bahwa buku ini nantinya akan dibagikan secara cuma-cuma dalam bentuk digital PDF yang bisa diakses siapa saja, sesuai semangat berbagi NGGOTIO.

Selain berisi bunga rampai beragam tulisan, rasanya buku ini tidak lengkap tanpa sebuah bab biografis tentang Pak Leo dan karya-karyanya. Ironisnya, walaupun Pak Leo banyak menghasilkan publikasi *who's who* (apa siapa), rupanya malah tidak banyak tulisan tentang biografi beliau. Rasanya karena beliau terlalu *low profile*. Maka kami tambahkan satu bab yang diolah dari NGGOTIO episode ke-15, 9 November 2020

[2] Bisa disaksikan di link https://www.youtube.com/watch?v=axdvVhvwFC4&list=PLPpX8GxZOm73Jsf2maKojNgdpnPsK3W3T&index=23&t=4s

yang antara lain mengangkat kisah perjalanan hidup Pak Leo.[3] Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Alex Cheung, seorang fans (paling) setia NGGOTIO, yang juga sudah merampungkan naskah luar biasa berupa transkrip seluruh 50 episode NGGOTIO! Sungguh suatu pekerjaan besar yang dilakukan dengan penuh cinta, pro bono. Setelah buku ini beres, pada waktunya hasil karya Alex ini juga akan kami bagikan dengan cuma-cuma dalam format PDF.

Untuk lebih melengkapi buku ini, karena buku ini merupakan buah hasil dari acara NGGOTIO, kami ingin ada satu tulisan yang merekam apa siapa itu NGGOTIO dan apa saja yang telah dilakukannya. Tidak ada orang yang bisa menulis lebih baik tentang kami selain Alex Cheung. Maka dengan segera dia mewawancarai panggagas NGGOTIO (Dr. Evi Lina Sutrisno) dan diri kami. Hasil akhirnya bisa dilihat dalam bagian epilog. Berhubung berbagai kesibukan kami, versi final buku ini baru bisa selesai setelah beberapa bulan lewat. Untuk itu kami mohon maaf kepada Pak Leo. Demikian juga, seperti kata peribahasa "tak ada gading yang tak retak". Walaupun kami sudah berusaha maksimal dalam menyunting buku ini, pasti di sana-sini masih berceceran kesalahan. Tentunya ini tanggung jawab kami selaku penyunting. Untuk itu mohon pembaca budiman berkenan memberitahukan kepada kami hal-hal apa saja yang perlu dikoreksi. Untuk itu kami selaku editor mengucapkan terima kasih.

Sebuah buku merupakan buah dari hasil kerja kolektif. Untuk itu perlu kami sampaikan ucapan terima kasih. Pertama-tama kepada Pak Leo untuk semua dukungan dan inspirasinya bagi beberapa generasi peneliti. Terima kasih tak terhingga juga kami haturkan kepada keluarga besar NGGOTIO, sebuah tim yang sudah laksana keluarga, saling berbagi dalam suka dan duka. Untuk Cik Evi Lina Sutrisno, sang penggagas, apresiasi dan terima kasih untuk upaya gigihmu dalam mengajak saya bergabung di kelompok ini. Tentu juga kepada Pak Iryanto Susilo (*Founder*

[3] Bisa disaksikan di link https://www.youtube.com/watch?v=59emjXsJlYY&list=PLPpX8GxZOm73Jsf2maKojNgdpnPsK3W3T&index=36&t=2584s

Roemah Bhinneka) dan Pak Yohannes Somawiharja (Rektor Universitas Ciputra Surabaya) yang telah memungkinkan kami semua turut mengisi proses *nation building* lewat acara webinar NGGOTIO, seluruh pengisi acara yang bersedia berbagi secara pro bono di tengah kesibukan mereka serta para pembuat *flyer* (Pandyapratita Putra, Masruhan dan Yehuda Abiel) yang setiap minggu kami kejar-kejar desainnya. *Last but not least,* adalah dukungan para pemirsa yang selalu setia memberikan masukan dan dukungannya.

Adapun ucapan terima kasih khusus saya sampaikan pada 10 orang awak NGGOTIO yang telah meluangkan waktunya untuk menulis di sini, untuk Pak Johan Hasan yang memfasilitasi agar buku ini bisa hadir lewat unit penerbitan Universitas Ciputra Surabaya, serta paling rajin mengejar-ngejar kami untuk segera menyelesaikan buku ini. Juga kepada tim Universitas Ciputra yang sudah mengerjakan *lay out* dan mengurus ISBN buku ini, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Kepada sobat Alex Cheung, ucapan terima kasih khusus karena telah ikut membuat isi buku ini lebih lengkap. *Last but not least, to my better half,* Evelyne Yudiarti*, my guardian angel, for your everlasting support and understanding.*

Akhirnya, semoga Pak Leo tetap sehat dan bersemangat untuk terus berkarya. Dan kepada para pembaca, semoga apa yang kami persembahkan ini bisa menambah wawasan Anda sekalian. Selamat membaca!

Jakarta, penghujung tahun yang basah 2021
Didi Kwartanada

WACANA PEMBUKA

Leo Suryadinata dan Kajian Tionghoa di Indonesia[1]

Didi Kwartanada

PENGANTAR

LEO SURYADINATA terlahir sebagai **Liauw Kian Djoe** [廖建裕 **Liao Jianyu]** di Jakarta, 21 Februari 1941, setahun menjelang datangnya tentara pendudukan Jepang. Dirinya telah memberikan kontribusi penting dalam kajian Tionghoa di Indonesia. Tulisan ini merupakan gambaran awal sumbangsih Leo pada bidang ini melalui karya-karyanya yang terbit dalam bahasa Indonesia, setelah lebih dulu memberikan narasi ringkas tentang latar belakang pribadi dan pendidikannya.

[1] Sumber-sumber yang digunakan adalah bahan-bahan dari Pak Leo: (1) "CV Professor Dr. Leo Suryadinata" (2018), (2) "Riwayat Singkat Prof. Dr. Leo Suryadinata" (2021). Ditambah *talkshow* dengan Pak Leo dalam NGGOTIO episode ke-15, 9 November 2020, yang bisa disaksikan di link https://www.youtube.com/watch?v=59emjXsJlYY&list=PLPpX8GxZOm73Jsf2maKojNgdpnPsK3W3T&index=36&t=2584s. Penulis memanfaatkan transkripnya yang sudah dikerjakan oleh Alex Cheung. Untuk itu kami haturkan terima kasih kepada Pak Leo dan Alex juga www.worldcat.org yang memudahkan kami mencari publikasi Pak Leo. Namun isi artikel ini adalah tanggung jawab kami pribadi.

Kegigihan Leo dalam belajar dan melakukan riset membuatnya telah meraih lima gelar akademis dari lima universitas dalam bidang ilmu sejarah, ilmu politik dan hubungan internasional. Kelima gelar yang diraihnya tersebut adalah:

- B.A. (Nanyang University, 1962)
- Sardjana Sastra, atau disebut juga Doktorandus (Universitas Indonesia, 1965)
- M.A. (Monash University, Australia, 1970)
- M.A. (Ohio University, USA, 1972)
- Ph.D. (American University, Washington D.C., USA, 1975)

Selama perjalanan karirnya yang panjang, berbagai jabatan dan posisi pernah dipangkunya antara lain:

- Direktur Chinese Heritage Centre (CHC, Singapore, 2006-2013);
- Presiden, International Society for the Study of Chinese Overseas (ISSCO, 2007-2010; 2010-2013);
- Pengajar, kemudian profesor, Departemen Ilmu Politik, Universitas Nasional Singapura (National University of Singapore, NUS, 1982-2002);
- Peneliti, kemudian Peneliti Senior, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS 1975-1982; 2002-2005).

Dari daftar publikasinya (selektif) hingga November 2021 (terlampir), nampak bahwa Leo Suryadinata sangat produktif. Tercatat dirinya sudah menerbitkan lebih dari enam puluh buku dalam tiga bahasa yang dikuasainya dengan baik: Inggris, Tionghoa dan Indonesia.

Kira-kira separuhnya berupa karyanya sendiri (penulis tunggal; *single-authored book*) dan sisanya merupakan buku-buku yang disuntingnya, di mana dia juga ikut menyumbangkan artikel di dalamnya.

Latar Belakang Keluarga

Foto 2. Keluarga Lengkap Leo Suryadinata (1955)
Tampak Leo Suryadinata muda di dalam foto (dilingkari)
(Foto: Koleksi Pribadi Leo Suryadinata)

Leo Suryadinata terlahir sebagai anak ke-3 dari 8 bersaudara keluarga Liauw, seorang pengusaha di Jakarta. Kedua orangtua Leo dilahirkan di Indonesia dan sehari-harinya berkomunikasi dalam Bahasa Betawi serta Bahasa Indonesia. Walaupun ayahnya mampu bercakap bahasa Mandarin dan dialek Hokkian, tetapi bahasa tersebut tidak digunakan ketika dia berbicara dengan anak-anaknya.

Adapun riwayat pendidikan dasar hingga menengah Leo semua ditempuh di sekolah dengan pengantar bahasa Tionghoa. Ia pernah belajar di sekolah Tionghoa di daerah Tanah Abang yang berlangsung hanya setahun, sebelum kemudian pindah ke *Sin Hwa* di Pasar Baru, lalu lanjut ke *Pah Chung (Pah Tsung)*, sebuah sekolah menengah Tionghoa terkemuka di Jakarta saat itu, sampai lulus (1958). Saat duduk dibangku sekolah dasar, oleh karena takut tertinggal di dalam pelajaran, dia juga dikursuskan bahasa Tionghoa oleh orangtuanya supaya lebih lancar dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Leo besar dalam dunia budaya Tionghoa-Indonesia, di tengah masyarakat Jakarta yang multikultural. Ini adalah modal yang kuat baginya untuk nantinya menjadi seorang pengamat dunia ketionghoaan Indonesia.

Foto 3. Leo Suryadinata bersama kedua orang tua (1980)
(Foto: Koleksi pribadi Leo Suryadinata)

Leo adalah seorang kutu buku sejak muda. Bacaannya adalah buku dalam bahasa Mandarin maupun Indonesia. Buku-buku sastra, baik yang berup cerita rakyat, maupun cerita silat Tiongkok (dalam versi asli maupun edisi Indonesia yang pada waktu itu banyak dihasilkan penerjemah seperti Oey Kim Tiang/O.K.T. dan lain-lain). Di samping buku-buku Mandarin, juga buku-buku cerita rakyat dalam Bahasa Indonesia (seperti yang dikarang M Radjab, Bagindo Saleh, Da Kacha dan Zuber Usman dll.) serta komik-komik yang dimuat dalam Star Weekly, mingguan Sin Po, dan Pancawarna. (misalnya Put On, Sie Djin Kwi, Si A Piao, dsb-nya. Komik Ramayana dan MahaBaratha juga sering dibacanya)

Bukan hanya membaca, sejak duduk di bangku sekolah menengah, Leo sudah mulai menulis karangan berbahasa Tionghoa, yang diterbitkan dalam media cetak dalam bahasa tersebut.

Selain karya kreatif, Leo juga membuat terjemahan cerita-cerita rakyat Indonesia ke dalam Bahasa Indonesia. Seingatnya, dia juga pernah menulis karangan di ruang Kanak-kanak mingguan *Star Weekly.*

Membentangkan Sayap lewat Nantah

Setamat SMA (1958) Leo melanjutkan studinya ke Nanyang University (南洋大学/Nantah), yang barusaja didirikan secara swadaya oleh komunitas Tionghoa di Singapura dan resmi beroperasi sejak 1956. Nantah adalah satu-satunya perguruan tinggi swasta di kota singa yang memakai medium bahasa

Tionghoa. Kebetulan sekali, Nantah membuka jurusan Bahasa dan Sastra Tionghoa yang menjadi minat Leo. Ketika sampai di Singapura, terlebih dahulu ia belajar Bahasa Inggris selama 6-7 bulan untuk mengikuti tes masuk ke perguruan tinggi tersebut. Akhirnya Leo lulus ujian masuk dan diterima sesuai pilihannya. Namun beberapa saat setelah kuliah, Leo mempertanyakan prospek masa depan kalau sudah tamat dari jurusan tersebut, yang diyakininya tidak akan mampu membawanya menggapai cita-cita yang tinggi. Oleh karena itu di tahun kedua kuliahnya (1960), ia kemudian "banting setir" menggabungkan diri ke jurusan sejarah. Semula Leo mempelajari sejarah Tiongkok, lalu masuk ke sejarah Barat, kemudian ia mendalami juga sejarah Asia Tenggara. Sejak itulah Leo mengkhususkan diri dalam sejarah kawasan ini.

Apabila kita mengecek katalog global online www.worldcat.com nampak di sana "rekam jejak digital" Leo, yang ternyata sangat aktif menulis dan mempublikasikan karyanya sejak usia muda, walaupun masih terbatas dalam bahasa Tionghoa[2]. Kinerja ini semakin tersalur saat dirinya duduk di bangku kuliah di Nantah. Ia menerbitkan cukup banyak karya tentang Indonesia dan Malaya, khususnya tentang legenda, bahasa dan sastra dalam bahasa Tionghoa.

Bisa disebut di sini antara lain: (1) 印尼名诗选 *Yin ni ming shi xuan = Sanjak-sanjak Indonesia* (39 hlm, Singapura: 1959); (2) 凯里尔 • 安哇诗选*Kai Li Er An Wa Shi Xuan = Sajak2 Chairil Anwar.* Singapura, 1961 (45 hlm). Hingga kini Chairil Anwar adalah salah satu penyair idola Leo; (3) 爱情 • 眼泪 • 歌声 *Aiqing· -Yanlei-Gesheng* (Asmara- Airmata- Irama: Himpunan Sajak Indonesia) Singapura, 1962 (49 hlm) dan (4) 现阶段的印尼文学运动. Xian jie duan de yin ni wen xue yun dong (102 hlm) Singapura: 1962), tentang gerakan sastra Indonesia pada ketika itu.

Pada usianya ke-19, Leo menerbitkan beberapa buku yang disunting oleh Hsu Yun-Ts'iao (許雲樵/Xǔ Yúnqiáo, 1905-1981),

---

[2]Katalog www.worldcat rupanya tidak mencatat karya-karya Leo dalam Bahasa Melayu ketika dirinya berada di Nantah (Januari 1959-Desember 1962) . Dirinya sering menulis untuk media-media *Berita Harian, Mimbar Universiti dan Budaya*. Tulisan Leo cukup banyak, sayang tidak dibukukannya. Pada waktu itu, boleh dikatakan Leo merupakan sosok "Jembatan Budaya" untuk masyarakat Melayu dan Tionghoa di Singapura dan Malaya (koreksi dan tambahan info dari Leo Suryadinata, email 22 Januari 2022)

[3] Mengenai Hsu, lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Hsu_Yun_Tsiao
(diakses 13 Desember 2021).

seorang akademisi terkemuka Singapura tentang Tionghoa Perantauan dan sejarah Asia Tenggara.[3] Karya-karya itu adalah: (1) 苏门答腊民间故事 / *Su men da la min jian gu shi* (49 hlm, 1960) cerita-cerita dari Sumatera; (2) 万鸦老民间故事*Wan ya lao min jian gu shi* (terjemahan dari *Dongengan Menado* karya sastrawan Minahasa H.M. Taulu, 45 hlm) (Singapura: 1960); (3) 爪哇民间故事 / *Zhao wa min jian gu shi* (54 hlm, 1960), legenda-legenda Jawa; (4) 印尼散記/*Yinni san ji* (115 hlm, 1960) Judulnya berarti "Catatan Acak tentang Indonesia".

Ketertarikan Leo pada kesusasteraan Melayu juga membuatnya menerbitkan buku-buku dalam tema tersebut, bahkan kamus pun juga dibuatnya. Menariknya, karya-karya ini diterbitkan tidak saja di Singapura, namun juga di Malaya dan Hongkong, misalnya: (1) 马来新文学的独特性/*Ma lai xin wen xue de du te xing* (Hong Kong, 1961, 103 hlm); (2) 马来新诗选 *Ma lai Xin shi Xuan* (Himpunan Sajak Melayu), (Singapura: 1961, 59 hlm); (3) 馬來同義詞詞典 = *Malai tong yi ci ci dian* = Kamus *kata sa-rumpun bahasa Melayu* (Singapura 1961, 263 hlm) tentang sinonim dan antonim bahasa Melayu. Jadi memasuki usianya ke-20, Leo sudah menjadi penulis dalam bahasa Tionghoa yang cukup produktif dan telah menerbitkan karya-karyanya di berbagai negara. Untuk melengkapi kehidupan intelektualnya di Nantah, Leo juga banyak menulis karangan dan sajak dalam Bahasa Melayu di suratkabar *Berita Harian* dan majalah *Nantah Mimbar Universiti*. Di samping itu Leo bergiat selaku editor sebuah majalah Bahasa Melayu, bertajuk *Budaya* (1960-1962).

Memperdalam Sejarah Indonesia di Rawamangun

Sekembalinya ke Indonesia setelah maeraih gelar sarjana muda sejarah dari Nanyang University (1962), Leo ingin lebih memperdalam bidang studi ini. Satu-satunya lembaga yang menawarkan program itu di kota kelahirannya, tentu saja di Universitas Indonesia (UI) yang pada waktu itu masih berlokasi di Rawamangun.[4]

---

[4] Mulai bagian ini dan seterusnya diambil dari sketsa otobiografis Leo dalam "Pengantar" dari buku Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965-2008* (Jakarta: Kompas, 2010), h. viii-xiii

Untuk itu dirinya mengunjungi Dekan Fakultas Sastra UI, Profesor Soetjipto Wirjosuparto --biasa dipanggil Pak Cip-- di kantornya hingga dua kali, dengan tujuan supaya dirinya diberikan kesempatan untuk meraih gelar Sarjana Sastra (dengan titel drs./doktorandus).

Soetjipto minta Leo kembali tiga bulan kemudian untuk menjawab pertanyaan, yang akan diujikan sendiri olehnya. Ada empat topik yang ditanyakan: sejarah Indonesia kuno, sejarah Indonesia zaman kolonial serta Pancasila dan Manipol USDEK.[5] Keempatnya adalah mata kuliah yang merefleksikan jiwa zaman, ketika ajaran-ajaran Presiden Sukarno merupakan ideologi yang harus dipahami setiap calon mahasiswa. Termasuk di sini juga Leo, yang "harus menguasainya sebelum masuk tingkat empat Jurusan Sejarah".

Pada waktu itu sistem pendidikan di Fakultas Sastra UI adalah 5 tahun, tiga tahun untuk tingkat sarjana muda dilanjut dua tahun tambahan bagi gelar Sarjana Sastra/Doktorandus. Leo tidak perlu menjadi sarjana muda lagi karena sebelumnya ia sudah meraih gelar B.A. di Singapura, sehingga saat diuji Pak Cip ia lulus dan langsung duduk di tingkat sarjana tahun keempat.

Pada waktu yang bersamaan, beberapa mahasiswa Singapura juga masuk ke UI karena mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia. Mereka antara lain Liaw Yock-fang (1936-2016, Bahasa dan Sastra Indonesia)[6] dan Tan Ta Sen (Bahasa dan Sastra Indonesia).[7] Mereka bertiga lulus Bahasa dan Sastra UI berbarengan (lihat foto 4) dan kemudian tetap menjadi sahabat hingga akhir hayat.

Adapun sahabat-sahabat seangkatan Leo adalah Soe Hok Gie (1942-1969), alm. Richard Zacharias Leirissa (kemudian menjadi guru besar UI, wafat 2006), juga Abdullah Dahana (mahasiswa

---

[5] Manipol USDEK merupakan akronim dari Manifesto Politik / Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang oleh Sukarno dijadikan haluan negara (Wikipedia).

[6] Liaw Yock-fang kemudian menjadi ahli kesusasteraan Melayu Klasik. Dirinya terus menekuni jalur akademik dan lanjut belajar ke Universitas Leiden hingga meraih gelar Drs. (1971). Lima tahun kemudian ia memperoleh gelar Doktor Sastra dari universitas yang sama, dengan mempertahankan disertasinya yang berjudul *Undang-undang Melaka*. Dirinya mengajar di NUS hingga purnabakti. Bukunya yang banyak digunakan di sini adalah *Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

[7] Setelah lulus dari UI, Tan Ta Sen mengajar di Nanyang University (1969-1978); kemudian menjadi Direktur Cheng Ho Cultural Museum di Melaka dan Presiden "The International Zheng He Society". Ia meraih gelar doktor sejarah dari UI dengan disertasi yang k emudian diterbitkan dengan judul *Cheng Ho: penyebar Islam dari China ke Nusantara*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).

Sastra Cina, sekarang profesor emeritus UI). Namun kawan yang cukup dekat adalah Ong Hok Ham (1933-2007). Leo pernah bercerita, sedemikian dekatnya persahabatan mereka pernah suatu ketika Ong mengetuk-ngetuk pintu kediamannya malam-malam, karena .....lapar! Rupanya dia minta dimasakkan nasi goreng. Terpaksa Leo menuruti permintaan sahabatnya ini. Mereka berdua tetap menjadi sahabat dekat, bahkan salah satu buku Leo (*Dilema*) diberi pengantar oleh Ong.

Suasana kampus pada waktu itu diwarnai hingar bingar politik nasional dengan Presiden Sukarno dan ajarannya sebagai panglima. Di UI Leo "mulai menaruh minat pada masalah nasionalisme Indonesia". Latar belakangnya sebagai Tionghoa membuat dirinya "ingin tahu bagaimana posisi etnis Tionghoa dalam nasion Indonesia". Dari berbagai mata kuliah, kelas sejarah pergerakan nasional yang diberikan alm. Drs. Abdurrachman Surjomihardjo (1929-1994)[8] --Leo memanggilnya "Mas Dul"-- yang paling menarik perhatiannya. Akibatnya ketertarikan ini membawa Leo giat menekuni masalah nasionalisme.

Leo membagi waktunya antara kuliah dengan mencari uang tambahan. Ia bekerja paruh waktu di surat-surat kabar Tionghoa dan mengajar bahasa Inggris serta Sejarah Indonesia di sekolah menengah Tionghoa di Jakarta. Untuk topik skripsi, dia sebetulnya ingin mengangkat soal pers totok, namun bahannya ternyata terbatas. Maka dia memutuskan untuk fokus ke pers peranakan.

Di sinilah titik awal perkenalan Leo dengan kajian masyarakat Tionghoa Indonesia, melalui skripsinya yang meneliti hubungan pers peranakan Tionghoa dengan pergerakan kemerdekaan Indonesia sebelum perang. Ketika itu ia meneliti harian *Sin Po*, *Perniagaan*, dan *Sin Tit Po.*

Koran-koran itu tersedia di Perpustakaan Nasional di Gedung Gajah/Museum Pusat, dan Leo membacanya berbulan-bulan. Beruntung dia mendapatkan bantuan dari pegawai perpustakaan, karena lembaran koran itu --yang belum di microfilm-kan---begitu berdebu dan bisa menyebabkan sakit pernafasan.

---

[8] Biografi singkatnya bisa dibaca di sini https://komunitasbambu.id/book-author/abdurrachman-surjomihardjo/ (diakses 9 Desember 2021)

Akhirnya, skripsinya berjudul "Pers Peranakan Tionghoa dan Pergerakan Nasional (1901-1942)" --yang dikerjakan dengan pembimbing Mas Dul-- bisa selesai pertengahan 1965.[9] Dengan dukungan pembimbingnya, Leo bisa lulus pada tahun 1965 (berbarengan dengan Liaw Yock-fang dan Tan Ta Sen), hanya dua hari sebelum pecah peristiwa G30S. Jika terlambat beberapa hari saja, kelulusannya bisa tertunda. Leo menerima gelar Sarjana Sastra secara simbolik dari Bung Karno di Ciputat[10]. Kedua sahabatnya, Ong Hok Ham dan Soe Hok Gie, dua sosok yang kemudian menjadi legenda, baru lulus kemudian (1968-69).

Percobaan kudeta 1965 memperlambat langkah Leo pasca kelulusannya. Sehari menyusul peristiwa tersebut, semua harian Tionghoa di bredel dan awal 1966, semua sekolah Tionghoa ditutup. Kedua peristiwa itu menyebabkan Leo tidak lagi bekerja dan bisa lebih fokus pada penelitian. Masa vakum ini dimanfaatkan Leo untuk menulis dan berdiskusi dengan para senior, mulai dari mantan pembimbing skripsinya Mas Dul, sampai Mely G. Tan (lahir 1930) dan Lie Tek Tjeng (1931-2009). Mely waktu itu sudah meraih MA di Universitas Cornell dengan tesis *The Chinese of Sukabumi.*[11] Setelah sebentar mengajar di Unika Atma Jaya Jakarta, Mely dikirim oleh LIPI untuk menempuh program doktornya dalam bidang sosiologi di UC Berkeley. Sedangkan Lie (peneliti senior LIPI) sudah meraih MA (1963-1968) dan Ph.D (1962) dari Universitas Harvard di bidang sejarah dan bahasa Asia Timur.[12]

---

[9] Di kemudian hari, beberapa bagian dari skripsi ini terbit di dalam antologi sejarah pers Indonesia yang disunting oleh Abdurrachman Surjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Deppen RI-LEKNAS LIPI, 1980). Leo menulis "Pers Melayu Tionghoa" (h. 35-64). Selain itu nama Leo juga tercantum sebagai anggota dalam tim penulis sejarah pers di Indonesia, 1977-1980. Namun tidak lama setelah terbit, buku ini dilarang oleh Menteri Penerangan karena alasan yang kurang jelas. Barulah di era pasca Orba, buku ini dicetak ulang dengan judul serupa, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2002). Tulisan Leo ada di h. 41-75. Akhirnya skripsi ini diterbitkan secara utuh dalam Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia,* hlm. 3-81.

[10] Sebetulnya, Leo memperoleh ijazah pada 23 September 1965. Akan tetapi pada tgl 28 September (kalau tidak ingat salah), dirinya bersama Tan Ta Sen dan Liaw Yock Fang menghadiri upacara penyerahan ijazah di Ciputat. (email Leo Suryadinata, 22 Januari 2022)

[11] Diterbitkan sebagai Giok-Lan, Tan, *The Chinese of Sukabumi: a Study in Social and Cultural Acommodation* (Ithaca, N.Y: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1963). Kini (akhir 2021) buku klasik ini sedang dalam proses penerbitan ulang oleh Yayasan Obor Indonesia dalam format e-book.

[12] Karya Lie Tek Tjeng a.l: *Studi Wilayah Pada Umumnya, Asia Tenggara Pada Khususnya*. (Bandung: Alumni, 1977) dan *Studi Wilayah Pada Umumnya: Asia Timur Pada Khususnya* (Bandung: Alumni, 1977)

Foto 4. Leo Suryadinata (kanan) saat Wisuda Sardjana Sastra UI bersama mahasiswa Singapura Tan Ta Sen (kiri) dan Liaw Yock-fang (tengah) (1965) (Foto: Koleksi Pribadi Leo Suryadinata)

Kuliah Pascasarjana dan Terjun ke Dunia Akademik Internasional

Di tahun 1966, Leo bertemu dengan Dr. Herbert Feith dan Profesor John D. Legge yang merupakan para pionir studi tentang Indonesia di Australia. Pembicaraannya dengan Legge[13] membuat Leo berhasil diterima di Universitas Monash sebagai mahasiswa pascasarjana. Setelah lulus *M.A preliminary examination* (ujian pendahuluan untuk masuk ke jenjang S2) dengan hasil "cukup memuaskan", bahkan diperbolehkan membuat disertasi Ph.D, tetapi harus menulis tesis M.A terlebih dahulu. Untuk tesis MA di Monash Leo menulis "The Three Major Streams in Chinese Politics in Java 1917-1942" (1969). Di tahun yang sama Leo juga menerbitkan tulisannya "A Brief Historical Survey of the Peranakan Chinese Press in Java 1900-1942", *Journal of Southeast Asian Researcher*, 5 (1969), hlm. 160-162.[14] Barangkali ini adalah publikasi pertamanya dalam

[13] John Legge (1921-2016) seorang perintis kajian Indonesia di Australia yang terkait erat dengan Monash University, khususnya Jurusan Sejarah maupun Monash Center of Southeast Asian Studies yang didirikannya (1964). Ia telah menulis Sukarno: sebuah Biografi Politik (1985, 1996, 2002) dan *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir* (1993).

[14] Dédé Oetomo, "The Ethnic Chinese in Indonesia" dalam Leo Suryadinata (ed.), *The Ethnic Chinese in the ASEAN States: Bibliographical Essays* (Singapore: ISEAS, 1989), hlm. 88.

bahasa Inggris, bahasa dunia akademik internasional. Pelahan tapi pasti, Leo muda yang penuh semangat mulai merentangkan sayapnya menuju ke "dunia baru", yakni ranah publikasi dalam bahasa Inggris.

Terkait penulisan tesis masternya ini, selain riset kepustakaan di Jakarta, hal lain yang membantu Leo adalah masih adanya tokoh-tokoh pers peranakan --dari media-media yang ditelitinya-- yang bisa diwawancarainya maupun berbagi pengalaman mereka. Mereka adalah Tio Ie Soei (1890-1974, redaktur *Pewarta Soerabaia* yang pengetahuannya tentang pers peranakan laksana ensiklopedia), Kwee Kek Beng (1900-1975, pemipin redaksi *Sin Po* edisi bahasa Melayu) serta Tjoa Tjie Liang (1913-2006) redaktur *Sin Tit Po* dan *Mata Hari,* serta anggota terkemuka Partai Tionghoa Indonesia).[15]

Biarpun bisa lanjut ke program Ph.D, namun Leo hanya kuliah di sini saja seusai menyelesaikan gelar M.A-nya (1970), karena mendapatkan tawaran dari Universitas Ohio (Athens) untuk bekerja sambil kuliah. Ia akan menjadi semacam *teaching fellow* atau *research associate*. Di sana, dirinya berencana sekaligus akan mengambil gelar MA-nya yang kedua.

Foto 5. Leo Suryadinata bersama John D. Legge di Monash (1968)
(Foto: Koleksi Pribadi Leo Suryadinata)

[15] Lihat "Ucapan Terima Kasih", dalam Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), tanpa nomor halaman.

Leo meninggalkan Australia ke Ohio melalui Jakarta (awal 1970). Setibanya di sana, ia segera menghubungi rekan-rekannya sambil mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Kebetulan Abdurrachman Surjomihardjo duduk selaku anggota panitia Seminar Sejarah Nasional Indonesia kedua yang akan diselenggarakan di Yogyakarta (Agustus 1970) dan dirinya menawari Leo untuk ikut memberikan makalah dalam perhelatan akbar tersebut.[16] Leo pun tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini, maka ditulisnyalah makalah "Ciri-ciri Khas Pergerakan Nasional Indonesia Sebelum Perang: Sebuah Analisa". Rupanya dirinya adalah satu-satunya pemakalah dari etnis Tionghoa dalam seminar tersebut. Soe Hok Gie baru saja wafat saat mendaki Gunung Semeru (Desember 1969) dan Ong Hok Ham sedang kuliah di Universitas Yale, Amerika Serikat (berangkat 1968). Ternyata makalah Leo tersebut memicu banyak perdebatan, khususnya dari para guru sekolah menengah, yang tidak bisa menerima argumentasi bahwa Indonesia adalah suatu "kebetulan sejarah", yang bukan kelanjutan dari Sriwijaya maupun Majapahit, melainkan "produk kolonialisme Belanda".[17]

Kota Athens, menjadi pelabuhan Leo selanjutnya di dalam mencari ilmu. Dia menjadi asisten riset Prof. Paul van der Veur (1922-2011)[18] di Southeast Asia Studies Program (yang didirikan van der Veur pada 1967), Ohio University, sekaligus mengambil gelar M.A.-nya yang kedua. Rupanya kesibukan akademis internasional Leo semakin terasah di Ohio ini. Publikasinya dalam bahasa Inggris pun semakin bertambah dalam "periode Athens" (1970-1972) ini. Pada 1970 Leo bekerja sama dengan Charles Coppel--seorang pengacara Australia yang kemudian beralih menjadi sejarawan-- dalam menulis "The Use of the Terms Tjina and Tionghoa in Indonesia: An Historical Survey", *Papers on Far Eastern History*. (ANU) II (September 1970).

---

[16] Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme,* hlm. xi.

[17] Empat tahun kemudian tulisan tersebut diterbitkan dalam publikasi perdana sebuah jurnal yang dibiayai oleh Pertamina, *Bulletin YAPERNA* no 1 (1974), dilengkapi dengan komentar Abdurrachman. Di masa Reformasi, tulisan ini beserta komentarnya diterbitkan ulang dalam Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme*, hlm. 85-121.

[18] Untuk riwayat singkat Van der Veur, lihat https://www.athensmessenger.com/obituaries/paul-van-der-veur/article_8eee224e-2c72-11e0-bd1a-001cc4c002e0.html (diakses 13 Desember 2021)

Karya berdua ini akan banyak dikutip di masa awal Reformasi. Kontak lamanya dengan Mely G. Tan (LIPI) membuahkan kolaborasi dalam penulisan "The 'Special Project National Schools' in Jakarta", makalah disajikan pada 28th Orientalists' Congress di Canberra (Januari 1971).[19] Masih di tahun yang sama, salah satu bab dari tesis MA-nya di Monash yang berjudul "Pre-war Indonesian Nationalism and the Peranakan Chinese", diterbitkan dalam *Indonesia* no. 11 (197 1).[20] Seperti diketahui, jurnal ini diterbitkan oleh Modern Indonesian Project dari Cornell University, yang merupakan "kiblat" kajian Indonesia di mancanegara ketika itu.

Leo pun juga menerbitkan publikasinya bersama Ohio University, yakni *The Pre-World War II Peranakan Chinese Press of Java: A Preliminary Survey* (1971) dan *Prominent Indonesian Chinese in the Twentieth Century: A Preliminary Survey* (1972). Keduanya diterbitkan dalam serial "Papers in International Studies" oleh Center for International Studies, Ohio University. Karya *Prominent Indonesian Chinese* ini merupakan pijakan awal untuk karya-karya *who's who* (apa siapa) Leo selanjutnya.[21] Leo akhirnya mendapatkan M.A.-nya yang kedua dengan "course works" (1972). Ketika di Ohio inilah, Leo menyiapkan makalah "nasionalisme Indonesia dan gerakan pemuda sebelum Perang Dunia" (1972)[22] Masih di tahun ini, tulisannya kembali terbit di Cornell, dengan judul "Indonesian Chinese Education: Past and Present", *Indonesia*, no.14 (Oktober 1972).

Pada fase pembelajaran di "periode Athens"[23] ini Leo kembali

---

[19] Oetomo, "The Ethnic Chinese", hlm. 91.

[20] Terjemahan bahasa Indonesia dari jurnal terbitan Cornell ini diterbitkan dalam Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme*, hlm. 123-146.

[21] Leo tergolong aktif meng-*update* biodata orang-orang Tionghoa terkemuka di Indonesia. Kemudian dia bahkan memperluas minatnya ke tokoh Tionghoa se-Asia Tenggara. Lihat *Eminent Indonesian Chinese: Biographical Sketches*. (Singapura: ISEAS, 1978; edisi revisi ke-2, Gunung Agung, 1981). Karya ini kemudian diperluas menjadi *Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches* (Singapura: ISEAS, 1995; 1997, edisi ke-4, 2015). Untuk versi yang mencakup wilayah regional, lihat *Southeast Asian Personalities of Chinese Descent: A Biographical Dictionary,* 2 jilid (Singapura: ISEAS 2012) selaku editor umum, editor wilayah Indonesia dan kontributor.

[22] Beberapa tahun kemudian karyanya ini terbit sebagai "Indonesian Nationalism and the Pre-war Youth Movement: A Revisit". *Journal Southeast Asian Studies* 9, no. 1 (Maret 1978): 99–114. Terjemahan bahasa Indonesia terbit dalam Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme*, hlm. 147-180.

[23] Periode Athens ini bagi Leo sangat penting, karena dia bertemu dengan sejarawan Professor John F. Cady, yang merekomendasi dirinya untuk menulis topik-topik penting mengenai Sejarah Indonesia untuk *Encyclopedia Britannica*, edisi ke -15 (1974). Di sana terdapat puluhan topik yang dikerjakan Leo. Selain itu terdapat juga dua karangan mengenai tokoh, yakni "Kertanegara" dan "Gajah Mada", lihat daftar publikasi.. Email Leo Suryadinata, 22 Januari 2022.

mengalami perkembangan pandangan. Ia sebelumnya suka sejarah, sesuai pidato Bung Karno yang pernah menyatakan "bangsa yang menghargai sejarahnya akan menjadi bangsa yang besar". Namun dirinya merasa, jika hanya mengambil disiplin ilmu ini saja, maka untuk menganalisis hal-hal yang terkait politik --yang cukup ruwet dan untuk mencari solusi bagi masa depan-- tidak akan memadai. Untuk mengetahui diri sendiri, kita harus mempelajari sejarah sebanyak mungkin. Tetapi di sisi lain, Leo juga menganggap penting dan akan lebih baik juga untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial lainnya. Ia kemudian mempelajari antropologi, politik komparatif, dan ilmu lainnya[24]. Sambil bekerja, dirinya tetap tekun belajar dan berjuang mengambil gelar M.A.-nya yang kedua. Setelah itu Leo lanjut mempelajari bidang hubungan internasional di School of International Service, American University, Washington DC untuk gelar doktornya, sekaligus menjadi *teaching assistant* di Center for Asian Studies.

Saat merenungkan berbagai bidang apa saja yang telah dipelajarinya sepanjang hidupnya, mulai dari sastra, sejarah, *comparative politics*, antropologi sampai akhirnya hubungan internasional, diakuinya bahwa bidang sastra dan sejarah merupakan dasar utama dari karya-karyanya. Sementara bidang *comparative politics* dan hubungan internasional diakuinya merupakan bidang ilmu yang digunakannya untuk mencari nafkah.[25]

Pengabdian Panjang sebagai Akademisi

Setelah mendapat gelar Ph.D. (1975), Leo mencari pekerjaan, namun sempat belum mendapat pekerjaan yang tetap. Rupanya nasib baik kemudian mempertemukannya dengan Kernial Singh Sandhu,[26] seorang sarjana India berkebangsaan Malaysia. Ia adalah Direktur Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Singapura yang baru, menggantikan direktur sebelumnya,

---

[24] Sebagaimana dikatakan, MA Leo di Ohio adalah "by course works". Maka dirinya mengambil sebanyak mungkin mata kuliah karena ingin mendapatkan ilmu semaksimal mungkin. Email Leo Suryadinata, 22 Januari 2022.

[25] Ketika mengajar di NUS, Leo selalu menjelaskan bahwa dirinya memiliki disiplin *political science* dan *international relations*.

[26] Kernial Singh Sandhu (1929-1992) pernah mengajar di Malaya, Singapura dan British Columbia, sebelum menjadi Direktur ISEAS (1972). Dengan rentang karir akademis selama lebih dari 3 dekade, membuat Sandhu dikenal sebagai sosok terkemuka dan dihormati dalam bidang studi Asia Tenggara.

Profesor Josef Silverstein. Ketika itu Sandhu berada di Washington untuk mencari tenaga peneliti. Leo termasuk salah seorang yang diwawancara dan berhasil diterima.

Leo kemudian pindah ke Singapura dan bekerja selaku peneliti di lembaga ISEAS selama 6 tahun. Selanjutnya ia ditawarkan untuk mengajar di Departemen Ilmu Politik NUS, profesi yang ditekuninya selama 20 tahun hingga purna karya sebagai guru besar (profesor). Selain mengajar dan menulis, di sini Leo juga pernah menjadi editor *Asian Journal of Political Science* (1993-2002), terbitan jurusan tempatnya mengajar. Proses ini membuat Leo secara otomatis tinggal dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Singapura, belum lagi masa-masa kuliah sarjana mudanya di Nanyang University.

Leo menaruh minat besar pada topik Tionghoa, namun ia juga meneliti dunia politik Indonesia. Itu sebabnya, banyak karya tulisnya yang juga membahas tentang partai politik, budaya politik dan pemilihan umum. Spesialisasi Leo sendiri adalah masalah etnisitas, politik Asia Tenggara (terutama Indonesia); politik luar negeri Indonesia; hubungan internasional antara Tiongkok (China) dengan negara-negara ASEAN.[27] Buku-buku karya Leo, baik dalam Bahasa Indonesia dan Tionghoa, sebagian berupa terjemahan dari karyanya sendiri, yang awalnya ditulis dalam Bahasa Inggris.

Di Indonesia, karya-karyanya yang paling dikenal publik mungkin adalah beberapa bukunya yang khusus berkaitan dengan etnis Tionghoa Indonesia; misalnya: *Dilema Minoritas Tionghoa* (akan dibahas kemudian secara khusus); *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (aslinya dalam Bahasa Inggris terbit tahun 1976, terjemahan Indonesia-nya terbit 1986, 1994), *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia* (1988), *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 1996), *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia* (aslinya dalam Bahasa Inggris, terbit tahun 1979 dan 1997, edisi Bahasa Indonesia --yang malah lebih lengkap daripada edisi aslinya--- terbit pada tahun 2005).

[27] Lihat lebih lanjut bagian "Publikasi Selektif"

Foto 6. Beberapa buku Leo Suryadinata
(koleksi Didi Kwartanada)

Perlu diketahui bahwa Leo bukan hanya meneliti tentang isu-isu ke-Tionghoa-an saja, tetapi juga mengenai politik Indonesia. Bukunya *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik* (1992, 1993) dan *Politik Luar Negeri di Bawah Suharto* (1998, 2019) --keduanya merupakan terjemahan dari karya Leo berbahasa Inggris-- pernah dipakai sebagai buku rujukan di UGM dan UI.

Foto 7. Beberapa buku Leo Suryadinata (koleksi Didi Kwartanada)

Hadir Berkarya di Era Orde Baru

Di masa Orde Baru (1966-1998), hampir tidak ada buku terkait Tionghoa yang *reliable* dan *balance*. Buku-buku yang beredar sangat mendukung visi misi pemerintah untuk meng-asimilasi-kan kelompok minoritas ini. Misalnya, *Masalah Cina*

di Indonesia (1975) karya seorang sinolog yang juga perwira intelejen TNI AD, Kolonel W.D. Sukisman. Sesuai judulnya, buku ini berawal dari kecurigaan, bahwa orang Tionghoa adalah "kolone ke-5 China", maka mereka adalah "masalah" yang mesti segera diselesaikan bagi kestablilan dan keamanan politik nasional. Orde Baru tidak segan-segan melarang buku yang dianggap membahayakan kelangsungan rezim ini. Leo pun pernah terdampak kebijakan ini, ketika bunga rampai sejarah pers (1980) segera dilarang beredar oleh pemerintah, padahal di dalamnya dimuat juga tulisannya tentang pers Melayu-Tionghoa.

Foto 8. Buku sejarah pers Indonesia (1980) yang segera dilarang oleh Menteri Penerangan di masa Orde Baru, yang memuat juga karangan Leo di dalamnya. Lihat lebih lanjut
catatan kaki #8. (koleksi Didi Kwartanada)

Alhasil karya Leo yang berjudul *Dilema Minoritas Tionghoa* (1984,1986) menjadi buku yang komprehensif dan juga menjadi buku acuan banyak mahasiswa yang hendak menulis skripsi terkait ketionghoaan di masa Orde Baru.[28] Ada satu cerita yang menarik di balik penerbitan buku tersebut yaitu bahwa Leo sampai harus bernegosiasi dengan pihak penerbit, agar judulnya

[28] Oleh karena buku *Dilema* terbit dari grup yang sama dari majalah *Tempo*, maka mingguan ini menurunkan ringkasan sepanjang 14 halaman atas buku ini. Lihat *Tempo*, no 25, Th. XIV, 18 Agustus 1985, h. 37-51.

tidak menggunakan kata "Cina" melainkan "Tionghoa". Di sinilah Leo menyatakan ketidaksetujuannya, sebab sudah jelas sekali pada waktu itu istilah "Cina" dipakai untuk menghina. Dirinya menjelaskan bahwa dalam Seminar Angkatan Darat ke-2 di Bandung (25-31 Agustus 1966), telah diputuskan bahwa istilah "Tiongkok" dan "Tionghoa" harus diubah menjadi "Cina", untuk menghina satu kelompok (Tionghoa) sekaligus suatu negara (RRT), yang dituduh terlibat percobaan kudeta G30S. Demi alasan kesopanan, Leo kemudian meminta penerbit untuk mengganti judul beristilah "Cina" menjadi "Tionghoa". Untungnya penerbitnya berlapang dada dan bersedia mengganti judulnya menjadi *Dilema Minoritas Tiong hoa*.

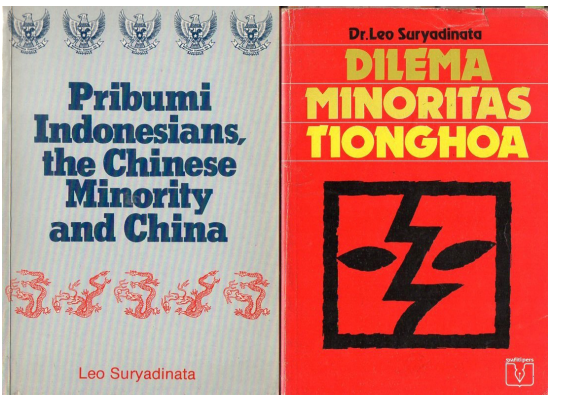

Foto 9. Disertasi Leo (kiri) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
(koleksi Didi Kwartanada)

Buku tersebut sebenarnya diangkat dari disertasi Leo (1975) yang berjudul *Indigenous Indonesians, the Chinese Minority and China: A Study of Perceptions and Policies*. Akan tetapi ketika sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menurut pihak penerbit judulnya seperti demikian "kurang menjual", sehingga diusulkan dipersingkat menjadi *Dilema Minoritas Tionghoa*. Kenyataannya, buku tersebut memang sempat mengalami cetak ulang, suatu hal yang langka bagi sebuah buku akademis. Menariknya, buku ini diberi pengantar oleh sahabat lama Leo saat di Jurusan Sejarah UI, Ong Hok Ham, yang juga telah menjadi doktor sekaligus kolumnis kenamaan.

Di samping menerbitkan buku, pada masa Orde Baru Leo juga aktif menulis di jurnal maupun di majalah populer. Redaksi *Prisma*, sebuah jurnal bulanan ilmiah --dijual untuk umum-- yang terbit sejak 1971, meminta Leo untuk menulis karangan tentang beberapa tokoh Tionghoa. *Prisma* bersikap kritis terhadap Orde Baru, dan rupanya mereka hendak menampilkan perspektif yang berbeda tentang Tionghoa lewat pendekatan biografis. Leo memakai tiga patokan untuk tokoh yang dipilihnya, yakni orang-orang yang berpengaruh, sudah meninggal dan pernah aktif dalam bidang budaya dan politik. Tampillah tiga sosok: (1) Liem Koen Hian (*Prisma* 3, Maret 1983), (2) Kwee Hing Tjiat (*Prisma* 7, Juli 1984); (3) Kwee Kek Beng (*Prisma* 10, Oktober 1984). Ternyata munculnya ketiga tokoh tadi mendapat animo yang besar dari para pembacanya. Barangkali mayoritas mereka sama sekali belum pernah mendengar nama-nama tersebut. Maka kemudian penerbit *Prisma*, yakni LP3ES ingin mengumpulkannya dalam bentuk buku saku. Untuk itu Leo menulis beberapa tokoh lagi untuk maksud tersebut. Maka akhirnya terbitlah *Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San sampa Yap Thiam Hien* (Jakarta: LP3ES, 1990),[29] yang berisi 8 biografi tokoh terkemuka Tionghoa.

Foto 10. Buku Leo tentang tokoh-tokoh Tionghoa
(koleksi Didi Kwartanada)

[29] Di era Reformasi, buku ini diterbitkan kembali dengan judul *Tokoh Tionghoa & Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien* (Depok: Komunitas Bambu, 2010).

Majalah berita mingguan terkemuka, *Tempo* juga meminta Leo untuk menulis kolom maupun resensi buku. Salah satu kolom Leo, misalnya berjudul "Cina Perantauan", terbit dalam *Tempo* no. 39, 27 November 1993, h. 35. Kadang dia juga meresensi buku, misalnya memoar Yap Tjwan Bing, *Meretas Jalan Kemerdekaan,* berjudul "Kisah Jalan Sang Politisi", yang muncul di *Tempo,* 9 April 1988 h.110. Seringnya nama Leo muncul di berbagai media, membuat dirinya cukup dikenal publik dalam isu-isu yang terkait ke-Tionghoa-an maupun integrasi nasional, di tengah satu rezim yang--ironisnya-- kurang bersahabat dengan topik tadi.

Lalu, apa yang telah disumbangkan Leo pada kita semua, melalui karya-karyanya sejak hampir setengah abad silam, khususnya dalam kehidupan kebangsaan kita? Hal ini secara bagus telah diterangkan oleh Johan Hasan (dosen UC Surabaya) dalam buku ini. Menurutnya

> [Tulisan Leo...] sesungguhnya mengungkapkan akar permasalahan yang membantu kita memahami permasalahan nasionalisme Indonesia dan perubahannya dari sudut Tionghoa Indonesia, suatu sudut yang terkadang diabaikan atau bahkan dalam beberapa hal malah dihapuskan, sehingga membuat kita tidak mampu melihat atau memahami permasalahan secara utuh.

Fakta-fakta yang ditemukan Leo membuktikan bahwa etnosentrisme sangat kuat mewarnai pergerakan nasional (1908-1942). Dengan data historis yang sahih, dia mampu menunjukkan, bahwa ternyata hanya segelintir saja kaum pergerakan yang dengan sepenuh hati membukakan pintunya bagi kaum peranakan. Dari periode 3,5 dekade tersebut hanya tiga, sekali lagi hanya tiga, partai politik yang menerima peranakan.[30] Bahkan seorang peranakan Arab pun ditolak untuk turut dalam perkumpulan pemuda bumiputera![31] Lahirnya Partai Tionghoa Indonesia (Surabaya, 1932) oleh Liem Koen

---

[30] Mereka adalah Indische Partij (1912-1913), PKI (1920-1926) dan Gerindo (1937-1942)

[31] Misalnya Hamid Algadrie (1912-1998)-- kakek dari Mendikbud Nabiel Makarim-- menerima penolakan yang sengit dari tokoh pemuda Soebadio Sastrosatomo untuk duduk dalam kepengurusan Badan Permusyawaratan Pelajar-Pelajar Indonesia (Baperpi). Lihat Rosihan Anwar. *Soebadio Sastrosatomo: Pengemban Misi Politik* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), h. 16.

Hian dkk dikarenakan tidak adanya partai politik bumiputera yang mengizinkan mereka bergabung sebagai anggota penuh. Lanjut Johan Hasan

> Kontribusi dari tulisan Leo Suryadinata ..... menunjukkan pada kita bagaimana nasionalisme masa lalu kita bersifat sempit, kerdil, tidak setara karena menempatkan pribumi/bumiputera atau istilah pejoratifnya *inlanders*, di posisi yang lebih tinggi dari elemen masyarakat lainnya.

Johan menutup tulisannya dengan sangat elegan dan lewat sejarah dia mengajak untuk melihat ke depan

> ...Namun, di sisi lain, ...Suryadinata ..... juga menunjukkan pada kita bagaimana fragmen sejarah ini tidak perlu ditutupi, diabaikan atau malah dimanipulasi, tetapi justru dengan jiwa besar mesti diakui dan diperbaiki. Walau masalah nasionalisme Indonesia tidak pernah selesai, dengan melihat pembahasan ini secara keseluruhan, kita dapat melihat arah dan peluang bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Untuk itulah nasionalisme yang berkesetaraan dan sejahtera perlu dan harus terus diperjuangkan oleh generasi berikutnya

Kontribusi tetap Berlanjut

Berakhirnya Orde Baru (1998) dengan sejarah yang monotafsir-nya, dilanjutkan dengan upaya-upaya "pelurusan sejarah", dengan salah satu tokoh utamanya adalah DR. Asvi Warman Adam (peneliti senior LIPI). Salah satu isu yang ramai dibahas dalam koridor ini adalah soal dihilangkannya kontribusi Tionghoa bagi bangsa Indonesia, suatu hal yang ditutup-tutupi di masa Orba. Maka bermunculanlah berbagai tulisan tentang hal itu, termasuk semakin membanjirnya buku-buku tentang sejarah dan budaya Tionghoa Indonesia.

Leo Suryadinata pun ikut terpanggil untuk terus memberikan kontribusinya bagi integrasi nasional dan *nation building* Indonesia. Ketika sekelompok sejarawan Indonesia dengan sponsor dari pemerintah di era Reformasi berusaha menyusun buku sejarah yang bebas dari bayang-bayang Orba, maka sebagai hasilnya muncullah "mega-book" berupa

Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS) yang terdiri atas 8 jilid isi plus 1 jilid indeks (2012).

Dua sejarawan senior, Prof. Taufik Abdullah dan Prof. Adrian B. Lapian menjadi editor utamanya. Rupanya, redaksi juga ingin memasukkan sejarah orang Tionghoa ke dalam buku ini, maka Leo pun diminta turut serta menyumbangkan pikirannya. Tulisannya berjudul "Peran Kelompok Etnik Tionghoa dan Kebijakan Negara", dimuat dalam Susanto Zuhdi (ed.), *IDAS Jilid 8: Orde Baru & Reformasi* (Jakarta: IBVH dan Depdikbud, 2012), hlm. 451-477.

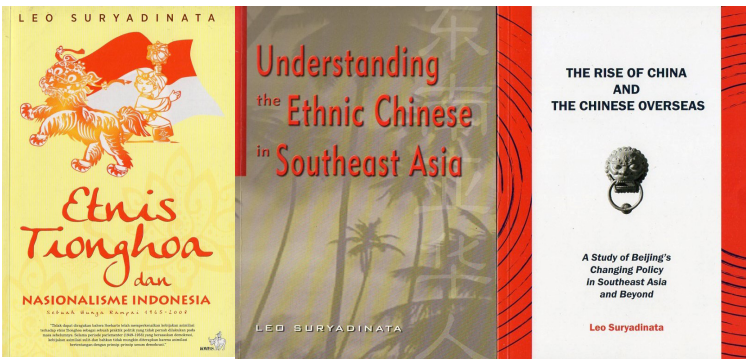

Foto 11. Buku-buku Leo yang terbit setelah tahun 1998, masing-masing terbit tahun (kiri-kanan) 2010, 2007 dan 2017 (Koleksi Didi Kwartanada)

Seperti bisa dilihat dalam "daftar karya" Leo, nampak bahwa dia tetap aktif menulis dan menerbitkan publikasi dalam tiga bahasa setelah tahun 1998. Adapun buku-bukunya dalam bahasa Indonesia yang terbit di masa Reformasi adalah (secara kronologis): *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1999); *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. (Jakarta: LP3ES and Centre for Political Studies, November 2002); (bersama Aris Ananta dan Evi N. Arifin), *Penduduk Indonesia: Etnisitas Dan Agama Dalam Era Perubahan Politik* (Jakarta, Indonesia: LP3ES, 2003); *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002* (Jakarta: LP3ES, 2005*)* (selaku editor dan penerjemah); *Laksamana Cheng Ho dan Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 2007) (selaku editor dan kontributor); *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965-2008* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010) buku ini

merupakan kumpulan karya akademis Leo di S1 dan S2; serta *Tokoh Tionghoa & Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien* (Depok: Komunitas Bambu, 2010).

Sebuah *Magnum Opus*: Tionghoa dalam Keindonesiaan

Foto 12a. Cover Tionghoa dalam Keindonesiaan versi Indonesia (2016) dan Mandarin (2021)
(koleksi Didi Kwartanada)

Sebagai penutup, izinkan penulis membahas karya terbaru Leo dalam bahasa Indonesia, yaitu *Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa* (mengenai isinya, silakan baca pada kontribusi kami dalam buku ini). Buku ini memiliki kesan khusus bagi penulis karena dua hal. Pertama, di dalam pengerjaan buku ini, dia mendapat kesempatan langsung untuk bekerja sama dengan Pak Leo (demikian kami menyebut beliau). Kedua, penulis terlibat pengerjaan buku ini sejak awal hingga terbit.

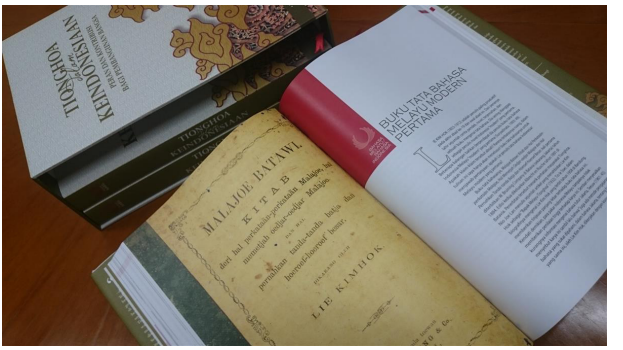

Foto 12b. Buku Tionghoa dalam Keindonesiaan
(Foto: Didi Kwartanada)

Foto 12c. Tim buku "Tionghoa dalam Keindonesiaan" (ki-ka): Didi Kwartanada (editor pelaksana), Budi Setiyono (editor bahasa), Drs. Eddie Lembong (penggagas), Leo Suryadinata (editor umum) dan Clara Cindy (admin) di kantor Yayasan Nabil (Oktober 2014)
(Foto: Didi Kwartanada)

Secara singkat bisa diuraikan, bahwa projek buku ini digagas dan dibiayai oleh Drs. Eddie Lembong, ketua pendiri Yayasan Nabil. Beliau memandang perlu adanya buku yang mendokumentasikan kontribusi Tionghoa bagi Indonesia, suatu hal yang selama ini dihapuskan atau tidak mendapat tempat dalam buku-buku sejarah di masa Orba. Untuk projek raksasa seperti ini, tidak ada orang yang lebih tepat daripada Pak Leo untuk menjadi editor utamanya. Semula beliau enggan untuk menerima amanah tersebut, namun berkat masukan dari Ibu Lanty (istri tercinta Pak Leo), akhirnya Pak Leo bersedia, dengan syarat pihak Nabil menyediakan tim pendukung yang solid. Maka Pak Eddie menugaskan kami dan tim Nabil untuk membantu Pak Leo.

Setelah dikerjakan selama tiga tahun, akhirnya terkumpul 129 naskah hasil karya 73 penulis, 14 di antaranya dari mancanegara. Oleh karena ketebalannya mencapai 1,500 halaman, maka buku ini dibagi ke dalam tiga jilid. Buku ini terbit pada 2016 dan dicetak ulang setahun kemudian. Pak Leo selalu menyebut karyanya ini sebagai "mega book".

Rupanya karya ini mendapatkan sambutan hangat dari khalayak ramai, misalnya sejarawan muda Ravando[32] dalam resensinya di harian *Kompas* (22 April 2017) menulis:

[32] Ravando juga ikut menyumbangkan tulisannya dalam buku ini.

> "....melalui buku ini diharapkan agar etnis Tionghoa bisa lebih mengenal 'wajahnya' sendiri, sekaligus mematahkan stereotip yang terlanjur melekat bahwa orang Tionghoa merupakan *economic animal*....diharapkan juga agar buku ini dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi penulisan kurikulum sejarah nasional Indonesia yang selama ini masih mengesampingkan peranan etnis Tionghoa dalam memori kolektif masyarakat Indonesia".

Sambutan juga datang dari kalangan akademis dari dalam negeri maupun mancanegara. *Doyen* sejarah Indonesia, Prof. Taufik Abdullah yang juga Ketua, Komisi Ilmu Sosial, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, memberikan *endorsement*-nya demikian.

> Buku-buku tentang berbagai ragam pengalaman golongan Tionghoa dalam dinamika sejarah Nusantara agak banyak juga yang telah diterbitkan. Tetapi barulah buku ini yang menjelajahi arti kehadiran dan corak aktivitas mereka sebagai bagian yang otentik dari arus sejarah bangsa. Jadi kisah kesejarahan yang terhampar dalam buku ini bukan sekadar percikan pengalaman dari komunitas Tionghoa dalam kesendirian tetapi sebagai unsur sosial kultural yang otentik dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Maka bisalah dikatakan bahwa buku ini adalah sebuah kontribusi akademis yang elegan dalam memahami irama dan arah sejarah bangsa. [33]

Seorang peneliti muda asal Belanda memberikan apresiasi yang "terlalu tinggi" dalam sebuah jurnal internasional terkemuka seperti berikut:

> .....*Aptly supervised by editor-in-chief Leo Suryadinata and managing editor Didi Kwartanada, and with forewords by Eddie Lembong and Yudi Latif, the book is a remarkably exhaustive standard work on Indonesia's Chinese diaspora, surpassing most, if not all, earlier scholarship*.[34]

---

[33] Dimuat dalam sampul belakang *Tionghoa dalam Keindonesiaan.*

[34] Tom Hoogervorst, "Learning to Love the Unknown: Chinese-Indonesians Contribution to Nation Building, *Bijdragen to de-taal -land-en volkenkunde* 173 (2017), h. 378

> .....Dibimbing dengan tepat oleh pemimpin redaksi Leo Suryadinata dan redaktur pelaksana Didi Kwartanada, dan dengan kata pengantar oleh Eddie Lembong serta Yudi Latif, buku ini merupakan karya standar yang sangat lengkap tentang diaspora Tionghoa di Indonesia, melampaui sebagian besar, jika tidak semua, karya-karya sebelumnya.

Gaung buku ini ternyata sampai juga ke mancanegara, khususnya di Hong Kong. Mr. Liang Junxiang (seorang pengusaha kelahiran Indonesia) melalui organisasinya, The Life Foundation, Hong Kong, telah bermurah hati mengusahakan penerjemahan buku ini ke dalam bahasa Tionghoa. Beliau menggandeng Pak Leo (selaku editor utama sekaligus supervisor penerjemahan) serta tim dosen Bahasa Indonesia dari Guangdong University of Foreign Studies (China). Proses penerjemahan ini tidak berjalan mudah. Jilid I bisa diselesaikan pada 2018 dan telah diluncurkan dalam satu acara di Hong Kong. Berhubung meledaknya pandemi covid-19, dua jilid lainnya baru bisa diselesaikan pada 2021. Oleh Mr. Liang, buku ini dibagikan secara cuma-cuma ke berbagai perpustakaan maupun lembaga yang memerlukannya. Kerja keras dan pengalaman profesional Pak Leo beserta tim telah membuat buku ini mencapai maksud awalnya. Sayang sekali, tak lama setelah versi asli buku ini terbit Pak Eddie Lembong meninggal dunia (November 2017). Kami merasa lega bahwa beliau sudah melihat hasil kerja Pak Leo dan tim, serta mendukung rencana penerjemahannya ke dalam versi Mandarin, agar karya ini bisa diakses oleh dunia internasional. *Rest in Peace*, Pak Eddie!

Penutup: Terus Berkarya

Karya dan pengabdian Leo Suryadinta yang panjang dan *all out* selaku akademisi telah menghasilkan beberapa penghargaan. Pada 2008 Yayasan Nabil di Jakarta, yang didirikan Drs. Eddie Lembong, memberikan "Nabil Award" atas pengabdian Leo dalam *nation building* melalui karya-karya

tulisnya. Leo menerima hadiah ini bersama dengan kawan lamanya, Prof. Mary Somers-Heidhues, peneliti senior sejarah Tionghoa Indonesia yang berasal dari Jerman.

Sepuluh tahun kemudian, Leo memperoleh "Anugerah Kebudayaan untuk kategori Perorangan Asing" dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Prof. Dr. Muhadjir Effendy). Penghargaan ini diberikan oleh Kemendikbud kepada "perorangan asing di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan tentang Indonesia, dan bidang-bidang lain yang memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara Indonesia."[35] Adapun di atas Piagam Penghargaan tersebut tertulis: "Atas dedikasi dan pengabdiannya sebagai ahli etnis Tionghoa dalam Dinamika Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik, dan Budaya Indonesia". Dalam rilis resmi Dikbud disebutkan, bahwa Leo "mengaku tidak menyangka bahwa dia bisa memperoleh penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Baginya, penghargaan ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Namun, ia menerima penghargaan ini dengan perasaan rendah hati dan berharap para akademisi di Indonesia dan asing lainnya yang menaruh perhatian besar kepada Indonesia juga kelak mendapat penghargaan serupa."[36]

Seperti sudah disinggung di atas, Leo juga seorang pecinta berat sastra, khususnya puisi. Sejak remaja ia dengan lahap menikmati puisi-puisi Chairil Anwar (1922-1949) maupun penyair-penyair lainnya. Kami pernah mendengar Pak Leo bisa mengulang beberapa puisi dengan baik. Selain buku-bukunya tentang sastra Indonesia dalam bahasa Tionghoa, setidaknya dia sudah menghasilkan dua buku kumpulan puisi dalam bahasa Melayu: *Jejak Kaki dan Lagu Hati: Kumpulan Sajak* (Singapura: Pustaka Nasional, 1985) serta *Kota Singa: Himpunan Sajak* (Singapura: Pustaka Nasional, 2015).

Saat ini Leo sedang menyiapkan penerjemahan karya empat penyair Nusantara ke dalam bahasa Tionghoa. Mereka adalah Chairil Anwar dan K.H. Mustofa Bisri (Gus Mus) dari Indonesia, Usman Awang (Malaysia) dan Masuri S.N. (Singapura), yang

---

[35] Peneliti lain yang pernah menerima penghargaan ini a.l: Prof. Anthony Reid dan alm. Prof. Merle Ricklefs; dan Prof. Margaret Kartomi.

[36] Diambil dari *press release* resmi Dikbud https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/leo-suryadinata-pakar-etnis-tionghoa-di-indonesia/ (diakses 8 Desember 2021)

masing-masing akan dimuat 20 puisinya. Sebuah lembaga di Nanyang Technological University (NTU) Singapura sudah bersedia menerbitkannya, karena dianggap penting untuk memperkenalkan para penyair terkemuka di Nusantara kepada pembaca Mandarin (email pribadi, 9 Agustus 2021).

Aktivitas rutin Leo Suryadinata dewasa ini adalah selaku *Visiting Senior Fellow* di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura (sejak 2014-sekarang), dan Profesor (adjunct) di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University (sejak 2007). Beliau juga sering menulis kolom di surat kabar Singapura maupun di Hongkong, seperti *South China Morning Post*. Di samping itu ia juga masih menerbitkan *working papers* untuk mengikuti perubahan yang terjadi dengan begitu cepat. Sampai sekarang Leo Suryadinata masih konsisten meneliti masyarakat Tionghoa di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia.

Akhirnya, kami ucapkan selamat memasuki dunia *octogenarian* kepada Pak Leo. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Ibu Lanty, belahan jiwa Pak Leo, yang selalu setia mendampingi. Salam sehat bagi Pak Leo dan bu Lanty serta anak cucu. Tiada hari tanpa berkarya, biarpun usia terus bertambah bagi seorang Leo Suryadinata. Terima kasih untuk semua hasil karyamu, yang akan tetap abadi! (*)

Mega-mega jang disentuh, pudar karena keagungan kerdja
Badai-badai jang ditentang, njisih karena keagungan djiwa
Tiadalah kebahagiaan sebesar kebahagiaan selesai kerdja
Tiadalah kelapangan sebesar kelapangan kemenangan djiwa
Dan semua pengabdian diuntukkan bagi keagungan bangsa
Dan semua kelelahan diuntukkan bagi kemuliaan manusia.

Ramadhan KH[37]

[37] Puisi yang dipahat di atas prasasti di ruang lobby Hotel Indonesia, yang diresmikan Bung Karno pada tanggal 5 Agustus 1962. Setelah direnovasi, letaknya kini di lorong jalan menuju restoran lantai I, Hotel Indonesia Kempinski.

Piagam Penghargaan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan apresiasi kepada

LEO SURYADINATA

Kategori **Perorangan Asing**

atas Dedikasi dan Pengabdiannya sebagai Ahli Etnis Tionghoa dalam Dinamika Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya Indonesia.

Jakarta, 26 September 2018

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Prof. Dr. Muhadjir Effendy

Foto 13. Piagam Penghargaan dari Mendikbud RI (September 2018)

Foto 14. Leo Suryadinata (kanan) bersama Liaw Yock Fang, A. Dahana dan Dede Oetomo
(ISEAS, 1986) (Foto Koleksi Pribadi Leo Suryadinata)

Foto 15. Leo Suryadinata bersama Dr. Mely G. Tan (1999)
(Foto Koleksi Pribadi Leo Suryadinata)

Foto 16. Leo Suryadinata bersama sahabat lamanya, Ong Hok Ham (1995)
(Foto Koleksi Pribadi Leo Suryadinata)

Foto 17. Leo Suryadinata saat peluncuran buku Indonesian Population bersama co-Authors Dr. Aris Ananta dan Dr. Evi Arifin beserta Prof. Wang Gungwu di ISEAS (2003)
(Foto Koleksi Pribadi Leo Suryadinata)

Foto 18. Leo Suryadinata bersama Arief Budiman, Charles Coppel, Jean Gelman Taylor dan Jemma Purdey di Monash (sekitar 2002) pada saat acara purnakarya Charles Coppel
(Foto Koleksi Pribadi Leo Suryadinata)

Foto 19. Leo Suryadinata berfoto bersama anggota Kelompok Mailing List Tjersil bersama Gan K.L. (penerjemah silat) di kediaman Akhmad Bukhari Saleh, Jakarta (2003)
(Foto Koleksi Pribadi Leo Suryadinata)

Foto 20. Leo Suryadinata menerima Nabil Award (2008) bersama Mary Somers Heidhues dari Pendiri Yayasan Nabil (Bapak dan Ibu Eddie Lembong) beserta Buya Syafii Maarif dan Prof. Saparinah Sadli (Foto Koleksi Pribadi Leo Suryadinata)

Foto 21. Peluncuran Buku "Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa" Jilid 1 edisi Mandarin di Guangdong University of Foreign Studies (GDUFS) Januari 2019. Acara juga dihadiri oleh Melly Saliman (istri mendiang Eddie Lembong) dan Konjen RI di Guangzhou, Gustanto (kanan).
(Foto: Didi Kwartanada)

PUBLIKASI SELEKTIF LEO SURYADINATA (HINGGA NOVEMBER 2021)[38]

BUKU/MONOGRAF

1. *Peranakan Chinese Identities in the Globalizing Malay Archipelago*. (Singapore: ISEAS Publishing, akan terbit)
2. *Huaren zai yinni minzu jianshe zhong de juese yu gongxian* 华人在印尼民族建设中的角色与贡献（Chinese translation of *Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa*）vols. 1-3, Hong Kong: Shenghuo Wenhua Jijinhui 生活文化基金会， 2018/2021. Vol. I (467 pp), Vol. II (445 pp), Vol. III (481 pp).
3. *The Rise of China and the Chinese Overseas: Beijing Changing Policy in Southeast Asia and Beyond*. (Singapore: ISEAS Publishing, 2017) 278pp.
4. *Tionghoa dalam KeIndonesiaan: Peran dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa* (Chinese in Indonesia: Role and Contribution to Nation-Building, Jakarta: Yayasan Nabil 2016) (Editor-in-Chief and Contributor), 3 vols., Vol. 1 (485 pp), Vol. II (426 pp.) & Vol. III (467 pp.)
5. *Peranakan communities in the era of decolonization and globalization*, Singapore: CHC/NTU and NUS Baba House, 2015. (Editor and Contributor) 148 pp
6. *The Making of Southeast Asian Nations: State, ethnicity, indigenism and citizenship* (Singapore, World Scientific, 2015), 332 pp.
7. *Southeast Asian Personalities of Chinese Descent: A Biographical Dictionary* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Publishing, 2012) (General Editor , Indonesia Country Editor and contributor) Vol. 1 (1,397 pages); Vol. 2 (154 pages)
8. *Malaysian Chinese: Recent Developments and Prospects* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012) 205 pp (Co-editor with Lee Hock Guan)
9. 《再读孙中山、南洋与辛亥革命》(Sun Yat-sen, Nanyang

[38] Dikirimkan oleh Pak Leo melalui email tertanggal 4 November 2021. Untuk itu kami selaku editor menghaturkan terima kasih.

and the 1911 Revolution: A Revisit) (Singapore: CHC and ISEAS, 2011) (Editor and contributor)

10. *Migration, Indigenization and Interaction: Chinese Overseas and Globalization* (Singapore World Scientific, 2011) 325 pp. (Editor and contributor)
11. *Tan Kah Kee and Lee Kong Chian in the Making of Modern Singapore and Malaysia* (陈嘉庚、李光前与现代新马) (bilingual, Singapore: Chinese Heritage Centre, 2010) 279pp. (Editor)
12. *Peranakan Chinese in a Globalizing Southeast Asia.* (Singapore: Chinese Heritage Centre, 2010) 192 pp. (Editor and contributor)
13. *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965-2008.* (Ethnic Chinese and Indonesian nationalism, collected articles 1965-2008, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 266 pp.
14. Liao Jianyu 廖建裕 (Leo Suryadinata), *Yinni Kongjiao Chutan* 印尼孔教初探 (A Preliminary Study of Indonesian Confucian Religion), Singapore: Chinese Heritage Centre, 2010. 127 pp.
15. *Chinese Migration in Comparative Perspectives: Adaptation and Development,* (Singapore: Chinese Heritage Centre and Centre for Chinese Language and Culture, NTU, 2009) (Co-editor and contributor). 158 pp.
16. *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia.* (Singapore: ISEAS, 2008.) 209 pp. (Editor and contributor)
17. *Yinni yuanzhumin, huaren yu zhongguo* 印尼原住民**,** 华人与中国 (Indigenous Indonesians, Ethnic Chinese and China, a Chinese translation of my earlier English work entitled *Pribumi Indonesia, the Chinese Minority and China*, with new post-script). (Singapore: Youth Book Store, 2007) 325 pp.
18. *Understanding the Ethnic Chinese in Southeast Asia.* (Singapore: ISEAS, 2007) 310 pp.
19. *Tongmenghui, Sun Yat Sen and the Chinese in Southeast Asia: A Revisit* 再读同盟会**,** 孙中山与南洋华人(Bi-lingual publication) Singapore : Chinese Heritage Centre and Sun

Yat Sen Nanyang Memorial Hall, 2006. 248 pp. (Editor and contributor)

20. *Admiral Zheng He and Southeast Asia* (Singapore: ISEAS, 2005) (Editor and contributor) 168 pp.
21. *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002* (Jakarta: LP3ES, 2005*)* (Editor and translator) 421 pp.
22. *Emerging Democracy in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2005) (joint authors with Aris Ananta and Evi Nurvidya Arifin), 166 pp.
23. *Michael Leifer: Selected Works on Southeast Asia* (Singapore: ISEAS, 2005) (co-compiler and co-editor with Chin Kin Wah), 748 pp.
24. *Ethnic Relations and Nation-Building in Southeast Asia: The Case of the Ethnic Chinese*. (Singapore: ISEAS, 2004) (Editor and contributor), 251 pp.
25. *Indonesian electoral behaviour: A statistical perspective* (Singapore: ISEAS, 2004) (co-authors: Aris Ananta, Evi Nurvidya.) 427 pp.
26. *Chinese Indonesians: State policy, Monoculture and Multiculture*. Singapore: Marshall Cavendish, 2003) (Editor and contributor) 124 pp.
27. *Indonesia's Population: Ethnicity, Religion in the Changing Political Landscape* (Singapore: ISEAS, 2003) (co-authors: Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta) 196 pp.
28. *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. (Jakarta: LP3ES and Centre for Political Studies, November 2002) 295 pp.
29. Liao Jianyu 廖建裕 (Leo Suryadinata), *Xianjieduan de Yinni Huaren Zuqun* 现阶段的印尼华人族群 (Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia), Singapore: Bafang Qiye Publishing Co., 2002), 138 pp.
30. *Ethnic Chinese in Singapore and Malaysia: A Dialogue between Tradition and Modernity* (Singapore: Times Academic Press, 2002) (editor and contributor) 408 pp.
31. *Elections and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2002) 282 pp.

32. *Nationalism and Globalization: East and West*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000. (Editor and contributor) 366 pp.
33. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa,* Jakarta: LP3ES, 1999. (An Indonesian translation of my book entitled: Chinese and Nation-Building in Southeast Asia.) 264 pp.
34. *Interpreting Indonesian Politics*, Singapore: Times Academic Press, 1998, 264 pp.
35. *Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 1998) (Indonesian Translation of my book entitled *Indonesia's Foreign Policy Under Suharto*, with a postscript.) 270 pp.
36. *The Culture of the Chinese Minority in Indonesia*, Singapore: Times Book International, 1997. 276 pp. (Reissued in 2004 by Marshall Cavendish, with a postscript, 258 pp.)
37. *Ethnic Chinese as Southeast Asians*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997, 308 pp. (Editor and Contributor)
38. *Chinese and Nation-Building in Southeast Asia*, Singapore: Singapore Society of Asian Studies, 1997, 170 pp. (Reprinted in 1999) (Reissued in 2004 by Marshall Cavendish, with an epilogue, 174 pp.)
39. *Indonesia's Foreign Policy Under Suharto: Aspiring to International Leadership*. (Singapore: Times Academic Press, 1996). 210 pp. (2nd printing)
40. *Sastera Peranakan Tionghoa Indonesia*. (Jakarta: Grasindo, 1996). 379 pp. (editor and contributor).
41. *Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches*. (A revised and enlarged edition of my earlier book entitled *Eminent Indonesian Chinese*.)Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1995; 1997 2nd printing, 2015, 4th edition). 495 pp.
42. *Southeast Asian Chinese and China: The Politico-Economic Dimension*, (Singapore: Times Academic Press, 1995; 1997 2nd and 3rd printing). 260 pp. (Editor and Contributor)
43. *Southeast Asian Chinese: The Socio-Cultural Dimension*, (Singapore: Times Academic Press, 1995). 326 pp. (Editor and Contributor)
44. *Peranakan's Search for National Identity: Biographical Studies of Seven Indonesian Chinese*, (Singapore: Times Academic Press,

1993.), 131 pp. (Reissued in 2004 by Marshall Cavendish, with a postscript, 162 pp.)

45. *Chinese Adaptation and Diversity: Essays on Society and Literature in Indonesia, Malaysia and Singapore*, (Singapore: Singapore University Press, 1993), 212 pp. (editor and contributor)
46. Liao Jianyu 廖建裕 (Leo Suryadinata) *Yinni Huaren Wenhua yu Shehui* 印尼华人文化与社会 (Indonesian Chinese Culture and Society), (Singapore: Singapore Society of Asian Studies, 1993). 244 pp.
47. *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*. (Jakarta: LP3ES, 1992. Reprinted in 1993; Indonesian edition of my *Military Ascendancy and Political Culture*, with a new chapter on the 1992 election and Golkar), 200 pp.
48. *Times Comparative Dictionary of Malay and Indonesian Synonyms.* (Singapore and Kuala Lumpur: Times Books International, 1991) xii + 486 pp.
49. *Military Ascendancy and Political Culture: A Study of Indonesia's Golkar*. (Athens, Ohio University Press for Center for International Studies, 1989;1992 2nd printing) 230 pp.
50. *The Studies of the Ethnic Chinese in the ASEAN States: Bibliographical Essays*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1989) 270 pp. (editor and contributor)
51. *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1988) 159 pp.
52. *Moving Into the Pacific Century: The Changing Regional Order in the Asia-Pacific.* (Singapore: Heinemann, 1988) 189 pp. (Co-editor)
53. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*. (An Indonesian Translation of my work: *Peranakan Chinese Politics in Java*) (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986, 1994 2nd printing) 196 pp.
54. Liao Jianyu 廖建裕 (Leo Suryadinata). *Jaowa Tusheng Huaren Zhengzhi*. 爪哇土生华人政治 (A Beijing's translation of my work: *Peranakan Chinese Politics in Java*) (Beijing: Youyi

Publishers, 北京友谊出版社1986) 229 pp.

55. Liao Jianyu 廖建裕 (Leo Suryadinata). *Jaowa Tusheng Huaren de Zhengzhi Huodong*. 爪哇土生华人的政治活动 (A Taiwan's translation of my work in English: *Peranakan Chinese Politics in Java*) (Taipei: Cheng-Chung Book Co., 台北正中书局1985), 178 pp.
56. *China and the ASEAN States: The Ethnic Chinese Dimension*. (Singapore: Singapore University Press, 1985), 230 pp. (Reissued in 2005 by Marshall Cavendish, with an epilogue, 222 pp.)
57. *Dilema Minoritas Tionghoa*. (The Dilemma of the Chinese Minority) (Jakarta: Grafiti Press, 1984 and 2nd printing, 1986), 258 pp.
58. *Trends in Indonesia II: Proceedings and Background Paper*. (Singapore: Singapore University Press, 1981), 166 pp. (Co-editor and Contributor)
59. *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1977: A Source Book*. (Singapore: Singapore University Press, 1979; 1997 2nd edition, with an amended title: *Political Thinking of the Indonesian Chinese 1900-1995*.) 265 pp. (editor and translator)
60. Liao Jianyu 廖建裕 (Leo Suryadinata), *Xianjieduan de Yinni Huazu Yanjiu*现阶段的印尼华族研究 (Studies on the Ethnic Chinese in Indonesia) (Singapore: Educational Publication Bureau, 1978), 164 pp.
61. *Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China; A Study of Perceptions and Policies*. (Kuala Lumpur and Singapore: Heinemann, 1978; second revised edition, 1986; third revised edition, 1993), 254 pp.
62. *Eminent Indonesian Chinese: Biographical Sketches*. (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1978; 2nd revised edition, Gunung Agung, 1981), 218 pp.
63. *The Chinese Minority in Indonesia: Seven Papers*. (Singapore: Chopmen, 1978), 175 pp.
64. *Peranakan Chinese Politics in Java: 1917-1942*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1976; 2nd edition, Singapore University Press, 1981), 193 pp.

Bab Dalam Buku

1. "The Ethnic Chinese in the Riau Islands: A Community with a Frontier Spirit at the Edge of Indonesia." in Francis E. Hutchinson and Siwage Dharma Negara, eds. *The Riau Islands: Setting Sail.* Singapore: ISEAS Publishing, 2021, pp. 412-428.
2. "Beijing's New Policy towards the Chinese Overseas: Some Reflections", in Zheng Yongnian and Zhao Litao, eds. *Chineseness and Modernity in a Changing China: Essays in Honour of Professor Wang Gungwu*. Singapore and New Jersey: World Scientific, 2020, pp. 287-302
3. "Ethnic Groups and the Indonesian Nation-State, with Special Reference to Ethnic Chinese", in Robert W. Hefner, ed. *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia.* London and New York: Routledge, 2018), pp. 43-53.
4. "China's Nationality Laws and the Chinese Overseas", in Jayati Bhattacharya and Coonoor Kripalani, eds. *Indian and Chinese Immigrant Communities: Comparative Perspectives*, London and New York: Anthem Press, 2015, pp.43-54.
5. "State and 'Chinese Religions' in Indonesia: Confucianism, Tridharma and Buddhism during the Suharto Rule and After" in Tan Chee-Beng, ed. *After Migration and Religious Affiliation: Religions, Chinese Identities and Transnational Networks*, Singapore: World Scientific Publishing, 2014, pp.19-42.
6. "Southeast Asian Policies toward the ethnic Chinese: A Revisit", Tan Chee-Beng, ed. *Routledge Handbook of the Chinese Diaspora*, New York: Routledge, 2013, pp.274-289.
7. "Southeast Asianists in China in the Last Three Decades: A Preliminary Survey", in Saw Swee Hock and John Wong, eds. *Southeast Asian Studies in China*, Singapore: ISEAS, 2007. pp. 30-53.
8. "China-ASEAN Political Relations: Post Cold War Developments", in Hou Kok Chung and Emile Kok-Kheng Yeoh, eds. *Malaysia, Southeast Asia and the Emerging China: Political*, *Economic and Cultural Perspectives*. Institute of China Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, 2005, pp.189-207.
9. "Asian-China Relations: Realities and Prospects, Saw Swee Hock,

Sheng Lijun & Chin Kin Wah, eds. *Asian-China Relations: Realities and Prospects* (Singapore: ISEAS, 2005), pp.356-366.

10. "Anti-Chinese Actions in Southeast Asia: In Search of Causes and Solution", in Dewi Fortuna Anwar, Helene Bouvier, Glenn Smith and Roger Tol, eds. *Violent Internal Conflict in Asia Pacific: Histories, Political Economies and Policies.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS, KITLV-Jakarta, 2005, pp. 151-162.
11. "Peranakan Chinese Identities in Singapore and Malaysia: A Re-Examination", In Leo Suryadinata, ed. *Ethnic Chinese in Singapore and Malaysia: A Dialogue between Tradition and Modernity* (Singapore: Times Academic Press, 2002), pp.69-84
12. "China's Citizenship Law and the Chinese in Southeast Asia," In M. Barry Hooker, ed. *Law and the Chinese in Southeast Asia*, (Singapore: ISEAS, 2002), pp.169-202.
13. "Ethnic Chinese Literature in Indonesia: Ethnicity and Nationhood", in Lee Guan Kin, ed. *The Nantah Scholar*, Singapore: Centre for Chinese Language & Culture, Nanyang Technological University, 2001, pp.147-170.
14. "The Economic Role of Ethnic Chinese in Southeast Asia", in Jocelyn Armstrong , Warwick Amstrong and Kent Mulliner, eds. *Chinese Populations in Contemporary Southeast Asian Societies: Regional Interdependence and International Influence*, London: Curzon, 2001, pp. 55-73.
15. "Ethnic Chinese and the Nation-State in Southeast Asia", Terisita Ang See, ed. *Intercultural Relations, Cultural Transformation, and Identity—the Ethnic Chinese*. Manila: Kaisa Para Sa Kaunlaran, 2000, pp.308-327.
16. "Nation-Building and Nation-Destroying in Indonesia", in Leo Suryadinata, ed. *Nationalism and Globalization: East and West.* Singapore: ISEAS, 2000. pp. 38-70.
17. "State and Minority Religions in Contemporary Indonesia: Government Policy towards Confucianism, Tridharma and Buddhism", in Tsuneo Ayabe, ed. *Nation-State, Identity and Religion in Southeast Asia*. Singapore: Singapore Society of

Asian Studies, 1998, pp.5-24.

18. "China's Policy towards the Ethnic Chinese in Southeast Asia," in L.M. Douw and P. Post (eds.), *South China: State, Culture and Social Change during the 20th Century*, Amsterdam: Royal Netherland Academy of Arts and Sciences, 1996, pp. 103-111.
19. "Government Policies towards the ethnic Chinese in the ASEAN States: A Comparative Analysis." in Teresita Ang-See and Go Bon Juan (eds), *The Ethnic Chinese: Proceedings of the International Conference on Changing Identities and Relations in Southeast Asia*. Manila: Kaisa Para Sa Kaunlaran, 1994. pp. 67-80
20. "Southeast Asian Studies in Singapore: Past and Present." In Taufik Abdullah and Yekti Maunanti (eds.) *Toward the Promotion of Southeast Asian Studies in Southeast Asia*., Jakarta: Program of Southeast Asian Studies: Indonesian Institute of Sciences, 1994. pp. 115-136.
21. "National Ideology and Nation-Building in Multi-Ethnic States: Lessons from Other Countries", in Jon S.T. Quah, (ed.) *In Search of Singapore's National Values*. (Singapore: Times Academic Press, 1990) pp.24-44.
22. "Political Contestation in Indonesia", in Norma Mahmood and Zakaria Haji Ahmad, (eds.) *Political Contestation: Case Studies from Asia*. (Singapore: Heinemann, 1990) pp. 15-28.
23. "Domestic Political Dimensions: ASEAN", in *Security in South-East Asia and the South-West Pacific: Challenges of the 1990s*. (International Peace Report No. 29) (Dordrecht/Boston/London: Martinus Nijhoff, 1989) pp.93-110.
24. "Kwee Tek Hoay Sebagai Penulis Masalah Masyarakat Tionghoa dan Politik: Sebuah Pengkajian Awal", in Myra Sidharta, (ed.) *100 Tahun Kwee Tek Hoay*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989) pp.17-33.
25. "Chinese Economic Elite in Indonesia: A Preliminary Study", in Jennifer Cushman and Wang Gungwu eds. *Changing Identities of the Southeast Asian Chinese Since World War II.* (Hong Kong: Hong Kong University Press, 1988) pp.261-188.

26. “Yinni Wuxia Xiaoshuo Gailun” 印尼武侠小说概论 (A General Introduction to Kungfu Novels in Indonesia), in Lee Lai To and Tan Eng Chow, eds. *Nanyang yu Zhongguo* 南洋与中国 (Southeast Asia and China), Singapore: South Seas Society, 1987), pp.141-186.
27. “The 1911 Revolution and the Chinese in Java: A Preliminary Study”, in Lee Lai To, (ed.) *The 1911 Revolution--The Chinese in British and Dutch Southeast Asia*. (Singapore: Heinemann, 1987), pp.108-124.
28. “Indonesia” in D.K. Mauzy, (ed.) *Government and Politics of ASEAN Countries*. (Kuala Lumpur: Marican and Sons, 1984) pp.109-137.
29. “Indonesia under the New Order: Problems of Growth, Equity and Stability”, in Leo Suryadinata and Sharon Siddique (eds.) *Trends in Indonesia II: Proceedings and Background Paper*. (Singapore: Singapore University Press, 1981) pp.3-51.
30. “ASEAN Relations with China: Problems and Prospects”, in Kuang-sheng Liao, (ed.) *Modernization and Diplomacy of China: Selections from Proceedings of the Seminar on China*. (The Chinese University of Hong Kong, 1981) pp.117-126.
31. “Pers Melayu-Tionghoa”, in Abdurrachman Suromihardjo (ed.) *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. (Jakarta: Deppen RI & Leknas) Lipi, 1980, pp.35-64.
32. “Studies on the Chinese in Southeast Asia: Some Observations”, in Peter Chen and Hans-Dieter Evers, (eds.) *ASEAN Sociology*. (Singapore: Chopmen, 1979) pp.35-64.
33. “Yinni Huazu de Guoqu, Xianzai yu Jianglai” 印尼华族的过去, 现在与未来(Indonesian Chinese: Past, Present and Future), in Chui Kui-Chiang, et.al eds. *Dongnanya Huaren zi Yuanjiu*. (Singapore: EPB, 1978) pp.160-167.
34. “Kertanegara”, *The New Encyclopedia Britannica*. (15th edition, 1974) vol.10, pp.435-436.
35. “Gajah Mada”, *The New Encyclopedia Britannica*. (15th edition, 1974) vol.7, pp.825-826.

Artikel Di Refereed Journal (Internasional)

1. "Can Moro and Filipino Coexist? " *Asian Ethnicity*, vol.46, no.4 (2015), pp. 586-588.
2. "Chinese politics in Post-Suharto's Indonesia: Beyond the Ethnic Approach?" *Asian Survey* (May/June 2001), pp. 502-524.
3. "Democratization and Political Succession in Suharto's Indonesia," *Asian Survey* (March 1997), pp. 269-280.
4. "Islam and Suharto's Foreign Policy: Indonesia, the Middle East and Bosnia," *Asian Survey*, (March 1995), pp. 291-303.
5. "Indonesia-China Relations: A Recent Breakthrough", *Asian Survey* (July 1990) pp. 682-696.
6. "Ethnic Chinese in Southeast Asia", in *Journal of International Affairs* (New York: Columbia University) vol. 41, no.1 (Summer/Fall 1987) pp.135-151.
7. "Bumiputra and Pribumi: Economic Nationalism (Indigenism) in Malaysia and Indonesia", *Pacific Affairs* (Winter 1981)1982), vol.54, no.4, pp.662-687. (Co-author)
8. "The Chinese Minority and Sino-Indonesian Diplomatic Normalization", *Journal of Southeast Asian Studies* (March 1981), pp.179-196.
9. "Indonesian Nationalism and the Pre-War Youth Movement", *Journal of Southeast Asian Studies*, vol.9, no.1 (March 1978), pp. 99-114.
10. "The Search for Identity of a Peranakan Chinese in Indonesia: A Political Biography of Liem Koen Hian", *Archipel* (Paris), no.14 (1976) pp.43-70.
11. "Ethnicity and National Integration in Indonesia: An Analysis", *Asia Quarterly* (Belgium), no.3 (1976) pp.209-234.
12. "Indonesian Policy Toward the Chinese Minority under the New Order", *Asian Survey* (August 1976) pp.770-789.
13. "Confucianism in Indonesia: Past and Present", *Southeast Asia* (Southern Illinois University), vol. 3, no.3 (Spring 1974) pp.17-33.

14. "Indonesian Chinese Education: Past and Present", *Indonesia*, no.14 (October 1972) pp.49-71.
15. "Pre-War Indonesian Nationalism and the Peranakan Chinese", *Indonesia* (Cornell Modern Indonesia Project) no.11 (April 1971) pp.83-94.
16. "The Use of the Terms Tjina and Tionghoa in Indonesia: An Historical Survey", *Papers on Far Eastern History*. (ANU) II (September 1970) pp. 97-118. (co-author：Charles Coppel)

Artikel Di Refereed Journal (Regional)

1. "Baba/Peranakan Chinese in Indonesia and Beyond", in *Asian Culture* no.42 (December 2018), pp. 29-36.
2. "Innovation and Transformation: Peranakan Chinese Literatures/Publications in Indonesia, Malaysia and Singapore." *Asian Culture*, no. 41 (December 2017) pp,92-99.
3. "Blurring the distinction between huaqiao and huaren: China's changing policy towards the Chinese overseas", *Southeast Asian Affairs 2017,* pp.101-113.
4. "The Prospect of the Peranakan Community: A Comment on Dr Tan Ta Sen's Speech", *Asian Culture* 40 (December 2016), pp.130-136.
5. "Quanqiouhua zhong de Zhonghua yimin yu Huaqiao Huaren yanjiu" **(**全球化中的中华移民与华侨华人研究**),**《华侨华人历史研究》 (English title: *Overseas Chinese History Studies)* （Beijing,） 2012 (1) pp. 1-17.
6. "Confucian Ethics, Economic Development and Ethnic Chinese Business: Some Reflections", *Asian Culture* 37 (August 2013) pp.15-28.
7. "Integration of Indonesian Chinese to Mainstream Society", *Asian Culture* 36 (August 2012), pp. 9-17.
8. "Malay/Indonesian translations of Chinese Literature: Past and Present." *Asian Culture* 32 (June 2010), pp.24-41.
9. "The decline of the hegemonic party system in Indonesia:

Golkar after the fall of Soeharto", *Contemporary Southeast Asia*, vol. 29, no.2 (August v2007), pp. 333-358.

10. "Indonesia: The Year of the Democratic Election", *Southeast Asian Affairs 2005*, pp.89-103.
11. "Indonesia: Continuing challenges and Fragile Stability", *Southeast Asian Affairs 2004*, pp.89-103.
12. "A Year of Upheaval and Uncertainty: The Fall of Soeharto and Rise of Habibie", *Southeast Asian Affairs 1999*, pp.111-127.
13. "Golkar of Indonesia: Recent Development", *Contemporary Southeast Asia*, vol. 19, no.2 (September 1997) pp.190-204.
14. "Patterns of Chinese Political Participation in Four ASEAN States," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 15, No. 3 (December 1993), pp. 292-308.
15. "Indonesia-Vietnam Relations Under Suharto", *Contemporary Southeast Asia*, vol. 12, no.4 (March 1991), pp.331-340.
16. "Government Policy and National Integration in Indonesia", *Southeast Asian Journal of Social Science*, vol.16, no.2 (1988) pp.111-131
17. "Indonesian Political System: Continuity and Change", *Contemporary Southeast Asia*, vol. 9, no.4 (March 1988) pp.268-281.
18. "Suharto's Indonesia: Two Decades On", *Southeast Asian Affairs 1987*. pp.131-145.
19. "Politics in Indonesian Parliament 1966-1985", *Southeast Asian Journal of Social Sciences*, vol. 15, no. 1 (1987) pp. 35-52.
20. "Government Policies towards the Ethnic Chinese: A Comparison between Indonesia and Malaysia", *Southeast Asian Journal of Social Science* (Singapore) vol.13, no.2 (1985) pp.15-28.
21. "Indonesia in 1980: Continuity rather than Change", *Southeast Asian Affairs 1981*, pp.129-145.

22. "Indonesia in 1979: Controlled Discontent", *Southeast Asian Affairs 1980*, pp.121-144.
23. "Indonesia: A Year of Continuing Challenge", *Southeast Asian Affairs 1979*, pp. 105-118.

Occasional/Working Papers (Selektif)

1. "A Rising China Affects Ethnic Identities in Southeast Asia" (*ISEAS Perspective 2021* no.74) 3 June 2021
2. "Chinese-Language Newspapers in Indonesia: Declining Readership, Advertisement Revenue and Dearth of Journalists/Writers" (*Perspective* 2020, no. 91) 21 August 2020.
3. "Tensions in Indonesia over Chinese Foreign Workers during COVID-19 Pandemic" (*Perspective* 2020, no.73) 6 July 2020.
4. "New Chinese Migrants in Indonesia: An Emerging Community that Faces New Challenges" (*Perspective* 2020, no.61) 11 June 2020.
5. "Identity Politics in Indonesia: The Meliana Case. (*ISEAS Perspective* 2019, no.4) 23 January 2019
6. "Pancasila and the Challenge of Political Islam: Past and Present", *Trends in Southeast Asia*, 2018, no.14, 20 pp.
7. "Islamism and the New Anti-Terrorism Law in Indonesia", *ISEAS Perspective*, Issue No.39 (25 July 2018)
8. "Indonesia and China's Belt and Road Initiatives: Perspectives, Issues and Prospects," (Co-author: Siwage Dharma Negara) *Trends in Southeast Asia*, 2018, no.11, 41pp.
9. "Golkar's Leadership and Indonesian President", *ISEAS Perspectives*, No.5 (26 January 2018) 7 pp.
10. "The Growing "Strategic Partnership" between Indonesia and China Faces Difficult Challenge", *Trends in Southeast Asia*, No.15 (2017) 25pp.
11. "Can the Kokang Chinese Poblem in Myanmar be Resolved?"

ISEAS Perspective No. 37/2015 (15 July 2015) 10 pp.

12. "An End to Discrimination for China and the Chinese in Indonesia," *ISEAS Perspective*, No. 26 (25 April 2014). 8pp.
13. *The Ethnic Chinese Issue and National Integration in Indonesia*. (Trends in Southeast Asia no.2) Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1999. 18 pp.
14. *Determinants of Indonesia's Foreign Policy: In Search of an Explanation*, Department of Political Science, Working Paper Series, NUS, no. 6, 1993. 31 pp.
15. *Political Parties and the 1982 General Election in Indonesia*. (Singapore: Research Notes and Discussion Paper, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1982), 81 pp.
16. *"Overseas Chinese" in Southeast Asia and China's Foreign Policy: An Interpretative Essay*. (Research Notes and Discussion Paper, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1978), 45 pp.
17. *Prominent Indonesian Chinese in the 20th Century: A Preliminary Survey*. (Papers in International Studies, Southeast Asian Series, Ohio University, 1972), 62 pp.
18. *The Pre-World War II Peranakan Chinese Press of Java: A Preliminary Survey*. (Papers in International Studies, Southeast Asian Series, Ohio University, 1970), 35 pp.

*****Makalah konferensi dan opini di surat kabar tidak dimasukkan dalam daftar ini.**

BAB I

STEREOTIP, IDENTITAS DAN NASIONALISME

Leo Suryadinata dan Cerita Tionghoa di Mulut Harimau-Buaya

Aan Anshori

Siapa yang tidak kenal Profesor Leo Suryadinata? Begawan Tionghoa yang sepenuhnya mendedikasikan diri dan jiwanya memproduksi pengetahuan berkaitan dengan Tionghoa. Aku tidak pernah bertemu secara fisik dengannya. Persinggunganku sebatas pernah bertemu sekilas di ruang online. Namun sejujurnya, aku pernah membaca sedikit karya-karyanya. Saat itu, sebagai orang Islam-Sunni-Nahdliyyin-Jawa, aku tertarik menyelidiki relasi antara Jawa dan Tionghoa. Karya Prof. Leo tentu saja menjadi salah satu asupan. Aku berterima kasih padanya.

Entah apakah dia hadir atau tidak saat diskusi rutinan Tionghoa "NggoTio," edisi 15 (18/1/2020) dengan topik "Menganalisis Survei Relasi Tionghoa-Non Tionghoa," Di forum tersebut, selain aku, ada satu narasumber lain, Charlotte Setijadi, intelektual perempuan Tionghoa.[1]

Sebagai orang Jawa, aku selalu berpikir, kenapa Tionghoa --baik sebagai identitas individual maupun penanda kelompok-- selalu "tampil" di arena diskursus akademik maupun politik, khususnya dalam kontestasinya dengan suku mayoritas di Indonesia; Jawa. Tionghoa sepertinya merupakan satu-satunya etnis/suku, dari ratusan yang ada di Indonesia, yang terasa spesial.

Sudah tidak terhitung berapa ratus riset dilakukan, berapa seminar/workshop --baik online maupun offline-- dilaksanakan

[1] Lihat liputannya di https://www.youtube.com/watch?v=LVhLZxBuk1A&t=7054s

untuk membincang tema seputar Tionghoa. Tionghoa selalu menarik didiskusikan, bukan karena posisinya sebagai kelompok mayoritas, namun karena faktor masa lalu, khususnya saat etnis ini bersinggungan dengan etnis Jawa. Tidak ada etnis di Indonesia yang hidupnya penuh penderitaan melebihi apa yang pernah dialami etnis Tionghoa. Tidak hanya setelah kemerdekaan namun juga telah terjadi jauh sebelum itu.[2]

Penderitaan ini, secara kritis, merupakan imbas dari dari politik adu domba Belanda saat itu terhadap etnis Jawa dan Tionghoa. Mereka dibelah dan dibenturkan agar memudahkan Belanda menguasai sumber daya alam nusantara, khususnya pulau Jawa. Meski Indonesia sudah merdeka lebih dari 75 tahun, namun pewarisan stigma terhadap Tionghoa, khususnya di kalangan Jawa, tidak bisa serta merta dipatahkan. Stigma ini senantiasa memiliki potensi, dan telah terbukti dalam banyak kejadian, untuk terus diorkestrasi demi banyak kepentingan, khususnya politik.

Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan relasi Tionghoa-Non Tionghoa berbasis survei yang pernah dilaksanakan, misalnya, oleh Wahid Foundation, Saiful Mujani Research Center, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta tulisan Muhtadi dan Mietzner?

Stereotype; Minor tapi Mayor

Secara jumlah, Tionghoa di Indonesia tidaklah banyak. Mengamini Charles Coppel (2017) yang merujuk data survei sosial dan ekonomi nasional (Susenas) 2010, populasi Tionghoa hanya 1,2 persen, atau kurang dari 3 juta orang, dari total penduduk Indonesia. Bandingkan dengan, misalnya, suku Jawa yang merajai populasi dengan persentase 40 persen. Tahun 2000 etnis Tionghoa berjumlah 2.412.000 orang naik menjadi 2.833.000 pada 2010. Mereka hidup menyebar, tidak terkonsentrasi dalam satu wilayah saja.[3]

---

[2] Muzakki, Akh. "Ethnic Chinese Muslims in Indonesia: An unfinished anti-discrimination project." *Journal of Muslim Minority Affairs* 30.1 (2010): 81-96.

[3] Lihat Charles Coppel, "Reassessing Assumptions about Chinese Indonesias" https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/reassessing-assumptions-about-chinese-indonesians/

Sebagian besar mereka hidup di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Barat dan wilayah lainnya. Uniknya, menurut Coppel, mereka bisa dianggap "lebih Indonesia", karena sekitar 60% mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian. Persentase ini mengalahkan raihan suku dan etnis lain.

Data penting lain yang telah dan akan memengaruhi dinamika Tionghoa-Non-Tionghoa (khususnya Jawa) adalah seputar agama di kalangan mereka. Separuh dari jumlah Tionghoa Indonesia beragama Buddha, 27 persen memilih Kristen Protestan, Katolik 17 persen, dan sisanya menganut Islam dan Khonghucu. Besarnya jumlah penganut non-Islam di kalangan Tionghoa nantinya juga ikut berpengaruh terhadap dinamika antaragama, khususnya Islam-Kristen/Katolik.

Tionghoa memang minor dalam hal jumlah. Akan tetapi mereka adalah raksasa dalam perekonomian di Indonesia. Ibaratnya, kecil-kecil cabe rawit. Majalah Forbes, sebagaimana dikutip Kompas.com (10/12/2020), mengeluarkan daftar 15 orang terkaya Indonesia. Mungkin hanya Chairul Tanjung dan Sri Prakash Lohia saja yang bukan Tionghoa. [4]

Kesuksesan bisnis yang sebenarnya bisa dicapai oleh siapa saja, dari etnis manapun asal bekerja keras dan tidak dapat disangkutpautkan dengan etnis tertentu, kemudian menjadi agak rumit saat "masuk," dalam relasi Jawa-Tionghoa, Islam-Non Islam, dengan konstruksi pascakolonial. Alih-alih mengejar ketertinggalan sektor ekonomi, tidak sedikit Jawa-Muslim merasa justru telah terjadi ketidakadilan dalam sektor ekonomi.

Banyak orang Jawa-Muslim --yang merasa memiliki perpaduan dua identitas mayor, dan oleh sebab itu, merasa harus keluar sebagai pemenang-- semakin meyakini Tionghoa dan Nonmuslim adalah kolonialisme baru yang selalu akan memposisikan Jawa-Muslim tidak bisa menjadi pemenang di rumahnya sendiri. Sentimen rasial dan agama ini, entah bagaimana, terus dihidupi dan dibiarkan meranggas.

[4] Mutia Fauzia, Kompas, "Ini 15 Orang Terkaya di Indonesia tahun 2020" https://money.kompas.com/read/2020/04/09/124003226/ini-15-orang-terkaya-di-indonesia-tahun-2020

Tionghoa dan Kurusetra Data

Beberapa bulan sebelum pecah demonstrasi "212" dalam kasus Ahok[5] 2016 di Jakarta, Wahid Foundation merilis data yang cukup mencengangkan. Sebanyak 59,9 persen muslim dewasa Indonesia mengaku membenci individu dengan ciri non-Muslim, Tionghoa, Komunis dan LGBT.

Lebih dari 80 persen dari prosentase tersebut tidak mau bertetangga dengan individu tersebut, dan tidak rela mereka menjadi aparat negara. Sebanyak 28 persen dari total responden mengaku siap melakukan sweeping rumah ibadah non-Muslim dan tempat-tempat yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. [6]

Namun bagaimana kita tahu seberapa besar kebencian yang spesifik terhadap etnis Tionghoa? Menurut saya ini yang menarik. Beberapa hari setelah kasus 212 tahun 2016, SMRC merilis sebuah data bahwa sentimen anti-Tionghoa atau Tiongkok di masyarakat sangatlah kecil, hanya 0,8 persen saja. "Rasialisme muncul bukan karena faktor rasialisme, tapi ada mobilisasi politik, ada yag menggunakan ras untuk kepentingan politik," tukas Saiful Mujani.[7]

Menurutnya, sentimen anti-Tionghoa dalam kurun 15 tahun terakhir ini cenderung stabil. Rendahnya sentimen ini, secara spesifik, juga diperkuat data Wahid Foundation 2016 dan 2017 di mana kebencian terhadap China/Tionghoa hanya 0,4 persen dan 0,7 persen.

Data ini cukup membuat siapapun tidak perlu resah dengan relasi Tionghoa-nonTionghoa. Bisa dikatakan upaya normalisasi hubungan tersebut telah berada di jalur yang sudah benar. Namun kita juga patut mencermati temuan Komnas HAM. Dengan menggandeng Kompas, lembaga ini menyelenggarakan survei diskriminasi ras dan etnis pada 2018. Hasilnya, sebanyak

---

[5] Analisis seputar Ahok dan 212, pernah saya tulis dalam artikel "Ahok dan Raksasa Penjaga islam jawa" https://geotimes.co.id/kolom/ahok-dan-raksasa-penjaga-islam-pulau-jawa/

[6] Rakhmad Nur Hakim, Kompas, "Survei Wahid Foundation: Indonesia Masih Rawan Intoleransi dan Radikalisme" https://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/13363111/survei.wahid.foundation.indonesia.masih.rawan.intoleransi.dan.radikalisme Presentasi Wahid Foundation bisa diakses di https://www.wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Presentasi-Laporan-Kemerdekaan-BeragamaBerkeyakinan-Wahid-Foundation-2018

[7] Rohmanuddin, Liputan6, "Survei SMRC: Sentimen Anti-Tionghoa Akibat Mobilisasi Politik" https://www.liputan6.com/news/read/2691455/survei-smrc-sentimen-anti-tionghoa-akibat-mobilisasi-politik

81,9% dan 83,1 % responden mengaku lebih nyaman hidup dalam keturunan yang sama dan tinggal dalam kelompok etnis yang sama.[8]

Sekitar 82,7% juga mengaku lebih nyaman hidup dengan orang yang memiliki ras sama (kulit putih/hitam). Meski 90% responden mengaku belum pernah mengalami diskriminasi etnis dan ras akan tetapi 48% total responden mengaku pernah melihat diskriminasi ras dan etnis di fasilitas umum milik pemerintah, misalnya sekolah maupun puskesmas. Survei tersebut mengajak kita menemukan dua kemungkinan; pertama, diskriminasi ras dan etnis jarang terjadi atau, kedua, minimnya pengetahuan masyarakat terkait apa itu diskriminasi sehingga tidak dapat membedakan mana praktek diskriminasi dan mana yang tidak.

Supaya lebih "memperkeruh" hasil survei-survei di atas, kita juga perlu membaca tulisan Muhtadi dan Mietzner[9] yang sempat membuat geram banyak aktifis Nahdlatul Ulama (NU).[10] Kedua ilmuwan tersebut memapar data; (i) 53% orang Islam keberatan atas rumah ibadah non-islam, 54% pengikut NU juga keberatan, (ii) sekitar 52% orang Islam keberatan non-Islam menjadi bupati/walikota maupun gubernur, prosentase sama juga terjadi di internal pengikut NU, (iii) sebanyak 50% muslim dan 59% pengikut NU sepakat memilih suku Jawa sebagai presiden.

Dalam pandangan saya, data-data di atas menunjukkan beberapa kemungkinan. **Pertama**, sentimen terhadap Tionghoa sebagai identitas cukup kecil, namun fenomena ini juga dapat

---

[8] Ign. L., Adhi Bhaskara, Survei Komnas HAM; Dskriminasi Etnis dan Ras Masih Terus Ditolerir," https://tirto.id/survei-komnas-ham-diskriminasi-etnis-ras-masih-terus-ditolerir-dahP
Baca juga "Potensi Diskriminasi Ras dan Etnis Sangat Tinggi" https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/11/19/687/potensi-diskriminasi-ras-dan-etnis-sangat-tinggi.html

[9] Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). "The Myth of Pluralism". *Contemporary Southeast Asia*, *42*(1), 58-84.

[10] Salah satunya adalah Amin Mudzakkir, ia menulis kritiknya di media Alif.id,salah satunya dengan judul "Melepaskan NU dari Konteksnya; Problematik Metodologis Mietzner dan Muhtadi" https://alif.id/read/amin-mudzakkir/melepaskan-nu-dari-konteksnya-problematik-metodologis-mietzner-dan-muhtadi-b230840p/ Ahmad Suaedy, cendekiawan NU, bahkan menulis di status Facebooknya "Pelajaran yang bisa dipetik adalah terjadi degradasi keilmuan para ilmuwan politik sebagian indonesianis, disebabkan karena mereka hanya yakin dengan kebenarannya sendiri, bacaannya usang yang mengacu keadaan 50 tahun yang lalu, seolah islam Indonesia belum berubah sejak Konstituante. Saya berdoa mereka membaca buku dan realitas lagi, tidak hanya yakin dengan keyakinan di kepala mereka sendiri," Saya sangat yakin tulisan itu ditujukan pada Muhtadi dan Muhtadi, https://m.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfSTEwNzA0Nzk5OTM6MTAyMjA4NTMyMjE2OTQ5MTg%3D

ditafsirkan sebagaimana apa yang menjadi kesimpulan survei Komnas HAM dan Kompas; masyarakat --baik pelaku maupun korban-- belum memahami dan menyadari secara tepat apa yang dimaksud dengan diskriminasi dan intoleransi. Saya menduga sangat banyak orang yang akan mengaku tidak membenci etnis tertentu, misalnya Tionghoa, namun pada saat yang bersamaan masih memiliki preferensi politik berdasarkan ras maupun etnis. Saya sendiri menyebutnya sebagai fenomena "orang sakit yang tidak merasa dirinya sedang sakit," Fenomena ini pernah terjadi pada saat CSIS melakukan survei milenial 2017. Lembaga ini menunjukkan data lebih dari 90% millenial tidak sepakat ada ideologi lain menggantikan Pancasila. Namun lebih dari 52% mereka akan memilih pemimpin seagama.[11] Bagi saya fenomena ini mungkin lebih mudah "disembuhkan," namun tidak menutup kemungkinan sebaliknya; sulit disembuhkan.

Kedua, saya meyakini, pada saat relasi rasial Tionghoa dan Non-Tionghoa dapat dikatakan membaik, arena diskriminasi dan persekusi kelompok mayoritas telah bergeser; tidak lagi hanya berbasis ras maupun etnis namun telah menempati arena yang lebih luas dan panjang, yakni arena agama. Dalam arena ini, sebagaimana pernah saya singgung dalam diskusi online di atas, etnis Tionghoa akan tetap rentan mengalami persekusi dan diskriminasi, bukan karena faktor etnis maupun ras namun karena agama. Posisi Tionghoa Indonesia, seperti pepatah lama, keluar mulut harimau masuk mulut buaya. Atau, bisa jadi lebih parah; mereka tidak bisa keluar dari mulut harimau karena ada buaya yang ikut menggerus mereka.

Kita berhutang banyak pada warisan pengetahuan prof. Leo untuk memerdekakan Tionghoa dari kedua mulut binatang tersebut.

Waalohu a'lam. (*)

---

[11] Baca "Laporan Survei Milenial 2017," yang dikeluarkan CSIS, https://www.csis.or.id/uploaded_file/event/ada_apa_dengan_milenial___paparan_survei_nasional_csis_mengenai_orientasi_ekonomi__sosial_dan_politik_generasi_milenial_indonesia__notulen.pdf

Pelajaran dari Perjalanan*

Surya Samudera Giamsjah

Perjalanan Ini

Ada begitu banyak peribahasa serta kata-kata mutiara yang berkaitan dengan sebuah perjalanan. Sebuah lagu tahun 80-an yang berjudul "Berita Kepada Kawan", dipopulerkan oleh penyanyi Ebiet G. Ade, diawali dengan sebuah lirik yang berkata, "Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan, sayang engkau tak duduk di sampingku, kawan..." Sebuah kata-kata mutiara Tionghoa, yang diucapkan Lao Tzu, juga mengatakan, "Perjalanan ratusan mil dimulai dengan satu langkah pertama!" Kitab Mazmur dalam Alkitab pun dimulai dengan Mazmur 1, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul "Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik", berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh..." Mazmur ini diakhiri dengan kalimat, "...sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan."

* Sebuah tulisan reflektif-dialektis seorang pendeta Kristen Protestan Tionghoa Indonesia dalam rangka pengucapan syukur dan perayaan ulang tahun ke-80 Leo Suryadinata, tokoh Tionghoa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan.

Kehidupan manusia memang seringkali dipandang sebagai sebuah perjalanan, namun bagi mereka yang senang mencermati kehidupan, tentu saja terdapat pernak-pernik dan detil kehidupan yang menarik untuk disimak dan diberi makna sehingga timbul istilah "menarik hikmah". Ya! Rupa-rupanya bagi mereka yang suka mencermati kehidupan, ada hikmah yang bisa diambil dari langkah-langkah perjalanan hidup, entah itu hidup seseorang, entahkah itu hidup sebuah suku bangsa, entahkah itu hidup sebuah bangsa.

Perjalanan Hidup Tionghoa di Nusantara

Sebagai salah seorang penyumbang tulisan dalam buku "Ada Aku di antara Tionghoa dan Indonesia", hari itu saya beserta istri datang dalam acara bedah buku yang ditulis tujuh puluh tiga penulis itu serta ikut menikmati paparan-paparan yang disampaikan para pemateri yang salah satunya adalah Dr. Widjajanti Dharmowijono. Dari mulut beliaulah dan pada momentum itulah untuk pertama kalinya saya mendengar tentang peristiwa pembantaian etnis Tionghoa di Batavia pada tahun 1740 yang memakan korban sampai puluhan ribu jiwa. Astaga! Sejarah kelam dan pekat ini tidak pernah saya dengar sebelumnya dari pelajaran-pelajaran di bangku sekolah dan tentu saja paparan itu membuat saya kaget dan berbisik pada istri saya, "Sampai segitunya, ya?"Istri saya pun tertegun. *In the name of economical agendas, the government slayed and victimized thousands soul of Chinese people who lived in Batavia.* "Sungguh keterlaluan!" Pikir saya, "Hidup manusia seperti tidak ada harganya!"

Rasa geram dan penasaran itu terus berlanjut dan momentum menerima jawab atas rasa penasaran itu datang. Ibu Esthi Susanti Hudiono dari Biro Pengembangan dan Mobilisasi Sumber Daya di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga memberikan undangan atas penyelenggaraan bedah buku "Geger Pacinan" yang ditulis Rama Daradjadi dari Kraton Pura Mangkunegaran Surakarta. Beliau sendiri hadir dalam acara bedah buku tersebut dan menyampaikan beberapa penggalan kisah serta data resmi dari babad-babad yang tersimpan di

perpustakaan keraton sebagai sumber buku tersebut. Sekali lagi hati ini terkesima dan sekaligus bertanya-tanya, "Sampai berapa jauh lagi perjalanan ini berlangsung?"

Dari dua momentum tersebut, saya merenung. "Rupa-rupanya perjalanan sejarah kehidupan Etnis Tionghoa yang mendiami tanah Nusantara ini diwarnai dengan kisah-kisah kelam berupa pembantaian dan pengkhianatan sehingga jalan kehidupan yang dilalui adalah jalan yang penuh dengan air mata dan darah." *Koq ngenes* sekali ya?" Lebih lanjut saya merenung, "Apa *sech* salahnya terlahir sebagai etnis Tionghoa di bumi Nusantara ini? Apakah mata sipit dan warna kulit yang "bening" adalah sebuah kesalahan? Siapa yang salah?"

Perjalanan Hidup Tionghoa Indonesia

Kedua momentum itu pula yang membawa saya berjumpa dengan Evi Lina Sutrisno dan Soka Handinah Katjasungkana, dua perempuan hebat yang menjadi sahabat dalam menyusuri lorong-lorong gelap sejarah Tionghoa Indonesia. Dari mereka, kami *gathuk* dengan Didi Kwartanada, Ravando, Betty Chandra, Sutrisno Murtiyoso, dan tentu saja "raksasa" pejuang anti diskriminasi Gus Aan Anshori. Dalam sebuah kesempatan *WhatsApp video call*, kami membentuk panitia seri webinar "Nggosipin Tionghoa, Yuk!" dengan *host* Roemah Bhinneka di Surabaya, bersama Iryanto Soesilo dan Michael Andrew. Menyusul kemudian Johan Hasan, R.N. Buffon Aji, dan Shinta Rahayu.

Unbelievable! Serial webinar yang semula direncanakan tayang empat episode saja di bulan Agustus 2020 untuk memperkenalkan dan menumbuhkan rasa kebangsaan kepada generasi Millenial Tionghoa Indonesia di bulan kemerdekaan itu ternyata berlanjut memasuki bulan September 2020 yang membicarakan pahit dan pedih hidup sebagai Tionghoa Indonesia di masa pendudukan VOC, zaman pendudukan Jepang, masa Orde Lama, dan menjelang tumbangnya Orde Baru dalam kerusuhan Mei 1998. Episode-episode kelam yang mengiris hati dan membuat hati miris. Dalam paparan Didi Kwartanada (Serial Webinar Nggosipin Tionghoa, Yuk edisi 17 Agustus 2020), saya mengenal istilah "*middleman*" di mana VOC dan kemudian

pemerintah Hindia Belanda menempatkan Etnis Tionghoa yang tinggal di Nusantara sebagai etnis di "kelas menengah", maksudnya sebagai "*bumper*" supaya ketika terjadi gejolak di kelas *inlander*, penguasa tidak secara langsung terdampak gejolak tersebut sebab telah "menabrak" kelas menengah yang disiapkan. Sistem feodalistis masyarakat Jawa kala itu menjadi peluang bagi penguasa untuk melakukan politik *devide et impera* dengan mengorbankan warga etnis Tionghoa.

Perjalanan Hidup di Masa Reformasi Indonesia

Seorang Tionghoa Indonesia yang fenomenal di masa reformasi bangsa Indonesia adalah sosok Basuki Tjahaja Purnama, tokoh anti korupsi yang mengambil sikap terbuka dan transparan untuk menunjukkan ketetapan hatinya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dengan gaya komunikasinya yang *straight* dan *to the point*, beliau menjadi alternatif dalam membangun komunikasi massa di tengah birokrasi bangsa yang seringkali menampilkan diri sebagai *homo homini lupus* bagi rakyat. Rupa-rupanya model alternatif ini rentan terhadap serangan mereka yang tidak merasa diuntungkan dengan gaya bicara *ceplas-ceplos* dan sikap yang terekspresikan dalam kalimat "... *nenek loe*!" ini. *Stereotype* dan *image* etnis Tionghoa yang dipandang - katanya, *mbuh* kata siapa - tidak cocok bagi kehidupan masyarakat (di pulau) Jawa membawanya masuk jeruji tahanan Mako Brimob sehingga muncul istilah "di-Ahok-kan". Keterusterangan dan integritas yang dibangunnya dijawab para politikus dan pelaku bisnis yang merasa dirugikan dengan politik identitas, yang ternyata justru merobek-robek rajut ke-Bhinneka Tunggal Ika-an bangsa ini. Dalam lompatan logika yang tidak masuk akal, sekali lagi nama yang fenomenal ini dijadikan sebagai *scapegoat* yang bahkan dalam pola majas bahasa *pars pro toto* "ujung-ujungnya" gara-gara etnis Tionghoa juga. *Plintiran* politik yang mengorbankan - *victimizing* - sebuah etnis bangsa. Warisan politik kolonialistik mengejawantah dalam politik identitas dan politik dinasti, dan etnis Tionghoa Indonesia, dengan segala *stereotype*-nya yang negatif, diumpankan sebagai tumbal. Semoga kondisi ini tidak berlangsung terus dan berulang kali terjadi.

Perjalanan Hidup Tokoh Ayub dalam Alkitab

Alkitab, dalam Perjanjian Lama, mempersaksikan kehidupan seorang tokoh yang bernama Ayub. Dalam klasifikasi *genre* penulisan, kitab Ayub ini dimasukkan dalam kelompok "tulisan-tulisan hikmat" (*qokmah*. Ibr.) sehingga melalui pembacaan dan perenungan kitab yang mencatat kisah hidup tokoh Ayub ini diharapkan seseorang bukan hanya dapat mengenal siapakah Allah dan apakah karya-Nya, namun juga mendapatkan pelajaran apa makna dan nilai-nilai kehidupan yang dapat dijalaninya di dunia ini.

Panggung drama kehidupan Ayub dibuka dengan disibakkannya layar dan para pembacanya dapat membaca "awal perjalanan ratusan mil" dalam adegan keluarga yang harmonis, yang mapan secara ekonomi, yang diberkati dalam pandangan budaya masyarakat pada waktu itu. Keluarga idaman, bahkan dalam pandangan masyarakat Tionghoa yang menjunjung tinggi cita-cita hidup berkelimpahan (*prosperity life*). Bayangkan, kemapanan ekonomi yang digambarkan dengan banyaknya kambing, domba, lembu, sapi sebagai ternak yang mengharuskan Ayub menggaji gembala-gembala yang banyak untuk menggembalakan ternaknya, serta diikuti gaya hidup pesta tiap malam yang dilakukan anak-anaknya bersama para sahabat mereka, khas *lifestyle* generasi muda layaknya *crazy rich* zaman itu.

Layar panggung ditutup dan kemudian dibuka kembali dengan adegan metafisika yang sama sekali tidak diketahui dan tidak disadari Ayub dan keluarganya, namun sangat berkaitan dengan jalan kehidupannya. Dalam sidang ilahi, Allah memimpin sebuah percakapan di mana ternyata Iblis pun datang di hadapan-Nya. Suatu catatan teks suci yang mencengangkan, bahwa Yang Mahakudus bercakap-cakap berhadap-hadapan muka dengan muka dengan yang mahajahat. Pokok percakapannya tentang Ayub, yang dipuji sebagai "hamba-Ku yang baik dan setia". "Aaakh... sebaik dan sesetia apa *sech* dia?" Seru Iblis, "Paling-paling sejauh Engkau memberinya kemakmuran?" *Prejudice* Iblis terhadap Ayub berkaitan dengan situasi dan kondisi baik yang Ayub alami, namun bagaimana ketika segala kebaikan itu diambil dan dirampas? "Tentu gugur!" Terlintas dalam benak

Iblis. Allah pun memberi izin bagi Iblis untuk "menjamahnya" dengan "syarat dan ketentuan berlaku" yaitu, "...sayangkanlah nyawanya sebab nyawanya adalah milik-Ku!" Dalam waktu satu hari, semua harta bendanya ludes, ternaknya dirampok para penjahat, para gembala sebagai hamba-hambanya mati terbunuh, anak-anaknya perempuan dan laki-laki mati, dan istri yang ia harapkan menopangnya justru berseru, "Kutukilah Tuhanmu dan matilah!" Penulis kitab Ayub mencatat jawaban Ayub pada istrinya, "Masakan engkau hanya mau menerima hal-hal yang baik dari Tuhan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan!" Komentar penulis kitab Ayub, "Dalam kesemuanya itu Ayub tidak melakukan hal yang berdosa di hadapan Tuhan." Layar panggung pun ditutup kembali.

Manakala layar panggung dibuka kembali, *setting* sudah kembali dalam persidangan ilahi, Allah sebagai pemimpin persidangan bercakap-cakap dengan para anak-anak-Nya dan Iblis pun hadir di sana. Kembali Iblis berseru kepada Allah, "... ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki Engkau!" Aaaaiiihh... *suudzon* sekali Iblis ini, dan Allah pun menjawabnya, "...ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." *Setting* kembali berubah dan lampu sorot menukik tajam pada sosok Ayub yang mengalami sakit yang menjijikkan sampai-sampai tubuhnya berbau busuk dan gatal-gatal hebat sehingga ia mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Frasa "duduk di tengah-tengah abu" perlu mendapat sorotan tajam sebagai sikap dan tindakan yang secara tradisi saat itu menunjukkan dukacita, kekecewaan, dan ketidakberdayaan yang mendalam akibat penderitaan yang datang bertubi-tubi menghajar kehidupan seseorang, dalam hal ini hidup Ayub.

Duduk di tengah-tengah abu dengan sekujur tubuh bertabur abu dan debu dalam bau busuk menyengat dan rasa gatal yang dahsyat bukanlah impian hidup Ayub dan siapapun yang hidup pada zaman penulisan kitab ini, bermimpi dan membayangkan saja pun adalah kengerian tak terbayangkan, namun itulah jalan kehidupan yang Ayub harus jalani.

Sikap dan tindakan ini menjadi "langkah pertama" Ayub dalam menjalani dinamika hidup dalam perjalanan "melalui kerikil-kerikil tajam, jalanan berbatu, mendaki dan menuruni lereng" sejauh ratusan mil yang entah ujungnya berakhir seperti apa. Proses yang terjadi menjadi penting, sebab dalam dinamika itu ternyata Ayub menunjukkan sikap dan tindakan sebagai berikut:

a. **Tetap menghidupi identitas yang melekat pada dirinya**
   Allah, seperti dicatat oleh penulis Kitab Ayub, berkata kepada Iblis, "...tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." *Labelling* yang Allah berikan bukan main-main sebab diberikan oleh Allah sendiri dan karena berangkat dari realita kehidupan, bukan sebuah tuduhan sembarangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Komentar Allah atas kehidupan Ayub adalah sebuah pujian terhadap kehidupan Ayub yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Itu identitasnya! Itu terbukti dengan berubahnya situasi dan kondisi di sekitar Ayub, ia tidak berubah.
b. **Tidak menerima dan menyerah atas jalan kehidupannya**
   Ayub berserah namun tidak menyerah! Dalam dinamika kehidupannya ia tidak larut dalam makian istrinya, tuduhan sahabat-sahabatnya, dan kenyataan pahit kehidupan yang ia harus jalani. Ia bergumul, bahkan dalam percakapannya dengan Allah, ia berseru secara jujur menceritakan kebingungannya dan protesnya kepada Allah. Ia pun membuka telinga, pikiran, dan hatinya dalam menyimak tuturan Allah akan penataan alam semesta serta norma dan nilai yang berjalan di dunia ini dalam kearifan surgawi.

c. **Berani mempertanggungjawabkan sikap dan tindakan yang dipilihnya**
   Sahabat-sahabat yang semula datang untuk menghibur, rupa-rupanya memiliki pandangan fatalisme sempit yang mengatakan bahwa penderitaan adalah akibat dosa dan oleh karenanya nasib buruk yang menimpa

Ayub pasti karena keberdosaannya. Memang Ayub dan para sahabatnya serta seluruh pribadi yang disebutkan dalam kitab ini tidak mengetahui drama persidangan ilahi yang justru menegaskan bahwa penderitaan Ayub justru terjadi karena ulah Iblis yang meragukan kualitas kebajikan hidup Ayub. Jelas sekali penulis kitab Ayub ini hendak melawan pemahaman fatalisme sempit bahwa penderitaan adalah karena dosa yang seseorang lakukan. Kehidupan ini dipenuhi misteri yang seringkali tidak terjangkau kemampuan manusia. Hidup ini tidak "hitam putih" dengan begitu sederhananya, namun ada gradasi-gradasi warna-warni kehidupan yang perlu direnungkan dan hikmahnya perlu dipetik. Ayub bersikukuh dalam pendiriannya bahwa ia tidak bersalah, dan di akhir kitab Allah membela dan membenarkannya.

Pelajaran dari Perjalanan

Teologi Kristen Protestan dalam tradisi arus reformasi mengatakan bahwa Allah menyatakan diri-Nya, salah satunya, melalui sejarah. *God revelating himself through history*. Dengan demikian umat manusia dipanggil untuk mengenal Allah dengan mencermati sejarah, dan dalam hal ini berarti dengan mengamati jejak-jejak perjalanan dan karya-Nya dalam sejarah perjalanan hidup manusia, entah untuk semakin mengenal siapakah Allah, apakah ajaran dan karya-Nya, ataukah untuk menentukan langkah dan tindakan apa yang akan manusia ambil pada saat-saat selanjutnya. Yohanes Calvin pun, seorang reformator Gereja, mengemukakan pemahaman teologis yang dikenal dengan istilah *duplex cognitio Dei*, pengenalan ganda akan Allah, maksudnya adalah ketika manusia mengenal Allah, ia akan mengenal dirinya sendiri, dan ketika ia mengenal dirinya sendiri, ia mengenal Allah. Demikian seterusnya membentuk spiral kehidupan.

Pengenalan terhadap Allah dan pengenalan terhadap diri sendiri membawa seseorang semakin menghargai identitasnya, baik secara pribadi, secara komunal, secara sosial, maupun secara global. Pada titik-titik inilah Tionghoa Indonesia perlu

merumuskan identitas diri serta orientasi kehidupannya. Pertanyaan-pertanyaan seperti "Siapakah aku? Komunitas mana yang menjadi wadah hidupku? Peran seperti apakah yang harus aku lakoni dalam kehidupan bermasyarakat? Bagaimana dan sejauh apa kiprahku di dunia ini?"

Tionghoa Indonesia telah melakukan perjalanan ratusan mil, bukan hanya secara fisik melakukan migrasi dari daratan Tiongkok dan tiba di kepulauan Nusantara, namun juga "ratusan mil" perjalanan hidup dengan dinamika kehidupan bagai roda yang berputar "di atas dan di bawah". Pengalaman menempuh perjalanan hidup "ratusan mil" ini tentu saja perlu dicermati dan dari perjalanan itu terdapat begitu banyak hikmah yang dapat dipetik, termasuk didalamnya dalam mengenali identitas dan peran Tionghoa Indonesia *hic at nunc*. Persoalan asimilasi dan inkulturasi, orientasi kehidupan "ke sini atau ke sana", serta identitas sebagai Warga Negara Indonesia atau *global citizenship* di era digital-milenial ini tidak bisa lepas dari pengenalan akan diri sendiri, "Siapakah aku?"

Tulisan dan konsep-konsep yang Om Leo tuliskan dan sumbangkan bagi kehidupan Tionghoa Indonesia adalah pelajaran-pelajaran berharga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial tersebut, bagaikan gunungan potongan *puzzle* yang turut membentuk gambaran identitas dan kehidupan Tionghoa Indonesia. Terima kasih Om Leo Surjadinata yang telah mengamati dan mengambil pelajaran dari perjalanan kehidupan Tionghoa Indonesia. Kiranya "Langit" senantiasa melimpahkan berkah-Nya bagi Om Leo sekeluarga.

Bacaan Lebih Lanjut

_____, *Alkitab*, Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 1974

Atkinson, David, *Ayub: Dalam Kasih Allah*, Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1997

Calvin, Yohanes, *Institutio*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980

Loekito, Daniel Lucas, *Diktat Kuliah Teologia Calvin*, Bandung: Sekolah Tinggi Teologia Bandung, 1997.

Habel, Norman C., *The Book of Job*, dalam seri *The Old Testament Library*, Philadelphia: Westminster Press, 1985.

Wolfers, David, *Deep Things Out of Darkness: The Book of Job, Essays and a New English Translation*, Kampen: Kok Pharos dan Grand Rapids: Eerdmans, 1995.

Menuju Nasionalisme Indonesia yang Berkesetaraaan

Johan Hasan

Pengantar Permasalahan

Nasionalisme seperti dinyatakan Benedict Anderson bukanlah sesuatu yang diwariskan dari masa lampau, kejayaan nenek moyang yang agung (*absolutely splendid ancestors*), namun merupakan suatu konsep modern dan lebih kepada sebuah proyek bersama (*common project*) untuk tujuan bersama, kini dan terutama masa depan[1]. Oleh karena itu, kita dapat menilai apakah arah nasionalisme kita sudah benar atau salah. Tanpa mengabaikan persoalan minoritas lainnya, barometer terbaik menilai benar tidaknya arah nasionalisme adalah, apakah kita berhasil memberikan kesetaraan bagi Tionghoa Indonesia sebagai warga negara Indonesia secara adil dan setara atau tidak. Jika nilai moral Pancasila dipahami secara universal[2], atau dinyatakan oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai taraf yang dapat menanggalkan perikemanusiaan yang *limited* menuju perikemanusiaan yang universal, seharusnya nasionalisme Indonesia dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negaranya, baik lintas suku, agama, gender atau golongan lainnya, karena Indonesia adalah masyarakat yang majemuk.

Pembahasan ini akan berangkat dari tulisan Leo Suryadinata berjudul "Nasionalisme Indonesia Sebelum Perang dan Tionghoa Peranakan"[3] yang merupakan salah satu bab dari

---

[1] Benedict Anderson. *Indonesian Nationalism Today and in the Future*. Tempo's twenty-eighth anniversary. Hotel Borobudur, Jakarta, March 4,1999. h. 1-3.

[2] Pramoedya Ananta Toer. *Haokiau di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya (1998). h. 45.

[3] Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia, Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas (2010) h. 123-180. Artikel ini merujuk khusus tulisan Prof. Leo Suryadinata sebagai penghormatan terhadapnya. Perkenalan saya secara pribadi dengannya berlangsung singkat dan lebih didorong oleh ketertarikan pribadi dalam upaya memahami mengapa terjadi peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Saya pun kemudian terlibat membantunya menyunting naskah-naskahnya yang kemudian terbit dengan judul *Negara dan Etnis Tionghoa, Kasus Indonesia* (2002) yang diterbitkan LP3ES dengan ucapan terima kasih darinya di pengantar buku tersebut. Dengan membantu menyunting naskah tersebut, saya tanpa sadar dibantu Leo Suryadinata untuk belajar melihat masalah peranakan Tionghoa melalui sejarah. Kami bertemu kembali beberapa belas tahun kemudian dalam acara webinar rutin *Nggosipin Tionghoa* yang dilakukan Roemah Bhinneka.

skripsi M.A.-nya di Monash dan pernah juga dimuat dalam jurnal *Indonesia* terbitan Cornell (1971) dan sekarang dihadirkan dalam bahasa Indonesia dalam bukunya, *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia*[4]. Tulisan Suryadinata ini menarik karena sesungguhnya mengungkapkan akar permasalahan yang membantu kita memahami permasalahan nasionalisme Indonesia dan perubahannya dari sudut Tionghoa Indonesia, suatu sudut yang terkadang diabaikan atau bahkan dalam beberapa hal malah dihapuskan[5] sehingga membuat kita tidak mampu melihat atau memahami permasalahan secara utuh.

Dari tulisan Suryadinata ini, kami akan membahas tiga permasalahan yakni 1) Konsep kebangsaan yang sempit, 2) Tionghoa, orang asing yang kaya dan 3) Tionghoa yang apolitik. Kami juga mencoba memberikan refleksi kritis terhadap permasalahan tersebut, serta menunjukkan bahwa arah nasionalisme tampak semakin membaik walau tetap terbuka kemungkinan akan mundur jika tidak diperjuangkan terus menerus oleh setiap generasi.

Masalah Pertama: Konsep Kebangsaan yang Sempit

Mungkin mengherankan bagi mereka yang tidak mempelajari sejarah dari sudut pandang liyan, untuk menyadari apa yang dinyatakan Leo Suryadinata, bahwa kata "bangsa" ternyata juga mempunyai konotasi rasial[6]. Demikian juga kita akan sulit memahami pidato Bung Karno 1 Juni 1945 yang menyebutkan, "Maaf, Tuan Liem Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan Fuku-Kaichō, Tuan menjawab: 'Saya tidak mau akan kebangsaan'"[7] yang dijawab oleh Liem Koen Hian, "Bukan begitu. Ada sambungannya lagi." Menurut saya, Liem Koen Hian bukan menolak kebangsaan Indonesia yang utuh

---

[4] *Ibid.* h. xiii.

[5] Lihat Didi Kwartanada. "Diingat Sekaligus Dihapuskan, 'Cina' Dalam Memori Kolektif dan Historiografi Orde Baru" dalam *Prisma*. Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi. Volume 39, no2 (2020), h. 422-454, yang menunjukkan bagaimana peran politik Tionghoa dihapuskan dalam narasi sejarah resmi.

[6] Suryadinata (2010). h. 129

[7] Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dalam R.M. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009. h. 159 (dengan sedikit penyesuaian ejaan, editor).

seperti yang kita pahami saat ini, tetapi konsepsi kebangsaan yang berkonotasi rasis pada masa itu. Jika mengerti konteks sejarah yang diberikan Suryadinata, maka kita memahami bahwa kebangsaan memiliki makna yang berbeda sebelumnya, yakni sempit dan hanya menyangkut dan mengakui bumiputera/pribumi/*Inlanders* saja atau bahkan bumiputera yang beragama Islam saja.[8]

Sebagai contoh dalam Anggaran Dasar PNI pada pasal 4 yang menyatakan anggota partai adalah orang-orang bangsa Indonesia[9], namun orang-orang bangsa Asia yang lain dapat menjadi anggota luar biasa[10]. Jadi, kelompok peranakan, baik itu Tionghoa, Arab, India, ataupun Indo Eropa, tidak termasuk orang-orang bangsa Indonesia saat itu. Suryadinata pun menunjukkan bagaimana gigihnya seorang Kwee Tjing Hong yang mengambil inisiatif membentuk cabang PNI di Palembang, juga mencoba membentuk cabang lain di Bangka, kemudian ditangkap oleh Belanda bersama pemimpin PNI lainnya, namun sungguh pun ia sudah berjuang sepenuh hati bagi PNI, karena statusnya adalah nonpribumi, ia harus kecewa dan keluar dari partai karena hanya dianggap anggota luar biasa saja menurut aturan Anggaran Dasar tersebut[11].

Demikian juga Suryadinata menunjukkan dalam kongres Partai Indonesia Raya (Parindra, 1938), Husni Thamrin menyatakan pandangannya agar partainya untuk sementara waktu tidak membuka keanggotaannya kepada golongan peranakan manapun. Pendapat ini pun diterima oleh kongres. Walau Thamrin menyadari keberadaan Partai Tionghoa Indonesia dari Liem Koen Hian yang berorientasi ke Indonesia dan menganggap Indonesia sebagai tanah air mereka, keberatannya terhadap Tionghoa adalah karena mereka masih mempertahankan pendidikan dan adat istiadat Tionghoa[12]. Pembaca masa kini yang kritis tentu akan bertanya, kalau demikian mengapa pendidikan adat istiadat

---

[8] Bambang Purwanto. *Praktik Kewarganegaraan di Indonesia, Dalam Perspektif Histiografis.* Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2019. h. 33.
[9] Suryadinata (2010). h. 129
[10] *Ibid.* h. 129.
[11] *Ibid.* h. 130.
[12] *Ibid.* h. 140.

non-Tionghoa lainnya diterima? Dalam hal ini, Thamrin menginginkan golongan peranakan melebur pada kebudayaan Indonesia pribumi[13], persis seperti konsep asimilasi yang dijalankan pada zaman Orde Baru, walau asimilasi itu hanya untuk Tionghoa, tidak untuk Arab, India atau lainnya. Kata pribumi merujuk pada apa yang diwariskan dan dipisahkan oleh Belanda, yakni *Inlanders* yang dibedakan dari Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen)*. Thamrin juga mencatat untuk Partai Arab Indonesia, karena beragama Islam akan lebih mudah berasimilasi ke dalam masyarakat Pribumi[14]. Di kemudian hari, setelah Orde Baru berkuasa, walau Junus Jahja (Lauw Chuan Tho) menyatakan, "jangan masuk Islam hanya karena untuk asimilasi" namun badan BAKOM PKB berharap bahwa persamaan agama akan mempermudah pembauran[15]. Bagaimana pun, menurut saya tataran cara berpikir kebangsaan ini masih sama dengan yang sudah dinyatakan Thamrin.

Berita baiknya, kita melihat lahirnya partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo, 1937) yang membuka keanggotaannya bagi kelompok peranakan. Tokoh partai ini Amir Sjarifoeddin menyatakan kebangsaan yang tidak ditentukan oleh darah atau warna kulit atau bentuk muka tetapi oleh tiga faktor: tujuan, nasib dan keinginan[16]. Namun, ketika partai-partai kemudian melebur dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Suryadinata mencatat, kembali Partai Tionghoa Indonesia (PTI) dan Partai Arab Indonesia (PAI) hanya mendapat tawaran sebagai anggota luar biasa saja. Di sini kita lihat perbedaan sikap antara PTI dengan PAI. Tawaran ini diterima PAI, tapi ditolak PTI dengan mengatakan, "PTI bersedia memikul tanggung jawab dan akibat-akibat sebagai anggota penuh GAPI, tetapi PTI tidak mau menjadi anggota luar biasa… sebab PTI tidak ingin menjadi anak tiri dari seorang ibu Indonesia."[17]

---

[13] *Ibid.* h. 141.
[14] *Ibid.* h. 140.
[15] Junus Jahja (1984). "Islamisasi, Asimilasi" dikutip dari *Tempo, 14 Juli 1979*, dalam buku Junus Jahja (ed.), *Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa.* Jakarta: Yayasan Ukhuwah Islamiyah (1984). h. 21.
[16] Suryadinata (2010) h. 142
[17] *Ibid.* h. 143.

Oleh karena pengertian istilah "bangsa" yang berkonotasi rasial ini, Liem Koen Hian lebih memilih istilah "*Indonesiër*" berdasarkan gagasan *Indische Partij* dibandingkan istilah "bangsa" Indonesia yang mengeluarkan kelompok peranakan dari keluarga bangsa Indonesia[18]. Sementara itu, dengan kepekaannya, Sanusi Pane lebih menggunakan istilah orang Indonesia daripada bangsa Indonesia[19]. Ketika membela Liem, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo menggunakan kata "*Indonesiër*" dengan menyatakan, "Liem Koen Hian adalah seorang *Indonesiër*, dengan atau tanpa pici"[20].

Walau demikian, Suryadinata pun kembali berhasil menunjukkan informasi lain yang menarik, bahwa seorang Sutan Sjahrir ternyata mengartikan *Indonesiër* hanya kepada orang Indonesia pribumi saja[21]. Artinya, jika Liem memilih menggunakan istilah *Indonesiër* dibandingkan istilah "kebangsaan" yang berkonotasi rasis itu, ternyata masalah tidak juga selesai kalau pengertian *Indonesiër* kemudian dipersempit dengan konotasi rasis pula. Demikian juga, sebenarnya usaha di masa pascaorde-baru yang menggantikan kata 'Cina' menjadi 'Tionghoa', suatu usaha untuk menghindari konotasi rasis seperti yang dilakukan Liem Koen Hian dengan "kebangsaan", sebenarnya dapat bernasib sama dengan "Indonesiër" Liem yang dimaknai Sutan Sjahrir dengan makna hanya untuk pribumi. Dalam penggunaan bahasa, kata "Tionghoa" bisa saja dimaknai dengan rasis pada suatu masa, sama seperti kata "nasional" yang bermakna rasis dalam "nasionalisasi ekonomi", yang dimaknai "pribumisasi ekonomi".

Dalam sidang *Dokuritsu Junbi Chōsakai* atau BPUPK tanggal 16 Juli 1945 diajukan usul, "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" dan tiga orang wakil Tionghoa di BPUPK dicatat tidak setuju atas pasal rasis ini[22]. Saya menginterpretasi ketiga orang yang tidak setuju dengan pasal tersebut adalah Oei Tjong

---

[18] *Ibid*. h. 132
[19] *Ibid.* 134
[20] *Ibid.* 138
[21] *Ibid.* 133.
[22] A.B. Kusuma (2009). h. 429 dan Daradjadi & Osa Kurniawan Ilham. *Pejambon 1945. Konsensus Agung Para Peletak Fondasi Bangsa*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2020. h.122 tidak menyebutkan siapa ketiga orang Tionghoa tersebut.

Hauw, Oey Tiang Tjoei dan Mr. Tan Eng Hoa karena Liem Koen Hian sudah mengetahui satu hari sebelumnya, yakni 15 Juli 1945 bahwa rumusan pasal warga negara --yang akan mengakibatkan dirinya sebagai peranakan, tidak otomatis diakui sebagai warga negara Indonesia-- akan diputuskan hari berikutnya. Maka ia pun siap mengajukan surat pengunduran diri dari BPUPK tertanda tanggal 16 Juli 1945.

Kelak, kita ketahui bahwa Pasal 6, "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam" mengalami perubahan menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli" dengan dihilangkannya kata-kata "yang beragama Islam". Hal ini terjadi ketika dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) para anggota dari wilayah Indonesia Timur bersama para anggota Sumatera berunding lagi dengan para anggota dari Jawa, ketika harus memutuskan Undang Undang Dasar.

Sungguh pun, rumusan pasal ini lebih setara dalam hal pemilihan Presiden serta berhasil melepaskan hak istimewa pada agama Islam sebagai satu-satunya yang boleh menjadi presiden, tetapi rumusan ini di mata hukum masih belum bisa menghilangkan hak istimewa "pribumi" atau "Indonesia asli" dari kalangan warga negara dalam hal menjadi presiden.[23]

Tafsiran selama ini bahwa dicantumkan "Presiden ialah orang Indonesia asli" bertujuan untuk mencegah orang Jepang menjadi presiden, tampaknya lemah. Demikian juga, Bambang Purwanto menunjukkan, tafsiran Bagir Manan bahwa "orang Indonesia asli" tidak berkonotasi diskriminatif, atau hanya sekadar warga negara karena kelahiran, juga sudah ditolak sebelumnya oleh Soepomo yang secara tegas menyatakan pasal ini merupakan bentuk diskriminasi rasial. Dalam Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, Soepomo menggantinya dengan pasal "Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia", dan tidak diharuskan warga-negara golongan asli.[24]

---

[23] Purwanto (2019) h. 35, menunjukkan bagaimana sebelumnya "Bumiputera kolonial" (bumiputera yang tidak beragama Islam), tidak diakui kebumiputeraannya, dibandingkan "Bumiputera asli" yang beragama Islam.

[24] Lihat Purwanto (2019). h. 2-3. dan juga Prof. Dr. R. Soepomo, *Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia*. Penerbit Noordhoff-Kolff N.V., 1950. h. 50

Syukurlah sejak reformasi sudah dilakukan banyak koreksi terhadap konsepsi rasis tadi bahkan secara aspek hukum juga diperkuat: istilah "pribumi" dan "nonpribumi" tidak lagi dipergunakan[25], diterimanya peranakan Tionghoa melaksanakan adat istiadatnya serta agama dan kepercayaannya[26], juga merayakan Imlek[27], serta menggantikan penggunaan istilah Cina kembali pada Tionghoa[28].

Butuh waktu puluhan tahun menuju Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002, yang mencoba memberikan keadilan dan kesetaraan warga negara dengan membuka kemungkinan kelompok peranakan --termasuk peranakan Arab-- menjadi seorang Presiden atau wakil Presiden, secara hukum dan dasar negara, dengan pasal "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden." Dengan demikian, kelompok Tionghoa dan peranakan lainnya di Indonesia memperoleh kesempatan yang sama di mata hukum, walau secara kenyataan, mayoritas suku Jawa dan Islam cenderung memilih berdasarkan kesukuan dan agamanya. Namun, jauh sebelum kemerdekaan, Suryadinata mencatat selalu ada kelompok kecil yang mengusahakan keadilan dan kesetaraan tersebut, "Bagaimana pun juga sejumlah kecil kaum nasionalis sekuler Indonesia, yang mendapat pengaruh kuat Marxisme, mulai mengembangkan suatu konsepsi mengenai nasion Indonesia yang tidak berdasarkan ras sejak pertengahan tahun 1930-an." [29]

Tokoh seperti Sanoesi Pane juga menyatakan konsepsi ras tidak bisa dipertahankan sebab tidak ada ras yang murni.[30]

---

[25] Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan

[26] Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina

[27] Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek

[28] Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967

[29] Suryadinata (2010). h. 133.

[30] *Idem*.

Tentu, Pramoedya Ananta Toer juga sudah menulis, "*... berdasarkan keterangan para antropolog di atas, aku bertanya kepada kaum rasialis Indonesia dengan dalih-dalihnya, dapatkah mereka membuktikan bahwa dirinya seorang yang 100%* ras-echt*? Artinya, bahwa mereka 100% darahnya belum tercampur dengan darah bangsa atau ras lain?*"[31] Dengan gamblang, Pramoedya menyatakan, Indonesia adalah bangsa pendatang dan bukan asli.[32] Kita ketahui kemudian, melalui Proyek DNA yang dilakukan Historia.ID, terbukti tidak ada yang disebut Indonesia asli tersebut.

Namun, Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 setidaknya sudah mengkoreksi kesalahan konsepsi tersebut melalui perbaikan Pasal 6, walau masih menyisakan pasal 26 UUD 1945 yang masih menggunakan istilah "Indonesia Asli" di samping "orang-orang bangsa lain", sisa warisan kolonialisme yang belum bisa kita hilangkan. Selain itu, interpretasi hukum bahwa agama resmi/ diakui di Indonesia pada lima agama di masa Orde Baru, yang kemudian diperbaiki dengan diakui kembali agama Khonghucu pada masa reformasi, sesungguhnya masih masih menyisakan ketidaksetaraan pada kepercayaan ataupun agama-agama lain di luar enam agama ini yang ada di Indonesia. Hal ini bukan saja bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29, tetapi juga kesetaraan di dalam hukum yang tercantum dalam pasal 27 UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Tanpa sadar, kita seperti menciptakan kembali keistimewaan enam agama di ruang publik Indonesia di atas agama-agama lainnya yang ada di Indonesia.

Bagaimana pun, hukum yang tersurat perlu diimbangi kedewasaan pemahaman konsep kebangsaan yang berkeadilan dalam masyarakat melalui pendidikan terus menerus. Jika negara seperti Amerika Serikat pun perlu waktu lama untuk

[31] Pramoedya (1998). h. 53.
[32] *Ibid.* h. 59

dapat memilih presiden yang bukan dari ras kulit putih atau yang tidak beragama Kristen Protestan --walau hukumnya sudah menyatakan kesetaraannya di mata hukum-- tetapi tanpa pengembangan kedewasaan masyarakatnya terus menerus, tidak mustahil generasi berikutnya kembali menjadi rasis.

Sebagaimana kesetaraan warga negara pernah diperjuangkan sekelompok kecil pemuda pada masa lalu, maka akan selalu ada harapan dari kelompok mayoritas Jawa-Islam yang dewasa dan tercerahkan, yang akan berkontribusi besar dalam keadilan dan kesetaraan di Indonesia di masa sekarang dan mendatang. Perjuangan keadilan bagi mereka yang beragama lain atau beretnis lain sebagai sesama warga negara Indonesia ini sangat dimungkinkan. Pertama-tama, karena adanya klaim di hampir semua agama terhadap nilai-nilai moral universal, yang dapat diterapkan untuk seluruh umat manusia. Kedua, karena teori perkembangan moral (*Lawrence Kohlberg*) ataupun teori perkembangan iman (*James Fowler*) menunjukkan adanya tokoh yang mencapai tahap perkembangan tertinggi yang tidak dibatasi pada etnis atau agama/ kepercayaan tertentu saja. Setidaknya kita melihat seorang Muslim Jawa, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang memperjuangkan kemanusiaan universal, dengan kesetaraan warga negara Indonesia lintas golongan, etnis, agama bagi semua. Keteladanan Gus Dur, Y.B. Mangunwijaya dan tokoh agama lainnya yang mampu berpikir dan bertindak demi keadilan lintas golongan selalu memberikan harapan besar bagi pembentukan nasionalisme Indonesia yang berkesetaraan, dan upaya progresif ini justru datang dari kelompok mayoritas, yang rela memperjuangkan kepentingan kelompok minoritas lainnya.

Masalah Kedua: Tionghoa, Orang Asing yang Kaya

Suryadinata menunjukkan bagaimana kerusuhan pada tahun 1912 di Surakarta dan Surabaya, dan kerusuhan 1918 di Kudus terhadap etnis Tionghoa, merupakan pertentangan kepentingan antara pengusaha Tionghoa setempat dengan para pedagang pribumi[33]. Dalam hal ini, Suryadinata mengutip pernyataan Semaoen, pemimpin sayap kiri Serikat Islam, "Perbedaan antara

[33] Suryadinata (2010). h. 128.

miskinnya bumiputera dan kayanya lain bangsa yang nyolok mata itu sudah timbulkan kebencian antara bumiputera dengan si kaya, yang banyak juga bangsa Tionghoa. Bangsa bumiputera yang miskin kebenciannya kepada bangsanya sendiri yang kaya bisa hilang, sebab sama bangsa dan sama agama… tetapi kebencian antara miskin bumiputra dan kaya Tionghoa hampir tidak ada timbangannya."[34]

Tentu pandangan Semaoen bahwa "Tionghoa = Kaya" yang masih dianut banyak pihak hingga saat ini, berasal dari cara pandang yang menurut Bambang Purwanto masih bersifat Jawasentris dan hanya melihat aspek perkotaan.

Padahal, lanjut Purwanto, jika melihat pusat-pusat-pusat industri pertambangan dan perkebunan seperti di Kalimantan, Sumatera Timur, Bangka dan Belitung, kita akan juga mendapati komunitas buruh dan petani miskin Tionghoa.[35]

Dari sejarah yang ditulis Suryadinata, penggambaran Tionghoa yang pada zaman sebelum kemerdekaan dilabeli sebagai "tukang riba dan pedagang"[36] dan yang tidak berubah setelahnya, tidak boleh dianggap remeh. Ketika Tionghoa dianggap sebagai binatang ekonomi kaya yang serakah, maka kita disadarkan akan stereotip semacam ini yang kemudian menjadi pembenaran atas pelbagai kerusuhan, penjarahan, pemerkosaan atau pembunuhan terhadap etnis Tionghoa, tanpa mau menyadari bahwa sebelum Belanda hadir di Indonesia hubungan Tionghoa dengan Pribumi tidak pernah menjadi masalah. Pramoedya menunjuk bahwa adalah kebijakan *Wijkenstelsel* (sistem zonasi tempat tinggal), yang menyebabkan mengapa orang-orang Tionghoa menjadi pedagang. Padahal sebelumnya, seperti rakyat Indonesia lainnya, mereka banyak juga yang bertani, memburuh dan bertukang bersama-sama penduduk pribumi.[37] Bagi Pramoedya, aturan *wijkenstelsel* membuat para Tionghoa tidak mungkin jadi petani ataupun pegawai negeri, dan hanya dapat bergerak di lapangan usaha yang terkait uang.[38] Saya kira tidak berlebihan jika dinyatakan,

---

[34] *Ibid.* h. 129.
[35] Purwanto (2019). h. 58.
[36] Suryadinata (2010). h. 127
[37] Pramoedya (1998) h. 72
[38] *Ibid.* h. 73

Orde Baru melakukan hal yang persis sama dengan pemerintah Hindia Belanda, dengan mendorong Tionghoa hanya pada kegiatan bisnis semata dan membatasi gerak mereka di bidang lainnya.

Sejarah Indonesia sudah menunjukkan betapa rentannya dan mudahnya kelompok Tionghoa ini dijadikan korban dalam kerusuhan melalui stereotip itu. Seperti juga stereotip kepada orang Yahudi di Jerman --yang dianggap membunuh bisnis orang Jerman asli, sehingga kemudian memuluskan kejahatan kemanusiaan dan genosida-- maka para pemimpin publik yang sengaja menggunakan stereotip seperti ini pada Tionghoa, sedang mengobarkan api kebencian yang akan berujung pada kekerasan terhadap kelompok ini.

Dari sudut kewarganegaraan yang setara, hukuman hendaknya hanya dikenakan bagi orang yang bersalah, lepas dari embel-embel agama ataupun suku bangsanya, juga tentu dalam pemberitaan di media massa. Demikian juga untuk masyarakat miskin yang perlu ditolong, maka ia harus ditolong, lepas dari apa pun suku atau agamanya, termasuk Tionghoa Indonesia yang miskin, sementara siapa pun *entrepreneur* atau pebisnis yang kuat dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya, ia harus dilihat sebagai elemen kekuatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, yang kuat jangan dipangkas karena ia bagian integral dari kekuatan bangsa. Di pihak lain, mereka yang lemah perlu ditolong dan diperkuat.

Jalan pintas merebut supremasi ekonomi dari "asing" --termasuk juga golongan Tionghoa-- dicatat sudah beberapa kali dilakukan. Program Gerakan Benteng (1950-1953) yang mengistimewakan importir pribumi, ternyata hanya melahirkan pengusaha palsu, yakni mereka yang menjual izin impor kepada pengusaha sesungguhnya (baca: Tionghoa), sehingga melahirkan kekacauan dalam perekonomian. Pramoedya juga mencatat, akibat PP 10/ 1959 dalam rangka ekonomi terpimpin dengan mengakhiri atau menghentikan segenap usaha asing di berbagai daerah mengakibatkan lebih dari setengah juta orang Tionghoa terkena dampaknya.[39] Akibat tindakan tersebut

[39] Pramoedya (1998). h. 68.

bukan saja melukai perikemanusiaan yang universal tetapi juga berdampak bagi keseluruhan perekonomian. Pramoedya pun mencatat, "*Dengan bekunya modal golongan Tionghoa, bukanlah berarti celana-dalam rakyat akan tambah selembar, atau kemampuan-belinya akan menjadi naik. Bekunya modal menyebabkan masyarakat yang miskin menjadi lebih miskin*." [40]

Seorang *entrepreneur* Tionghoa, Ir. Ciputra menawarkan sebuah jalan, yakni "jalan tidak pintas" tetapi dalam kerangka berkeadilan dan mengembangkan kapabilitas seseorang. Di Medan (2008) ia menyatakan pentingnya pendidikan *entrepreneurship* diselenggarakan ke seluruh anak bangsa, "Saya memimpikan 25 tahun lagi akan lahir 4 juta *entepreneur* baru di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pesisir sampai pegunungan, dan dari desa sampai kota-kota besar. Anak petani, anak nelayan, anak guru, anak buruh, anak pegawai negeri, anak polisi, anak tentara menjadi *entrepreneur*."[41] Baginya, belajar dari jejak hidupnya yang lahir dari keluarga miskin, dengan ayah yang ditangkap dan dibunuh oleh tentara Jepang ketika ia masih kecil, ia yakin *entrepreneurship* adalah kunci menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera melalui kerja keras dan inovasi. Daripada iri kepada mereka yang kaya, mengapa tidak berusaha mengembangkan lebih banyak *entrepreneur* lintas etnis di Indonesia? Mitos bahwa hanya Tionghoa yang bisa menjadi *entrepreneur* atau sukses dalam ekonomi, harus ditepis melalui pendidikan dan ketekunan berusaha, sama seperti juga perlu menepis mitos Tionghoa hanya bisa berdagang, yang sudah ditunjukkan dalam sejarah, tidaklah demikian.

Masalah Ketiga: Tionghoa yang Apolitis

Dari tulisan Suryadinata juga terungkap bahwa hampir tidak ada partai kebangsaan yang mau menerima Tionghoa Peranakan pada masa sebelum kemerdekaan itu. Bagi Boedi Oetomo, Tionghoa tidak mungkin terlibat karena organisasi berdasarkan kesukuan yakni Jawa dan Madura. Sarekat Islam

[40] *Ibid.* h. 57
[41] Lihat https://ekonomi.bisnis.com/read/20200108/12/1188209/mimpi-ciputra-untuk-2033-4-juta-entrepreneur-baru-lahir-di-indonesia- (diakses 6 Desember 2021)

(SI), tentu tidak mampu menarik banyak Tionghoa karena sedikit orang Tionghoa yang beragama Islam saat itu.[42] *Indische Partij* merupakan partai terbuka pertama tetapi umurnya sangat pendek karena segera dibubarkan penguasa dan para pendirinya diasingkan oleh Belanda tahun 1913. Jejak IP diikuti *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV) --yang menjadi Partai Komunis Indonesia (1920)-- yang juga membuka diri kepada Tionghoa. Namun riwayat partai komunis pertama Asia ini berakhir seiring dengan berhasil dipadamkannya pemberontakan PKI tahun 1926. Tercatat adanya 8 orang Tionghoa di antara 823 aktivis partai yang dibuang ke Boven Digoel.[43] Dengan demikian memasuki akhir dekade 1920-an, tidak ada partai politik yang menerima Tionghoa.

Setelah itu kita melihat bagaimana --di tengah partai nasionalis yang hanya menerima kelompok peranakan sebagai anggota luar biasa saja seperti PNI atau Parindra-- muncullah Liem Koen Hian yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) untuk mengisi kekosongan ini, yang diikuti AR Baswedan yang mendirikan Persatuan (kemudian Partai, 1937) Arab Indonesia (PAI, 1934). Walaupun terlambat, di akhir dekade 1930-an berdirilah satu partai kecil, yakni Gerakan Indonesia (Gerindo). Dalam kongresnya di Palembang (1939), tokoh Gerindo Amir Sjarifoeddin mengumumkan bahwa partainya akan membuka diri bagi golongan peranakan. Kebijakan ini segera membuat Liem Koen Hian meninggalkan partai yang didirikannya dan masuk Gerindro.[44]

Ketika menghadapi bayang-bayang serbuan Jepang, partai-partai membentuk satu kekuatan politik bernama GAPI, namun PTI dan PAI hanya mendapatkan tawaran sebagai anggota luar biasa saja. Seperti sudah disebut di atas, tawaran ini diterima oleh PAI,[45] tetapi ditolak oleh PTI. Apakah ini cerminan ketidakluwesan PTI, yang tidak menerima kalau diperlakukan sebagai "anak tiri"? Sikap Liem Koen Hian yang kemudian juga memilih keluar dari BPUPK ketika usulannya soal kewarganegaraan ditolak, apakah merupakan suatu

[42] Suryadinata (2010) h. 125.
[43] *Ibid.* h. 126.
[44] *Ibid.* h. 142.
[45] *Ibid.* h. 143.

kesalahan? Lebih ironis lagi, ketika akhirnya Liem Koen Hian yang sudah mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya, akhirnya melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang sudah diperjuangkannya (1951). Ia kehilangan kesabarannya setelah dituduh China komunis dan dimasukkan penjara oleh pemerintah Indonesia tanpa pengadilan dan alasan yang jelas. Taomo Zhou mencatat bagaimana Liem berbicara kepada media tentang sikap putus asanya terhadap pemerintah Indonesia, dengan menyatakan buat apa jadi warga negara Indonesia kalau masih saja bisa "disembelih".[46] Apakah Liem tidak cukup sabar untuk itu? Namun dapat dikatakan, apa yang diperjuangkan Liem bagi kewarganegaraan yang berkesetaraan merupakan sumbangsih penting, walau ia menjadi --istilah Bambang Purwanto-- "korban pertama". Indonesia tetap membutuhkan orang-orang Tionghoa yang kembali berjuang, walau beberapa kali ditolak.

Sungguh pun demikian, Suryadinata juga mampu menunjukkan, walaupun ada keterbukaan dari segelintir partai, Tionghoa Indonesia tidak banyak yang bergabung dengan partai tersebut. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, yakni: 1) nasionalisme Tionghoa sudah muncul lebih dulu sebelum munculnya proto-nasionalisme Indonesia, dengan berdirinya Tiong Hoa Hwee Kuan (1900) di Batavia.[47] Nasionalisme semacam ini tentu menghalangi integrasi Peranakan Tionghoa ke dalam pergerakan nasional Indonesia, ditambah lagi untuk golongan totok yang memiliki kendala bahasa. 2) Perbedaan ideologi. Organisasi seperti ISDV dan PKI, dianggap sosialis yang radikal bagi sementara orang peranakan Tionghoa yang bergerak dalam perdagangan dan pengrajin[48], sementara partai lainnya tidak menerimanya dengan baik. 3) Namun mayoritas Tionghoa bersikap apolitis, yang berdampak di masa revolusi kemerdekaan. Seperti yang dikemukakan Liem Koen Hian dalam sidang BPUPK (1945),

---

[46] Terima kasih kepada Didi Kwartanada yang telah menunjukkan kutipan di atas dari buku Taomo Zhou (2019), *Revolusi, Diplomasi, Diaspora. Indonesia, Tiongkok dan Etnik Tionghoa, 1945-1967*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. h. 131.

[47] *Ibid.* h. 123-124.

[48] *Ibid.* h. 126

"Kebanyakan dari kita orang tidak pernah memikir urusan politik, tidak berani memikir urusan politik. Dan jika pada hari ini disuruh memilih, diminta memilih, maukah atau tidak menjadi orang Indonesia, dia orang telah bingung semua. Oleh karena adanya pedoman ini, maka pemuka-pemuka dari bangsa Tionghoa di Malang dan di Surabaya telah meminta kepada saya sampaikan kepada Badan Penyelidik, supaya diwaktu mengadakan hukum dasar Indonesia, biar ditetapkan saja, semua orang Tionghoa menjadi warga negara Indonesia…"[49]

Jika dipikirkan sekarang ini, maka fenomena keberadaan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) setelah berakhirnya Orde Baru adalah mirip dengan keadaan yang dinyatakan Liem Koen Hian, bahwa sebagian besar Tionghoa (pada masa itu) adalah apolitis. Kita kembali melihat harapan, walau Ahok kemudian dipenjarakan karena kiprah politiknya, namun tragedi ini tidak mematahkan semangat orang Tionghoa untuk terjun ke politik, seperti yang dilakukan Grace Natalie, misalnya. Sebuah ungkapan populer berkata demikian,

> *"Buta huruf terburuk adalah buta huruf politik, ia tidak dapat mendengar, berbicara atau berpartisipasi dalam kejadian-kejadian politik. Ia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang atau ikan atau tepung, atau sewa rumah atau sepatu atau pengobatan, semua tergantung pada keputusan politik. Buta huruf politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusung dada sambil berkata saya membenci politik. Si dungu tidak tahu karena ketidakpeduliannya pada politik, lahirlah prostitusi, anak-anak terlantar, maling-maling terburuk, politikus jahat serta perusahaan nasional dan multinasional yang korup dan gagal."[50]*

Dengan demikian, alangkah sayangnya jika Tionghoa Indonesia -- karena ketidakpedulian atau ketakutannya berpolitik-- justru melepaskan peluang berkontribusi dalam membentuk nasionalisme yang berkesetaraan. Sebagian besar

---

[49] A.B. Kusuma (2009). h, 270.

[50] Kutipan ini sering dianggap tulisan penulis drama Jerman bernama Bertolt Brecht (1898-1956) tetapi tidak ada bukti bahwa itu tulisannya. Namun, kutipan di atas cukup populer untuk menunjukkan dampak dari ketidakpedulian pada politik. Lihat juga https://whereofonecanspeak.com/tag/political-illiteracy/

Tionghoa mungkin akan menyatakan, dalam sejarah Tionghoa Indonesia justru mereka yang ikut berpolitik dihabisi dan menjadi sasaran empuk, sama seperti kasus para pemimpin Baperki atau Ahok yang ikut berpolitik. Namun, dari sejarah kita akan juga belajar bahwa ketika Tionghoa yang tidak berperan serta dalam politik --dengan berakibat munculnya pelbagai kerusuhan dan kebijakan yang diskriminatif-- sebetulnya risikonya sama besar, bahkan mungkin lebih besar. Yang jelas, jika orang Tionghoa terlibat dan berperan serta, selain risiko yang pasti bakal ditemui, juga terbuka peluang untuk ikut menghilangkan diskriminasi yang masih ada, tentunya bersama kelompok lain yang tercerahkan.

Dengan terlibat aktif di dalam politik, maka Tionghoa Indonesia ikut menentukan arah bangsa ini bersama-sama komponen bangsa lainnya, bukan hanya menjadi korban yang pasif. Jika kegigihan dalam berusaha di bidang ekonomi bisa dilakukan, mengapa tidak gigih untuk politik dan bernegara? Kontribusi Tionghoa justru semakin diharapkan, bersama-sama dengan kelompok lainnya, ikut membentuk nasionalisme Indonesia yang berkesetaraan. Dengan sejarah kelamnya di masa lalu, justru Tionghoa Indonesia diharapkan memiliki empati yang kuat untuk ikut memperjuangkan nasib minoritas-minoritas lainnya di Indonesia untuk meraih keadilan dan kesejahteraan bersama.

Penutup

Kontribusi dari tulisan Leo Suryadinata dan juga Bambang Purwanto menunjukkan pada kita bagaimana nasionalisme masa lalu kita bersifat sempit, kerdil, tidak setara karena menempatkan pribumi/ bumiputera atau istilah pejoratifnya *inlanders,* di posisi yang lebih tinggi dari elemen masyarakat lainnya. Bahkan di periode awal republik ini, hukum telah menempatkan pribumi Islam pada kedudukan lebih tinggi dari warga negara Indonesia lainnya.[51] Adalah benar apa

[51] Terima kasih untuk Didi Kwartanada yang sudah menunjukkan buku Purwanto (2019) dan membagikan link video Prof. Dr. Bambang Purwanto, dalam "Seminar Sejarah untuk Kebhinekaan dan Ke-Indonesiaan: Refleksi 60 Tahun Seminar Sejarah Indonesia, 1957-2017", pada tanggal 14-16 Desember 2017, dengan judul "Sindrom Pascakolonial dan Kenikmatan Kolonial dalam Histiografi Kewarganegaraan yang Tercabut dari Akarnya", dapat dilihat di https://www.youtube.com/watch?v=kIbZHqXOtfk

yang dinyatakan oleh Purwanto, walau sudah merdeka, ternyata kita masih mengidap sindrom kolonial, tetapi sulit melepaskannya karena juga menikmatinya[52]. Namun, di sisi lain, baik Suryadinata maupun Purwanto juga menunjukkan pada kita bagaimana fragmen sejarah ini tidak perlu ditutupi, diabaikan atau malah dimanipulasi, tetapi justru dengan jiwa besar mesti diakui dan diperbaiki. Walau masalah nasionalisme Indonesia tidak pernah selesai, dengan melihat pembahasan ini secara keseluruhan, kita dapat melihat arah dan peluang bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Untuk itulah nasionalisme yang berkesetaraan dan sejahtera perlu dan harus terus diperjuangkan oleh generasi berikutnya (*)

[52] *Idem.*

Pentingnya Peranan Orang Tionghoa dalam Administrasi Publik Indonesia

Michael Andrew

Pengantar

Salah satu yang menarik ketika membaca ulang buku Profesor Leo Suryadinata yang berjudul "Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia" terbitan LP3ES tahun 2002 tampak sekali bahwa Prof. Leo (demikian panggilan akrab beliau) memaparkan bagaimana negara Republik Indonesia memperlakukan (baik secara politik dan sosial) orang-orang Tionghoa-Indonesia dalam kebijakan-kebijakan administrasi yang ada. Bahkan sebelum negara Republik Indonesia ini lahir dan berkembang sampai sekarang, Prof. Leo memaparkan juga bagaimana orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara Asia Tenggara lain seperti di Malaysia dan Singapura ketika mereka diatur secara administratif oleh pemerintah kolonial baik Belanda, Jepang, maupun Inggris. Peraturan-peraturan administratif yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap orang-orang Tionghoa-Indonesia tersebut juga tidak sepenuhnya "ditarik", bahkan ada yang "disesuaikan" dengan kondisi zaman yang ada, tergantung motif dan keinginan dari penguasa politik negeri ini.

Sebagian besar tentu orang Tionghoa-Indonesia, secara khusus yang lahir di era Orde Lama maupun Orde Baru pasti mengalami perubahan-perubahan kebijakan yang ada. Misalnya saja ada kebijakan yang mewajibkan bagi seluruh orang Tionghoa-Indonesia untuk mengganti nama Tionghoa (Mandarin) menjadi nama Indonesia yang juga diatur dalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Belum lagi dengan adanya kebijakan-kebijakan seperti tidak

boleh menggunakan bahasa Tionghoa (Mandarin) dalam kehidupan sehari-hari, merayakan Imlek, dan juga sembahyang-sembahyang atau doa-doa dalam tradisi Tionghoa. Belum lagi karena dianggap berbeda dengan ideologi Pancasila, maka sekolah-sekolah Tionghoa pada era tahun 1966-an mengalami penutupan karena dianggap berhaluan "kiri" atau "komunis" seperti laiknya Republik Rakyat China (RRC) yang menganut komunisme. Pun, jikalau pada awal kemerdekaan Republik Indonesia banyak orang Tionghoa-Indonesia yang awalnya mungkin memilih tidak beragama karena berpegang pada ajaran etika Tionghoa, namun pada Orde Baru akhirnya "terpaksa" menjadi pemeluk agama Katolik Roma, Kristen Protestan, Tri Dharma, dan sebagian Islam. Seiring berjalannya waktu, muncullah tokoh-tokoh reformasi seperti K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri yang telah berjasa bagi orang-orang Tionghoa-Indonesia karena mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa-Indonesia tersebut. Bahkan di era kekinian, muncul berbagai tokoh politik Indonesia berdarah Tionghoa seperti Basuki Tjahaja Purnama (atau lebih dikenal dengan "Ahok" atau "BTP"), Ignasius Jonan, Grace Natalie, Aji Chen, Surya Tjandra, dan masih banyak lainnya.

Jika melihat kebijakan-kebijakan yang pernah dialami dan diterapkan bagi orang-orang Tionghoa di Indonesia ini memang sungguh menarik jika dilihat juga dari perspektif administrasi publik. Hal ini bukan karena administrasi publik adalah suatu ilmu yang begitu istimewa atau lebih tinggi dari ilmu-ilmu yang lain, namun segala urusan yang berkaitan dengan kebijakan, apalagi juga menyangkut publik, maka hal itu termasuk dalam "administrasi publik". Prof. Leo dalam buku "Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia" tersebut dengan baik dan gamblang menggambarkan bahwa dalam perkembangannya, kebijakan-kebijakan terhadap orang-orang Tionghoa-Indonesia tersebut meliputi kebijakan di bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, pendidikan, agama, dan masih banyak lainnya. Oleh karenanya penting agar orang-orang Tionghoa-Indonesia memahami dan sekaligus

merefleksikan kembali secara kritis kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan bagi orang-orang Tionghoa-Indonesia ini. Justru di era kekinian, diharapkan peranan orang-orang Tionghoa-Indonesia untuk aktif dalam melihat dan berperan dalam administrasi publik di Indonesia ini. Bukan semata-mata demi orang-orang Tionghoa-Indonesia saja, melainkan untuk negara Republik Indonesia sendiri yang semakin maju dan tidak diskriminatif.

Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik atau sebagian besar orang juga menyebutnya sebagai administrasi negara merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang muncul pada zaman post-modern. Oleh karena administrasi publik ini melibatkan "publik" atau "masyarakat" dalam sebuah "negara", maka administrasi publik tidak bisa lepas dari tiga unsur lembaga penting dalam trias politica yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kendati menggunakan istilah "administrasi" bukan berarti di sini "administrasi" dipahami sekedar "tata usaha" atau "pekerjaan kantoran" saja. Justru di sini istilah "administrasi" di sini meliputi merumuskan, menerapkan, mengelola, mengevaluasi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan, birokrasi, rencana pembangunan, anggaran, dan lain-lain yang sangat terkait dengan kehidupan banyak orang (publik itu sendiri). Oleh sebab itu, administrasi publik sangat penting untuk dapat dipahami dalam konteks bagaimana suatu negara hadir untuk menjalankan pemerintahan bagi negara dan masyarakatnya.

Salah satu penting adanya ilmu administrasi publik ini idealnya adalah agar setiap negara dapat mencapai "*good governance*" atau "pemerintahan yang baik". Ilmu ini memang diharapkan dapat mengawal cita-cita "*good governance*" dari tiap-tiap negara yang melibatkan seluruh perangkat pemerintahan beserta dengan birokrasinya. Adapun indikator-indikator yang dapat dinilai dari suatu "good governance" adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, ketepatan,

kecepatan dalam menangani sesuatu, dan masih banyak lainnya. Tentunya sekali lagi, untuk mencapai "*good governance*" ini membutuhkan banyak pihak dan sekaligus banyak hal yang harus terus dilakukan dan dievaluasi agar cita-cita bersama tersebut dicapai. Pihak-pihak yang setidaknya diminta terlibat adalah pemerintah (meliputi seluruh jajaran pemerintahan beserta dengan tenaga-tenaga aparatur sipil negaranya), perusahaan swasta dan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan non-pemerintah), dan juga peranan "publik" atau "masyarakat" itu sendiri. Jikalau ketiga pihak ini saling bekerja sama dengan sangat baik dan senantiasa solid, tentunya harapan agar negara Indonesia ini menjadi negara yang berbasis "*good governance*" dapat segera terwujud.

Namun, berbicara tentang administrasi publik di Indonesia memang tidak bisa lepas dari sistem politik yang berlaku. Hal ini tidak mengherankan apabila administrasi publik di berbagai universitas di Indonesia selalu berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL). Hal itu juga yang menjadi salah satu alasan kuat bahwa administrasi publik tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan politik dan sosial. Mekanisme yang berlaku adalah ketika ada masyarakat yang ingin berbuat sesuatu kepada publik dengan dampak yang besar tentunya harus mengikuti prosedur dan sistem perpolitikan yang berlaku di negara Indonesia ini. Misalnya, seseorang harus masuk partai tertentu lalu dapat mencalonkan diri sebagai salah satu anggota legislatif. Kemudian orang tersebut baru dapat menyuarakan kepentingan-kepentingan politik dan sosialnya apabila ia terpilih dengan jumlah suara rakyat tertentu pada pemilihan umum. Tak berhenti di situ, orang tersebut bisa saja bertemu dengan orang lain yang juga sama-sama duduk di kursi legislatif dengan latar belakang politik dan kepentingan yang berbeda pula. Di sinilah terkadang terjadi proses dinamika dalam berpolitik dan bersosial sebelum itu dapat diteruskan menjadi salah satu agenda maupun rencana pengimplementasian kebijakan publik.

Pentingnya Peranan Orang Tionghoa dalam Administrasi Publik Indonesia

Peranan orang Tionghoa dalam administrasi publik memang sangat penting, khususnya dalam masa-masa kontemporer ini. Hal ini bukan karena kondisi perpolitikan di Indonesia yang "mendukung" agar orang-orang Tionghoa melakukan hal tersebut, melainkan ada beberapa dua penting yang dapat menjadi landasan pemikiran ini, antara lain:

Pertama, orang-orang Tionghoa, secara khusus yang memang sudah menjadi seorang warga negara Indonesia (WNI) merupakan "warga negara" Indonesia sendiri yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum negara Republik Indonesia. Kendati memang orang-orang Tionghoa dalam sejarahnya mengalami banyak sekali kebijakan yang diskriminatif sehingga menganggap bahwa terlibat dalam administrasi publik adalah sesuatu yang "asing", maka justru sekarang inilah saat yang penting agar orang-orang Tionghoa untuk berperan, belajar, dan juga mengembangkan administrasi publik yang ada di Indonesia ini. Walaupun memang masih banyak tantangan yang dihadapi, misalnya dalam beberapa kasus seperti Ahok yang mengalami "diskriminasi politik" juga, namun hal itu bukanlah menjadi alasan agar orang-orang Tionghoa sendiri untuk tidak aktif berpolitik maupun masuk dalam dunia administrasi publik itu sendiri. Hal ini juga tidak bertentangan dengan tujuan dan cita-cita bersama dari administrasi publik itu sendiri yakni terwujudnya "*good governance*" itu sendiri yang memang melibatkan semua warga negara, termasuk orang-orang Tionghoa juga.

Kedua, selain orang-orang Tionghoa dapat memajukan administrasi publik Indonesia diharapkan dengan keterlibatan orang-orang Tionghoa dapat ikut bersuara bersama dengan warga negara lain yang juga terlibat dalam administrasi publik tersebut. Hal ini penting bahwa kesetaraan dan keadilan dalam admininstrasi publik juga menjadi dua indikator penting dalam menjalankan pemerintahan ini. Namun, bukan berarti orang-orang Tionghoa ketika masuk di administrasi publik ini hanya

"membela kepentingan" orang-orang Tionghoa saja, melainkan juga semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Justru, peranan orang-orang Tionghoa dapat mengajak suku-suku lain yang mungkin tidak berjumlah banyak untuk bersama-sama bersuara dan bertindak apabila ada birokrasi-birokasi maupun kebijakan-kebijakan yang dianggap diskriminatif, tidak adil, dan intoleran untuk senantiasa disuarakan dan dapat diubah agar menjadi lebih adil, plural, toleran, dan setara.

Berangkat dari dua pemikiran di atas maka penting agar orang Tionghoa aktif dalam administrasi publik karena orang Tionghoa, secara khusus yang memang sudah menjadi warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk terjun dalam administrasi publik tersebut. Hal ini bukan karena sekedar "kesempatan kekinian" karena alam demokrasi yang kekinian pula sehingga orang-orang Tionghoa "berbondong-bondong" untuk terjun ke dunia politik juga. Justru besar harapan agar orang-orang Tionghoa sendiri dapat membantu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang "*good governance*" dan senantiasa bersuara dan bertindak ketika terjadi ketidakadilan, intoleransi, dan diskriminasi secara administrasi publik demi negara Indonesia ini sendiri.

Bacaan Lebih Lanjut

1. Banga, Wempy. *Kajian Administrasi Publik Kontemporer: Konsep, Teori, dan Aplikasi (Edisi Revisi)*. Jakarta Gava Media: 2018
2. Suryadinata, Leo. *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia*. Jakarta LP3S: 2002

BAB II

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

Moral is Political: Notions of Ideal Citizenship in Lie Kim Hok's *Hikajat Khonghoetjoe*[1]

Evi Lina Sutrisno

INTRODUCTION

Despite the claim that Confucianism is an ancient teaching dating back to Confucius' own era (551 – 479 BC), Confucianism in Indonesia was introduced into the Netherlands East Indies by the Chinese Peranakan[2] no earlier than the late nineteenth century. In this period there was an unprecedented and prolific introduction of Confucianism as the religion of the Chinese people. Several efforts had been made, such as the suggestion to use a new calendar based on the birth date of Confucius in the early 1880s by the Chinese Peranakans of Surabaya. This was followed by the changing of the veneration of the deity of the Wenchang Ci, a temple built in 1884 and originally dedicated to the God of Literature, to the Wen Miao (Boen Bio – in Hokkien), which is now principally given over to the veneration of Confucius, in Surabaya in 1899 (Salmon 2005: 130-133). The figure of Confucius himself was introduced into Malay for the

[1] The original article, entitled "Moral is political: Notion of ideal citizenship in Lie Kiem Hok's Hikajat Khonghoetjoe" was published in *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* Vol. 18, No. 1, "Chinese Indonesians in historical perspective I" (2017, hal. 183-215, Depok/Jakarta: Faculty of Humanities Universitas Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia). Republished here with the permission of the chief editor (Lilie Roosman) in email dated October 25, 2021

[2] Peranakan refers to the Chinese who were born from mixed marriages between the Chinese men and local women and, therefore, cultivate hybrid cultures.

first time by the publication of *Hikajat Khonghoetjoe* (The life story of Confucius), written by Lie Kim Hok in 1897. The first Confucian canon to be published in Malay in 1900 by Njio Tjoen Ean, a Chinese captain of Ambon, was *Soe Sie Pek Boen*. As the majority of the Chinese Peranakan had lost their Chinese language skills, instead of translating their works from Chinese sources, both Lie and Njio borrowed their ideas from European texts.

The prolific efforts to introduce Confucianism as a religious teaching on the cusp of the twentieth century can be seen as a groundbreaking strategy which eventually established Confucianism in Indonesia in its current unique position as an institutionalized religion, instead of the philosophy or morality practised in other countries, such as China, Japan, Singapore, and Korea. This paper analyses the *Hikajat Khonghoetjoe* (hereafter *HK*), understood to be a text central to the introduction of Confucianism in the early of the twentieth century, in order to illuminate the entanglement between religiosity and various political, social, and economic factors faced by the Chinese in the Netherlands East Indies. Instead of being based on earlier Chinese texts, the *HK* is a translation and appropriation of two western texts. This paper analyses the agency of a Malay author and the process of translation commonly practised in his tradition. In a period of growing interest in Confucianism and Chinese nationalism, the *HK* was reprinted as many as four times, which presumably an indication of a wide readership (Salmon 1981: 231).[3]

Applying critical discourse analysis (hereafter CDA), my goal is to highlight that Lie chose the figure of Confucius to promote a type of piety in which personal virtue, self-respect, and high standards of morality should be expressed through political actions, active citizenship and the promotion of good

[3] The first version was published in 1897 by G. Kolff and Co in Batavia. In 1910 and 1913, there were publications by Kho Tjeng Bie and Goan Hong respectively. Both claimed they published the second versions. The Kho Tjeng Bie's version added the word "*nabi*" (prophet) in its title, which became *Hikajatnja Nabi Khonghoetjoe* (The life story of the Prophet Confucius). Other than the title, there was no change in its content. The last edition was published in 1921 by Goan Hong.

governance. By describing Confucius, his teaching and actions, Lie was intimating that his fellow Chinese Peranakans reconnect with China as an alternative patronage through which they might attain a position better than their subordinate and second-class status under Dutch colonialism. Before analysing the text, I shall provide the background which influenced the production of the *HK.* It consists of: (1) knowledge formation about China and Confucianism by the West, (2) Dutch racial policies and their effects on the economic and political conditions of the Chinese Peranakans; and (3) the Confucian revival movement in China and Singapore and its connections with that of the Peranakans in the Netherlands East Indies. Thereafter, I shall describe Lie Kim Hok, his authorship, sources, and agency. The last part analyses the subversive ideas encoded in the *HK*, including cosmopolitanism, active citizenship and good governance.

Governing race and the political economy in the Netherlands East Indies

In the 1814 Grondwet (Constitution), the Dutch colonial government defined its colonial subjects in a system of racial stratification. The first category was composed of the Dutch people, the second of the *vreemde oosterlingen* (oriental foreigners), and the third was the *priboemi* (natives). This stratification system extended into other policies. For example, there were separate courts for the three groups. The Chinese – who were classified in the second category, with the Arabs – had to apply to a special court and were governed by regulations designed for their group. The natives were meted out at similar treatment. However, the latter were assigned additional courts and rules, *hukum adat* (customary laws) and *hukum Islam* (Islamic laws).

In 1816, the colonial government introduced the *wijkenstelsel* (quarter system) and the *passenstelsel* (passport system). Tied to urban area development projects, the *wijkenstelsel* regulated the settlement of colonial subjects on the basis of their race. In many colonial urban settings were therefore to be found a Kampung Arab (the neighbourhood for Arabs), a Kampung

Melayu (the ward for Malays and local people), and a Pecinan (Chinese quarter). In the name of *rust en orde* (law and order), colonial subjects were required to obtain passes if they wanted to travel 5 kms beyond their settlement. Those who were caught travelling without a valid pass, could be fined or jailed. Although the *passenstelsel* was abolished for the Javanese in 1863 (van Hoëvell & Bleeker 1863: 236-239), it was still retained the Chinese.

In 1897, under the pretext of the halting the opium trade, the colonial government imposed the strictest supervision on the Chinese's traveling activities. In *Opium to Java,* James Rush (1990) demonstrates that in the mid-nineteenth century, opium trading, alongside cash-crop plantation, was the backbone of the colonial economy. The government sold the monopoly to sell the opium in the rural areas to the wealthy Chinese. Later, under the pressure exerted by an ethical commission in the mother country, the colonial government was forced to abolish the opium trade. The purpose of the strict *passenstelsel* policy was to limit the Chinese opium business networks in the rural areas. The most recent regulation had required them to obtain a pass each time they needed to travel away from home for more than four days for almost any reason. A pass was even required for a journey as short as an hour away from home and for any reason, including emergencies or health concerns. Failure to present a valid pass resulted in a fine of 25 guilders or a month's imprisonment with hard labour. The Chinese experienced devastating financial loss since they were unable to travel on businesses to rural areas and were forced to limit their commercial activities to cities (Tio 1958: 9; Williams 1960: 28-30). In 1911, the *passenstelsel* was abolished, but it was only in 1919, with the ending of the *wijkenstelsel*, that the Chinese were permitted to settle in other parts of town (Bloembergen 2007: 124).

The abolishment of opium trade occurred in support of an ethical policy toward the natives. Some Dutch ethicists called for positive actions on the behalf of the natives by campaigning against the liberal economy as an "unjust and un-Christian"

practice (Mansvelt et al. 1994: 217; Adam 1995: 71-72). It was followed with a negative campaign against the Chinese, which grew the fear of a "yellow peril". The Chinese economic power, which had previously been considered a main pillar of the colonial economy, was, now, perceived as a dangerous threat to both the natives and the Dutch.

The images of the Chinese as spiders and bloodsuckers, entrapping the powerless Natives in deep addiction and poverty through their opium dens and pawn shops as they were portrayed in newspapers and novels alerted the Dutch to what would be considered a growing concern. In their opinion, the jeopardized Native's economy meant the destruction of *their* economy (Rush 1990: 198-216). Other negative representations of the Chinese as lawbreakers and felons who operated opium smuggling and illegal trading in rural areas appeared in several official letters among the Dutch officers (Scheltema 1907: 112). Starting from 1896, Lea Williams (1960: 41) notes, that most of the newspapers had "begun a crusade against the Chinese." During the campaign against opium, the Chinese were not only struggling harder to maintain their economic positions but also trying to fight the negative images and stereotypes.

Defining Chineseness and the alternatives of subjective position

In modern colonialism, Chatterjee (1993: 14-34) argues that the making of racial differences is the most powerful method of governing the colonized. "The difference could be marked by many signs, and varying with the context, one could displace another as the most practicable application of the rule. But of all these signs, race was perhaps the most obvious mark of colonial difference" (Chatterjee 1993: 20). In the case of British West Indies, it was the difference between the British as White race that gave them power to govern the inferior Other, the Indian. In the case of Netherlands East Indies, the Dutch not only made themselves as superior White race, but they also created categories among the Other: the

Eurasian, the Orient foreigners (Arab and Chinese) and the native.

In line with Chatterjee's work, Naoki Sakai (2005) states that modern colonialism produces an asymmetrical power relationship between the colonizer and the colonized. Rooted in this power imbalance, the colonizers enjoy superior positions that allow them to observe, define, and categorize the colonized through the application of various technologies, such as surveys, censuses, and discriminative policies. Eventually, the accumulated knowledge of the Other is to fashion the West itself as "modern" or "advanced". He calls the act of defining "self" in relation to each other as "subjective technology". What makes Sakai different from Chatterjee is that the former argues for social and dialogic dynamics in the making of the West-and-the-Rest discourse. The social categories, including the West and the Other, are putative, unstable and continuously (re)defined alongside the changing economic, social and political situations. In other words, Sakai's point of view allows struggles, resistance, and different positionalities between categories, which resonates better to the case of Lie Kim Hok and the Chinese Peranakans as I will discuss further in the section of Lie's biography. It also suggests that the dynamics and relativities of social categories recognize the gradient of positionality. A Western educated Javanese, for example, might be categorized as a native by the Dutch, but they might be considered as a Westerner in relation to most uneducated Javanese. As the discussion below shows, the Chinese Peranakans who appropriated Western sources to promote Confucianism might be considered Chinese by the Dutch, but in their relations with other Chinese *totoks*[4], they were considered a Western influenced group.

Sakai's point of view, however, focuses mainly on the West and the Rest dichotomy. In the case of the Chinese Peranakans in the late nineteenth century, the dichotomy was subverted. As Didi Kwartanada argues (2011: 124) that, on the one hand, the Chinese were enthusiastic in acquiring Western modernity by learning

[4] *Totok* means the pure blood Chinese who still maintained their Chinese language skills and culture. They usually refer to traditionalists and politically oriented to China mainland.

European languages and applying the Roman alphabets instead of Javanese or Arabic scripts. On the other hand, they used the Romanized Malay to reinvigorate their Chinese culture. There were, indeed, opportunities to create "self" through China as a different patronage. In her extensive bibliographical work, Claudine Salmon (1981: 21) investigates the Chinese peranakans' writing starting from the mid-nineteenth century, in which she found the first translations from Chinese in the period of 1878 to 1910 by eighteen Chinese Peranakan and newcomer writers, of whom Lie Kim Hok was one. Their works can be categorized as translations of novels, religious or moral canons, Confucian classics and revolutionary writings. The translations of the Chinese literatures and sources demonstrate that even though many of the Chinese Peranakans were looking for inspirations from Malay and European sources, several of them were interested in the stories of their ancestors.

Outside the literary forces, the efforts to link to China had been started by the Chinese Peranakans in Surabaya. Salmon (2005: 130) demonstrates that the Chinese Peranakan in Surabaya had started the reform by applying the Confucian calendar as early as the 1880s. Another example was the foundation of Chinese schools in Batavia and Surabaya as J.E. Albrecht (1897: 231-233) reported. These schools were founded by the Chinese communities as the Dutch government did not provide education for their children. These schools were in poor learning atmosphere and had around 15 to 50 students. In 1879, Albrecht reported that, there were several Chinese schools which taught their students to read Chinese and used Confucius' four classics as the moral teaching. A school in Surabaya hung a piece of red paper with Chinese characters "the holiest teacher Confucius" on one of the walls and set up a table with a vase where they could put joss sticks as offerings.[5] The schools celebrated Chinese holidays, too. Even though Albrecht wrote that the children could barely read and write Chinese characters after attending several years of schooling,

[5] There was no evidence, however, that the life story of Confucius had been introduced in these schools except the conversation between Confucius and a small boy, Hang Thok, in several Chinese school textbooks (Chambert-Loir 2015: 68, footnote 1).

his observation nevertheless demonstrated that the imagination of being a part of China and Chinese culture has been actively promoted by several Chinese Peranakans even though their efforts were local and in small scales. Unlike most scholars who believed that the Chinese Peranakans were influenced by the Confucian reform movement proposed by K'ang Yu-wei in 1895 (for example, Coppel 1981; Suryadinata 2002), these two examples show that they started the efforts some fifteen years before K'ang's movement.[6]

The efforts of the Chinese Peranakans to link themselves to China obtained an accelerating momentum. At the same time with the increasing hostilities and restrictions in the Netherlands East Indies against the Chinese, the Chinese government was changing its political attitude toward the Chinese diaspora. In 1895, after the disastrous Sino-Japan war, a young middle-ranking officer, K'ang Yu-Wei, proposed a thorough governmental reform through institutional change in order to save the nation from further defeat. Simultaneously with his effort to convince the Emperor and his colleagues, K'ang perceived the overseas Chinese as possible supporters of his vision for a "new China" (Wong 1992: 517).

Inspired by the Meiji Restoration of Japan, K'ang proposed to purify Chinese culture and to make Confucianism as the state religion (*guo jiao*) and "the soul of the Chinese nation". He deduced that the humiliation experienced by the Chinese people was resulted from the lack of civic virtues (*gongde*) so that they experienced moral degeneration and cannot survive in the world (Tay 2010: 105). On June 11, 1898, the Emperor Kwang-Hsu finally endorsed the reform proposed by K'ang. However, the reform only lasted a hundred days for the Dowager Ci Xi and conservative officials seized power back. After escaping the death penalty, K'ang travelled to thirty-one foreign countries, including Singapore and Batavia to seek support among the overseas Chinese population (Hummel 1935: 343; Kwee 1969: 25).

In Singapore, Dr. Lim Boon Keng, a respectful Edinburgh-trained physician, hosted K'ang. Lim was the defender and

[6] Kwee Tek Hoaij (1939: 1-7) asserts that K'ang Yu-Wei and his reform movement had indirect influence to the foundation of THHK (Tiong Hoa Hwee Koan) in Batavia.

promoter of K'ang's reform program whose ideas of educational reform resonated with K'ang. In 1895, in the same year when K'ang established the Kongjiao Movement, Lim formulated his thoughts in speeches and articles published in *the Straits Times, Thien Nan Shin Pao* (Tiennan Xinbao), the *Straits Chinese Magazine* and *Jit Shin Pao* (Ri Xin Bao) (Lee 2006: ix), in hopes that they might reach the Chinese in Batavia. In line with K'ang's concept of combining classical Confucian scholarship with modern Western liberal ideas, Lim emphasized educational development by hiring foreign teachers, sending students abroad and adopting a Japanese educational system (Wang 2006: i).

Williams (1960: 54-55) indicates that there was information flowing from Singapore to Batavia. Singapore had been the window to the world for Batavia and "an intellectual center" for the Chinese Peranakans. She noted, however, that a year earlier than Lim's Confucian movement in Singapore in 1898, the *HK* had been published in Batavia. There was no specific evidence whether Lie Kim Hok was influenced by Lim Boon Keng's writing. On K'ang Yu-wei's influence, Kwee Tek Hoay (1969: 1) wrote that K'ang had visited Batavia in 1903 and met the Tiong Hoa Hwee Koan (The Chinese Association - hereafter THHK) board of commissioners (bestuur), of which Lie was the leader of its Religious Commission (Nio 1940: 203, 213). Considering the chronology, the publication of the *HK* in 1897 is a good evidence to demonstrate that Lie Kim Hok had already developed the ideas of embracing Confucianism and Western values years before he met those leaders. It goes without saying, however, that K'ang Yu-wei and Lim Boon Keng had influenced the Chinese nationalism and Confucian movement in the Netherlands East Indies in the later period of the early 1900s, such as Lim Boon Keng's endorsement on the publication of *Su shi* (Si shu – Four classics) by Tan Gin Tiong after a personal meeting in Singapore in 1899 (Kwee 1969: 5).

It is worth noting here that although K'ang's idea of reform through Confucian teaching had been abandoned by both the last Manchu monarch and the newly emergent Republic of China in 1912, his idea to build support among the overseas Chinese had remained. As early as 1909, the Manchu ruler launched an imperial decree to

define a Chinese subject based on *jus sanguinis* or the blood principle.

This meant that China could claim every child of a Chinese father or mother as a Chinese subject, regardless of their birthplace. The decree created a problem of dual nationality for the Chinese Peranakan in the Netherlands East Indies as the Dutch claimed them as Dutch subjects based on Holland's decree of *jus soli* or land principle launched in 1910 (Aguilar 2001: 513-514). The dual nationality phenomena opened opportunities for the Chinese *peranakan* to consider China-oriented nationalism, something which had not been previously imagined.

Lie Kim Hok's short biography and authorship

Lie was born in Bogor in 1853 to Chinese Peranakan descendants and spent his childhood in Tjiandjur (Cianjur), a small town in West-Java. His family had presumably been in the Indies for three or more generations. His father – Lie Hian Tjouw – spoke a high Sundanese (*bahasa Sunda halus*), a local dialect of West Javanese. His mother – Oey Tjiok Nio – was also a Peranakan woman. Lie learned some old Chinese traditions from his father and local traditions from his mother as was widely practiced by the Chinese families across Java at that time (Tio 1958: 14-17). It was unsurprising that as a productive writer, Lie was interested in adapting Chinese stories to Sino-Malay.

When he was ten years old, Lie attended the first missionary school in Tjiandjur founded by the missionary Albers. Sundanese was the language of instruction at the time. In 1866 his parents decided to move back to Bogor where he entered a small private Chinese school run by *sinshe*[7] Tan Liok Ie, who was subsequently replaced by other *sinshe*s. Although he gained some basic knowledge of Hokkien, Lie neither read nor was he capable of writing in Mandarin characters. In mid-1866, the missionary Sierk Coolsma opened a small private school in Bogor. Lie continued his education under Coolsma's supervision. Lie was an enthusiastic student. Coolsma described him "*de honger van zijn geest was grooter dan die van zijn maag*" (the hunger of his spirit was greater than that of his stomach) (Tio

[7] *Sinshe* is a Chinese traditional healer.

1958: 37). After four years, the missionary D.J. van der Linden replaced Coolsma and changed the language of instruction from Sundanese to Malay. This change might be due to the fact that the Chinese Peranakans were more responsive and interested in learning Christianity than the Sundanese. The latter were actually the main target of Dutch missionary work. Very much to their disappointment, West Java was a predominantly Islamic area where refusal and hostility against Christianity were strong. Van der Linden apparently noticed this phenomenon and decided to use Malay, which "tended to reinforce the Chinese element in the school" (Coppel 1986: 20). Van der Linden also taught Lie Dutch and presumably other European languages as well, such as French, English, and German (Tio 1958: 22-23; Salmon 1981: 228-229).

Lie enjoyed an even closer relationship with Van der Linden when he was appointed as a teaching assistant in the school. His closeness to Van der Linden helped him become familiar with Western values and Christianity. Although he did not convert to Christianity, Tio Ie Soei (1958: 37) argues that "*dia melebihkan Keristen daripada banjak orang Keristen*" (he is more Christian than many other Christians). It is interesting to note that Lie's father sent his son to a Christian school despite the common fear that Christianity can threaten one's Chinese identity. Despite criticism for his decision, Lie's father was open-minded to the influence of Western knowledge and considered it to be a complement to the Chinese tradition which imposed both morality and spirituality (Tio 1958: 39-40).

Given his language proficiency, Lie was familiar with European texts and novels. Twenty of his writings have apparently been either translations or adaptations from French, Dutch, Chinese, and English novels, such as *Graaf de Monte Christo* (the Count of Monte Christo, 1894) and *Hikajat Kapitein Flamberge* (the life story of Captain Flamberge, 1908). More than half of his translations of Chinese stories were based on French or Dutch adaptations of Chinese novels. *Boekoe Tjerita Pembalasan Dendam Hati* (The Story Book of Revenge), also known as *Ong Djin Gi* (1907), for example, was not based on a

Chinese story although it was given a Hokkien title. Instead, it was an adaptation of a novel by an unidentified French writer. Four of his writings were based on Chinese novels, such as *Pek Hauw Thouw* (1886) which were made in collaboration with two friends, Tan Kie Lam and Tee Pek Thay, who were literate in Chinese characters (Salmon 1987: 405). Eleven of his writings were reprinted, but only the *HK* was reprinted as many as four times (Salmon 1981: 229-232).

The case of Lie uniquely demonstrates how the boundary between modern values, Malay cultural traditions and imagined affiliation to China are blurring. Since he translated several Western works, he could be considered as "Westernized" and too modern by his Chinese Peranakan fellows. Yet, his works on Chinese literature, his deep interests in Confucianism and his choice to use the Malay language made his subjective positionality beyond Sakai's "the West versus the Rest" binary complexity. His subjectivity encompassed three categories at the same time: acceptance of Western modern values, political and religious orientation to China, and linguistic root in Low Malay (*Bahasa Melayu rendah*).[8] During his lifetime, Lie was productively writing 28 stories alongside numerous articles published in newspapers, including *Bintang Barat*, *Pemberita Betawi*, *Dinihari*, *Hindia Olanda*, *Bintang Betawi*, *Taman Sarie, Hoekoem Hindia, Siang Po*, and *Perniagaan*. For his efforts to popularize the Low Malay through his novels and writings, he has become well known as "Bapak Melajoe-Tionghoa" (the father of Sino-Malay) (Salmon 1981: 231; Tio 1958: 86-87).

Revisiting Lie's work, Tio (1958: 90-91) summarizes the criticism on his works. Instead of translating the original version and acknowledging the source, Lie chose to develop his own plot and details. In *Ong Djin Gi*, he gave the French characters Chinese names, moved the setting to China, and replaced the European calendar system with the Confucius calendar. In *Kapten Flamberge,* he wrote a happy ending, instead of a tragic ending as it was in its original version.

[8] Henri Chambert-Loir (2015: 86-87) argues that the Low Malay or Sino-Malay worked as an identity marker for the Chinese Peranakans and a struggle against the High Malay (bahasa Melayu Tinggi) or Riau Malay standardized and supported by the Dutch government.

In order to understand Lie's way in translating and writing a novel, I suggest contextualizing it in the broader Malay literary tradition of his time, which was different from that of the Western tradition. The Malay tradition considered a piece of literary creation to be the property of a community which meant that most Malay works were anonymous (Muhammad Haji Salleh 1991: 3-23). The oral tradition of transmitting stories had opened up opportunities for storytellers and other authors to modify tales by experimenting with various fragments, styles or plots and making new work in itself. Henri Chambert-Loir (1984: 44) calls this process the "evolution" of literature, while Haji Salleh (1991: 3) considers this type of authorship "conglomerate authorship".

The concept of authorship in written tradition did not come into being until the seventeenth century when books were introduced into the Malay literary tradition. It was the British missionary Medhurst who introduced printing technology to Batavia in 1828 (Van der Putten 1997: 717). Since then, compositions on paper have gained a greater sophistication, legitimacy, and authority than oral compositions. Despite the differences between the older and the newly emergent type of authorship and authority, there was still a wide space for writers and storytellers to modify stories, to claim an authorship, and to transmit these stories (Millie 2004: 2). At the end of the nineteenth century, when Western print capitalism had penetrated deeper in the colony, the Malay writers started to claim story ownership, regardless of the fact that the works they wrote down did not originate from them. These writers also claimed "monetary rights" over their modified works (Maier 1997: 59-60) for copy rights law (*Auteurswet*) was only imposed in 1912.

What is called a "monetary right" to these writings was initiated by changing readership patterns in the period since the introduction of print capitalism to the Netherlands East-Indies. In addition to oral stories, readers could also read written stories by borrowing manuscripts from lending libraries. However, this service was not free in the same sense as a library. Borrowers

would pay a small fee to the library owner in order to gain access to a text. To ensure continuous and loyal readerships, library owners copied stories from older manuscripts or wrote oral stories down with some modification and claimed them as their own. It can be said that Malay authors at that time, including Lie Kim Hok, enjoyed a flexibly oscillating role of copyist, translator, and author (Chambert-Loir 1984: 44).

In the last years of Lie's life, the Manchu dynasty claimed the citizenship towards the overseas Chinese in 1910. Although there is no record of how this policy had affected his political view, I would like to argue that Lie consistently maintained his subjective technology, which embraced three categories of identities – being modern, Chinese oriented and Malay rooted. The record shows that in his last years, he translated more Dutch and French novels, such as *Boekoe tjerita kawanan pendjahat* (The story of a bandit group, 1910) adapted from a French novel, Rocambole (1859) and its four sequels, into Sino-Malay language (Salmon 1981: 231). Given the fact that he was one of the founders of THHK where he actively engaged as the secretary of the leader's council and the leader of the Chinese religious commission, he was harshly criticized by his Chinese friends for enrolling his children in a Dutch school, instead of to a Chinese school, even though he supplemented then with extra lessons in Chinese language and culture (Tio 1958: 92). In 1909, he received a distinguished service medal, *the Seventh order of Kung Pai*, from the government of China for his involvement in and support of several Chinese social organizations, such as Tiong Hoa Oen Tong Hwe (The Chinese Sport Association), Lie Lun Hwe (the debate group), and Djin Tiu Hi (Chinese charity bazaar). On 2 May 1912, he visited the THHK and two newspaper offices to discuss the cholera epidemic in Batavia and its surrounding areas and how they could help provide medicine for the poor. His care and attention for his local fellows unfortunately lasted for a few days before he himself was diagnosed with typhoid and died in 6 May 1912 (Tio 1958: 82-83).

Analysing the *Hikajat Khonghoetjoe*: Genre, discourse, and style

This article applies the Critical Discourse Analysis (henceforth CDA) as a method "to investigate critically social inequality as it is expressed, signaled, constituted, legitimized and so on by language use (or in discourse)" (Wodak and Meyer 2002: 2). The CDA argues that a text which is produced within particular time, space and historical forces may serve as a reflection of social life and hegemonic ideology. By analysing the concepts of power, history, and ideology behind a text, the CDA can be useful in understanding "pressures from above and possibilities of resistance to unequal power relationship that appear as societal conventions" (Wodak and Meyer 2002: 3).

In analysing linguistic practices, including investigating the meaning behind a text, Norman Fairclough (2002: 123) suggests scrutinizing three elements of social practices: text genre, the representation of figure(s) or social actor(s), and social activity within a practice. I will discuss the genre of the *HK* in this section, and the representation of Confucius as a social actor and his activity in the later section.

Raised as a Chinese Peranakan, who was presumably familiar with the Malay oral tradition, it is understandable that Lie wrote the life story of Confucius in the *hikayat* genre as one of the genres in Malay writing, which takes a prose form. It has roots in the Arabic-Persian story telling tradition and may have a heavy overlap between story and history, which in the Western tradition would be separately categorized. Therefore, the translation of the word *hikayat* into English varies widely from "tale", "story", "life story" to "history" (Riedhorst and Dykstra 1944).

The gray area between story and history or fiction and facts is one of the most problematic issues in reading the *hikayat* as a "scientific" work. The question is whether or not a *hikayat* can be regarded as historical writing. The Western standard of "scientific history", started in the early nineteenth century considers identification, systematization, and authentication of

primary sources as well as objectivity as essential requirements to the reconstruction of what 'really' occurred and what can be determined as historic fact (Harrison, Jones, and Lambert 2004: 26-37; Florida 1995: 52). To these requirements, several *hikayats,* include clear and verifiable dates, places, and events. Written by Abdullah bin Abdul Kadir Munsji in the 1840s, *Hikajat Abdullah* is one of the exemplary histories of Melaka, which contains remarkable clarity of dates, events, and places. However, it is not uncommon that characters, places, and times in a *hikayat* do not appear in any of the known genealogies or histories. For example, *Hikajat Panglima Nikosia* (The tale of Commander Nikosia), published in *Sarawak Gazzette* in 1873 and written at an unknown date (Walker 2005) and *Hikayat Siti Mariah* (The story of Siti Mariah) published in *Medan Priyayi* in 1910 also written at an unknown date (Toer 2003), contain unverifiable characters and times although the description of places in these stories are realistic.

The blurring of boundaries between story and history, fiction and fact, historical and literary works in Malay tradition requires a different understanding than the Western standard of "scientific history". Traditional Malay historical writing follows a different practice wherein "truth" does not lie in historical facts but rather on the moral obligation of the author to present the story under God's blessings. It is to remind the readers that God is the only truth while human beings, including the author, may err. As an oral tradition within a "conglomerate authorship", the *hikayat* is usually told and retold from older to younger generations, which opens the possibilities for tellers or writers to modify it into their own style. Therefore, in the introduction of an older *hikayat,* an author refers to his/her genealogical web, in order to testify his/her starting point and his/her relations to "knowledge" (Salleh 1991: 3-7, 9). This can be seen as an acknowledgement to his ancestors and, to some extent, a guarantee of the quality of his work.

The *HK* consists of an introduction and main text. It applies a linear plot that starts with a genealogy of Confucius' ancestors dating back as far as 2237 BC. The genealogy provides

information about Confucius' ancestors and the roots of his good character and teaching philosophy. The story continues with Confucius' birth, childhood, adulthood, his teaching, and old age. In choosing the *hikajat* genre to introduce Confucius to his Malay readers, I argue that Lie obtained at least two benefits. First, he enjoyed the "conglomerate authorship" through which he acquired some degrees of flexibility and agency in modifying and appropriating his story. I shall show the ways Lie selected and quoted the original texts in the next section.

Second, the *hikajat* genre allows him to introduce Confucius as a real historical figure. As discussed above, a Malay author may use the *hikajat* genre to write a tale and/or fiction. Lie had also applied the *hikajat* for a fictive character in his novel, *Hikajat Kapitein Flamberge* (1907) which was an adaptation from a French novel written by Paul Sanière, *Flamberge* (1887) (Salmon 1981: 231). Comparing the *HK* and the *Hikajat Kapitein Flamberge,* however, it seems that Lie put more efforts into introducing Confucius as a real historical figure by incorporating his life into the history of ancient kingdoms in China. He included years and names of his ancestors in more than four pages. He also emphasized that the genealogy of Confucius had been verified or known for sure: *sabagimana jang kataoean dengan pasti,* in *HK* (Lie 1897: 12).

In the *Hikajat of Kapitein Flamberge*, on the other hand, he neither explained the origin of his character nor did he affirm that Flamberge was a real figure.[9] Introducing Confucius as a real historical figure is, in my opinion, one of Lie's main strategies to emphasize Confucius as an excellent role model and social actor whose teachings are still "appropriate" (*patoet*) and "compulsory" (*wadjib digoenaken*) for contemporary people (*HK*, Lie 1897: 10).

[9] Since the boundary between real and fiction can be unclear in Malay writing tradition, it was not uncommon an author added a subtitle "*ada soenggoeh kedjadian*" (really happened in …) to emphasize the factuality of his story. Lie did it in one of his works "*Sair tjerita di tempo tahon 1813 soeda kedjadian di Betawi, terpoengoet dari boekoe Njaie Dasima*" (A story tale that had happened in 1813 in Batavia, adopted from the book of Njaie Dasima).

Writing with the West, against the West: Sources, indirect agency, and the citation politics

In the previous section, I discussed the agency of Lie as a Malay author in choosing the *hikajat* genre and utilizing it to introduce Confucius as a great role model for his Chinese fellows. In this section, I would like to highlight another aspect of Lie's agency as an author in regards to choosing and appropriating his sources. In line with the tradition of anonymity and conglomerate authorship commonly practiced in Malay writing, it was not uncommon for Malay writers and oral story tellers to adopt stories without citing their resource(s). In the *HK*, however, Lie chose to identify one of his sources. In the introduction, he mentioned J.L. de Lanessan, a Frenchman (*saorang Prasman*), whom, to the best of Lie's knowledge, was superbly familiar with the teaching of Confucius. De Lanessan, who had been the former Governor General of Indo-China, wrote *La morale de philosophes Chinois; Extraits de livres classique de la Chine et de l'Annam*[10] (The moral of Chinese philosophers; Excerpts from classical books of China and Annam; hereafter *La morale*) which was published in 1896, a year earlier than the first publication of the *HK*.

In the other parts of his introduction, Lie cited comments and sayings three times from a source whom he called "*saorang boediman bangsa Eropa*" (an European gentleman), "*itoe toewan boediman*" (that gentleman), and "*soewatoe toewan boediman*" (a gentleman) (Lie 1897: 1, 9). By mentioning De Lanessan twice and the other European gentleman three times, there are several questions to raise about his sources: was De Lanessan's the only texts Lie adopted? If so, how closely did he borrow the ideas from it? If not, what are the other text(s)? Did he possibly borrow the work of a Dutch, British or German writer?

I started to investigate these questions by juxtaposing the *HK* and the *La Morale.* The juxtaposition shows that from the 124 pages of the *La Morale*, Lie took only four and a half pages of the

[10] Annam was a former colony of France and is now a part of Vietnam.

introduction and one and a half pages of the moral apotheosis in the last section to incorporate into his introduction. The main texts of both are written with totally different structure and content. *La Morale* consists of the proverbs originated from the *Si shu* (Four classics). It does not cover the biography of Confucius, which means Lie would have referred to other Western texts to compose the life story of Confucius as Salmon (1981: 231) indicates that the *HK* is , "(a) study on Confucius based on Western studies, among others on a work by the French Civil Servant, J.L. de Lanessan entitled *La morale des philosophes Chinois* [...]". Salmon did not, however, mention the *HK*'s other sources.

A long research throughout the older works on Confucianism and Chinese religion(s) collected by the Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies (KITLV) in Leiden and the National Archive (KB) in The Hague has brought me to *De heilige boeken der Chinezen, of de vier klassieke boeken van Confucius en Mencius (Khoeng-tseu en Meng-tseu), voorafgegaan door een inleidend levensberigt van Confucius en Mencius, en voorzien van ophelderende aanmerkingen en historische aantekeningen, naar de beste Europesche vertalingen door den bewerker van de Nederduitsche uitgaaf van den Koran* (The holy books of the Chinese, or the four classical books of Confucius and Mencius, with an introductory note on the life sketches of Confucius and Mencius, and provided with clarifying remarks and historical notes to the best (standard) of European translation by the editor of the Dutch-German Qur'an publisher; hereafter *De heilige boeken*), which was published by J.J. van Brederode of Haarlem in 1862. Reading this book together with the *HK*, I found the closest similarities between the two, which led me to the conclusion that *De heilige boeken* was Lie's main source for the *HK*.

As there is no author's name mentioned in the book, another investigation in the KB brought me into the name of Salomo Keyzer (1823-1868), the editor of the Dutch-German Qur'an publisher. Keyzer was a professor at the Royal Academie in Delft, the Netherlands, who travelled as far as the Netherlands East

Indies and Mekkah in order to research Islamic law and the hajj pilgrimage. The translation of the *De heilige boeken* was possibly his side project since most of his writings and publications were mainly about Islam and the life of the native in Java.[11] From his introduction, however, readers can get an impression of how deeply Keyzer admired and valued Chinese philosophy. The KB catalogue also includes a note that Keyzer translated the Chinese classics into Dutch from the work of a French writer Jean Pierre Guillaume Pauthier (1801-1873). Since Keyzer did not mention his name in *De heilige boeken,* it is understandable that Lie could only refer him as "an European gentleman" or "that gentleman" in his introduction.

Regarding Lie's decision to use De Lanessan's and Keyzer's as the sources of the *HK,* one could raise questions about why he chose these two books out of other books he had access to? What was special about these books compared to the others? What if these two books were the only books Lie could find about Confucius in the colony? Regarding to the last question which expresses doubts that people in the Netherlands East Indies had access to knowledge and books circulated in Europe, Lisa Kuitert shows that starting from the mid-nineteenth century, there were more books moving from Europe to the colonies, including the Netherlands East Indies. In line with the increasing literacy rate and readership, there was a growing number of imported books from Europe to the colony. In 1883, there were seventeen book trading companies (*boekhandel*) throughout Java, whose business was importing books from Europe and circulating them in the colony.[12] That number grew to 30 in a decade. This is not to mention the numbers of bookstores (*boekwinkels*), small

[11] See, for example, *Kitab Toehpah; Javaansch-Mohammedaanschregt* (The Toehpah Book; The Javanese-Islamic Law) (1853), *Schetsen uit het leven der inlanders op Java; I. De bedevaart naar Mekka* (Sketches from the native' lives of Java; I. The pilgrimage to Mekkah) (1868), *Het Mohammedaansche strafrecht naar Arabische, Javaansche en Maleische bronnen* (The Islamic criminal law from the Arabic, Javanese and Malay sources) (1857), and *Onze tijd in Indië* (Our time in Indies) (1860).

[12] Several *boekhandels* might also have business in book printing and publication (Kuitert 2011: 77). One of them was G. Kollf & Co of Batavia, where the first edition of the *HK* was published.

libraries or book renting kiosks. The total weight of books exported from the Netherlands to the Netherlands East Indies was 45.693 kilograms in 1860 and it became 111.233 kilograms in 1880. If the average book weight is 250 grams, this means there were around half a million books circulated in the colony in 1880 with various themes and formats, such as bulletins, magazines, advertisements, school books, novels and popular knowledge books (Kuitert 2011: 76-77). Given the fact that Lie could obtain the *La Morale,* which was published only one year before the *HK,* there must have been other opportunities for him to access the earlier works of the other European sinologists, such as the well known James Legge's *The Religions of China* (1880) and *The life and teaching of Confucius; With explanatory notes* (1867) and Henri Borel's *De Chineesche filosofie; Toegelicht voor niet-sinologen* (The Chinese philosophy; Explained to non-sinologists) (1896). Thus, I assume that Lie might have had different books to consider as his sources when he planned to write the *HK.*

I would like to argue that in choosing his sources, Lie exercised his agency as an author who wanted to promote Chinese philosophy and culture against the vilification and humiliation that they were facing due to the abolition of the opium trade. The reason Lie chose de Lanessan's and Keyzer's works was perhaps because both were more positive about Chinese culture than the works of other sinologists. Both even considered Chinese culture to be equal to European culture, which possibly positioned them as the earliest European sinologists to promote cultural relativity and egalitarian attitudes – at least when we judge them from their introductory remarks.

In his introduction, De Lanessan (1896: 1) mentioned that he hoped his book would "set light to Western eyes" about Confucianism which has been a little known philosophy in Europe but has been very influential in China and Annam. He added his observation that far from the common judgement

that they were uncivilized people, the Chinese and Annamese have developed their school system and incorporated Confucian teaching into it. This teaching has provided an important moral and philosophical ground for these people regarding how to be good members of the family, community and nation.

Even though de Lanessan considered Confucianism to work in a parallel way to Christianity to European society, he drew a difference between the two in which rather than focusing on metaphysical concerns, such as soul, divinity and afterlife, Confucianism addresses morality and worldly matters. He concluded with his admiration to the longstanding nature of the deep beliefs in and absorption of Confucianism in their daily life.

In introducing Chinese philosophy, Keyzer also brought up the self-criticism of European ethnocentrism against the rest.

> In our way of thinking, we despise all things that differ from the accepted ideas in Europe, whereas (Europe is) actually the smallest part of the world and we developed our civilizations based on the civilizations of ancient peoples and other regions. It will sound strange for us, when we use our perspective, that – perhaps since the invention of printing technology, which made publications come to our hands – there are very rare works which are standing higher than the writings of Confucius. In his character whose life sketch is given in the following pages, one discovers the reflection of the noble soul, amiable character, comprehensive mind, broad vision and lofty principles. *(De heilige boeken* 1862: 1.)[13]

[13] All translations from Dutch, French, and Malay are mine unless it is stated otherwise. The original Dutch text: "Bij onze begrippen, waardoor wij alles minachten wat afwijkt van de aangenomen denkbeelden in Europa, hetwelk toch het kleinste deel der wereld uitmaakt, en welks beschaving op die van vroegere bevolkingen en andere streken is gebouwd, zal het welligt vreemd klinken, dat, volgens onze overtuiging, onder de werken die, sedert de uitvinding der boekdrukkunst, het publiek in handen zijn gekomen, er zich misschien zeer weinige bevinden, welke hooger staan dan de geschriften van CONFUCIUS, waarin men de afspiegeling ontdekt van de edele ziel, het beminnelijk karakter, den veelomvattenden geest, de breede zienswijze en de verheven beginselen van den man, wiens levensschets in de hierna volgende bladzijden wordt gegeven".

The attitudes of De Lanessan and Keyzer were in contrast to that of James Legge, the famous Scottish sinologist, whose several of his works had been translated into multiple European languages, including Dutch. In *The life and teaching of Confucius* (Legge 1867), Legge began with his criticism to the Chinese people.

> "And have you foreigners surnames as well?" This question has often been put to me by Chinese. It marks the ignorance which belongs to the people of all that is external to themselves, and the pride of antiquity which enters largely as an element into their character. If such a pride could in any case be justified, we might allow it to the family of the K'ung, the descendants of Confucius. (Legge 1867: 55). [14]

Even though Legge did not clarify why and how the K'ung family was responsible to such a self-centered attitude, he implied that this pride is originated to the establishment of ancestral genealogical system through which the Confucius' decendants could claim their longstanding nobility.

There have not been a lot of discussions about choosing resource texts and citing practices or author's agency in CDA. Among a few studies on this issue, Ronit Ricci (2012) demonstrates how the practices of citing and translating Islamic religious texts among the Muslim communities in South and Southeast Asia between the sixteenth and early twentieth century reveal knowledge circulations and networks among Muslim communities in these areas. In this case, citations and translations function as "the basis for common educational models, authority structures, a shared imagination, and historical consciousness" (Ricci: 352). They serve to connect loci and strengthen bonds through the formation of shared religious identity among Muslim groups of different areas.

While Islam serves as a shared religious identity to the

[14] Legge's major works had been translated into several European languages, but there was no Dutch translation for *The life and teaching of Confucius* (1876). Therefore, I use the original publication which was in English.

different groups in South and Southeast Asia, as a Chinese *peranakan* and colonial subject, Lie neither had necessarily a common identity background with de Lanessan and Keyzer nor would he strengthen a religious network with these European writers. In the case of the *HK*, I argue that citation and translation practices reflect a different type of agency, which is a form of indirect subversion against the West by borrowing the Westerners' voices as this following example shows.

> As the readers may have known the continent of Europe is the smallest among five others, (however) White people who originally lived on this continent or who have origins from this continent, especially in the present time, have been acknowledged as the most cultivated people in the world. Any matter which is unacceptable by the European's way of thinking is despised by people there; but, a surprise comes to the readers' heart, if, according to a European gentleman who is well-acquainted with Chinese literature, it is said now that among all the books published since the art of letter printing had been founded, there has probably been no better book than KHONGHOETJOE's writings from which one can see clearly its author's kind heart, refined behavior, deep thought, full comprehension and clear and sharp memory. (*HK,* Lie 1897: 1; capital letters are in original.)[15]

Starting from the beginning, Lie playfully contrasts the West and the Rest. He acknowledges Europe as a centre of knowledge and authority, which means the Europeans hold the power to define acceptable manners for the rest of the world. To be considered well-mannered or civilized meant to

[15] Sabagimana jang Pembatja-pembatja tantoe soedah taoe djoega, sedang benoewa Europa ada djadi bagian boemi jang paling ketjil di antara lima sasamanja, bangsa-bangsa koelit-poetih jang sedjati di benoewa itoe, atawa jang berätsal dari sitoe, terlebih poela pada djeman sekarang ini, haroeslah dikataken ada kalihatan paling berboedi di antara bangsa-bangsa isi doenia. Segala perkara jang tida bersatoedjoe dengan pikiran orang Europa, adalah tertjelah oleh bangsa-bangsa di sana; aken tetapi, brangkali djoega rasa heran nanti datang pada hati Pembatja, kaloe dengan menoeroet katanja saorang boediman bangsa Europa jang kenal baik sama kitab-kitab bahasa Tjina, sekarang ini ada dibilang, bahoewa di antara segala kitab jang telah tersiar dari tempo terbitnja ilmoe menjitak soerat, brangkali djoega ampir tida ada satoe karangan jang boleh dikataken ada bagitoe bagoes, seperti karangannja KHONGHOETJOE di mana ada kalihatan njata sekali pengarangnja poenja hati moelja, adat haloes, pikiran dalam, pengartian besar dan ingatan terang dan tadjam.

always be agreeable with the European standard of values. Lie, however, has an opportunity to invert the world order that had been imposed by European imperialism through the voice of a particular European gentleman who admitted that there have been no better books than Confucius' writing. This statement becomes political as it opposes the colonial reality wherein the Chinese were categorized as colonial subjects under White Supremacy.

Here I would like to emphasize Lie's agency in transforming Keyzer's text through CDA analysis. As Keyzers aimed to introduce Confucius and his teaching as self-criticism of superiority and ethnocentrism among his European fellows, he used the pronouns "we", "us" and "our" to imply his insider perspective and judgment. In the *HK,* Lie transforms Keyzer's first person pronouns into "they" (the Europeans) "them" (people there) and "he" ("a European gentleman) to emphasize his outsider or observer perspective. The changing of pronouns was the turn of actor position and agency. Through his citing practice, the readers understand that it was "the European gentleman" as the actor and agent, who did the criticism while Lie's role becomes secondary, if invisible or indirect.

In borrowing De Lanessan's text, Lie applies this strategy further. He changes the subjective position and the voice of authority and supplements it with his own words and intention in such a way that his Chinese Peranakan readers might interpret them as De Lanessan's words or ideas. De Lanessan wrote:

> I think it would be useful to place under the eyes of our countrymen a tangible proof of error they make when they talk about China and Annam as semi-barb arous countries […] This philosophy reveals the mindset of the yellow race, in the same way as the catechism and the Gospels uncover the genius people in the places where Catholicism dominates. The doctrine of Confucius and Mencius dominate China and Annam as the doctrine of Jesus to the French people […] The form in which this doctrine was taught by the Chinese philosophers

> to their disciples is analogical to that of employed by the founders of the Christian religion. *(La morale,* De Lanessan 1867: 1, 6, 8.*)*[16]

In Lie's words, it became:

> Mr. de Lanessan, a Frenchman who is well acquainted with custom and institutions of Annam (Vietnam) and China, had written a book in which he acknowledges that the custom laws of these two peoples equal to the custom law of European who is well-known as well-mannered people; so that if a person obeys the Confucius' teaching and his pupil's, Bengtjoe, he will be heard and respected not only in Shanghai or other places in China but also in London and Paris. *(HK*, Lie 1897: 7-8.*)* [17]

When De Lanessan published *La morale,* his intention was well stated in his introduction, through which he wanted not only to introduce the Chinese philosophy to his European comrades but also to refute the common judgment that China and Annam were semi-barbarous countries. De Lanessan's personal admiration of Chinese moral philosophy and politics dominates his nuanced introduction and epilogue of the book, particularly in his comparative perspective between Chinese philosophy and Christian doctrines. [18] On the other

---

[16] J'ai pensé aussi qu'il serait utile de placer sous les yeux de nos compatriotes une preuve tangible de l'erreur qu'ils commettent quand ils parlent de la Chine et de l'Annam comme de pays à demi barbares […] Cette philosophie révèle la tournure d'es prit de la race jaune, au même titre que le catéchisme et les évangiles décèlent le genie des peuples chez lesquels le catholicisme domine. Chinois et Annamites sont aussi imprégnés de la doctrine de Confucius et de Mencius que les Français de celle de Jésus […] La forme sous laquelle cette doctrine était enseignée, par les philosophes chinois, à leurs disciples, n'est pas sans analogie avec celle qu'employa plus tard le fondateur de la religion chrétienne.

[17] Toewan de Lanessan, saorang Prasman jang kenal baik adat-lembaga bangsa Anam dan Tjina, ada mengarang satoe kitab, di mana ija menjataken, bahoewa peratoeran adat dari doewa bangsa itu ada bertimbang sama atoeran adat dari bangsa Europa jang telah ternama bangsa sopan; maka djika saorang ada menoeroet betoel pada pengadjarannja KHONGHOETJOE dan goeroe ini poenja moerid jang bernama BENGTJOE, boekanlah sadja orang itoe ada diendahi dan dihormati di Sianghai atawa di lain-lain tampat di Tanah Tjina, hanja nanti diendahi dan dihormati djoega di London dan di Parijs."

[18] De Lanessan's sympathy to the Chinese philosophy invited critics from his comrades. W.A.P. Martin (1897: 796-798) criticizes de Lanessan's work as non-academic and closer to propaganda to convince his European comrades that the Chinese and Vietnamese were not semi-barbarous. The work contains mistakes on the premises of the superior qualities of human being, heaven, and afterlife due to de Lanessan's lack of language knowledge. These mistakes came from the decision to depend the work on "the somewhat diluted translation of Pauthier" and the wrong judgment in comparing Christianity and Confucianism. Martin make a final comment by saying: "Their (Chinese philosophy) transforming energy is not to be compared with that of the gospel of Christ".

hand, rather than presenting the Chinese philosophy as equally as valuable as Catholicism – two philosophies which are working in parallel ways in geographically separate places – Lie emphasized that Confucianism is universal in both Western and Eastern worlds. Lie's writing not only represents the desire for equality with Western culture but also a necessary imagination for Confucian followers to be a part of the global world. The juxtaposition of "Shanghai or other places in China" to "London and Paris" reinforces the idea that Confucianism makes these metropoles accessible and creates universally respectful subjects (*jang diendahi dan dihormati*). Situated in the racially segregated Batavia and within the context of mounting pressures against the Chinese, the way his message was crafted under de Lanessan's authority suggests Lie's strategy was to use Confucianism as currency in order to achieve a better subjective position in and beyond the colonial world. This idea should be considered seriously as none other than the governor general of French Indo-China himself admitted the superiority of Confucian moral teachings. A similar pattern reoccurs when Lie mentioned that several Christian priests, who had been coming to China two hundred years ago, felt pressured to praise (*merasa ada terpaksa aken poedji*) the superb teachings of Confucius (*HK,* Lie 1897: 5).

While De Lanessan clearly appreciated and considered Confucianism equivalent to Christianity, he eventually drew differences between the two.

> Both have this in common: they contain themselves almost exclusively in the moral part of philosophy. However, philosophers of China and Annam are different from the philosophers of most other nations by their almost absolute absence of any metaphysical concern. The issues of free will, soul, divinity and afterlife do not appear to get any place in their meditations. Their kingdom is in this world, their moral teaching addresses how men with their whole existence must progress and, consequently, will find the reward of their virtues, as

well as punishment for their misdeeds on this earth. *(La Morale,* De Lanessan 1867: 7, italics is in its original.*)*[19]

Lie, however, did not translate this part. He instead wrote his version of Confucianism which encompasses Eastern and Western values and emphasizes that it works as universal humanism.

> "(Confucius said) I am working for everybody without discriminating against any of them, because – in my opinion – all human beings can be considered as one family, and I was assigned to be a teacher of this family [...] My teaching is a teaching for everyone and should be followed by everyone". *(HK,* Lie 1897: 31, 32.*)* [20]

In these examples, Lie's strategy of translating and citing the Western texts is more like an appropriation, which was a common practice in the Malay writing tradition. Applying the "conglomerate authorship", he oscillated from one text to another to adjust them to his aim. In the introduction, Lie demonstrated some degrees of freedom to select, omit, add, assemble and/or rewrite his own version. In the narrative of the Confucius' life story, he followed the plot and translate the content of Keyzer's text in a closer manner manner but not without caution. Lie chose to modify or omit certain sentences or paragraphs. For example, Keyzer compared the figures of Confucius and Mohammad in ways that are favorable to the earlier and disrespectful and derogatory to the latter (*De heilige boeken* 1862: i-ii). Lie dropped Mohammad's name off from his writing and did not

---

[19] Toutes les deux ont cela de commun qu'elles se bornent à peu près exclusivement à la partie morale de la philosophie. Toutefois, les philosophes de la Chine et de l'Annam se distinguent de la plupart de ceux des autres nations par l'absence à peu près absolue de toute préoccupation métaphysique. Les questions du libre arbitre, de l'âme, de la divinité et de la vie future ne paraissent pas tenir la moindre place dans leurs méditations. *Leur royaume est de ce monde*, leur morale s'adresse à des hommes dont toute l'existence doit s'écouler sur cette terre et qui, par suite, devront y trouver la récompense de leurs vertus, comme le châtiment de leurs mauvaises actions.

[20] "Akoe hendak bekerdja aken goena segala orang, dengan tida memilih siapa adanja marika itoe, kerna – toeroet pikirankoe – samoewa orang poen ada teritoeng pada satoe koelawarga sadja, dan akoe ini ada dititahken akan djadi pengajar di dalam koelawarga itoe [...] Pengadjaran jang dibriken olehkoe, jaitoelah soewatoe pengadjaran jang haroes ditrima dan ditoeroet oleh samoewa orang".

Similar sayings occur several times in the introduction and main text. See: Lie (1897: 4, 24, 31, 34, 97-98, 106).

take it as an opportunity to promote Confucianism as a better teaching than Islam. In reading this omission, it becomes clearer that Lie's intention is to deal with the Dutch colonizer and White supremacy. He did not aim to create tension and problems with Muslim groups, nor did he aim to raise superior feeling among the Chinese Peranakans against other colonial subjects.

In applying the strategy of indirect agency, people may see his referral as a compliance with Western supremacy. I argue, however, that through an indirect manner, Lie exercised his agency as an author in the best way he could to write with the West and against the West. The purpose of borrowing can serve several aims. First, as a Chinese Peranakan who had no contact with China nor appropriate Chinese language skills, Lie could still make his proposal of Confucianism convincing to his Chinese Peranakan fellows for he claimed his referrences as people who were knowlegable about Confucianism and Chinese culture. The second concern goes with the fact that as a colonial subject, Lie had to comply with censorship and penalties under the regulation of pers and printed material (*het drukpersreglement*) applied in 1881 by the Dutch colonial government (Kuitert 2011: 75). The regulation implemented scrutiny, censorship and/or banning to both printed materials imported from Europe and the publications within the Netherlands East Indies, which were categorized as too critical and/or against the government. Some cases show that the authors and publishers could receive a fine ranging from 200 to 5000 guilders, a year of imprisonment and thereafter a close supervision (Kuitert 2011: 78, 82). Therefore, translating and citing materials that were critical to Western supremacy yet had been uncensored prior to their coming in the Netherlands East Indies was important to make his work circulated under little, or even no, investigation. Another important reason may concern his safety and protection against the government penalty. As he applied an indirect agency, his criticism was covered by "the European gentlemen's voices."

From colonial subjects to modern citizens

In this section, I address the representation of Confucius as a social actor. As it is suggested in the CDA, through the representation of Confucius as the main character and his social and political activities, Lie exercised his agency as an author to address social inequality that the Chinese faced and to introduce the concept of modern citizenship among the Chinese Peranakans. Embedded in Confucius' morality and his flexibility of crossing borders, in my opinion, Lie proposed that virtue and morality are political concepts through which the Chinese Peranakans could valorize their position from subjects to citizens. He suggested that good governance needs to fight for and the Chinese Peranakans should participate in it through active citizenship. Crossing borders also evoked the idea of cosmopolitanism, through which Lie proposed an alternative subjective technology to his Chinese Peranakan fellows. The experiences of the Chinese Peranakans with the Dutch colonizer had contained them in the dichotomy of the West versus the Rest. By introducing Confucianism, Lie added China as another patronage through which they could imagine struggles, resistance and, even, subversion against their subordinate position as colonial subjects. Being cosmopolitan allowed them to be more flexible and enabled them to cross the rigid boundaries, both physically and imaginatively.

A. Crossing borders and flexible subjects

In Lie's main text, Confucius is described as being born in Louw (*Lu*)[21] and as being a subject of the Louw country although he did not reside permanently in this country. He visited other countries and spent much of his life teaching and moving from place to place when he considered his tasks have

[21] Keyzer used the closest pronunciation of the Chinese names, places and ranks in Dutch. Lie adjusted them into Hokkien dialect. For example, Keyzer used Yen-Che for the name of Confucius' mother, Lie used the Hokkien version of it, Gan Tien Tjaij while the standard contemporary *pin yin* is Yan Zhengzai. For the names of the kingdoms where Confucius visited, Keyzer used among others Yen and Tsi while Lie used Ian and Tje for these places. Because their stories of Confucius' visit are different from other sinoogists and the current version, some of the names and places are unidentifiable. I choose to maintain the names and places that Lie used and add their current *pin yin* version whenever available.

been accomplished or when he felt his teachings were not being thoroughly accepted or applied by the rulers. His first experience of crossing a border was to visit Ian country upon the invitation of the Ian lord who needed Confucius' advice to enforce legal reforms. The second visit was to Tje territory to provide advice on good governance. This was followed by various visits to different regions. In between his visits to many places, he spent time teaching in his own school in Louw, where thousands of pupils studied faithfully under his direction.

The story of how Confucius left his country, traveled from one kingdom to another and did not belong to the community in the countries where his visited might remind Chinese Peranakan readers about their history of migration to the Netherlands East Indies. There are, however, huge differences between Confucius' and their stories of migration. As immigrants, the Chinese experienced neither respect nor acceptance from the local government. In contrast to Confucius who enjoyed respect from and provided advice to local rulers, the Chinese Peranakans were cast as second class subjects and had no political roles even though they contributed significantly to the Dutch colonial economy. In terms of the length of their stay, Confucius visited and lived in several kingdoms for relatively short periods while the Chinese Peranakan stayed and lived in the Netherlands East Indies for generations. They assimilated into native communities with whom they lived together harmoniously (Lombard and Salmon 1993; Graaf, Pigeaud, and Ricklefs 1984) before the Dutch came and put them in a separate category from the natives. While Confucius enjoyed the freedom to cross borders, the Chinese Peranakans were restrained from travelling beyond their living areas under the strict regulations of *passenstelsel* and *wijkenstelsel*.

Another situation which possibly triggered an even stronger desire of crossing borders was a large scale migration from China. At the time that Lie wrote the *HK*, the region of Southeast Asia had witnessed an influx of migration. As a part of the global migration phenomena, Southeast Asia received up to

11 million Chinese immigrants, with about four million of them entering the Netherlands East Indies during the period from the 1880s to the 1910s (McKeown 2004: 158). The massive opening of plantations and mines in the Netherlands East Indies had attracted large numbers of mainland Chinese who came as free migrants or forced laborers. Another important factor contributing to the migration influx was less restrictive border regulations.[22] Compared with the Chinese newcomers under the global migration phenomena, the Peranakans experienced a complicated position as they had been living in the Netherlands East Indies for generations and were rooted in local cultures. It became a bitter irony that within the position of neither completely foreign nor local, their mobility was restricted by *passenstelsel.*

The contrast between Confucius' and their living situation, I argue, might evoke a necessary imagination of "flexible subjects". My concept of "flexible subjects" borrows its root from Aihwa Ong's (1999) *Flexible citizenship*, which is used to describe the power of wealthy Chinese businessmen or top managers to negotiate and benefit from border crossing activities in the modern nation-state era. Since the Chinese *peranakans* and the natives were marginalized and unprivileged under the Dutch colonial administration, the term "subject", in my opinion, is more appropriate than "citizen". In representing Confucius' flexibility in crossing borders and self-determination, Lie proposed that the Chinese Peranakans fight for this same right. Not long after the publication of the *HK,* Lie and other Chinese Peranakan leaders established the Tiong Hoa Hwee Koan (The Chinese Association) in Batavia in 1900. The THHK was the first non-European civil organization acknowledged by the Dutch government. They conducted important negotiations with the Dutch government, one of which was to put an end to the *passenstelsel*, which was finally

[22] As McKeown (2004) argues, the mass migration was a phenomenon prior to modern nation-state formation and before the discourses of nationalism and citizenship influenced the enactment of strict border controls and immigration regulations.

abolished in 1911 (Kwee 1969: 58-59).[23]

B. Good governance and active citizenship: Confucian morality in political sphere

Another strong representation of Confucius is the acceptance and respect of him by different kings and high officials who were eager to learn his teaching wherever he went. The respect was not granted because of his noble genealogy even though it might open his access to the elites. Lie and his European sources seemed to agree that Confucius deserved the respect because of his exemplary morality, amiable character, broad vision and superb teaching (*HK*, Lie 1897*:* 5). In the *HK*, the Confucian teaching, I argue, serves several aims in evoking political awareness among the Chinese Peranakans. First, the representation of superior teaching was a strategy to refute the negative stereotypes against the Chinese which grew stronger during the anti-opium campaign. Second, the teaching of Confucius could be used as a modus for the Chinese Peranakans to obtain greater social and political roles. Embedded in the figure of Confucius, Lie demonstrates that high morality and social and political actions are inseparable. The kings, high officers, and students as well as common people highly respected and valued him and his teaching mainly because he was excellently and consequently applying his own words and teaching in every position he had; be he a citizen, civil servant, child, father, husband or teacher (*HK*, Lie 1897*:* 5-7*)*. In his role as a political subject, his morality guided his political decision.

> (Confucius said to his disciples,) "It's been a year that I have lived here (Tje country), but the lord and his officials are still in the same situation as at the time I arrived, and his country remains as chaotic as it was

[23] The ideas of crossing borders and becoming modern can be found in Lie's most famous work, *Sjair Siti Akbari* (The story of Siti Akbari, 1884), which was reprinted three times. Francesco Benitez (2004: 213) argues that Lie introduced the ideas of a modern subjectivity through the main character. Framed in a complicated love story, Siti Akbari was illustrated as a woman with self-determination whose adventures takes her to cross various boundaries and categories although in the end she chose to follow *adat* (the customary law). Akbari's womanhood symbolizes "a site of instability that makes manifest both the possibilities of social transformation as well as the anxiety over the possibility of social reproduction".

> before". […] The lord had remained in his bad habits although he was still paying respect to Confucius. This teacher did not see any sign whether the lord would put his teaching into practice. Therefore, KHONGTJOE planned to leave in an appropriate manner. *(HK,* Lie 1897: 32-33*.)* [24]

This story implies that it is an obligation to those who believe in the Confucian teaching to remain consistent with their morality and uncompromised against the ruler's wrongdoing. Thus, morality is inseparable from one's actions and choices in the political sphere.

In the reform of governance, Confucius' approach was top-down. He believed that the leader was a key factor for good governance and therefore should have appropriate conduct so as to maintain the order of his country. To the lord of Louw, who wanted to start good governance in his country, Confucius adviced him to raise people's welfare by lowering taxes and abolishing corveé (*HK*, Lie 1897: 65). After people's welfare had increased, the lord should enforce law and order, morals and customs.

It also becomes clear that through the figure of Confucius, Lie wanted to criticize the Dutch colonial policies. For example, Lie wrote about one of Confucius' students, Tjoe Kong, who had been promoted as a major of Sin Iang city. Confucius gave him the following advice:

> "Never give instruction to the people to do VOC-like work (*kerjaan koempenia*n), while they should do farm work, or different sort of works, which is compulsory"*(HK,* Lie 1897: 83*).*

The use of words *kerdjaan koempenian*, which the latter word was derived from the Malay spelling of the Dutch word *Compagnie,* to refer to *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*

---

[24] Soedah satahon akoe ada di sini, tapi Baginda dan sekalian ponggawanja masih sadja ada sabagimana adanja di tempo akoe baroe datang di sini, sedang hal karadjaannja masih djoega tinggal koesoet, sabagimana di tempo doeloe". […] Baginda radja tetap sadja di dalam kalakoeannja jang koerang baik, dan maskipoen sanantiasa ija ada membri hormat pada KHONGTJOE, tiada djoega goeroe ini dapat lihat pengadjarannja ditoeroet oleh baginda. Sebab bagitoe, KHONGTJOE merasa ingin aken berlaloe dengan sapantasnja.
A similar theme occurs in pp. 42, 62.

(VOC – United East-Indie Company or Netherlands East-Indie Company),[25] hints at Lie's strong opposition to the *cultuurstelsel* or mass plantation system implemented by Governor General Johannes van den Bosch in 1830, which led to a period of impoverishment for Javanese farmers and villagers.

The starting point for good governance, however, is none other than a disciplining of the lord's conduct so that he would be a good role model for his people. Lie illustrated that whenever a lord implemented Confucius' advice, his country became strong and his people enjoyed better lives (*HK,* Lie 1897: 66). Max Weber (1951: 153) notes that a top-down approach has been long embedded in the Confucian tradition in China. In old times, the kings were responsible for maintaining good natural and socio-political order. When a kingdom experienced natural disasters, it was the king who was blamed because of the association between the particular disaster and the leader's lack of moral conduct. It was also the king who took responsibility to educate his people and to make them cooperative in maintaining the social harmony and order. Chaos occurred when people lacked an education.

About the criteria of good leaders, Lie discussed two qualities. They were "following the middle way" (*memegang sama tengah*) and *lee* (sic.), which the latter, according to Lie, could not be translated in a simple way in Malay. Following the middle way means a leader should neither be too loose in applying law and order nor too impetuous. Instead, a good leader should be considerate and thorough before making decisions. Another interpretation of following the middle way is to strike the right balance in social relationships: one should neither be arrogant (*djoemawa*) nor submissive (*toeroeti sekalian kahendak orang*), but should be in between the two poles.

Lee (li) means following right thinking, responsibility, order, customs, appropriateness, politeness, and other good reasons. It means controlling one's ego and knowing one's limit. Doing

[25] "Djangan sekali kaoe soeroeh rahajat lakoekan kerdjaan koempenian, sedang ija-orang misti lakoeken kerdjaan tani, atawa lain-lain kerdjaan, jang tra-boleh tida dilakoeken olehnja".The word "*kumpeni*" was commonly used by Javanese – even long after the Indonesian independence – to refer Dutch people in general.

lee includes doing one's duty as it is set to him/her in a timely and responsible manner; saying the truth in an appropriate manner; conferring with others in a considerate way, so that the mode of interaction is neither too high nor too low; fulfilling one's responsibility to the leader, fellow men and subordinates; and taking opportunities to contribute to the development of country and to set order among its people.

For a ruler, *lee* is the key to acquiring charisma because *lee* consists of fairness, love and an orientation toward the people. It is understood that a ruler with *lee* will in turn be recognized by his people. *Lee* creates not only a strong bond between the ruler and the people but also fosters people's obedience, support, and loyalty. Different from Weber's conception of charisma as being specific gifts with supernatural power, Lie suggests that charisma is behavior-based, thus it is learned and developed. *Lee* is the core of civilization because it is a tool for reflection, good morality and humanity and sets us apart from the animal world. *Lee* is also the core of religiosity for doing *lee* means fulfilling one's responsibility to God and human being (*HK*, Lie 1897: 37-40, 67-71).

> Confucius has a strong self-determination in his heart. He believes that God (*Allah*) had given him a task to provide good teaching. He does, therefore, his best to do his tasks in small kingdoms, which were the parts of the empire. Although at many times he faces difficulties and shortages during his trips to remote areas, he has never cancelled his journeys. He does not want to withdraw himself from his obligation even though there are big difficulties, people hampers him (from his goals), people are jealous and humiliating him, and, even, there are dangers. In short, nothing can diminish his strong heart and will. *(HK,* Lie 1897: 101*.)* [26]

[26] KHONGTJOE ada merasa tetap di dalam hati, bahoewa Allah telah membri padanja kahidoepan di doenia ini, dengan menakdirken, jan ija misti mengoewarken pengadjaran itoe. Maka dengan sabisa-bisanja ija lakoeken kamistian itoe di dalam karadjaan-karadjaan ketjil, jang di masa itoe ada djadi bagian-bagian dari karadjaan keizer. Maskipoen seringkali ija dapat kasoesahan dan kamelaratan besar di dalam perdjalanannja ka tampat-tampat djaoeh, tiada loepoet ija bikin djoega perdjalanan-perdjalanan itoe. Ija tiada maoe berenti melakoeken kamistiannja itoe, maskipoen ada sangkoetan-sangkoetan besar, maskipoen ada orang-orang jang menjoesahi, jang menjindiri atawa mehinai padanja, malah maskipoen ada bahaja djoega. Dengen pendek boleh dibilang, tida ada satoe apa bisa hilangken katetapan hatinja dan kahendaknja jang keras.

The figure of Confucius, Lie suggested, is an active proponent of good governance. Whenever asked by kings and officers, he always provided advice even though he was not a part of government. He was appointed several times to work as an officer and once a minister of Justice (*soekouw*) in the Louw kingdom (*HK,* Lie 1897: 59). He is an uncompromised officer who sets up good and fair rules although they create enemies and jealousy. Most of his careers, however, ended quickly since the rulers were not persistent enough to apply his advice or corrupt officials maneuvered to end his career.

Confucius is an excellent example of an active and responsible "subject" of the Louw kingdom who could exercise his political rights as a "citizen". Etiénne Balibar (1988: 723, 726) argues that citizenship – a concept derived from Greek's *politeia* – entails two criteria: "it is bound to the existence of a state and therefore to a principle of public sovereignty, and it is bound to the acknowledged exercise of an individual 'capacity' to participate in political decisions". In response to Balibar's definition of citizenship, the political position of the Chinese in the colonial world becomes problematic under the overlapping of "foreign" and "subject" categories. They were 'foreign' to the extent that the colonial government denied the recognition of their roots and bonds in the Netherlands East Indies. As subjects, they were beholden to colonial policies, but denied political participation. Thus, through the representation of Confucius' political rights and his relationship to the rulers and high officials, Lie aimed to create an awareness among the Chinese *peranakans* about their political rights and obligations.

C. Cosmopolitanism and an alternative of political loyalty

In several cases, Confucius left a country because he did not consider the ruler to be committed enough to apply good governance. He left accordingly and went to another kingdom where the ruler was interested in his teaching. It is because Confucius' teaching was applicable across times and places, he could always find a place to go and to promote his ideas,

through which I argue that the teaching of Confucius provokes cosmopolitan ideas and its political implication in terms of a greater flexibility in creating an alternative political loyalty. By cosmopolitanism, I refer to the concept of a global political community that ensures the relationship of mutual influences among individuals and states regardless of their origins. Derived from the Greek words of *kosmo-polities,* which means "world" and "citizens" respectively, cosmopolitanism suggests the spirit of universal humanism that transcends the regional particularisms of territory, culture, language, or race. In regard to universal humanism, cosmopolitanism's spirit supports "a right to visit to which all human beings have a claim, to present oneself to society by virtue of the right of common possession of the surface of the earth" and not to be treated in a hostile manner by another upon his arrival on other's territory, which is known as *ius cosmopoliticum* or "cosmopolitan right"(Cheah 1998: 22-23).

In the introduction of the *HK* and in several parts of its main text, Lie emphasized that Confucian teaching is universal and necessary to be a part of global world.

> [...] if a person obeys the Confucius' teaching and his pupil's, Bengtjoe, s/he will be heard and respected not only in Shanghai or other places in China but also in London and Paris *(HK,* Lie 1897: 7-8*).*[27]

The juxtaposition of "Shanghai or other places in China" to "London and Paris" reinforces the idea that Confucianism creates universally respectful subjects (*jang diendahi dan dihormati*). By promoting Confucianism as a universal value or currency to access both Eastern and Western worlds, Lie seemed to suggest cosmopolitan ideas to his Chinese comrades, even though he did not use this terminology in particular.

It goes without saying that the representation of Confucius as a great Chinese sage and philosopher, his

[27] [...] maka djika saorang ada menoeroet betoel pada pengadjarannja KHONGHOETJOE dan goeroe ini poenja moerid jang bernama BENGTJOE, boekanlah sadja orang itoe ada diendahi dan dihormati di Sianghai atawa di lain-lain tampat di Tanah Tjina, hanja nanti diendahi dan dihormati djoega di London dan di Parijs.

ancestral genealogy and some stories of the older Chinese kingdoms which closely related to the Chinese civilization history also serves an important reconnection with China in a way that Benedict Anderson (1983) calls an imagined community. Reconnecting with China, I argue, relates to the idea of self-determination and possible withdrawal of loyalty from the unfair and repressive Dutch colonial government. China serves as another option of patronage against which they could define their "self" into a new category and, thus, make it possible to create an alternative relationship rather than the dichotomy they had with the Dutch colonizer. The use of Confucianism to reconnect the Chinese Peranakans with China took a bolder shape when Lie and his fellows founded the THHK. One of the goals they formulated was "to enhance the Chinese culture, as compliant as possible to the rules of the prophet Confucius […]". They established schools where the Chinese Peranakan children could learn their Chinese heritage and modern (Western) knowledge all together. One of the fulfillments of the ideas of being flexible and cosmopolitan subjects took place when the THHK was able to send 21 students to study in the Kay Lam Hak Tong – a school provided by the Chinese government for the children of overseas Chinese in February 1907 or five years before Lie's passing,

Conclusion

As a Malay writer who applied the *hikajat* genre, I have demonstrated that Lie creatively crafted his own version of Confucius and Confucianism for his Chinese peranakan fellows. Even though the sage had lived more than two thousand years ago, Lie contextualized his teaching within the Dutch colonial situation. In the *HK*, Lie exercised his indirect agency as an author to propose an alternative technology of self as a way to address and subvert the Chinese Peranakans' subordinate position under the Dutch racial segregation politics and anti-opium campaign.

Embodied through the figure of Confucius, Lie suggested the concept of virtuous self, which has multiple elements. It is all together political, ethical, cosmopolitan, and, yet, being connected with their Chinese traditions. Morality should inform one's political choices and actions. Being virtuous is also being supporting and actively negotiating for good governance – an attitude that he and other Chinese Peranakans put in the the foundation of the THHK.

In his real life, Lie practiced cosmopolitanism. Even though he had never physically crossed the borders beyond the Netherlands East Indies, he traveled through his ideas and political and social activities. While he actively promoted Confucianism and Chinese culture, it did not necessarily hinder him to be a proponent of modernity. It is, indeed, in line with the spirit of cosmopolitanism as the cosmopolitan ethics do not mean detachment from one's roots, commitments and affiliations. Rather, it means an ethos or an ability to go beyond borders – imaginatively or physically – without abandoning "particularities of places, characters, historical trajectories, and fates" (Robbins 1998: 1). The facts that Lie actively promoted Confucianism, participated in several Chinese organizations, adopted European and Chinese novels and wrote in the Sino-Malay language demonstrate that he himself was a flexible subject who subverted the dichotomy between the West and the Rest in the Dutch colonial world.

Acknowledgement

I dedicate this article to Laurie J. Sears and Francisco Benitez who draw my interest to study the Sino-Malay literature. I owe huge debts to Laurie Sears for providing insightful feedback, Henk Maier for insisting that Lie must have basing himself from the Dutch sources, Maya Liem for encouraging me to write this article, Andri Harianja for proof-reading my Chinese and Dutch translations, Putri Santoso for my French translation, and Hollis Miller for my English draft. I should, however, be responsible for all mistakes. I also enjoyed intellectually stimulating discussions with Didi Kwartanada, Elizabeth Chandra, Endy Saputro, and Sutrisno Murtiyoso.

References

Adam, Ahmat. 1995. *The vernacular press and the emergence of modern Indonesian consciousness (1855-1913).* Ithaca, NY: Southeast Asia Program, Cornell University.

Aguilar Jr, Filomeno. 2001."Citizenship, inheritance, and the indigenizing of '*Orang Chinese*' in Indonesia", *Positions: East Asia Cultures Critique* 9/3: 501-533. [Retrieved from http://muse.jhu.edu/journals/pos/summary/v009/9.3aguilar.html, accessed on 04-01-2012.]

Albrecht, J. E. 1879. "Het schoolonderwijs onder de Chineezen", *Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap* 25: 225-241.

Anderson, Benedict. 1983. *Imagined communities; Reflections on the origins and spread of nationalism.* London / New York: Verso.

Balibar, Etienne. 1988. "Propositions on citizenship" (translated by Simon James Critchley), *Ethics* 98: 723-730. [Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2380893, accessed on 29-04-2016.]

Benitez, Francisco. 2004. *Awit and syair; Alternative subjectivities and multiple modernities in nineteenth century Insular Southeast Asia.* PhD thesis, University of Wisconsin-Madison.

Bewerker van de Nederduitsche uitgaaf van den Koran [Keyzer, Salomon]. 1862. *De heilige boeken der Chinezen, of de vier klassieke boeken van Confucius en Mencius (Khoeng-tseu en Meng-tseu), voorafgegaan door een inleidend levensberigt van Confucius en Mencius, en voorzien van opheldernde aanmerkingen en historische aantekeningen, naar de beste Europesche vertalingen door den bewerker van de Nederduitsche uitgaaf van den Koran.* Haarlem: J.J. van Brederode.

Bloembergen, Marieke. 2007. "The dirty work of empire; Modern policing and public order in Surabaya, 1911-1919", *Indonesia* 83: 119-150. [Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40376415, accessed on 23-05-2015.]

Borel, Henri. 1896. *De Chineesche filosofie; Toegelicht voor niet-sinologen.* Amsterdam: Van Kampen.

Chambert-Loir, Henri. 1984. "Muhammad Bakir; A Batavian scribe and author in the nineteenth century", *Review of Indonesian and Malayan affairs* 18/2: 44-72.

Chambert-Loir, Henri. 2015. "Confucius crosses the South Seas", *Indonesia* 99: 67-107. [Retrieved from http://muse.jhu.edu/journals/ind/summary/v099/99.chambert-loir.html, accessed on 03-06-2015.]

Chatterjee, Partha. 1993. *The nation and its fragments; Colonial and post-colonial histories.* Princeton, NJ: Princeton University Press.

Cheah, Pheng. 1998. "The cosmopolitical – today", in: Pheng Cheah and Bruce Robbins (eds), *Cosmopolitics; Thinking and feeling beyond the nation,* pp. 20-41. Minnesota/London: University of Minnesota Press.

Coppel, Charles. 1981. "The origins of Confucianism as an organized religion in Java, 1900–1923", *Journal of Southeast Asian Studies* 12/01: 179-196. [Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20070420, accessed on 22-05-2009.]

Coppel, Charles. 1986. "From Christian mission to Confucian religion; The Nederlandsche Zendingsvereeniging and the Chinese of West Java 1870-1910", in: David P. Chandler and M.C. Ricklefs (eds), *Nineteenth and twentieth century Indonesia; Essays in honor of Professor. J. D. Legge,* pp. 15-40. Clayton, Vic.: Southeast Asian Studies, Monash University.

Fairclough, Norman. 2002. "Critical discourse analysis as a method in social scientific research", in: Ruth Wodak and Michael Meyer (eds), *Methods of critical discourse analysis,* pp. 121-138. London: Sage.

Florida, Nancy. 1995. *Writing the past, inscribing the future; History as prophesy in colonial Java*. Durham, NC: Duke University Press.

Graaf, Hermanus, Theodore G.Th. Pigeaud, and Ricklefs, M. C. 1984. *Chinese muslims in Java in the 15th and 16th centuries; The Malay annals of Sĕmarang and Cĕrbon*. Clayton, Vic.: Monash University. [Monash papers on Southeast Asia no. 12.]

Harrison, Robert, Aled Jones, and Peter Lambert. 2004. "Methodology; 'scientific' history and the problem of objectivity", in: Peter Lambert and Phillipp Schofield (eds), *Making history; An introduction to the history and practices of a discipline,* pp. 26-37. London / New York: Routledge.

Hummel, William. 1935. "K'ang Yu-wei, historical critic and social

philosopher, 1858-1927", *The Pacific Historical Review* 4/4: 343-355. [Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3634045, accessed 30-10-2012.]

Kuitert, Lisa. 2011. "Censuur in Nederlands-Indie in de negentiende eeuw; Kranten, boeken en het drukpersreglement", in: Marita Mathijsen, *Boeken onder druk; Censuur en pers-onvrijheid in Nederland sinds de boekdrukkunst,* pp. 75-88. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Kwartanada, Didi. 2011. "Translations in Romanized Malay and the Revival of Chineseness among the Peranakan in Java", in: Ronit Ricci & Jan van der Putten, *Translation in Asia: Theories, practices, histories,* pp. 119-135. Manchester: St. Jerome Publishing.

Kwee, Tek Hoay. 1969. *The origins of the modern Chinese movement in Indonesia.* Translated by Lea Williams. Ithaca, NY: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.

Lanessan, Jean L. de. 1896. *La morale de philosophes Chinois: Extraits de livres classique de la Chine et de l'Annam.* Paris: Felix Alcan.

Lee, Guan Kin. 2006. "Introduction – A Chinese journey; Lim Boon Keng and his thoughts", in: Wen Ching (Dr. Lim Boon Keng), *The Chinese crisis from within* (revised edition), pp. v-xii. Singapore: Select.

Legge, James. 1867. *The life and teaching of Confucius; With explanatory notes.* London: Trübner.

Legge, James. 1880. *The religions of China; Confucianism and Tâoism described and compared with the Christianity*. London: Hodder and Stoughton.

Lie, Kim Hok. 1897. *Hikajat Khonghoetjoe; Ditjeritaken di dalam bahasa Melajoe.* Batavia: G. Kolff and Co.

Lombard, Denys and Claudine Salmon. 1993. "Islam and Chineseness", *Indonesia* 57: 115-131. [Retrieved from http://alliance-primo.hosted.exlibrisgroup.com/UW:all:TN_jstor_archive_3410.2307/3351244, accessed on: 22-05-2007.]

Maier, Henk. 1997. *We are playing relatives; A survey of Malay writing.* Leiden: KITLV Press.

Mansvelt, William, P. Creutzberg, P.J. van Dooren, W. Korthals Altes, and P. Boomgaard. 1994. *Changing economy in Indonesia; A selection of statistical source material from the early 19th century up to 1940*. The Hague: Nijhoff.

Martin, W.A.P. 1897. "[Review of] *La Morale des Philosophes Chinois; Extraits des livres classiques de la Chine et de l'Annam*, J. L. de Lannesan (1896), Paris: Felix Alcan", *The American Journal of Theology* 1/3: 796-798. [Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3153256, accessed on 12-05-2010.]

McKeown, Adam. 2004. "Global migration, 1846-1940", *Journal of World History* 15/2: 155-189. [Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20068611, accessed on 05-01-2011.]

Millie, Julian. 2004. *Bidasari; Jewel of Malay muslim culture.* Leiden: KITLV Press.

Munsji, Abdullah bin Abdul Kadir. 1843[1953]. *Hikajat Abdullah*. Djakarta / Amsterdam: Djambatan,

Nio, Joe Lan. 1940. *Riwajat 40 taon dari Tiong Hoa Hwee Koan – Batavia (1900–1939).* Batavia: THHK.

Njio, Tjoen Ean. 1900. *Taij Hak atau kitab jang pertama dari pada kitab-kitab soetji dari orang-orang Tjina jang di tinggalkan oleh Nabi Khong Hoe Tjoe (Confucius) ja itoe Soe Sie Pek Boen atau atau Ampat kitab-kitab dari pada ilmoe hikmad jang sanonoh, dan dari pada kaparentahan negri di benoe Tjina jang mana bergoena sekali pada orang-orang Tjina akan mengatahoei agamanja.* Ambon: Ambonsche Drukkerij.

Ong, Aihwa. 1999. *Flexible citizenship; The cultural logics of transnationality*. Durham, NC: Duke University Press.

Ricci, Ronit. 2012. "Citing as a site; Translation and circulation in muslim South and Southeast Asia", *Modern Asian Studies* 46 (Special issue 02): 331-353. [Retrieved from http://journals.cambridge.org/abstract_S0026749X11000916, accessed on 10-09-2016.]

Riedhorst, Johanna C and R.R. Dykstra. 1944. *Malay-English; English-Malay dictionary.* Southwest Pacific: United States Armed Forces (USAF).

Robbins, Bruce. 1998. "Introduction part I; Actually existing cosmopolitanism", in: Pheng Cheah and Bruce Robbins (eds), *Cosmopolitics; Thinking*

and feeling beyond the nation, pp. 1-19. Minnesota/London: University of Minnesota Press.

Rush, James. 1990. *Opium to Java; Revenue farming and Chinese enterprise in colonial Indonesia, 1860-1910*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Putten, Jan van der. 1997. "Printing in Riau; Two steps toward modernity", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 153 (4): 717-736. [Retrieved from http://www.kitlv-journals.nl, accessed on 12-05-2010.]

Sakai, Naoki. 2005. "The West; A dialogic prescription or proscription?", *Social Identities* 11/3: 177-195. [Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=17941884&site=ehost-live, accessed on 01/04/2010.]

Salleh, Muhammad Haji. 1991. *Yang empunya cerita; The mind of the Malay author.* Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Salmon, Claudine. 1981. *Literature in Malay by the Chinese of Indonesia; A provisional annotated bibliography.* Paris: Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme.

Salmon, Claudine. 1987. *Literary migrations; Traditional Chinese fiction in Asia (17-20th century).* Beijing: International Culture Publishing Corporation.

Salmon, Claudine. 2005. "Confucianists and revolutionaries in Surabaya (c. 1880-c1906)", in: Tim Lindsey and Helen Pausacker (eds), *Chinese Indonesians; Remembering, forgetting, distorting,* pp. 130-147. Singapore: ISEAS.

Scheltema, J. F. 1907. The opium trade in the Dutch East Indies I, *American Journal of Sociology* 13/1: 79-112. [Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2762537, accessed on 10-05-2016.]

Suryadinata, Leo. 2002. *Negara dan etnis Tionghoa; Kasus Indonesia.* Jakarta: Pustaka LP3ES.

Tay, Wei Leong. 2010. "Kang Youwei, the Martin Luther of Confucianism and his vision of Confucian modernity and nation", *The University of Tokyo Center for Philosophy Booklet: Secularization, Religion and the State* 17: 97-108.

Tio, Ie Soei. 1958. *Lie Kim Hok: 1853-1912.* Bandung: L.D. Good Luck.

Toer, Pramoedya Ananta. 2003. *Hikayat Siti Mariah.* Jakarta: Lentera Dipantara.

Van Hoëvell, W.R. Baron van & Bleeker, P. 1863. "De afschaffing van het passenstelstel", *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie* I/2: 236-239.

Walker, J.H. 2005. "Hikayat Panglima Nikosa and the Sarawak Gazette; Transforming texts in nineteenth century of Sarawak", *Modern Asian Studies* 39/2: 427-460.

Wang, Gung Wu. 2006. "Foreword", in: Wen Ching (Dr. Lim Boon Keng), *The Chinese crisis from within,* pp. i-iv. Revised edition. Singapore: Select.

Weber, Max. 1951. *The religion of China; Confucianism and Taoism*. Translated by Hans H. Gerth. Glenco, Ill.: Free Press.

Williams, Lea. 1960. *Overseas Chinese nationalism; The genesis of the Pan-Chinese movement in Indonesia, 1900-1916.* Glencoe, Ill.: Free Press.

Wodak, Ruth and Michael Meyer (eds). 2001. *Methods of critical discourse analysis.* London: Sage.

Wong, Young-Tsu, 1992. "Revisionism reconsidered; Kang Youwei and the Reform Movement of 1898", *Journal of Asian Studies* 51/3: 513-54. [Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2057948 , accessed on 01-12-2008.]

Kisah Dua Punden: Kajian Mengenai Punden pada Dua Kelenteng di Parakan dan Magelang[1]

Sutrisno Murtiyoso

PENDAHULUAN

Orang Tionghoa sudah tinggal di Jawa sejak lama, dan meningkat dengan pesat sejak awal abad ke-17 ketika Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen menduduki dan menunjuk Batavia sebagai pusat kegiatan yang baru. Coen mengundang tenaga kerja dari Fujian karena ia membutuhkan sumber daya manusia untuk membangun kota barunya. Dari Batavia, kemudian mereka menyebar ke tempat-tempat lain Jawa seiring dengan meluasnya penguasaan VOC atas Pulau Jawa. Mulai dari pantai utara Pulau Jawa, meluas ke arah timur membangun kelenteng di tiap konsentrasi masyarakat Tionghoa di tiap kota, besar dan kecil. Namun kelenteng baru benar-benar masuk ke pedalaman Pulau Jawa pada perempat kedua abad ke-19, setelah penguasa Mataram di Yogyakarta dan Surakarta dilumpuhkan seusai Perang Jawa (1825-1830). Pertengahan kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 menyaksikan maraknya pembangunan kelenteng di Jawa.

Berita dan tulisan mengenai kelenteng sampai akhir abad ke-20 sangat sedikit. Berita terawal dari musafir Eropa yang singgah di Batavia[2] dan baru berkembang pada awal abad lalu dengan terbitnya artikel-artikel pendek di majalah masa

---

[1] Makalah ini adalah terjemahan dan olahulang sajian pada Simposium *Chinese Temples in Southeast Asia*, yang diselenggarakan oleh Asia Research Centre, National University of Singapore di Singapura pada 1 Maret 2019

[2] Laporan penting terawal dibuat oleh Pastur Guy Tachard (1688). Kemudian karya Ong Tae Hae (1849)

itu, terutama *Sin Po* (Jakarta), *Liberty*[3] (Surabaya) dan *Star Weekly* (Jakarta). Dua buku penting yang terbit di sekitar masa itu adalah karya Ezerman[4] dan Liem Thian Joe[5]. Di perempat terakhir abad lalu muncul buku oleh Moerthiko[6] dan karya penting sinologis Claudine Salmon[7], disusul sumbangan penting oleh Salmon dan Siu yang terbit tahun 1997[8]. Hanya di awal milenium baru, setelah masyarakat Tionghoa dibebaskan untuk mengekspresikan dirinya kembali kita dapat menyaksikan munculnya buku-buku mengenai kelenteng, mulai dari *coffee-table-book* mewah[9] sampai penerbitan pemerintah[10].

Namun selayang pandang saja segera tampak bahwa buku-buku ini lebih mengenai kelenteng di kota besar saja, bahkan kebanyakan memberikan tekanan khusus pada Jakarta. Sudah jelas bahwa kelenteng-kelenteng besar lebih mudah dan banyak ditemukan bahan-bahannya. Masyarakat pendukungnya lebih besar, keadaannya lebih terpelihara serta di masa lalu sudah dibahas orang, sehingga terdokumentasi lebih baik. Apalagi kelenteng besar biasanya paling tua dan jauh lebih terkenal, mereka jauh lebih menarik pandangan dan mengundang orang untuk melihat dari dekat.

Sebaliknya kelenteng kecil, apalagi yang letaknya di pedalaman, jauh dari kota besar, boleh dikatakan tidak menarik perhatian khalayak, bahkan dianggap tidak penting oleh khalayak. Lebih lagi, di masa Orde Baru, kelenteng kecil dengan sumber daya juga kecil, rawan sekali terhadap tekanan luar atau politis. Bangunannya biasanya menyerap unsur-unsur setempat sehingga dipandang rendah oleh mereka yang 'bijak' dan 'murni'. Bahkan kelenteng kecil sendiri seringkali kurang percaya diri dan cenderung untuk

[3] Salahsatu yang terpenting adalah *Klenteng-nummer*, Liberty tahun XIII no. 148, Juli 1940.
[4] Ezerman (1922)
[5] Liem Thian Joe (1933)
[6] Moerthiko. (1980)
[7] Salmon, C. dan Lombard (1985)
[8] Salmon, C. dan Siu (1997)
[9] Misalnya Kleinsteuber, A. dan Maharadjo (2010)
[10] Atmodjo, J. S. dan Witanto, (2000)

meniru cara dan tindakan orang kota besar.

Tulisan ini berusaha untuk mengumpulkan keterangan dan dokumen dari berbagai sumber serta bahasa untuk menyusun riwayat dua kelenteng tertua di pedalaman Jawa. Kedua kelenteng ini dibaktikan bagi punden yang sama, yakni Hok Tek Tjing Sin (Fude Zhengshen, 福德正神) dan berasal dari tempat yang sama, tetapi pada satu titik terpisah dan dipuja oleh masyarakatnya di dua tempat yang terpisah selama lebih dari satu abad, kemudian menemui nasib yang sama pula. Kelenteng tempat mereka berdua bersemayam adalah Hok Tek Bio (Fude miao, 福德廟) di Parakan dan Liong Hok Bio (Longfu miao, 隆福廟) di Magelang.

1. KELUAR DARI KEMELUT

1.1. Kedu di abad ke-19

Penduduk Tionghoa di Jawa Tengah meningkat sejak pertengahan abad ke-18, terutama di kota-kota pesisir, diperlihatkan oleh jumlah kelenteng yang dibangun[11]. Tetapi penetrasi ke pedalaman jauh lebih lambat, disebabkan oleh keadaan yang kacau akibat Perang Perebutan Tahta dalam dinasti Mataram yang terjadi berkali-kali. Hanya seusai Perang Jawa (1825-1830), yang berhasil mengukuhkan kekuasaan Pemerintah Jajahan Belanda di seluruh Pulau Jawa, barulah masyarakat Tionghoa berkembang dan mampu mendirikan kelenteng di pedalaman.

Wilayah Kedu, salah satu kawasan paling subur, terletak di tengah-tengah Jawa Tengah. Sudah sejak awal abad ke-17 ditetapkan oleh Sultan Agung Mataram sebagai salah satu tanah *gadhuhan* dibawah abdi dalem 8 orang Bupati Nayaka[12].

Pada awalnya Kedu dibedakan menjadi dua bagian, mengikuti aliran sungai suci Praga yang mengalir dari utara ke selatan. Sisi timur, disebut Siti Bumija dengan pusatnya di Magelang dan sisi satunya, Siti Bumi dengan kadipaten, kediaman bupati, di Parakan, Jetis[13].

---

[11] Kwee Hui Kian (2008) hal. 200.
[12] Margana, S. (2010) hal. 1.
[13] *ibidem*

Pada awalnya, Parakan lebih penting daripada Magelang bagi Mataram, karena letaknya ada di tengah jalur yang menghubungkan Mataram dengan pelabuhan di pantai utara, Batang dan Kendal. Ketika Perang Jawa meletus, jalur yang menghubungkan Mataram (Yogyakarta) dengan Semarang, sebagai pangkalan utama Pemerintah Jajahan Belanda, menjadi lebih penting, bahkan menjadi urat nadi bagi hidup Mataram, sehingga dipertahankan dengan mati-matian. Magelang menjadi titik pemusatan kekuatan militer Belanda, yang berlanjut sampai sekarang. Adalah pertimbangan militer pula yang membuat Pemerintah Jajahan Belanda mengubah pembagian utara-selatan itu menjadi barat-timur[14], dan memindahkan kadipaten lebih dekat ke jalur arteri militer, yaitu ke Temanggung, 12 km. ke arah timur Parakan.

Namun pusat kegiatan niaga tetap ada di Parakan, karena jaringan dan infrastruktur yang ada di tangan para pedagang Tionghoa sudah mapan disana. Mereka mengungsi keluar sewaktu Parakan jatuh pada Agustus 1825[15] tetapi dengan segera kembali masuk ke Parakan ketika keadaan sudah tenang. Merekalah yang mengelola hasil bumi Kedu dari petani ke pengguna. Di sisi lain Temanggung, sebagai pusat baru hanya didiami oleh para pegawai saja, kegiatan perniagaan baru berkembang nanti di akhir abad ke-19.

1.2. Peristiwa di Jana

Jana (Jono) terletak di Bagelen, sisi selatan Kedu, sekitar 8 km Kota kabupaten Kutoarjo sekarang. Saat ini, Jana hanyalah sebuah desa sunyi tanpa penduduk Tionghoa sama sekali, tetapi sebenarnya Jana sudah menjadi pemukiman Tionghoa yang penting sejak pertengahan abad ke-18[16]. Mereka menanam kapas dan menenun kain mori (kain putih) untuk industri batik di Yogyakarta dan Surakarta[17]. Penduduk awal Jana adalah para pelarian Pembantaian Orang Cina tahun 1740 di Batavia. Di Mataram rombongan pelarian

[14] Algemeene Secretarie (1871) hal. 48.
[15] Louw, P. J. F. (1894) Jilid I, hal 312 dst.
[16] Carey (1984) hal. 2
[17] Horsfield (1826) hal. 179.

ini didukung oleh beberapa Pangeran dan raja Pakubuwana II untuk menyerbu Semarang dan mengusir Belanda dari sana, namun gagal. Di tahun 1743, setelah peristiwa Sunan Kuning yang singkat, kelompok Tionghoa ini membubarkan diri dan memilih menetap di Jana sebagai petani.

Ketika Perang Jawa meletus pada bulan Juli 1825, Jana dianggap amat penting karena terletak di jalur menuju Banyumas di sisi baratnya. Menguasai Banyumas berarti menguasai segenap wilayah sampai pantai barat laut[18]. Orang-orang Tionghoa di kawasan itu, Bagelen, berkumpul di Jana yang dianggap aman karena memiliki perbentengan dari balok kayu yang kuat. Di awal tahun 1826, penyerbuan ke Jana telah dilancarkan oleh kaum pemberontak. Jana diserang dan dikepung selama 2 bulan, pengepungan ini baru bisa dibubarkan ketika pasukan bantuan Jawa-Belanda dari Magelang dibawah pimpinan Kolonel Cleerens datang. Serangan lebih besar datang pada bulan April dan Mei 1827, kali ini Jana benar-benar terjepit, sedangkan pasukan Belanda sedang sibuk mempertahankan Magelang. Penduduk Jana telah merencanakan serangan keluar bunuh diri ketika pasukan bantuan datang dengan susah payah. Gabungan pasukan bantuan dibawah pimpinan Mayor Perié bersama penduduk mati-matian mendesak mundur pasukan musuh untuk memberi kesempatan penduduk memanen sawah mereka. Tapi Perié tidak mungkin tetap di Jana, sedangkan keadaan semakin memburuk.

Pada tanggal 27 Mei Perié memutuskan untuk mundur bersama penduduk Jana. Jalur Loano yang mereka lalui ketika datang sudah tidak mungkin digunakan karena telah sepenuhnya dikuasai musuh. Satu-satunya jalan adalah jalur utara yang lebih panjang. Jalur ini sangat berat karena harus menembus gunung dengan hutan lebat di daerah Wadaslintang. Pasukan Jawa-Belanda menjaga bagian belakang rombongan untuk menangkis serangan, sedangkan lebih dari 600 orang penduduk maju dengan susah payah. Rombongan ini baru bebas

[18] Louw, P. J. F. (1894-1908) Jil.2, hal. 351

dari gangguan ketika mencapai Kaliwiro, setelah berjalan kaki sejauh 60 kilometer dalam 4 hari; dalam keadaan kelelahan habis-habisan.[19]

1.3. Perpisahan

Ternyata para pengungsi itu membawa serta para dewa pelindung mereka -*tepekong*- nama umum untuk punden yang berasal dari bahasa Hokkian *toa-pek-kong* (dabogong, 大伯公) yang bermakna 'paduka tetua yang mulia'. *Tepekong* paling banyak dipuja di Jawa adalah *Tho-te-kong* (Tudigong, 土地公) atau 'paduka penguasa lahan', tapi biasanya disamakan dengan Dewa Kemakmuran, Hoktek Cengsin (Fudezhengshen, 福德正神).

Gambar 1: Contoh Fude zhengshen dari kayu buatan abad ke-19 di Museum Volkenkunde, Leiden [Sumber: Koleksi pribadi]

Bahwa kedua punden ini sudah ada di Jana, mengarah pada kemungkinan mereka berasal dari Batavia, bahkan mungkin dibuat dan dibawa dari Cina[20]. Naskah berbahasa Jawa *Herinneringen van Ko Ho Sing*[21] menuliskan:

[19] Louw, P. J. F. and de Klerck, E.S. (1894-1908) Jil.3, hal.. 109

[20] Bandingkan Liem (1956)

[21] KITLV L.Or. 409 28.860, *Herinneringen van Ko Ho Sing*

pra cina sedhaya guyup	segenap orang Cina bersama
amung brahalanira kang den andel	mengandalkan punden mereka
pinundhi sinuhun-suhun	yang dipuja dan dimohon
jinaga mring cina kathah	dikawal oleh mereka semua
tan pegat den sembayang[22]	tanpa henti dipuja

Mereka terus melakukan ini sepanjang perjalanan melintasi gunung dan lembah dari Jana sampai Kaliwira. Mereka dengan khusuk berdoa dan memohon kepada dewa.

para cina ngiring tepik konge	mereka mengusung tepekong mereka
aneng marga pan pinundhi pundhi	sepanjang perjalanan dipuja
tansah [pegat] den pasangi	tanpa henti mereka memasang
kang dupa kumuluk[23]	dupa yang mengepul

Mengenai jumlahnya, hanya Liem (1956) yang menyatakan dengan tegas bahwa jumlahnya ada dua:

> Sesudahnja sampai di Magelang rombongan dibagi djadi 2 golongan, karena Twa Pek Kong-nja ada dua, jang satu dibawa terus ke Parakan dan jang satu ditempatkan didjalan Ngarakan. [24]

Pengungsian dari Jana ini digambarkan sangat mengerikan oleh Louw[25]. Para pengungsi berangkat pagi-pagi sekali tanggal 26 Mei 1827 setelah membumihanguskan desa mereka. Perié berencana untuk mencapai Merden, sekitar 20 km. di utara Jana pada sore harinya karena jalan terbuka dan landai. Sayang sekali

[22] KITLV L.Or. 409 28.860, pupuh 3-8/9
[23] KITLV L.Or. 409 28.860, pupuh 8-34
[24] Liem (1956) hal. 21.
[25] Louw (1894-1908), Jil. 3, hal.108-109

musuh yang membuntuti terus menerus mengganggu dari belakang. Sore hari mereka bermalam di tengah sawah (yang telah kering) di antara tembakan dan teriakan musuh sepanjang malam.

Esok paginya mereka mulai mendaki kawasan pegunungan yang tertutup hutan perawan, menuju perhentian kedua, Plunjaran berjarak 20 km. Kelompok pelopor harus membuka jalan menembus lebatnya hutan dan menimbun lubang-lubang agar dapat dilalui. Ketika malam tiba, mereka masih berjarak 5 km. dari Plunjaran, tujuan awal. Untung gangguan sudah jauh berkurang karena keadaan jalan yang sulit. Hari berikutnya barulah mereka dengan aman mencapai Kaliwira lewat tengah hari. Rombongan memaksakan untuk berjalan terus ke Wonosobo dan disana diterima oleh Residen malam harinya.[26]

Tanggal 30 Perié mengawal mereka sampai Kerteg dan disana rombongan pecah menjadi dua. Kelompok pertama terus ke Parakan dan kelompok lainnya bersama pasukan Perié berbelok ke selatan, menuju Magelang melalui Sapuran. Menurut naskah L.Or. 409, Ko An Twi ikut pasukan membawa satu punden sedangkan Tan Kong Cwan ke Parakan (mestinya) bersama punden satunya lagi.

... kha an twi	. . . kha an twi
ingkang dhumateng magelang	menuju Magelang
tepik kong kelawan malih	tepekong bersamanya
Tan kong cwan meksihneng	Tan Kong Cwan tetap di
dlagung[27]	jalan besar

[26] Louw (1894-1908), Jil. 3, hal. 109 cat.3.
[27] KITLV L.Or. 409 28.860 *Herinneringen van Ko Ho Sing*, pupuh 9-1

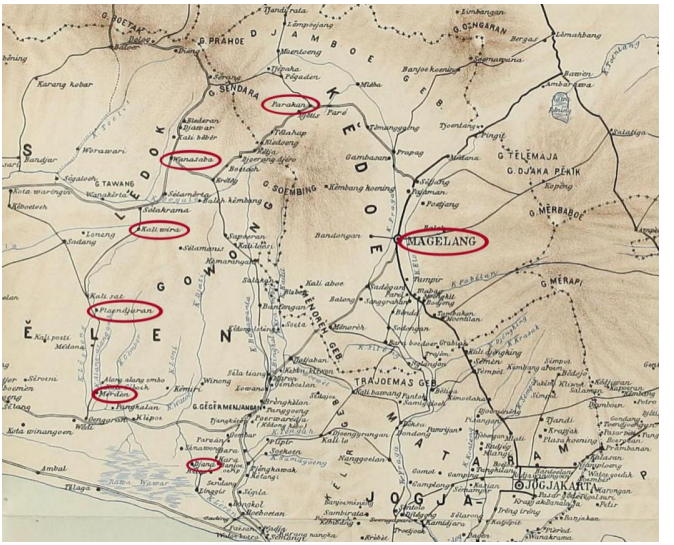

Gambar 2: Peta keletakan tempat-tempat yang disebut
[Sumber: Louw dan de Klerck.(1894-1908)]

2. MASA KEEMASAN

2.1. Persemayaman ke-1: Parakan

Leng Hong Seng (1955) memberitahukan bahwa punden Thoteekong dibawa ke Parakan oleh seseorang, seorang Cina *totok* dari Purworejo, melalui Magelang dan akhirnya sampai Parakan[28]. Jika kurun yang dikisahkan sama dengan pengungsian dari Jana, kisah ini tidak mungkin, karena justru jalur yang dimaksud pada waktu itu dikuasai oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Untungnya kita masih memiliki satu sumber lain, *Riwajat Ringkas dari Bio Hok Tek Tong di Parakan.*

Naskah ini memberitakan bahwa orang yang menyimpan punden Thoteekong di Parakan itu tinggal di Kampung Kalileri, bernama Tan Ko Kong. Tokoh ini seharusnya sama dengan Tan Kong Cwan yang disebut naskah L.Or. Aksara *kong* (*gong*, 公) dalam *Riwajat Ringkas* menyatakan sebutan kehormatan untuk orang tua, sedangkan aksara *kong* dalam Tan Kong Cwan jelas bagian dari nama diri, meskipun kita sudah tidak tahu lagi aksara yang mana. Penggunaan sebutan kehormatan pada masa itu umum sekali digunakan karena penyebutan nama

[28] Leng Hong Seng (1955), hal.17.

diri, khususnya untuk pejabat dan orang yang dituakan, sangat dihindari. Jika jarak antara kedatangan Tan ke Parakan menurut Louw di tahun 1827 dan sebutan di *Riwajat Ringkas* adalah tahun 1842, maka perbedaannya adalah 15 tahun. Apabila waktu datang ke Parakan ia berusia 30-an sebagai salah seorang pemimpin kelompok Jana, maka di tahun 1842 ia telah mencapai umur 45 tahun dan sudah dapat dikatakan tua.

Lebih penting untuk kita, *Riwajat Ringkas* menceritakan bahwa seseorang bernama Siek Hwie Soe bersama 36 orang Tionghoa lain, bergabung untuk mendirikan kelenteng bagi punden yang disimpan di rumah Tan itu. Kelompok ini mengumpulkan uang dan membeli rumah Tan serta rumah-rumah di sekelilingnya untuk dibangun kelenteng di tempat itu. Ternyata pada saat terakhir, mereka memutuskan untuk mencari lahan lain yang dianggap lebih baik, dan pilihan jatuh pada sebidang lahan di ujung timur jalan utama Pecinan Parakan. Tempat ini jelas lebih tepat dan strategis karena menjaga mulut Jalan Pecinan di sisi timurnya. Dengan demikian bangunan kelenteng akan menghadap ke gunung Sindoro yang menaungi Parakan. Pemilik lahan ini, kebetulan Siek Hwie Soe juga, dengan senang hati mewakafkannya, sedangkan petak di Kalileri akan disewakan dan hasilnya dipakai untuk membiayai kebutuhan kelenteng sehari-hari nanti.[29]

Gambar 3: Kelenteng Hok Tek Tong dan Pecinan.
[Sumber: Google Maps]

[29] *Riwajat Ringkas dari Bio Hok Tek Tong di Parakan*

Kelenteng baru ini diberi nama Hok Tek Bio (Fude miao, 福德廟)[30], pada awalnya hanya terdiri dari satu ruangan dengan meja sesaji di depan altar punden. Pada saat itu kemungkinan besar bangunan kelenteng dibuat sepenuhnya dari kayu. Sebuah papan peringatan dari kayu bertarikh tahun 1852, menyatakan bahwa papan itu dibuat ketika perbaikan atas kelenteng yang dibangun 'sepuluh tahun yang lalu'. Sangat mungkin bahwa tahun ini adalah permulaan penggunaan dinding batu bata, karena papan ini juga menyebutkan adanya 'kerusakan disebabkan api'. Di tahun 1880 di masa Letnan[31] Lie Tiauw Phik yang dihormati dan giat bekerja, ruangan tambahan di sisi kiri dan kanan kelenteng untuk sekolah Cina. Awal abad ke-20 sekolah ini berkembang menjadi pendidikan modern di bawah *Tiong Hoa Hwee Koan* (Zhonghua Huiguan, 中華會館)

Gambar 4: Hok Tek Tong (Bio) in Parakan
{Sumber: Koleksi pribadi]

Sebagai pelindung Pecinan dan kota Parakan, jika terjadi bencana, penduduk setempat mengadakan arak-arakan *tepekong* keliling kota untuk 'membersihkan udara' dan mengembalikan keselarasan. Leng Hong Seng mencatat dua peristiwa bagi arak-arakan ini, yang pertama di tahun 1902 ketika penyakit kolera melanda Parakan, sekali lagi di tahun 1918, ketika pandemi flu Spanyol banyak mengambil korban[32].

[30] Sekitar dasawarsa 1950 berganti nama menjadi Hok Tek Tong.
[31] Pangkat tituler bagi pejabat yang mengepalai masyarakat Tionghoa, diangkat oleh Pemerintah Jajahan Belanda.
[32] Leng Hong Seng (1955)

Dengan kedatangan Balatentara Kerajaan Jepang, Hok Tek Tong mulai terlantar karena Cina dianggap musuh mereka, sehingga orang menghindari kaitan dengan kelenteng, tempat berkumpul masyarakat Tionghoa Parakan. Sejak tahun 1950 stabilitas dalam negeri membaik dan kegiatan di kelenteng menggeliat kembali, ada perbaikan dan penambahan bangunan untuk sekolah. Sekolah THHK ini diubah menjadi sekolah nasional berbahasa Indonesia dan menerima murid dari segala kalangan oleh generasi muda yang sangat progresif pada tahun 1958. Perbaikan kelenteng terakhir adalah pada tahun 1965, tepat di ambang kemerosotan lebih panjang dan lebih buruk daripada yang manapun, di bawah rezim militer yang melarang segala sesuatu yang berkenaan dengan ketionghoaan.

2.2. Persemayaman ke-2: Magelang

Punden yang lain dibawa ke Magelang[33] dan kemudian disimpan di sebuah rumah di Ngarakan, di dekat Pecinan Magelang[34]. Sama sekali tidak ada catatan mengenai nama orang yang menyimpan punden itu. Nampaknya seperti halnya di Parakan, orang ini tidak termasuk ke 'golongan atas' dalam masyarakat Tionghoa Magelang saat itu. Mungkin sekali, karena ia seorang pengungsi yang tidak membawa apa-apa.

Satu-satunya sumber mengenai kelenteng Magelang yang ada pada kita, yang sekarang menjadi pegangan kebanyakan orang dan dikutip dimana-mana, adalah tulisan Liem Tjay An[35] di berkala Tri Budaja[36]. Liem menulis bahwa Liong Hok Bio didirikan dalam tahun 1864, atau 22 tahun setelah pasangannya di Parakan. Liem mengisahkan pula bahwa punden itu dibawa ke Magelang setelah pertempuran hebat antara Kyai Singkir (nama asli: The Djin Sing) melawan M. Bandulpurgowo, kepala pemberontak yang menyerang Djono (Jana). Sehabis memenangi pertempuran hebat itu ia pindah ke Magelang, sambil membawa bersamanya dua punden. Setibanya di Magelang, satu disimpan di sana, sedang satunya lagi dibawa ke Parakan, tanpa penjelasan

[33] Oleh Ko An Twi menurut L. Or 490.
[34] Liem (1956).
[35] Liem Tjay An adalah penjaga kelenteng (biokong) Liong Hok Bio di dasawarsa 1950.
[36] *Tri Budaja,* berkala bulanan diterbitkan oleh Gabungan Sam Kauw Indonesia (1954-1964?)

lebih lanjut[37]. Liem juga menjelaskan bahwa kelenteng Magelang didirikan oleh Be Tjok Lok (bergelar Koen Wie) ketika ia diangkat sebagai Kapten, mengepalai masyarakat Tionghoa Karesidenan Kedu di Magelang, bersama dengan pengangkatan puteranya sebagai Letnan di tahun 1864[38].

Jika diperiksa di *Regeerings Almanak*[39] bisa ditemukan bahwa Be Tjok Lok (Be Tjollok dalam RA) sudah diangkat sebagai kapitein sejak 1842 dan pensiun tahun 1856, disusul oleh puteranya, Be Tjing Tjwan[40] sebagai Kapitein, lalu saudaranya, Be Tjing Liem diangkat sebagai Luitenant[41]. Salmon dan Siu juga mencatat Be Tjok Lok meninggal pada tahun 1868[42]. Peristiwa didukung oleh satu iklan di harian *De Locomotief* berupa pengumuman bahwa Be Tjing Tjwan and Be Tjing Liem melunasi hutang mereka menggunakan warisan Be Tjok Lok[43]. Dalam bukunya, Salmon dan Siu juga menyebutkan adanya sebuah tuilian (duilian 對聯) dari pertengahan kedua abad ke-19 yang disumbangkan oleh dua saudara itu, Kapten Ma Jieyuan (馬潔源) atau Be Kiat Goan, dan Letnan Ma Jierong (馬潔榮) atau Be Kiat Yong[44]. Jelas bahwa Kiat Goan adalah gelar Be Tjing Tjwan dan Kiat Yong adalah Tjing Liem. Di Magelang hanya sekali itu terjadi, dua bersaudara menjabat sebagai kapten dan letnan dalam waktu yang sama.

Gambar 5: Liong Hok Bio in Magelang. [Sumber: Koleksi pribadi]

[37] Liem (1956) hal. 21
[38] Liem (1956) *op.cit.*
[39] Almanak tahunan yang diterbitkan Pemerintah Jajahan Belanda (1815-1941).
[40] Regeerings Almanac 1857, hal. 84.
[41] Regeerings Almanac 1863, hal. 110.
[42] Salmon dan Siu (1997), hal. 496.
[43] de Locomotief, 08-02-1869.
[44] Salmon and Siu, *op. cit.* hal. 498.

Liong Hok Bio didirikan oleh Be Tjok Lok, tapi bukan sewaktu ia menjabat, melainkan di masa pensiunnya, sewaktu cita-cita tradisional Tionghoa telah tercapai, yakni kemakmuran, kehormatan, dan anak-anak berbakti. Keletakan kelenteng ini tidak biasa, mungkin sekarang tidak, tapi pada masa itu sangat ganjil karena letaknya jauh dari Pecinan Magelang, yang berada sekitar 1 km. ke arah utara. Alih-alih, kelenteng ini ada di sisi alun-alun, berseberangan dengan kadipaten dan gereja, dekat dengan masjid dan *Hoofdenschool*[45], jadi di tengah-tengah kawasan Eropa yang sangat terhormat dalam masyarakat jajahan. Penempatan ini mencerminkan rasa percaya diri yang tinggi, di antara sesamanya, para priyayi Jawa dan *Europeesche ambtenaren* (pegawai Pemerintah Jajahan Belanda).

Gambar 6: Kelenteng Liong Hok Bio dan Alun-alun Magelang.
[Sumber: Google Maps]

Liong Hok Bio menjadi kebanggaan masyarakat Tionghoa sejak didirikannya, umat kelenteng menyumbangkan dana untuk membeli tanah di sekeliling kelenteng untuk disewakan dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan kegiatan kelenteng. Lebih kemudian juga untuk sekolah *Tiong Hoa Hwee Koan* sejak tahun 1906. Sebagai ibukota Karesidenan Kedu, Magelang telah menjadi tuan rumah bagi beberapa kongggres *Khong Kauw*

[45] Pada tahun 1900 diubah menjadi OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren, atau Sekolah Pendidikan Pegawai Negeri Pribumi)

Hwee serta beberapa pekumpulan lain yang berkaitan dengan masalah Tionghoa di kelenteng ini[46].

Magelang tumbuh dengan cepat pada abad ke-20, didukung oleh stabilitas sosial yang panjang, sebagian sebagai hasil kenyataan bahwa Akademi Militer Nasional (kemudian menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) bertempat disana. Berbeda dengan kota dan daerah lain, Magelang tidak pernah mengalami kerusuhan atau kegiatan anti-Cina sama sekali. Bahkan pada masa paling sulit, pasca 1966, Liong Hok Bio tidak terganggu, kelenteng ini mengambil sikap *low profile* tapi tetap aktif di dalamnya.

Memasuki abad ke-21, masyarakat Tionghoa memproleh kembali rasa percaya diri dan kesadaran identitasnya kembali, orang kembali ke kelenteng *en masse*. Tokoh-tokoh besar perdagangan dan industri setempat tidak segan lagi menunjukkan kekuatan. Mereka mengadakan dan membiayai upacara besar, festival, perayaan, konferensi serta terakhir pembangunan kembali kelenteng Liong Hok Bio. Pembangunan dilaksanakan baik horisontal maupun vertikal, bagian belakang kelenteng yang semula disewakan, dibangun setinggi tiga lantai, mengawal bangunan kelenteng lama yang tidak dirubah karena konon tidak disetujui oleh punden kelenteng sendiri.

3. KEMBALI KE LANGIT

3.1. Keberangkatan para dewa

Semua pesta akan berakhir, demikian juga dengan para dewa, setidaknya perwujudannya di dunia, karena jiwa suci mereka hidup di dunia seberang. Singkatnya, mereka kembali untuk hidup di lingkungan asal dan asli mereka.

Di Jawa, patung perwujudan dewa disebut *kimsin* (*jinshen*, 金身) atau 'tubuh emas'. Dalam tradisi Cina lama, aksara 身 merujuk pada manusia dalam segenap aspeknya, baik teraga maupun tak teraga, sedangkan aksara 金 adalah perwujudan kesempurnaan. Jadi, kimsin dapat diartikan sebagai 'insan sempurna', keadaan yang dicapai oleh orang-orang suci yang telah naik ke istana langit menjadi dewa. Sayang sekali, pula

[46] Liem (1956) *op.cit.*

tak terhindarkan, di alam pikiran orang kebanyakan, sering dipahami secara harafiah. Sampai sekarang masih banyak orang yang beranggapan bahwa punden yang mereka puja di kelenteng itu benar-benar terbuat dari emas.

Gambar 7: Satu-satunya foto kimsin Hoktek Tjengsin yang asli di Parakan
[Sumber: Kelenteng Hok Tek Tong, Parakan]

Sedari tahun 1966, kelenteng Hok Tek Tong di Parakan mengalami kemunduran besar. Hampir semua kegiatan kelenteng berhenti, orang tidak mengunjunginya lagi, bisa dikatakan kelenteng sudah berubah menjadi noda bagi masyarakatnya. Kebanyakan orang Tionghoa meninggalkan kelenteng dan berpindah ke agama yang diakui pemerintah, biasanya Kristen baik Protestan maupun Katolik. Hanya sekitar setengah lusin orang lanjut usia yang kukuh dan tabah mempertahankan Hok Tek Tong sambil terus melaksanakan kegiatan pujabakti di dalam kelenteng.

Hanya *biokong* (*miaogong*, 廟公) atau penunggu kelenteng yang ada di tempat, biasanya ia datang pagi hari dan pulang sesudah malam tiba. Tapi pada tengah hari ia harus keluar untuk makan siang atau tidur sebentar, karena usianya yang sudah lanjut. Suatu siang di tahun 1967, seorang pencuri masuk

ke dalam kelenteng dan membawa pulang punden (*kimsin*). Sebenarnya beberapa orang menyaksikan perbuatan itu tapi tidak ada yang berani melaporkannya ke polisi mengingat keadaan masa itu. Urusan ini pun sirap dengan sendirinya, orang tidak membicarakannya secara terbuka. Kira-kira setahun kemudian, pencuri itu ditangkap polisi karena urusan lain. Dalam tahanan ia mengaku bahwa ialah yang mencuri punden di kelenteng karena mendengar bahwa patung itu terbuat dari emas. Jelas ia segera menemukan bahwa yang mengkilap pada patung itu hanyalah lapisan cat pada patung tanah liat. Ia berkeras mencari dan memecahkan patung tanah liat itu dan tetap tidak menemukan yang dicari. Putus asa dan marah, ia membuang potongan-potongan itu ke dalam sumur.

Punden yang berada di Magelang bertahan lebih lama, walaupun akhirnya menjumpai nasib yang tidak kalah mengerikannya. Magelang dan Liong Hok Bio melalui abad ke-20 dengan tenang, seperti yang telah dikisahkan di atas, lalu memasuki abad ke-21 dengan bersemangat. Seorang pengusaha besar, David Hermanjaya, setempat diangkat menjadi ketua perhimpunan keagamaan pada tingkat nasional[47]. Ialah yang lalu mencetuskan gagasan dan memelopori perluasan dan pembangunan Liong Hok Bio sejak awal tahun 2000.

Gambar 8: Kimsin asli Hoktek Tjengsin (tengah) di Magelang
[Sumber: The Han Thong]

[47] Ketua PTITD (Perhimpunan Tempat Ibadah Tri Dharma) Komisariat Daerah Jawa Tengah, sekaligus salah satu Ketua Walubi (Wali Umat Buddha Indonesia)

Upacara memeringati kelahiran Koan Im (Guanyin, 觀音) pada tahun 2014 jatuh pada tanggal 15 Juli, memasuki musim kemarau yang kering. Liong Hok Bio tidak lupa mengadakan pujabakti pada malam itu, yang selesai dengan baik. Tidak ada yang tahu penyebabnya, tetapi selewat tengah malam, asap mengepul dari dalam ruangan utama. Ketika petugas keamanan yang berjaga membuka pintu samping, api langsung berkobar besar karena meperolah pasokan oksigen dari luar. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan kebakaran sampai pagi hari ketika seluruh bangunan lama rata dengan tanah. Punden tua yang telah menyintasi berbagai ancaman dan bertahan hampir 300 tahun ikut terbakar sampai pecah. Ternyata kimsin itu juga terbuat dari *papier mache* dan tanah liat, sama dengan pasangannya. *Sic transit gloria mundi.*

Gambar 9: Kelenteng Liong Hok Bio pasca kebakaran 16 Juli 2014.
[Sumber: Kelenteng Liong Hok Bio Magelang]

Rangkuman

Sesudah lebih dari 3 dasawarsa dibawah pelarangan, ancaman dan pembatasan untuk melakukan upacara dan pujabakti, masyarakat Tionghoa menyambut kebebasan kembali mereka. Dengan penuh semangat mereka berusaha menggali mas alampau dan jatidiri semula mereka. Namun masa lalu telah

silam, hampir-hampir tanpa bersisa. Sekian banyak benda dan dokumen unik, yang hanya satu-satunya, lenyap tanpa bekas.

Kelenteng-kelenteng kecil biasanya luput dari perhatian pengamat sehingga tidak ada berita dan pembahasannya. Sumber utama data ada pada prasasti atau catatan pendirian/perbaikan kelenteng itu sendiri, berisikan daftar panjang nama para dermawan penyumbang kegiatan. Prasasti batu mahal pembuatannya, maka kelenteng kecil kebanyakan membuatnya dari papan kayu. Kelemahan kayu adalah membutuhkan perlindungan karena sangat rentan terhadap air dan api. Di masa pelarangan berlaku, semua prasasti kayu seperti ini diturunkan dan (seharusnya) disimpan, kenyataannya kebanyakan terbengkalai dan membusuk karena kelembaban tidak terjaga. Lebih parah lagi apabila diturunkan dan langsung dirusak. Hilanglah dokumen sejarah kelenteng itu untuk selamanya.

Serpihan informasi bisa didapat dari berbagai tulisan pendek pada perabot dan kelengkapan kelenteng, biasanya berisikan hanya nama dermawan dan tarikh pelaksanaannya. Namun jelas bahwa informasi seperti ini sangat sumir. Sumber lain adalah catatan di atas kertas karena kebanyakan kelenteng punya perpustakaan atau arsip kecil, juga jenis ini sangat rentan. Hanya sedikit sekali kelenteng yang masih memilikinya. Jika beruntung maka masih bisa ditemukan orang atau tokoh lama yang masih bisa bercerita mengenai masa lalu kelenteng itu.

Di luar kelentengnya sendiri, pencarian informasi bisa dilakukan terhadap berbagai artikel lepas, berita dan pada iklan suratkabar, majalah semasa. Buku bisa secara acak memuat serpihan informasi mengenai kelenteng yang dicari. Bila orang setempat ada yang masih menyimpan buku silsilah keluarga, mungkin memuat potongan informasi mengenai kelenteng. Sesudah itu masih bisa dilakukan pengumpulan kisah dan dongeng setempat, siapa tahu ada keratan informasi di dalamnya. Dengan keuletan dan nasib baik, kita bisa menemukan cukup bahan untuk membangun kisah masa lalu.

Melalui kajian terhadap sejarah kelenteng kecil dan tak terkenal, bisa dikenali lebih baik karakter masyarakat Tionghoa

di tempat itu dengan dinamikanya yang tampil sebagai irisan berskala waktu. Masyarakat Tionghoa tidak serbasama (homogen), tetapi banyak ragamnya, tergantung antara lain dari pengaruh kekuasaan, budaya setempat, interaksi dengan lingkungannya dan lain-lain. Kelenteng sebagai tempat bersosialisasi masyarakat Tionghoa selalu menyimpan dan mencerminkan karakter serta nilai masyarakat penggunanya.

Referensi

-. *Almanak en Naamregister voor het Jaar 1857*. Batavia, 'Lands Drukkerij (1857)

-. *Almanak en Naamregister voor het Jaar 1863*. Batavia, 'Lands Drukkerij (1863)

Algemeene Secretarie (1871) *De Residentie Kadoe Naar de Uitkomsten der Statistieke Opname en Andere Officiele Bescheiden.* Batavia.

Atmodjo, J. S. dan Witanto, E. P. (2000) *Kelenteng Kuno di DKI Jakarta dan Jawa Barat*. Jakarta

Carey**,** Peter (1984)**.** *Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825*. dalam Indonesia (Cornell University) 37, April 1984, hal. 1–47.

Ezerman, J.L.J.F. *Beschrijving van den Koan Iem Tempel Tiao Kak Sie te Cheribon*. Batavia (1922)]

Horsfield, Thomas (1826) *Essay on the Geography, Mineralogy and Botany of the Western Portion of the Territory of the Native Princes of Java*. dalam Transactions of the Batavian Society of Arts and Sciences vol. 8 hal. 175-312

Kleinsteuber, A. dan Maharadjo, S. (2010). *Kelenteng-kelenteng Kuno di Indonesia (Old Chinese Temples in Indonesia).* Jakarta.

Leng Hong Seng (nama asli: Tjioe Khing Ien) (1955). *Riwajat Kelenteng Parakan*. dalam Tri Budaja XVII Juni 1955, hal. 17-18.

Liem Thian Joe (1933). *Riwajat Semarang Dari Djamannja Sam Poo Sampe Terhapoesnja Kong Koan*. Semarang.

Liem Tjay An (1956). *Riwajat Kelenteng Liong Hok Bio Magelang dalam* Tri Budaja XXXII Sept. 1956, hal. 21.

Louw**,** P. J. F. **d**an de Klerck**,** E.S. (1894-1908). *De Java Oorlog van 1825-1830* 6 jilid. Batavia.

Margana, S. (2004) *Kraton Surakarta dan Yogyakarta, 1769-1874* . Yogyakarta.

Moerthiko (1980). *Riwajat Klenteng, Vihara, Lithang, Tempat Ibadah Tri Dharma se Jawa*. Semarang.

Kwee Hui Kian (2008)**.** *Cultural Strategies, Economic Dominance The Lineage of Tan Bing in Nineteenth-century Semarang, Java* dalam Boomgard, P., Kooiman, D. dan Schulte-Nordholt, H., (eds.) *Linking Destinies: Trade, town and kin in Asian History.*

Ong Tae Hae (1849). *The Chinaman Abroad, or, A desultory Account of the Malayan Archipelago, Particularly of Java.* The Mission Press, Shanghai

Salmon, Claudine, dan Lombard, Denys. *Les Chinois de Jakarta Temple et vie Collective*. Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'homme (1980), diterjemahkan ke Bahasa Indonesia: *Klenteng-Klenteng Masyarakat Tionghoa Di Jakarta.* Jakarta, Yayasan Cipta Loka Caraka (1985)

Salmon, Claudine, dan Siu, Anthony K. K. (1997). *Chinese Epigraphic Materials in Indonesia*, Jjilid. II (dalam 2 buku). Singapura dan Paris .

Tachard, Guy (1688). *A Relation of the Voyage to Siam: performed by six Jesuits sent by the French King, to the Indies and China in the Year 1685*. London.

Naskah

KITLV L.Or. 409 28.860 *Herinneringen van Ko Ho Sing*. Diterjemahkan oleh Trias Jusuf (2008)

Siek Tjoen Kioe, Liem Khik Oen (penerjemah) (1950) *Riwajat Ringkas dari Bio Hok Tek Tong di Parakan.*

BAB III

EDUKASI

Dilema Etnis Tionghoa : Kebijakan Jepang terhadap Pendidikan Etnis Tionghoa Surabaya 1942-1945

Shinta Devi Ika Santhi Rahayu

Pendahuluan

Periode pendudukan Jepang 1942-1945 merupakan periode yang sangat penting bagi etnis Tionghoa di Surabaya. Etnis Tionghoa Surabaya menjadi obyek kajian karena memiliki keunikan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, termasuk pula ketika dihadapkan pada kebijakan-kebijakan Jepang. Salah satu kebijakan Jepang yang berdampak besar terhadap keberlanjutan kehidupan etnis Tionghoa adalah kebijakan tentang pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan etnis Tionghoa adalah pendidikan yang ditujukan untuk etnis Tionghoa, di dalamnya meliputi pendidikan yang diselenggarakan oleh etnis Tionghoa dan Jepang, baik dalam bahasa Indonesia maupun Tionghoa. Akan tetapi dalam tulisan ini, penulis membatasi pada pendidikan yang dikelola oleh etnis Tionghoa dan dalam pengajarannya menggunakan bahasa Tionghoa sebagai bahasa pengantar. Sekolah Tionghoa tersebut memiliki arti yang sangat besar dalam menguatkan

serta membentuk identitas ke-Tionghoaan kalangan Tionghoa Peranakan yang sempat luntur ketika Pemerintah Kolonial Belanda banyak membuka sekola-sekolah dengan model pendidikan Barat.

Kebijakan Jepang terhadap pendidikan etnis Tionghoa sangat berbeda dari kebijakan masa Kolonial Belanda. Meskipun melakukan pengawasan yang cukup ketat, akan tetapi pemerintah kolonial Belanda memberi izin kepada perkumpulan-perkumpulan Tionghoa untuk membuka sekolah-sekolah, bahkan pada sejak tahun 1914, di Surabaya selain sekolah *Tiong Hoa Hwee Koan*, banyak berdiri sekolah Tionghoa swasta lainnya, dari sekolah tingkat dasar hingga tingkat menengah[1]. Sekolah-sekolah tersebut diizinkan menentukan kurikulum yang dipandang sesuai untuk kebutuhan anak-anak Tionghoa. Berakhirnya masa Kolonial Belanda menjadi babak baru bagi pendidikan Etnis Tionghoa. Kebijakan pengawasan yang sangat ketat serta pemaksaan kurikulum sesuai dengan kepentingan Jepang menyebabkan banyak kalangan yang memandang periode Jepang adalah masa suram bagi pendidikan Etnis Tionghoa. Akan tetapi tidak banyak peneliti yang melihat periode Jepang sebagai periode sangat penting bagi etnis Tionghoa dalam mengidentifikasi kembali identitasnya, bukan hanya identitas ke-Tionghoaan, namun juga identitas Asia yang mengantarkan mereka pada proses menjadi Indonesia. Tulisan ini terinspirasi dari kajian tentang pendidikan etnis Tionghoa yang dilakukan oleh Prof. Leo Suryadinata. Dalam bukunya yang berjudul *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, Prof. Leo Suryadinata memberikan penjelasan yang sangat menarik bahwa pendidikan pada era Jepang menjadi era penting bagi Etnis Tionghoa untuk menguatkan kembali identitas ke-Tionghoaan mereka. Larangan penggunaan Bahasa Belanda dan Inggris mendorong generasi muda Tionghoa yang terlanjur berproses menjadi Barat, didorong kembali untuk

[1] Pada tahun 1914, selain sekolah *Tiong Hoa Hwee Koan*, di Surabaya mulai bermunculan sekolah-sekolah untuk anak Tionghoa miskin, diantaranya adalah *Kiauw Tong Ja Hak*. *Pewarta Soerabaia*, tanggal 26 Oktober 1916.

menjadi Tionghoa[2]. Demikian pula dengan Didi Kwartanada, dalam artikelnya berjudul *The Road To Resinification: Education For The Chinese during The Japanese Occupation* juga menjelaskan bahwa periode Jepang merupakan periode resinifikasi identitas ke-Tionghoaan. Periode itu sekaligus menjadi periode yang sulit bagi anak-anak Tionghoa yang semula merupakan murid sekolah berbahasa pengantar Bahasa Belanda[3].

Penyusunan sejarah pada masa Jepang tidak mudah dilakukan, karena sangat sedikit arsip yang tersimpan dengan rapi. Sangat beruntung masih ada beberapa surat kabar terbitan pemerintah Jepang yang dapat dibaca, walaupun jumlahnya sangat sedikit dan kondisinya banyak yang rusak. Sependek pengetahuan penulis, era pendudukan Jepang juga menjadi periode yang buruk bagi perkembangan pers, karena hampir semua pers yang diterbitkan oleh etnis Tionghoa dilarang terbit, sehingga untuk mengetahui kondisi pendidikan mereka, hanya dapat diketahui melalui surat kabar yang diterbitkan oleh Jepang dan dilengkapi dengan wawancara. Meskipun sumber sangat terbatas, akan tetapi informasi yang diperoleh sangat berharga.

Jepang Memasuki Kota Surabaya

Jika dibandingkan dengan orang Tionghoa, pada masa kolonial Belanda jumlah orang Jepang yang tinggal di Surabaya lebih sedikit. Orang-orang Jepang mulai banyak berdatangan ke Hindia Belanda pada era Restorasi Meiji yang berawal pada tahun 1868. Pada waktu itu dorongan keluar negeri sangat kuat, dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan, serta taraf hidup sebagai bagian dari upaya memajukan Jepang. Dorongan ke luar negeri disebut dengan gerakan ke utara yang disebut *hokusin-ron*, dan gerakan ke selatan yang disebut

---

[2] Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 22-23.

[3] Didi Kwartanada, "The Road to Resinification: Education For The Chinese during The Japanese Occupation" dalam Peter Post (general editor), *The Encyclopedia of Indonesia in The Pacific War* (Leiden-Boston: Brill, 2010), hlm. 327.

nanshin-ron[4]. Pergi keluar negeri juga banyak dilakukan oleh warga biasa, yang secara ekonomi miskin dan tidak terpelajar. Sebagian besar orang Jepang[5] yang datang adalah perempuan yang berprofesi sebagai *karayuki-san*, serta laki-laki yang berprofesi sebagai pedagang keliling. Hingga awal abad ke-20, daerah tujuan mereka adalah Batavia, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Kedatangan orang-orang meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan perdagangan antara Jepang dengan Belanda. Akan tetapi hingga akhir abad ke-19, jumlah orang Jepang di Surabaya hanya tiga orang, dan semuanya adalah laki-laki. Setelah tahun 1910, barulah di Surabaya bermunculan toko-toko yang dikelola oleh orang Jepang. Selain itu banyak berdatangan pula pebisnis Jepang yang mengelola industri dan aktivitas ekspor-impor (*zaibatsu*). Meningkatnya kedatangan orang-orang Jepang tak lain disebabkan oleh perubahan kedudukan sosial orang Jepang yaitu dari kelompok kelas dua menjadi kelompok kelas satu yang dipersamakan dengan orang Eropa. Hingga tahun 1927 terdapat 22 perusahaan Jepang tersebar di Surabaya, Semarang dan Batavia[6]. Di antara pengusaha itu juga terdapat pengusaha perkapalan yang berjumlah sekitar 75.[7]

Hal yang menarik dari kedatangan orang-orang Jepang adalah, beberapa tahun sebelum invasi Jepang ke Indonesia, pemerintah Jepang mengirim satuan khusus yang salah satunya bernama F-Kikan. Tujuan pembentukan dan pengiriman satuan tersebut adalah untuk mempengaruhi masyarakat bumiputera agar bersimpati dan mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu. Selain mengirimkan satuan-satuan dengan

---

[4] Shimizu, Hiroshi, "Dutch Japanese Competition in The Shipping Trade on The Java-Japan Route in The Inter-War Period", dalam *Tonan Ajia Kenkyu*, Vol.26, June (1988), hlm. 28.

[5] Sarjana Sigit Wahyudi, "Hubungan Perdagangan antara Hindia Belanda dan Jepang Pada Masa Krisis Malaise" hlm. 81. Diakses dari http://eprints.undip.ac.id/19647/, pada tanggal 08 Februari 2021.

[6] Gusti Asnan, "Nanshin-Ron, dan Keberdaan serta Aktivitas Orang Jepang di Indonesia Sebelum 1942" dalam makalah yang disajikan pada Seminar Jepang dan Indonesia dalam Perspektif Humaniora yang Diselenggarakan oleh Jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas Padang 7 November 2017, 10-11.

[7] *Ibid*, hlm. 12.

tujuan propaganda, Jepang juga banyak mengirim ilmuwan atau peneliti sejarah yang ditugaskan merekonstruksi sejarah Indonesia. Dalam rekonstruksi sejarah yang mereka susun, memunculkan narasi-narasi tentang hubungan Indonesia dengan Jepang. Beberapa suku di Indonesia, yaitu Menado, Riau, Minangkabau, Bugis dan Melayu, mereka narasikan memiliki hubungan kekerabatan dengan Jepang. Intinya Jepang berusaha meyakinkan kepada masyarakat bumiputera bahwa Jepang adalah saudara tua bumiputera Indonesia.[8]

Keberhasilan propaganda Jepang sangat terlihat ketika Jepang bersama Jerman berhasil menang dalam perang melawan sekutu, termasuk di dalamnya adalah Belanda dan Amerika. Masyarakat bumiputera bersukacita menyambut kemenangan Jepang. Mereka berharap impian memperoleh perlindungan dan kemerdekaan dari cengkraman pemerintah Kolonial Belanda segera terwujud. Sukacita itu terlihat dari sambutan masyarakat bumiputera yang sangat meriah ketika tentara Jepang memasuki kota Surabaya pada 8 Maret 1942[9]. Di sepanjang Jalan Darmo, masyarakat bumiputera berdiri berjajar rapi dengan menyoraki tentara Jepang sambil mengejek orang-orang Eropa sebagai ekspresi kebencian. Sambutan baik masyarakat bumiputera juga ditunjukkan dengan kesediaan mereka membantu tentara Jepang memperbaiki fasilitas umum yang sengaja dirusak oleh orang-orang Belanda. Fasilitas kota tersebut diantaranya adalah rel kereta api serta gedung-gedung swasta dan pemerintah.

Berbeda dari masyarakat bumiputera, masyarakat Tionghoa memperlihatkan ketakutan yang luar biasa. Berita kekejaman tentara Jepang di Tiongkok dan Korea, terutama terhadap perempuan menyebabkan orang-orang Tionghoa resah dan ketakutan. Banyak orang Tionghoa menyikapi kedatangan tentara Jepang dengan cara bersembunyi dan mengungsikan anak-anak perempuan mereka ke tempat yang mereka rasakan aman. Ada pula orang Tionghoa yang sengaja menghitamkan

[8] *Ibid.*, hlm. 13

[9] William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya: 1926-1946)* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 110; Arniati Presedyawati Herkusumo, *CHUO SANGI-IN* (Jakarta: Rosda Jayaputra, 1984), hlm. 7.

wajah anak perempuan mereka dengan arang, agar tidak terlihat oleh tentara Jepang. Orang-orang Tionghoa telah banyak mendengar sepak terjang tentara Jepang yang menjadikan gadis-gadis Tionghoa sebagai budak nafsu.[10]

Kebijakan Pendidikan untuk Etnis Tionghoa

Izin pembukaan sekolah untuk anak-anak Tionghoa dan bumiputera baru dilakukan pada bulan Juni 1942. Orang-orang Tionghoa hanya diizinkan membuka kembali sekolah Tionghoa tingkat dasar. Jika, ingin melanjutkan ke sekolah tingkat menengah maka harus masuk ke sekolah tingkat menengah yang terbuka untuk anak-anak Asia, yaitu bumiputera, Arab dan Tionghoa. Kebijakan itu juga diberlakukan di kota-kota lainnya di Indonesia. Akibatnya, banyak guru sekolah menengah berbahasa pengantar Bahasa Tionghoa yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa beralih ke pekerjaan lainnya.[11]

Selain itu, Jepang juga menuntut perubahan kurikulum terhadap seluruh pendidikan sekolah. Hal utama adalah yang berhubungan dengan budaya dan pengetahuan Barat terutama yang berasal dari Belanda, Inggris dan Amerika. Jepang melarang bahasa Belanda dan Inggris diajarkan di sekolah-sekolah yang dikelola oleh orang-orang Tionghoa dan bumiputera. Jepang juga menetapkan semua gedung sekolah yang semula dikelola oleh swasta dan pemerintah Kolonial Belanda dialihfungsikan menjadi gedung sekolah yang hanya menerima anak-anak Asia, termasuk di dalamnya anak-anak Tionghoa dan Arab, serta anak-anak bumiputera. Sekolah-sekolah yang dibuka dan dikelola oleh pemerintah Jepang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Hal itu tentu saja sangat menggembirakan bagi anak-anak bumiputera yang sebelumnya kesulitan memperoleh pendidikan formal. Apalagi melalui semangat memberantas buta huruf, Pemerintah Jepang tidak memungut biaya sekolah kepada orang tua yang bersedia memasukkan anaknya ke sekolah yang dikelola pemerintah. Buku-buku sekolah juga telah disiapkan oleh pemerintah dan

[10] Wawancara dengan Oei Hiem Hwie pada tanggal 20 Mei 2020.
[11] Didi Kwartanada, *op.cit.,* hlm. 332.

dibagikan secara gratis. Akan tetapi. sekolah-sekolah itu tidak dizinkan menerima anak-anak Belanda dan Eropa lainnya.[12] Pembukaan sekolah-sekolah tersebut tentu saja memperoleh respon yang beragam. Orang-orang Tionghoa Peranakan yang tidak menguasai bahasa *Kuo Yu* atau Mandarin dengan baik serta sama sekali tidak memiliki kemampuan bahasa Belanda menyambut dengan gembira pembukaan sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Sebaliknya, hal itu menjadi dilema bagi Tionghoa Peranakan yang sebelumnya terbiasa menggunakan Bahasa Belanda. Pada masa awal, pembukaan sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia juga membuat resah orang-orang Tionghoa yang sebelumnya memasukkan anak-anaknya ke sekolah berbahasa *Kuo Yu.* Hal itu disebabkan jumlah sekolah berbahasa pengantar Bahasa Indonesia lebih banyak jika dibandingkan dengan sekolah berbahasa pengantar bahasa *Kuo Yu.*

Pembukaan sekolah berbahasa pengantar bahasa *Kuo Yu* atau Mandarin dilakukan pada bulan Februari 1943, termasuk diantaranya adalah pembukaan sekolah *Tiong Hoa Hwee Koan.*[13] Nampaknya keterlambatan pembukaan sekolah tersebut oleh orang-orang Tionghoa disebabkan oleh rasa ketakutan terhadap tentara Jepang. Kebengisan tentara Jepang di Tiongkok, Korea serta wilayah lainnya di Asia Tenggara mendorong orang-orang Tionghoa untuk bersikap sangat hati-hati. Selanjutnya, Jepang juga berusaha mengenalkan budaya Jepang melalui pembukaan sekolah bahasa Jepang khusus untuk calon guru bernama *Nippon Go Gakko*.[14] Tujuan pembukaan sekolah tersebut adalah membekali kemampuan berbahasa Jepang untuk calon guru yang diharapkan dapat berperan sebagai kepanjangan tangan Jepang dalam melakukan propaganda kepada siswa sekolah.

Hingga tahun 1943, di Surabaya terdapat 25 Sekolah rakyat, yang diantaranya termasuk tujuh sekolah Tionghoa tingkat dasar dan 15 Sekolah Menengah.[15] Jumlah guru dan

---

[12] "Sekolah Partikelir" dalam *Soeara Asia*, tanggal 8 Juni 2602.

[13] "Riwajat Singkat THHK Surabaya", dalam Buku Peringatan Hari Ulang Tahun ke-50 THHK Surabaya 1903-1953 (Surabaya: t.pn, 1953), hlm. 12.

[14] "Sekolah Peladjaran Bahasa NIPPON Telah Diboeka" dalam *Soeara Asia,* tanggal 27 Juni 1942.

[15] "Sekolah Rakjat Memboeka Pintoe" dalam *Soeara Asia*, tanggal 28 April 2603.

murid sekolah Tionghoa meliputi 91 orang guru, 2.583 murid laki-laki, dan 1.415 murid perempuan. Sehingga jumlah murid sekolah Tionghoa di Surabaya adalah 3.998 orang, atau 7,3 % dari 53.132 orang jumlah penduduk Tionghoa di Surabaya.[16] Akibat larangan membuka sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda, anak-anak Tionghoa lulusan sekolah berbahasa pengantar bahasa Belanda terpaksa harus mendaftar pada sekolah menengah berbahasa pengantar bahasa Indonesia.

Ada beberapa alasan yang mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke sekolah berbahasa pengantar Bahasa Indonesia, pertama adalah selain bahasa Belanda, mereka juga juga terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia, dan kedua adalah mereka tidak menguasai bahasa *Kuo Yu*, serta tidak memahami budaya Tionghoa. Keterbatasan jumlah sekolah yang bisa menampung seluruh anak usia sekolah juga menyebabkan sebagian anak Tionghoa tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kekhawatiran yang cukup besar terhadap perilaku tentara Jepang juga menjadi alasan orang tua tidak mendaftarkan sekolah.

Menurut salah seorang narasumber yang juga merupakan alumni Sekolah Kepandaian Puteri, bahwa sebenarnya tentara Jepang tidak mengganggu anak-anak. Kekejaman tentara Jepang seperti yang dinarasikan beberapa buku tentang masa pendudukan Jepang, tidak nampak di Surabaya. Narasumber tersebut menjelaskan bahwa perbedaan yang mencolok adalah lebih banyak tentara yang terlihat latihan baris berbaris dan berjalan menyusuri kota. Sedangkan hukuman hanya diberikan kepada warga kota yang melanggar tata tertib dan keamanan kota. Demikian pula dengan penculikan gadis untuk dijadikan pemuas nafsu tentara Jepang juga tidak terjadi di Surabaya. Anak-anak dapat bermain dan mengenakan pakaian seperti masa-masa sebelumnya.[17]

---

[16] Chong Liang Su dan Wang Kuan Chang, *Sejarah Perkembangan Pendidikan Bahasa Tionghoa di Indonesia* (Kuala Lumpur: Perkumpulan Guru Sekolah Tionghoa, 2005), hlm 102-103.

[17] Wawancara dengan Sumiyati pada tanggal 12 Maret 2020, di Puri Lidah Kulon Indah Surabaya

Seperti halnya pada masa Kolonial Belanda, Jepang juga membentuk lembaga untuk mengawasi dan menyusun peraturan untuk sekolah-sekolah baik sekolah untuk Bumiputera maupun Tionghoa. Lembaga tersebut bernama *Naiseibu* atau Seksi Pengajaran dalam *Surabaya Shūcho.* Selain mengawasi proses belajar mengajar, *Naiseibu* juga berkewajiban menentukan materi pelajaran yang harus diajarkan kepada murid-murid sekolah. Dalam kurikulum pendidikan, semua sekolah, termasuk diantaranya sekolah Tionghoa wajib mengajarkan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jepang untuk kelas lima dan enam sekolah dasar. Semua guru diarahkan agar menyebarluaskan semangat mencintai budaya serta tradisi Timur, menentang budaya Barat dan menanamkan semangat *Dai Nippon* yaitu semangat mengorbankan diri untuk kepentingan umum dan mendukung kemenangan serta kemakmuran Asia Timur Raya.[18] Oleh sebab itu dalam materi pembelajaran sejarah selain diberikan materi tentang Tiongkok, juga diberikan penjelasan tentang kejayaan dan persaudaraan bangsa-bangsa Asia serta kedatangan bangsa Barat yang menghancurkan kejayaan tersebut.[19]

Dalam pelajaran sopan santun dan sejarah, selain diberi materi tentang sopan santun berdasarkan adat istiadat Tiongkok, mereka juga diajarkan materi tentang sopan santun dan sejarah Jepang. Tentu saja sejarah Jepang yang diajarkan adalah yang berhubungan dengan kepahlawanan dan keberhasilan-keberhasilan yang berhasil diraih oleh Jepang. Pelajaran Ilmu Bumi diberikan dalam perspektif geopolitik Jepang. Selanjutnya untuk meningkatkan kebugaran, sikap sportif dan membangun rasa cinta terhadap Jepang sebagai saudara tua, murid-murid harus mengikuti pelajaran olah raga dan menyanyikan lagu Jepang yang berisi tentang semangat cinta tanah air dan perjuangan.[20]

---

[18] Chong Liang Su dan Wang Kuan Chang, op.cit., hlm. 102-103; "Pidato P.T. Soerabaja Syutyokan: Pendidikan Semangat di Garis Belakang Bantoean Goeroe dan Moerid Oentoek Asia Timoer Raja" dalam Soeara Asia, tanggal 6 Mei 2603; "Pertemoean Kepala-Kepala Sekolah Partikelir dengan Wakil Soerabaja Sytyo Bagian Pengajaran" dalam *Soeara Asia*, tanggal 14 Mei 2603

[19] Wawancara dengan Laksana Tedja pada tanggal 20 April 2002, di Rumah Abu The Goan Tjing

[20] Soemanto, Wasti, dan Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 43.

Daftar Pelajaran Sekolah Tionghoa dalam Seminggu

Nama Pelajaran		Tingkat Dasar		Tingkat Menengah		Tingkat Atas	
		Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6
Senam Pagi		1	1	1	1	1	1
Sopan Santun		2	2	2	2	1	1
Bahasa Tionghoa	Membaca	7	7	8	7	7	7
	Mengarang	-	-	1	1	2	2
	Menulis	3	3	2	2	1	1
Pengetahuan	Sejarah	4	4	5	5	2	2
	Ilmu Bumi					2	2
	Ilmu Alam					2	2
	Ilmu Kesehatan					2	2
Ilmu Hitung	Aljabar	3	3	6	6	6	6
	Sempoa				1	1	1
Ketrampilan		2	2	1	1	1	1
Menggambar		2	2	1	1	1	1
Olah Raga		3	3	2	2	2	2
Musik		3	3	1	1	1	1
Bahasa Indonesia		-	-	-	-	3	3
Bahasa Jepang		?	?	?	?	?	?

Sumber: Chong Liang Su dan Wang Kuan Chang, op.cit., hlm. 102-103

Dalam rangka meningkatkan semangat Dai Nippon, setiap pagi murid-murid Sekolah Tionghoa diberikan indoktrinasi *Hakko Ichiu,* yang artinya adalah delapan penjuru dunia di bawah satu atap yang merupakan slogan persaudaraan Jepang untuk mewujudkan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Indoktrinasi itu juga dilakukan pada setiap pelatihan guru agar semua guru menanamkan semangat tersebut pada murid-muridnya. Murid-murid juga diwajibkan mengikuti *Nippon Seisyin* yaitu kegiatan semacam latihan militer, yang sangat bermanfaat untuk melatih kedisiplinan serta sikap sigap dalam menyelesaikan persoalan.

Murid sekolah Tionghoa juga diwajibkan memperingati hari besar Bangsa Jepang. Pada setiap perayaan hari besar, semua guru dan murid wajib melakukan penghormatan kepada *Tenno Heika* dengan menghadap ke arah matari terbit yaitu ke arah timur, tempat kaisar Jepang dan disertai dengan mengibarkan bendera *Kokki* dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu *Kimigayo*. Beberapa hari besar yang harus diperingati oleh murid sekolah Tionghoa adalah. Beberapa hari besar negara Jepang yang harus mereka peringati adalah *pertama*, hari *Sihōhai* pada tanggal 1 Januari, yaitu hari kaisar Jepang mendoakan arwah nenek moyangnya, *kedua*, hari *Kigen-Setsu* pada tanggal 11 Februari untuk memperingati kaisar Jepang yang pertama, yaitu Djinmu Tenno, *ketiga,* hari *Tentjoo Setsoe* pada tanggal 29 April, yaitu hari kelahiran Tenno (Kaisar) Heika, *keempat,* hari *Meizi-Setu* pada tanggal 3 November untuk memperingati hari kelahiran kaisar Mutsuhito, yaitu kaisar Jepang yang berhasil membangun Jepang dan menjalin hubungan dengan negara-negara luar.[21]

Selain melalui pelajaran, semangat membela kepentingan Jepang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya juga ditanamkan melalui cara mengikutsertakan murid-murid sekolah Tionghoa dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh tentara Jepang, diantaranya adalah kegiatan memperingati

[21] A.G. Pringgodigdo, *Tatanegara di Djawa pada Waktu Pendudukan Djepang dari Bulan Maret sampai Bulan Desember 1942* (Jogjakarta: Universiteit Negeri Gadjah Mada, 1952), hlm. 29; *Almanak Asia Raja 2603* (Jakarta: Asia Raja, 2602), hlm. 38-40.

"Jawa Baru". Dalam rangka memperingati "Jawa Baru", pada tanggal 9 Maret 1943, murid-murid sekolah Tionghoa di Surabaya melakukan arak-arakan dengan membawa bendera Jepang yang disertai dengan menyanyikan lagu Kimigayo dan melakukan pertunjukan kesenian Tionghoa, diantaranya memainkan *Say*, yaitu alat musik dari Tiongkok.[22] Sehari kemudian, 50 orang murid perempuan sekolah Tionghoa yang bergabung dalam kelompok paduan suara turut memeriahkan pesta memperingati "Jawa Baru" di gedung perkumpulan *Tionghoa* dengan menyanyikan lagu *Kimigayo*, lagu-lagu berbahasa Jepang lainnya dan lagu-lagu berbahasa Jerman, serta memainkan alat musik dari Tiongkok. Lagu-lagu berbahasa Jerman turut dinyanyikan karena negara Jerman adalah sekutu Jepang dalam perang dunia.

Untuk meningkatkan kedisiplinan serta solidaritas sesama bangsa Asia, setiap hari Sabtu pagi hingga siang, *Naiseibu* mengumpulkan murid-murid sekolah melakukan kegiatan semacam kerja bakti, yaitu membersihkan kendaraan perang, gedung-gedung perkantoran dan membersihkan sampah.[23] Meskipun bertempat tinggal di kota, murid-murid sekolah Tionghoa juga dikenalkan dengan kegiatan pertanian, misalnya secara beramai-ramai membuat pupuk kompos. Awalnya kegiatan tersebut membuat resah para orang tua murid, karena kawatir anak-anak yang tidak terbiasa bekerja di bawah terik matahari akan jatuh sakit. Selain itu kegiatan di hari Sabtu juga menyebabkan hilangnya kesempatan anak-anak membantu orang tua bekerja, terutama yang orang tuanya bekerja mengelola toko. Setelah berlangsung beberapa bulan, para orang tua mulai tidak keberatan, karena mereka melihat dampak positifnya yaitu membuat anak-anak menjadi disiplin, memiliki kemampuan bekerja sama dan memiliki kepedulian yang lebih tinggi terhadap keluarga dan masyarakat di sekitar tempat mereka tinggal.[24]

---

22 "Perayaan Djawa Baru Oleh Masjarakat Tionghoa" dalam Soeara Asia, tanggal 13 Maret 2603.

23 *Soeara Asia* 24 Juli 1943 .

24 Wawancara dengan Opang di Kapasan Dalam Surabaya, pada tanggal 12 Nopember 2001

Akan tetapi, padatnya materi pelajaran tentang Jepang juga memunculkan ketidakpuasan orang tua murid sekolah Tionghoa. Mereka yang memiliki kelebihan uang berinisiatif memanggil guru Tionghoa ke rumah dengan tujuan mengajarkan bahasa dan tulisan *Kuo Yu*, sopan santun dan adat istiadat Tionghoa. Meskipun dalam hal tulisan memiliki kemiripan dengan tulisan Jepang, tidak banyak murid sekolah Tionghoa yang menguasa bahasa Jepang. Di lain pihak, orang tua yang tidak mampu memanggilkan guru ke rumah, mendaftarkan anak-anak mereka ke tempat kursus yang biasanya berlangsung selama dua jam. Berbeda dengan jadwal kursus pada masa Kolonial Belanda, pada masa Jepang tidak boleh ada tempat kursus yang buka pada malam hari, karena Jepang memberlakukan jam malam. Pada malam hari, semua warga kota harus berada di dalam rumah. Rata-rata mereka juga memadamkan lampu dengan alasan harga minyak pada waktu itu sangat mahal.[25]

Kebijakan pendidikan pada masa Jepang tidak memuaskan keinginan seluruh warga Tionghoa. Orang-orang Tionghoa yang sebelumnya terjun di bidang pendidikan menilai bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh Jepang dan kurikulum yang diterapkan pada sekolah-sekolah Tionghoa tidak merepresentasikan model pendidikan yang ideal. Model pendidikan yang diterapkan oleh Jepang tidak memberikan ruang bagi orang-orang Tionghoa untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga ada beberapa aspek yang hilang, terutama yang berhubungan dengan kemampuan bahasa. Penghilangan bahasa Belanda dan Inggris dinilai menghalangi kemampuan orang-orang Tionghoa beradaptasi dengan kemajuan jaman dan terutama ketika mereka menginginkan terjun dalam dunia perdagangan internasional. Akan tetapi, meskipun tidak dapat memuaskan, model pendidikan yang diterapkan Jepang memberikan manfaat terhadap perbaikan moral, terutama yang berhubungan dengan kedisiplinan, nilai gotong royong, kerja keras dan terutama solidaritas sesama bangsa Asia. Nilai-

[25] *Ibid.*

nilai yang berhubungan dengan solidaritas sesama bangsa Asia menjadi modal dasar bagi generasi Tionghoa untuk mendukung perjuangan bumiputera meraih kemerdekaan. Dukungan dan solidaritas tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan pemuda Tionghoa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada peristiwa perang 10 November 1945, banyak pemuda Tionghoa yang tinggal di Kapasan turut berjuang bersama pemuda lainnya. Banyak pula diantaranya yang terlibat dalam kegiatan dapur umum dan membuka klenteng-klenteng sebagai tempat untuk menolong korban perang.[26]

Kesimpulan

Kedatangan Jepang sebagai penguasa baru menggantikan Pemerintah Kolonial Belanda merupakan babak baru bagi kehidupan etnis Tionghoa. Kebijakan Jepang mengubah kelas sosial dengan menempatkan bangsa Eropa sebagai kelas terakhir di bawah bangsa Asia tidak serta merta membuat orang-orang Tionghoa gembira. Kebencian orang-orang Tionghoa terhadap Jepang disikapi dengan kebijakan-kebijakan yang cukup lunak. Izin pembukaan sekolah-sekolah Tionghoa merupakan salah satu wujud kebijakan lunak terhadap orang-orang Tionghoa. Dorongan menjadi Tionghoa kembali serta membangun semangat solidaritas sesama bangsa Asia melalui penghapusan bahasa Belanda dan Inggris serta larangan terhadap budaya Barat merupakan strategi Jepang dalam memberi identitas baru bagi etnis Tionghoa, bumiputera dan Asia lainnya. Identitas baru itu adalah identitas sebagai masyarakat Asia yang siap mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu. Hal yang tak terduga adalah ketika identitas ke-Asiaan itu mendorong sekaligus menjadi kekuatan yang menyatukan etnis Tionghoa dan bumiputera dalam semangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Secara tidak langsung, justru melalui materi pelajaran bahasa Indonesia, sejarah serta budaya Indonesia, Jepang mempersiapkan murid-murid Tionghoa menjadi warga dan bangsa Indonesia.

[26] *Ibid*: Wawancara dengan Gunawan, pada tanggal 3 Desember 2020, di Kapasan Dalam.

BAB IV

OLAHRAGA

The Magnificent Seven: Pionir Prestasi Bulu Tangkis Indonesia[1]

Ravando

KEGEMILANGAN Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang berhasil menyabet medali emas Olimpiade Tokyo 2020, menjadikan mereka sebagai ganda putri Indonesia pertama yang berhasil melakukannya di ajang olahraga empat tahunan terbesar tersebut. Lalu beberapa bulan berselang, Indonesia juga berhasil memulangkan kembali Piala Thomas yang telah melanglang buana ke negara lain hingga 18 tahun lamanya. Belum lagi dominasi Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon yang berhasil mengoleksi belasan gelar juara hanya dalam kurun dua tahun, semakin menegaskan Indonesia sebagai salah satu kiblat penting dalam dunia bulu tangkis.

Tidak ada yang menyangsikan posisi Indonesia sebagai salah satu negara bulu tangkis paling berpengaruh di dunia. Bulu tangkis, seperti yang ditulis Colin Brown dalam artikel berjudul "Playing the Game: Ethnicity and Politics in Indonesian Badminton", sudah menjadi semacam identitas nasional yang mampu menembus sekat-sekat perbedaan. Tidak bisa dimungkiri memang, ketika olahraga lain kesulitan berprestasi di kancah internasional, bulu tangkis kerap menjadi penyelamat wajah Indonesia di mata dunia.[2]

---

[1] Tulisan ini pernah dimuat dalam https://www.kompas.id/baca/opini/2020/11/15/the-magnificent-seven-pionir-prestasi-bulutangkis-indonesia pada 15 November 2020 dan disertai dengan beberapa pembaruan untuk kepentingan publikasi buku ini.

[2] Colin Brown, "Playing the Game: Ethnicity and Politics in Indonesian Badminton," *Indonesia*, No. 81 (April 2006), pp. 71-93.

Namun proses Indonesia untuk menjadi negeri bulu tangkis tidak berlangsung instan sekalipun kemungkinan olahraga tersebut sudah berkembang pesat di Indonesia sejak awal abad ke-20. Colin Brown, seorang sejarawan terkemuka asal Australia, menemukan informasi dari *Pewarta Deli* (7 Januari 1932) bahwa setidaknya ada dua toko di Medan, yakni Hari Bros dan Liang You, yang menjual perlengkapan bulu tangkis.[3] Di samping itu, Koo Hok Tjiang juga sempat menulis artikel panjang dalam mingguan *Sin Tit Po* (14 september 1935) tentang beragam aturan dalam bulu tangkis, yang menunjukkan bahwa olahraga ini sudah cukup populer di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera pada tahun-tahun tersebut.[4]

Tahun 1930-an dan 1940-an juga menandai kemunculan beragam klub bulu tangkis yang didirikan di berbagai daerah, di mana sebagian besar di antaranya diprakarsai oleh orang Tionghoa, sebut saja *Bataviaasche Badminton Bond* (Batavia), *Soerabaiasche Badminton Bond* (Surabaya), dan *Heerenstraat Badminton Club* (Semarang). Berbagai pertandingan eksibisi diadakan, mulai dari antar klub hingga antar daerah. Kegiatan Pasar Malam pun menjadi sarana penting untuk mempopulerkan olahraga ini. Hampir tidak ada penyelenggaraan Pasar Malam yang tidak menggelar pertandingan bulu tangkis.[5] Berbagai nama besar seperti Ferry Sonneville, Tan Joe Hok, Eddy Joesoef, Tan King Gwan, hingga Njoo Kiem Bie pun lahir dari klub-klub bulu tangkis daerah.

Dengan dihelatnya berbagai kejuaraan bulu tangkis di tingkat lokal dan internasional, popularitas bulu tangkis di Indonesia pun semakin tinggi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan kegemilangan Rudy Hartono yang berhasil menyabet delapan gelar All England, di mana tujuh di antaranya dilakukan secara beruntun. Lalu ada juga Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang untuk pertama kalinya membuka keran medali emas Indonesia di kancah Olimpiade. Belum lagi nama-nama besar, seperti Retno Kustijah, Minarni, Liem Swie King, Christian

---

[3] *Pewarta Deli,* 7 Januari 1932 dalam Colin Brown, "Playing the Game", hlm. 74.
[4] "Atoeran Maen Badminton," *Weekblad Sin Tit Po*, 14 September 1935.
[5] *Perkumpulan Bulu Tangkis Tangkas: 50 Tahun Mencetak Juara* (Jakarta: PB. Tangkas, 2001).

Hadinata, Hariyanto Arbi, hingga Ivanna Lie yang berulangkali mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.

Akan tetapi, kita kerap melupakan periode 1950-an dan 1960-an sebagai tonggak awal dari prestasi Indonesia di dunia bulu tangkis. Periode ini pun menjadi awal kiprah pemain-pemain bulu tangkis Indonesia di kancah internasional. Pencapaian ini menjadi begitu istimewa lantaran bulu tangkis Indonesia kala itu belum memiliki pelatih tetap dan sistem kompetisi yang jelas. Tan Liang Tie (Satyohusodo Sidiadinoto), wartawan olahraga mingguan *Star Weekly*, menyebut kecintaan masyarakat terhadap bulu tangkis-lah yang kemudian mampu mengerek nama Indonesia pada taraf global.[6]

Momentum tersebut diawali oleh kemunculan "The Magnificent Seven" yang terdiri dari Ferry Sonneville (saat itu tengah studi di Rotterdam), Tan Joe Hok (Bandung, Juara Nasional 1956), Tan King Gwan (Salatiga), Eddy Joesoef (Jakarta, Juara Nasional 1955), Njoo Kiem Bie (Surabaya), Lie Poo Djian (Purwokerto), dan Olich Solichin (Tasikmalaya), yang berulang kali berhasil mengerek nama Indonesia di luar negeri. Diawali dengan kemenangan Ferry Sonneville di ajang Selangor Open (1954), Malaysia Open (1955), Dutch Open (1956) dan French Open (1957), pundi-pundi prestasi bulu tangkis Indonesia pun resmi dimulai.

Piala Thomas 1958: Sebuah Momentum

Titik balik tersebut terjadi pada Juni 1958, ketika Indonesia memutuskan untuk berpartisipasi dalam ajang Piala Thomas yang babak utamanya diadakan di Singapura.[7] Namun sebelum mencapai babak tersebut, Indonesia harus

---

[6] Tan Liang Tie, *Djiwa Raga Untuk Bulu Tangkis Indonesia* (Jakarta: Varia, 1967), hlm. 36.

[7] Piala Thomas pertama kali diadakan pada 1948-1949 di Preston, Inggris, dengan format sembilan pertandingan yang terdiri dari lima tunggal dan empat ganda. Setiap pertandingan diadakan dalam dua hari dengan rincian empat pertandingan di hari pertama dan lima pertandingan di hari kedua. Tim Malaya keluar sebagai pemenang perdana dan berhasil mempertahankan Piala Thomas dalam dua turnamen setelahnya, yakni pada 1951 dan 1954. Terobosan penting dilakukan oleh International Badminton Federation (IBF) setelah Thomas Cup 1982, yakni dengan mengubah frekuensi perhelatan Piala Thomas dari yang sebelumnya tiga tahunan menjadi dua tahunan. Di samping itu, format pertandingan yang sebelumnya sembilan pertandingan pun diubah menjadi lima (tiga tunggal dan dua ganda). Lihat Max Karundaeng, *Pasang Surut Supremasi Bulu Tangkis Indonesia*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1980).

terlebih dulu melewati babak kualifikasi. Sebagai debutan, Indonesia tergabung dalam Zona Australasia bersama Selandia Baru dan Australia.[8]

Babak pertama kualifikasi diadakan di salah satu kota kecil di Selandia Baru bernama Invercargill. Tim Indonesia saat itu masih belum diperkuat Ferry Sonneville yang tengah menempuh pendidikan di Belanda. Namun Ferry sempat mengirim surat ke redaksi *Star Weekly* dan yakin Indonesia akan mampu berbicara banyak dalam keikutsertaan perdananya di Piala Thomas. Baginya, momen tersebt menjadi sebuah 'tonggak sejarah' (*mijlpaal*) bagi skuad Indonesia untuk mengharumkan Nusa dan Bangsa.[9]

Dengan hanya didampingi oleh R. Jusuf selaku manajer tim, Indonesia memulai ujian awalnya di babak kualifikasi pada 11 dan 12 Oktober 1957. Selandia Baru digasak 9-0 tanpa pemain Indonesia kehilangan satu set pun. Nama Tan Joe Hok mulai mencuri perhatian lantaran berhasil mengalahkan dua pemain Selandia Baru dengan skor telak, yakni P.D. Skelt (15-3, 15-0) dan A.M. Stepens (15-3, 15-3). [10]

Sementara itu dalam pertandingan kualifikasi kedua yang dihelat di Melbourne, Indonesia juga tetap mampu menunjukkan dominasinya dengan mencukur habis regu Australia dengan skor 9-0. Tan Joe Hok kembali menunjukkan kekuatannya dengan melibas dua pemain terbaik Australia, yakni K. Turner dan D. McG. Murray, masing-masing dengan skor 15-14, 15-12 dan 15-5, 15-7.[11] Dua kemenangan tersebut pun sukses mengantarkan Indonesia berlaga di babak utama di Singapura.

Sekalipun mampu lolos dengan skor meyakinkan, tidak ada pihak yang yakin Indonesia akan mampu berbuat banyak dalam turnamen putra beregu terbesar di dunia tersebut, termasuk

---

[8] Pada 1957-1958 tim-tim yang berpartisipasi dalam Piala Thomas dibagi ke dalam empat zona kualifikasi, yaitu (1) Zona Pan-Amerika (Amerika & Kanada); (2) Zona Asia (India, Thailand, Burma, Hong Kong, Pakistan, Srilanka, dan Jepang); (3) Zona Australasian (Australia, Selandia Baru, dan Indonesia; (4) Zona Eropa (Inggris, Irlandia, Skotlandia, Perancis, Denmark, dan Swedia. Lihat Peng Han Lim & Mohd Salleh Aman, "The History of Modern Organized Badminton and the Men's Team Thomas Cup Tournaments, 1948–1979," *The International Journal of the History of Sport*, 14:7-8, hlm. 692.

[9] Tan Liang Tie, *Djiwa Raga Untuk Bulu Tangkis Indonesia*, hlm. 36.

[10] "Indonesia - New Zealand 4-0," *Sin Po*, 12 Oktober 1957.

[11] "Indonesia – Australia 9-0," *Sin Po*, 19 Oktober 1957.

pihak PBSI sendiri. Keadaan finansial PBSI yang morat-marit membuat mereka ragu untuk memulangkan Ferry Sonneville ke tanah air. Namun berkat inisiatif dari seorang penduduk Bogor bernama Tjoa Keng Lin, diinisiasi-lah sebuah upaya penggalangan dana melalui majalah *Star Weekly*.

Dalam edisi 29 Maret 1958, redaksi *Star Weekly* mengeluarkan sebuah pengumuman yang mengajak para pembacanya untuk turut menyumbang. "Diminta bantuan pembatja supaja Ferry Sonneville dapat mendjundjung nama Indonesia". Dalam pengumuman tersebut juga diterangkan berbagai alasan mengapa mereka harus mendukung aksi tersebut, salah satunya adalah keyakinan bahwa lewat olahraga bulu tangkis inilah nama Indonesia akan terangkat di mata dunia. Singkat cerita, sumbangan bagi Ferry Sonneville dan regu Piala Thomas Indonesia pun terus mengalir. Sumbangan ini datang dari berbagai kalangan yang turut mengadakan berbagai kegiatan amal, mulai dari acara lelang barang, pertandingan eksibisi, dan lain sebagainya. Total uang Rp. 175.000 pun terkumpul, di mana Rp. 40.000 digunakan untuk memboyong pulang Ferry Sonneville.[12]

Sementara itu, terkait dengan peta kekuatan lawan Indonesia di ajang Piala Thomas, seluruh mata dunia jelas tertuju pada tim Malaya, selaku juara tiga kali beruntun sejak kompetisi tiga tahunan tersebut pertama kali digelar pada 1949. Berbagai bursa taruhan pun menjagokan Malaya akan menggondol Piala Thomas untuk keempat kali dan mengalahkan Denmark di partai puncak.[13]

Apalagi, tim Malaya saat itu dihuni oleh skuad terbaiknya. Selain Eddy Choong, yang telah menjuarai All England, Denmark Open, Dutch Open, dan Scotland Open, ada juga nama Johnny Heah dan Lim Say Hup, ganda terbaik dunia kala itu. Kepercayaan diri berlebih Malaya tersebut tersirat jelas dalam pernyataan Heah Joo Seang, Ketua Federasi Bulu Tangkis Malaya, seperti dikutip oleh *The Straits Times* pada

[12] "Pendapatan dan Pengeluaran Regu Thomas Cup Indonesia," *Sin Po*, 5 Juni 1958.
[13] "Malaya Akan Pertahankan Thomas Cup," *Sin Po*, 4 Juni 1958.

2 Juni 1958: "Kami sudah memilih tim yang kuat. Kami pasti menang. Saya bahkan sudah memesan empat botol sampanye untuk perayaan kemenangan."[14]

Situasi demikian jelas berkebalikan dengan skuad Indonesia yang dihuni oleh *The Magnificent Seven* dengan Thio Tju Djen dan Tan Thiam Beng sebagai cadangan. Tidak ada pelatih yang mendampingi keberangkatan mereka, skuad Indonesia hanya didampingin R. Joesoef selaku manajer tim, Dr. Ong Teng Houw yang menjadi dokter tim, Ramli Rikin sebagai *non-playing captain*, dan Tan Liang Tie yang dikirim *Star Weekly* untuk meliput jalannya pertandingan.[15] Pengaturan dan penentuan tim pun hanya didasarkan pada rembukan antarpemain saja.

Menjelang H-1 keberangkatan, tepatnya pada 31 Mei 1958, regu Indonesia memutuskan untuk menginap di sebuah hotel melati di kawasan Gunung Sahari, lantaran pertimbangan jarak yang dekat dengan bandara Kemayoran dan harganya yang murah. Berbekal jas pinjaman, mereka pun menuju bandara dengan diantar becak. Keberangkatan mereka pun berlangsung sunyi, tanpa adanya seremoni pelepasan. Tercatat hanya Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) saat itu, yakni Dr. Halim, yang mendampingi rombongan. Tentu tidak ada ekspektasi tinggi bahwa mereka akan membawa Piala Thomas ke Ibu Pertiwi.

Tan Joe Hok masih mengingat jelas momen tersebut. Dia menerangkan bahwa hotel yang mereka tempati penuh dengan kutu busuk. Namun tidak sedikit pun tersirat kekecewaan maupun kemarahan di wajah seluruh pemain. "Kami berangkat dengan hati yang gembira, tanpa beban sama sekali. Kami sadar bahwa ajang Piala Thomas ini menjadi penampilan perdana kami. Namun kami sama sekali tidak *nervous.* Kami hanya berupaya memberikan yang terbaik bagi Indonesia," pungkas Joe Hok.

Selama di Singapura, regu bulu tangkis Indonesia mendapatkan sokongan makanan dari masyarakat Indonesia yang tinggal di sana. Di luar itu, segala sesuatu harus diurus

---

[14] Lihat *The Straits Times*, 2 Juni 1958 dan *Berita Harian*, 2 Juni 1958.
[15] Tan Liang Tie, *Djiwa Raga Untuk Bulu Tangkis Indonesia*, hlm. 52-53.

sendiri oleh mereka. Namun di tengah keterbatasan tersebut, tim Indonesia tak disangka-sangka berhasil membuat kejutan.[16]

Pertandingan pertama mempertemukan Indonesia dengan Denmark yang kala itu terang lebih diunggulkan lantaran dihuni nama-nama besar seperti Erland Kops, Finn Kobbero, dan Jorgen Hammergaard Hansen. Manajer regu Denmark, Borge Frederiksen, pun yakin betul akan menyudahi pertandingan minimal dengan skor 6-3.[17] Tanpa mengindahkan kekuatan Indonesia, Frederiksen bahkan sudah menatap pertandingan final melawan Malaya yang ia yakini juga dapat dimenangkan dengan skor akhir 5-4.

Bertempat di Singapore Badminton Hall, Guillemard Road, yang berkapasitas 7.000 penonton, Indonesia mampu mengejutkan para penonton lantaran menyajikan permainan atraktif ketika bertemu Denmark. Baik Erland Kops maupun Finn Kobbero masing-masing dapat dikalahkan oleh Tan Joe Hok. Sementara pasangan ganda terbaik Indonesia, Njoo Kiem Bie/Tan King Gwan, juga berhasil mengalahkan Finn Kobbero/Jorgen Hammergaard Hansen dalam pertandingan tiga set. Di luar prediksi, Indonesia mampu membekuk Denmark dengan skor 6-3. Nama Tan Joe Hok pun semakin mencuri perhatian dan mulai diwaspadai oleh para lawan.

Kejutan itu terus berlanjut dalam babak lanjutan ketika Indonesia bertemu Thailand. Regu Thailand yang kala itu dihuni oleh pemain-pemain terbaiknya, seperti Charoen Wattanasin, diprediksi akan mampu memberikan perlawanan sengit bagi skuad Indonesia. Di luar dugaan, Thailand pun digasak dengan skor mencolok, yakni 8-1. Satu-satunya kekalahan Indonesia diderita oleh pasangan Tan Joe Hok/Lie Po Djian dalam pertandingan kesembilan yang sudah tidak lagi menentukan. Kemenangan atas Thailand tersebut pun mengantarkan Indonesia bertemu Malaya di partai puncak.[18]

Tan Liang Tie menggambarkan partai tersebut sebagai 'si tikus melawan si raksasa'. Tidak ada satu pun kalangan yang menjagokan Indonesia akan menggondol Piala Thomas. Berbagai

[16] "Serba-Serbi Thomas Cup," *Sin Po*, 20 Juni 1958.
[17] "Indonesia Kalahkan Denmark 6-3," *Sin Po*, 11 Juni 1958.
[18] "Muangthai Disingkirkan 8-1," *Sin Po*, 12 Juni 1958.

bursa taruhan menjagokan Malaya dengan perbandingan 60:40. Ratusan ribu dolar dipertaruhkan di Penang dengan kemenangan Malaya di atas skor 6-3. Berdasarkan hitung-hitungan kasar mereka, Malaya akan mengalahkan Indonesia dengan skor 7-2 bila beruntung, 6-3 dengan kondisi skuad mereka kala itu, dan 5-4 bila mereka apes. Perhatian Malaya hanya tertuju pada Ferry Sonneville dan Tan Joe Hok, sedangkan untuk sektor ganda Indonesia hanya dipandang sebelah mata, sekalipun telah mengalahkan para pasangan ganda Denmark dan Thailand.

Namun publik dibuat terkejut lantaran dari total empat pertandingan yang dilangsungkan di hari pertama, Indonesia mampu memetik tiga kemenangan di antaranya. Tiga kemenangan tersebut dibukukan Ferry Sonneville yang mengalahkan Eddy Choong dengan skor 15-12, 15-4; Tan Joe Hok yang melibas Teh Kew San 18-14, 15-3; dan Njoo Kiem Bie/Tan King Gwan yang mengandaskan perlawanan Johnny Heah/Lim Say Hup dalam tiga set 7-15, 15-5, dan 18-15. Sementara satu-satunya kekalahan dialami pasangan dadakan Ferry Sonneville/Tan Joe Hok ketika melawan Oei Teik Hock/Eddy Choong dengan skor 15-18, 5-15. [19]

Sekalipun menderita tiga kekalahan di hari pertama, Malaya tetap optimis akan mampu membalikkan kedudukan di hari kedua dan tetap keluar sebagai juara. Namun harapan tersebut berangsur sirna ketika Tan Joe Hok mampu membuat kejutan dengan mengalahkan Eddy Choong dalam dua set langsung, 15-11, 15-6. Poin kemenangan pun berhasil dibukukan oleh Ferry Sonneville yang mengandaskan perlawanan Teh Kew San dalam pertandingan sengit yang berakhir dengan skor 13-15, 15-13, dan 18-16. Skor 5-1 pun memastikan Piala Thomas direbut Indonesia dalam keikutsertaan untuk pertama kali. Para suporter Indonesia pun tumpah ruah di lapangan. Mereka pun mengalungi Tan Joe Hok dan Ferry Sonneville dengan karangan bunga bertuliskan "Hidup Indonesia". Euforia tersebut berlangsung selama beberapa menit, sebelum lapangan disterilkan untuk pertandingan selanjutnya yang mempertemukan Eddy Joesoef dan Abdullah Piruz. [20]

---

[19] "Leading 3-1 dari Malaya," Sin Po, 15 Juni 1958; "Regu Bulutangkis Indonesia Mendjadi Kampiun Dunia," Sin Po, 16 Juni 1958.

[20] Tan Liang Tie, *Djiwa Raga Untuk Bulu Tangkis Indonesia*, hlm. 109-110.

Eddy Joesoef yang sebelum pertandingan dijuluki oleh salah seorang wartawan Singapura sebagai pemain medioker, ternyata mampu mengalahkan Piruz dalam pertandingan tiga set, 6-15, 15-10 dan 15-8. Sementara dua kekalahan Indonesia di partai sisa tidak membuat Piala Thomas berpaling dari Indonesia. Skor 6-3 sekaligus meruntuhkan hegemoni Malaya dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di dunia bulu tangkis.

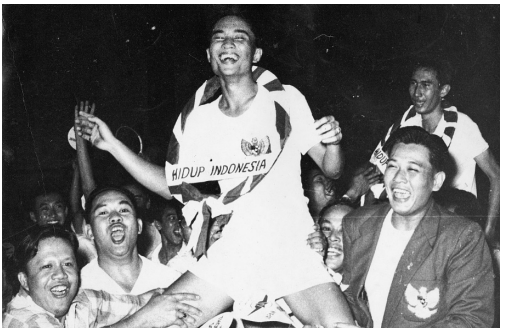

Euforia kemenangan Regu Indonesia atas Malaya di partai puncak Thomas Cup. Tampak Tan Joe Hok dan Ferry Sonneville diarak keliling lapangan dengan karangan bunga bertuliskan "Hidup Indonesia". Sumber: Koleksi Foto Tan Joe Hok

Kemenangan tersebut pun disambut dengan gegap gempita oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebuah panitia khusus untuk menyambut kepulangan regu Indonesia pun dibentuk dan diketuai oleh Abdulwahab Djojohadikusumo. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, sebuah regu olahraga memperoleh penghormatan nasional. Di tengah beragam permasalahan politik dan ekonomi yang tengah melanda, berita ini tentu ibarat menjadi oase di tengah padang gurun.

Anggota The Magnificent Seven berpose bersama Piala Thomas berhasil direbut dari Malaya. Dari kiri ke kanan: R Yusuf (Tim Manajer), Lie Po Djian, Njoo Kim Bie, Ramli Rikin (*non-playing captain*), Tan King Gwan, Eddy Joesoef, Tan Joe Hok, dan Ferry Sonneville. Sumber: Koleksi Foto Tan Joe Hok

Ribuan masyarakat pun tumpah ruah ke jalan, menyambut kepulangan skuad Indonesia ke tanah air, mulai dari Bandara Kemayoran menuju Istana Merdeka, di mana skuad Piala Thomas ini diterima oleh Presiden Soekarno.[21] Dalam salah satu wawancara saya dengan Tan Joe Hok, satu-satunya anggota *The Magnificent Seven* tersisa, ia menuturkan pesan dari Soekarno yang masih membekas: "Ingat Joe Hok, kamu akan terus bermain untuk bangsa dan negaramu!"[22] Prestasi itu terasa semakin lengkap lantaran pada akhir tahun 1958, nama Tan Joe Hok juga dinobatkan sebagai pebulutangkis terbaik dunia.

Parade Piala Thomas pun digelar di berbagai kota besar, mulai dari Jakarta, Bandung, hingga Surabaya. Bulu tangkis menguasai pemberitaan di media cetak hingga berminggu-minggu lamanya. Foto skuad *The Magnificent Seven* terpampang di berbagai papan reklame di sudut-sudut jalan ibukota. Nama mereka pun dielu-elukan sebagai pahlawan oleh rakyat Indonesia, dan banyak anak muda yang terinspirasi untuk mengikuti jejak mereka.[23]

Ribuan orang di Jakarta yang menyambut kedatangan skuad Indonesia yang berhasil memboyong Piala Thomas ke Tanah Air. Sumber: Koleksi Foto Tan Joe Hok

[21] "Thomas Cup ke Parlemen," *Sin Po*, 16 Juni 1958.
[22] Wawancara dengan Tan Joe Hok, 29 Oktober 2019.
[23] Lihat "Ibukota Pesta Menjambut Yoe Hok cs," *Sin Po*, 22 Juni 1958; "Bandung Sambut Regu Thomas Cup dengan Kebesaran," *Sin Po*, 25 Juni 1958.

Regu Piala Thomas diundang secara khusus oleh Presiden Soekarno ke Istana Negara. Tampak Tan Joe Hok, Ferry Sonneville, dan Eddy Joesoef berjalan di depan.
Sumber: Koleksi Foto Tan Joe Hok

Kemenangan tersebut jelas menorehkan sejarah baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Untuk itu, seorang pembaca *Sin Po* di Jakarta bernama R. Marto, kemudian mengusulkan agar para regu bulu tangkis Indonesia ini bisa diberikan sebuah tanda mata lewat uang yang dikumpulkan melalui koran tersebut. "Dompet Tanda Mata Pembatja Sin Po pada Regu Thomas Cup Indonesia" ini dibuka selama beberapa minggu lamanya, di mana seluruh lapisan masyarakat dapat berkontribusi, mulai dari menteri sampai petani. Akhirnya pada 7 Agustus 1958, bertempat di Restoran Mambo, Jalan Melawai No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta, tanda mata tersebut diserahkan kepada seluruh anggota Piala Thomas Indonesia. Adapun tanda mata tersebut berupa tujuh arloji merk 'Polarouter Universal Geneve' yang merupakan jam tangan paling terkemuka di dunia kala itu. Dalam salah satu webinar Nggosipin Tionghoa, Yuk! tanggal 30 November 2020, Tan Joe Hok menunjukkan arloji bertuliskan "Tanda Mata Pembatja *Sin Po*" tersebut kepada para partisipan diskusi dan menyebut arloji itu sumbangan luar biasa berharga dari seluruh rakyat Indonesia.[24]

[24] "Dompet Tanda Mata Pembatja Sin Po pada Regu Thomas Cup Indonesia," *Sin Po*, 17 Juni 1958; "Tanda Mata Pembatja Sin Po," *Sin Po*, 5 Oktober 1958.

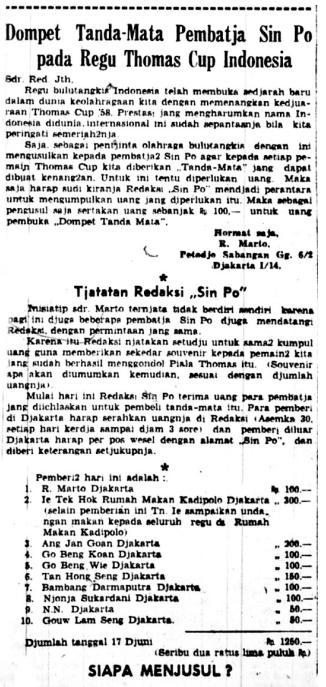

Dompet Tanda-Mata Pembatja Sin Po pada Regu Thomas Cup Indonesia

Sdr. Red. Jth.

Regu bulutangkis Indonesia telah membuka sedjarah baru dalam dunia keolahragaan kita dengan memenangkan kedjuaraan Thomas Cup '58. Prestasi jang mengharumkan nama Indonesia didunia internasional ini sudah sepantasnja bila kita peringati semerjah2nja.

Saja sebagai pentjinta olahraga bulutangkis dengan ini mengusulkan kepada pembatja2 Sin Po agar kepada setiap pemain Thomas Cup kita diberikan „Tanda-Mata" jang dapat dibuat kenang2an. Untuk ini tentu diperlukan uang. Maka saja harap sudi kiranja Redaksi „Sin Po" mendjadi perantara untuk mengumpulkan uang jang diperlukan itu. Maka sebagai pengusul saja sertakan uang sebanjak Rp. 100,— untuk uang pembuka „Dompet Tanda Mata".

Hormat saja,
R. Marto.
Petodjo Sabangan Gg. 6/2
Djakarta 1/14.

★

Tjatatan Redaksi „Sin Po"

Insiatip sdr. Marto ternjata tidak berdiri sendiri karena sdr. ini djuga beberapa pembatja Sin Po djuga mendatangi Redaksi dengan permintaan jang sama.

Karena itu Redaksi njatakan setudju untuk sama2 kumpul uang guna memberikan sekedar souvenir kepada pemain2 kita jang sudah berhasil menggondol Piala Thomas itu. (Souvenir apa akan diumumkan kemudian, sesuai dengan djumlah uangnja).

Mulai hari ini Redaksi Sin Po terima uang para pembatja jang dichlaskan untuk pembeli tanda-mata itu. Para pemberi di Djakarta harap serahkan uangnja di Redaksi (Asemka 30, setiap hari kerdja sampai djam 3 sore) dan pemberi diluar Djakarta harap per pos wesel dengan alamat „Sin Po", dan diberi keterangan setjukupnja.

★

Pemberi2 hari ini adalah :

1.	R. Marto Djakarta	Rp. 100.—
2.	Je Tek Hok Rumah Makan Kadipolo Djakarta (selain pemberian ini Tn. Je sampaikan undangan makan kepada seluruh regu di Rumah Makan Kadipolo)	„ 300.—
3.	Ang Jan Goan Djakarta	„ 300.—
4.	Go Beng Koan Djakarta	„ 100.—
5.	Go Beng Wie Djakarta	„ 100.—
6.	Tan Hong Seng Djakarta	„ 150.—
7.	Bambang Darmaputra Djakarta	„ 100.—
8.	Njonja Sukardani Djakarta	„ 100.—
9.	N.N. Djakarta	„ 50.—
10.	Gouw Lam Seng Djakarta.	„ 50.—
	Djumlah tanggal 17 Djuni	Rp. 1250.—

(Seribu dua ratus lima puluh Rp.)

SIAPA MENJUSUL ?

Laporan Dompet Tanda Mata Pembatja Sin Po edisi perdana beserta surat kiriman dari R. Marto. Sumber: Sin Po, 17 Juni 1958.

Momen Piala Thomas tersebut pun menjadi semacam pembuka jalan bagi prestasi bulu tangkis Indonesia lainnya. Pada 1959, Tan Joe Hok menjadi orang Indonesia pertama yang menjuarai All England setelah mengalahkan rekan senegaranya, Ferry Sonneville, dalam *all-Indonesian final*.[25] Di tahun yang sama, Joe Hok juga berhasil menjuarai Muangthai Open setelah mengalahkan Charoen Wattanasin di partai puncak,[26] di samping menjadi kampiun di Canadian Open dan US Open. *Sports Illustrated,* sebagai majalah olahraga terbesar di Amerika, bahkan sampai mengulas kemenangan Joe Hok tersebut dalam dua halaman penuh.[27]

---

25 "All Indonesian Final di Wembley-London," *Sin Po*, 21 Maret 1959.

26 "Joe Hok Djuara Muangthay," *Sin Po*, 8 Januari 1959.

27 "Tan Joe Hok Takes Detroit," *Sports Illustrated*, 13 April 1959. Lihat juga "Joe Hok Djuara Kanada," *Sin Po*, 31 Maret 1959 & "Joe Hok Djuara Single-Putera Bulutangkis Amerika Serikat," *Sin Po*, 6 April 1959.

HAPPY VICTOR, Tan Joe Hok, examined his blistered soles in locker room after the finals, exclaimed, "Only nose and feet hurt now. Oh, those feet. Must see doctor."

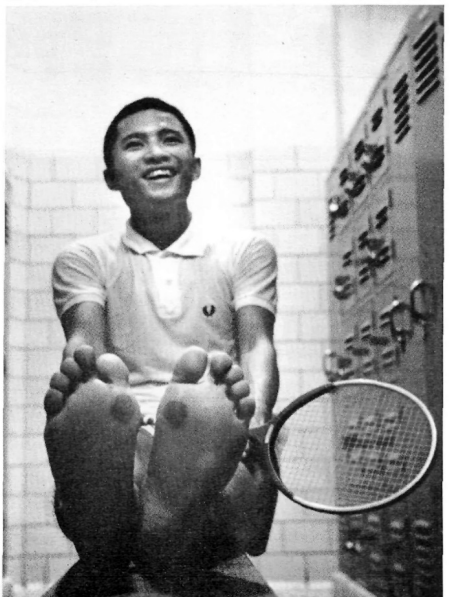

Potret Tan Joe Hok yang dimuat dalam *Sports Illustrated* setelah menjuarai US Open yang diselenggarakan di Detroit. Sumber: Sports Illustrated, 13 April 1959.

Ujian berat selanjutnya dihadapi Indonesia untuk mempertahankan Piala Thomas di hadapan pendukungnya sendiri di Jakarta pada 1961. Sebagai juara bertahan, Indonesia pun tinggal menanti lawan di partai final yang ternyata mempertemukan Indonesia melawan Thailand. Bertempat di Istora Senayan, Indonesia pun berhasil mempertahankan supremasinya dengan menundukkan Thailand, 6-3.[28] Hingga detik ini, Indonesia pun masih menjadi negara dengan koleksi Piala Thomas terbanyak, yakni 14 kali. Setelah terakhir kali juara pada 2002 (kala itu Indonesia menundukkan Malaysia di partai final), Indonesia pada akhirnya berhasil memboyong pulang Piala Thomas ke tanah air setelah mengandaskan perlawanan Tiongkok di partai puncak Piala Thomas 2020, yang bertempat di Aarhus, Denmark.

Pasca mempertahankan Piala Thomas pada 1961, nama Indonesia semakin dielu-elukan ketika berhasil merengkuh

[28] Lihat Max Karundaeng, *Pasang Surut Supremasi Bulu Tangkis Indonesia*, hlm. 49-63.

lima medali emas, tiga perak, dan tiga perunggu dari sektor bulu tangkis Asian Games 1962, yang diadakan di Istora Senayan, Indonesia. Setelahnya, Indonesia terus mendulang prestasi di cabang olahraga ini, termasuk dalam Olimpiade yang menjadi tolok ukur puncak prestasi seorang atlet. Sejak bulu tangkis dipertandingkan pertama kalinya dalam Olimpiade 1992 di Barcelona, Indonesia telah mengumpulkan total 21 medali dengan rincian: 8 medali emas, 6 perak, dan 7 perunggu. Hingga 2020, bulu tangkis pun masih menjadi satu-satunya olahraga yang mampu mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di ajang Olmpiade.

Setelah pensiun sebagai pemain, para anggota *The Magnificent Seven* ini kemudian terpencar. Sebagian di antaranya memutuskan menjadi pelatih dan sebagian lagi pensiun total dari olahraga yang membesarkan nama mereka. Tan Joe Hok sempat melatih di Mexico sebelum melatih Hong Kong, lalu memimpin skuad Indonesia merebut kembali Piala Thomas pada 1984 dari Tiongkok. Sementara Lie Po Djian pernah melatih Kamboja, begitu juga dengan Olich Solichin yang sempat melatih Kanada dan Korea. Bisa dibilang nama-nama di atas berperan penting dalam meletakkan pondasi bulu tangkis di negara-negara tersebut, yang mana kelak diikuti juga oleh berbagai negara lainnya.

Pahlawan Olahraga. Mungkinkah?

Dalam salah satu kesempatan, Tan Joe Hok sempat bertutur kepada saya tentang kebanggaan dia dan rekan-rekannya yang diberikan talenta untuk menjadikan Indonesia sebagai negara bulu tangkis. Saya bangga ada yang meneruskan kiprah kami semua," ujarnya. Terlepas dari karut-marut politik yang pernah menghantam ia dan pebulu tangkis keturunan Tionghoa lainnya, Joe Hok tetap merasa Indonesia sebagai rumah yang telah membesarkan namanya dan memberikannya banyak hal.

Puncaknya tentu ketika rezim Orde Baru berkuasa, di mana seluruh warga keturunan Tionghoa diwajibkan memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), tidak

terkecuali para pebulu tangkis yang berjuang habis-habisan guna mengharumkan nama bangsa. Hendrawan mengemukakan bahwa menjelang persiapan Piala Thomas 2002 di Guangzhou, SBKRI-nya terkatung-katung dan hampir tidak bisa berangkat. Ia bahkan mengemukakan bahwa kakak kandungnya sudah menunggu 20 tahun untuk mendapatkan SBKRI dan tak kunjung mendapatkannya.[29]

Padahal, ketika mereka menjuarai suatu turnamen, latar belakang etnis para pebulu tangkis ini sama sekali tidak pernah dipermasalahkan. Namun hal itu sepertinya tidak berlaku dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak dari mereka yang tetap dianggap sebagai dan kesulitan mengurus hal-hal yang bersifat administratif.

Ketika rezim Orde Baru berakhir, Presiden Habibie sejatinya telah mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 99 tentang penghapusan SBKRI. Namun Inpres tersebut tidak pernah dilaksanakan. Warga keturunan Tionghoa tetap diwajibkan memiliki SBKRI dalam segala urusan administrasi. Melihat hal tersebut, Tan Joe Hok bersama dengan beberapa pebulutangkis keturunan beserta puluhan tokoh Tionghoa lainnya, meminta dan mengusulkan kepada Presiden Megawati untuk mencabut SBKRI yang diskriminatif tersebut. Usaha tersebut berbuah manis. Saat ini SBKRI sudah tidak lagi diperlukan dalam segala urusan administratif.

Artikel pendek ini telah menunjukkan bahwa kemunculan Indonesia sebagai negeri bulu tangkis tidak terjadi secara instan. Terdapat sosok *The Magnificent Seven* yang telah memulai dan menuntaskan misinya dalam mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Mereka merupakan pahlawan olahraga, yang sekalipun berjuang di medan pertempuran berbeda, namun tetap memiliki visi dan misi serupa dengan pahlawan yang bertempur secara fisik.

Ironisnya, para sosok *The Magnificent Seven* ini seolah-olah luput dari perjalanan sejarah bangsa kita. Fakta-fakta historis tentang mereka hanya dibiarkan teronggok dalam kertas usang, dengan sedikit upaya untuk menggalinya kembali. Tan Joe Hok

[29] "Pejuang itu Berjuang Meraih SBKRI," dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7981/pejuang-itu-berjuang-meraih-sbkri/, 10 Mei 2003. Diakses pada 9 Februari 2021.

sempat bertutur bahwa ia dan kawan-kawannya tidak ingin dielu-elukan atau mengiba belas kasih pemerintah. "Sebab itu semua murni kami lakukan demi nama Indonesia," tuturnya. Akan tetapi, Joe Hok berharap agar pemerintah mengakui bahwa pernah ada sosok seperti Ferry Sonneville, Tan Joe Hok, Eddy Joesoef, dan lainnya yang pernah berjuang bagi Indonesia. "Saya bangga bisa turut menjadikan Indonesia sebagai negara bulu tangkis," ujar Joe Hok.[30]

Dengan ditetapkannya tambahan empat orang pahlawan nasional pada 10 November 2021, maka Indonesia kini memiliki total 195 orang yang menyandang gelar anumerta tersebut. Di samping bias dari segi jender, yakni 180 pahlawan pria berbanding 15 pahlawan perempuan, tidak ada satu pun para olahragawan yang muncul dalam daftar tersebut. Saya pun tergelitik untuk bertanya: apakah mungkin pahlawan Indonesia datang dari kalangan olahragawan? Apakah mungkin pebulu tangkis diangkat menjadi pahlawan nasional?

Sejatinya, tidak pernah terlintas sekalipun dalam benak Tan Joe Hok dkk. untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Baginya, pengakuan pemerintah atas kontribusinya terhadap bulu tangkis Indonesia sudah lebih dari cukup. Ia pun bermimpi agar tidak ada lagi atlet yang harus menanggung sengsara di hari tuanya, lantaran kurangnya perhatian pemerintah. "Seperti Kang Olich Solichin yang meninggal dalam keadaan buta setelah menderita katarak, atau Tan King Gwan yang harus menderita berkepanjangan lantaran kanker paru-paru," pungkasnya.[31]

[30] Wawancara dengan Tan Joe Hok, 12 November 2020.
[31] Wawancara dengan Tan Joe Hok, 12 November 2020.

Berjumpa Leo Suryadinata Saat Heuristik Sejarah Sepak Bola Tionghoa

Rojil Nugroho Bayu Aji

Menjadi mahasiswa sejarah memerlukan ketrampilan dan militansi dalam melakukan penelitian sejarah. Menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah terdiri dari empat langkah yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.[1] Heuristik merupakan proses awal untuk mencari sumber sebagai bahan dasar untuk merekonstruksi sejarah.

Pada tahun 2008, saya menulis skripsi sejarah olahraga (sepak bola) dengan judul *Tionghoa Surabaya Dalam Sepak Bola 1915-1942*. Saya memilih tema olahraga karena terpengaruh oleh Johan Huizinga, yang menyatakan bahwa manusia adalah *homo ludens* (manusia bermain) dan olahraga merupakan bagian dari permainan. Kajian olahraga memiliki sumbangsih yang besar dalam menjelaskan perjalanan kehidupan masyarakat karena olahraga bukan hanya sekadar permainan belaka. Olahraga mengandung nilai-nilai tertentu yang bisa menyumbangkan konstruksi budaya dalam masyarakat.[2]

Menulis sejarah olahraga memang bukanlah perkara yang mudah. Paling tidak, terdapat dua hal yang selalu menjadi masalah bagi sejarawan akademis, mahasiswa sejarah maupun siapa saja yang hendak menulis sejarah olahraga. *Pertama,* adalah masalah sumber. Sumbangan yang penting bagi sejarawan adalah sumber maupun dokumen dari Arsip Nasional Republik

---

1 Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 1999), hlm. 89.

2 Johan Huzinga, *Homo Ludens, a Study of The Play-Element in Culture*, (London, Boston and Henley: Routledge and Keagan Paul, 1949), hlm. 197-201.

Indonesia (ANRI) maupun kantor arsip yang ada di daerah. Banyak kesulitan-kesulitan yang saya alami selaku mahasiswa semester akhir. Bisa jadi, saat itu saya masih belum terampil dalam menerapkan metode penelitian sejarah, atau bisa juga, memang sumber-sumber untuk merekonstruksi sejarah sepak bola tidak sebanyak sumber-sumber penulisan sejarah lainnya yang melimpah di kantor arsip.

Berawal dari Tulisan di *Prisma*

Saat melakukan proses heuristik, secercah harapan muncul ketika menemukan tulisan Leo Suryadinata yang berjudul "Liem Koen Hian Peranakan yang Mencari Identitas" dalam *Majalah Prisma No. 3,* Maret 1983. Tulisan itu memiliki arti penting dalam penulisan skripsi saya karena dari situlah saya mengetahui ada pemboikotan sepak bola tahun 1932 di Surabaya yang dilakukan oleh Liem Koen Hian (dengan propagandanya melalui *Sin Tit Po*) bersama Radjamin Nasution dari *Soerabaiasche Indische Voetbal Bond* (SIVB) (sekarang menjadi Persebaya) dan kelompok Arab Al-Jaum.

Dari tulisan di *Prisma* itu pula, saya kemudian membaca karya-karya pak Leo yang lainnya untuk memahami pemetaan atau penggolongan orang-orang Tionghoa, yakni antara Tionghoa totok dan peranakan. Saya mendapatkan pemahaman itu dari buku pak Leo yang berjudul *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942,*[3] dan *Dilema Minoritas Tionghoa*.[4] Ternyata memahami dinamika masyarakat Tionghoa di Indonesia, khususnya era kolonial tidaklah tunggal.

Pada awal abad ke-20, banyak pendatang Tionghoa yang sampai ke Hindia Belanda dengan membawa istri yang berasal dari Hakka dan Kong Hu (Cantonese). Orang Hakka dan Kong Hu lebih familiar disebut totok *(singkeh)* karena lahir di Tiongkok dan dengan kokoh mempertahankan kebudayaan, tradisi asal Tiongkok serta bahasa yang digunakan adalah Mandarin-China.[5]

---

[3] Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942* (Jakarta: Sinar Harapan, 1994).

[4] Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafiti Pers, 1986).

[5] Siauw Tiong Djien, *Siauw Giok Tjhan, Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika* (Jakarta: Hasta Mitra, 1999), hlm. 13.

Secara keyakinan agama, Tionghoa totok sangat menjunjung tinggi adat istiadat China tradisional dan masih bersembahyang di kuil-kuil China, serta memuja nenek moyang. Tionghoa totok terbiasa berkumpul sesama mereka yang bahasa Mandarin. Ikatan orang totok dengan negara asal sangat dekat dan kuat.[6]

Golongan yang kedua adalah Tionghoa peranakan. Secara budaya, peranakan telah mengalami percampuran antara budaya Jawa, Tionghoa dan Barat. Bahasa Peranakan biasanya Melayu Tionghoa.[7] Tionghoa peranakan bisa juga dikategorikan berdasar kelahirannya yakni hasil perkawinan campuran antara orang Tionghoa dengan non Tionghoa terutama (Bumiputera). Peranakan dengan cepat harus bisa membaur dengan masyarakat setempat sehingga bahasa Mandarin mereka tidak aktif lagi. Agama Tionghoa peranakan, paling tidak ada tiga yakni menganut pemujaan terhadap leluhur yang tercampur dengan adat Bumiputera, ada yang beragama islam dan ada yang kristen bagi peranakan yang dekat dengan budaya Belanda.[8]

Secara politis, Siauw Tiong Djin mendefinisikan peranakan sedikit berbeda, yakni mereka yang menganggap Indonesia sebagai tanah airnya serta menjalankan hidup sesuai dengan kultur masyarakat setempat meskipun fasih berbahasa Mandarin. Tionghoa totok menurutnya adalah orang yang cenderung memilih dan mendukung Tiongkok dan menganggap Tiongkok sebagai tanah airnya. Walaupun orang Tionghoa fasih berbicara bahasa Melayu-Indonesia dan lahir di Indonesia dapat dikategorikan totok berdasarkan pendekatan orientasi politik tersebut.[9]

Pergerakan yang ada di Hindia Belanda akhirnya berpengaruh juga terhadap orang-orang Tionghoa karena pemerintah Belanda yang dinilai terlalu rasialis dan diskriminatif. Perjalanan historis orang Tionghoa di Hindia Belanda pada

---

[6] Leo Suryadinata, *op. cit.,* hlm. 90-91.

[7] Ong Hok Ham, "Tiga Macam Kebudayaan yang Mempengaruhi Cara Hidup Tionghoa Peranakan" dalalm: Ong Hok Ham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa* (Depok: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 65-66.

[8] Leo Suryadinata, *op. cit.,* hlm. 86-87.

[9] Siauw Tiong Djin, *op. cit.,* hlm. 14-15.

akhirnya mempunyai tiga orientasi. Pertama, adalah *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) bahwa orang-orang Tionghoa yang berada di Hindia Belanda menganggap dirinya sebagai bagian dari Tiongkok. Kedua, *Chung Hua Hui* (CHH) yang digawangi oleh Dr. Fromberg dan lebih dekat dengan Belanda. Akhirnya orang Tionghoa mulai mengakui dirinya sebagai kawula Belanda. Ketiga, adalah golongan *Partai Tionghoa Indonesia* (PTI) yang digawangi oleh Liem Koen Hian.

Era pergerakan nasional di Hindia Belanda boleh dikatakan sebuah fase awal untuk menggerakkan bangsa Indonesia demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia secara penuh. Sekitar tahun 1932 terjadi satu perdebatan dalam pers Melayu Tionghoa tentang keberadaan orang Tionghoa dan orientasinya. PTI bertujuan untuk memajukan bangsa-bangsa di Indonesia dan memajukan kedudukan seluruh rakyat Indonesia, termasuk Tionghoa (khususnya peranakan) beserta persamaan kepentingan-kepentingan Indonesia.[10]

Perubahan haluan dari Tiongkok ke Indonesia dijelaskannya dengan gagasan *Indonesierschap* Liem Koen Hian, yakni orang-orang Tionghoa harus berorientasi kepada Indonesia. Apabila ada orang Tionghoa yang kemudian menginginkan kemerdekaan Indonesia maka bisa dikatakan sebagai *Indonesier* (menjadi Indonesia). Pembahasan Liem supaya peranakan untuk menjadi *Indonesier* mendapat sambutan hangat dari para pendukungnya. Dokter Sutomo, ketua PBI yang menghadiri acara pidato Liem tentang *Indonesierschap* mengidentifikasi bahwa perananakan Tionghoa agar mau menjadi *Indonesier* apabila menginginkan hidup di Hindia Belanda dengan selamat dan makmur.[11]

Anjuran Liem bagi peranakan agar berafiliasi ke Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan dikarenakan peranakan terlahir, besar dan kemudian mencari kehidupan, menikah serta melanjutkan keturunan di Indonesia. Peranakan tidak berorientasi kepada Tiongkok karena terlalu jauh, sedangkan secara perlahan Tiongkok pun tidak dapat menyelesaikan

[10] Ong Hok Ham, "Chung Hua Hui, PTI dan Indonesia Merdeka", dalam: Ong Hok Ham, *op. cit.,* hlm. 135-137.

[11] Leo Suryadinata, "Liem Koen Hian Peranakan yang Mencari Identitas", *op. cit.,* hlm. 74-77.

semua permasalahan orang Tionghoa di negeri orang. Begitu juga dengan Belanda tidak akan selamanya menjadikan Hindia Belanda sebagai jajahan. Liem dengan cerdas melihat situasi peta perpolitikan dan menangkap semangat perjuangan nasional kalangan pejuang Indonesia. Maka, jalan ketiga adalah berafiliasi dengan Indonesia dan kemudian berjuang bersama pejuang kemerdekaan Indonesia.

Boikot Sepak Bola di Surabaya 1932

Kembali lagi kepada peran penting artikel Leo Suryadinata di *Prisma*. Ketika Belanda melakukan kolonialisasi di Indonesia, transformasi sepak bola terjadi di Indonesia, terutama Surabaya. Catatan-catatan sejarah yang ada menunjukkan bahwa awal dibentuknya *bond-bond* (perkumpulan) sepak bola secara massif dan dinamis diawali oleh pemuda Belanda, John Edgar di Surabaya. *Bond* sepak bola yang ada di surabaya pada tahun 1890-an antara lain *Victoria* (1895), *Sparta* (1896), *SIOD (Scoren Is Ons Doel)*, *Rapiditas* dan *THOR*. Tumbuhnya *bond-bond* sepak bola yang diawali oleh pemuda Belanda di Surabaya merangsang tumbuhnya persepakbolaan di kalangan Tionghoa dan Bumiputera.

Semangat orang Tionghoa dalam sepak bola pada tahun 1932 tidak kalah gempar dengan kondisi perpolitikan di Hindia Belanda (Indonesia). Sepak bola pada waktu itu digunakan untuk membakar semangat orang Tionghoa agar berpegang pada ide *Indonesiershap* Liem Koen Hian, bahwa orang Tionghoa adalah bagian dari Indonesia. Akhirnya, pemboikotan dilakukan oleh Liem terhadap kompetisi *Soerabaiasche Voetbal Bond* (SVB) yang berafiliasi dengan Belanda. Hal inilah yang kemudian bisa membakar semangat orang Tionghoa untuk menegaskan tentang pentingnya (ke)indonesia(an). Semangat itu meresap masuk ke ranah sepak bola. Lim Koen Hian yang mengaku bahwa dirinya adalah nasionalis Indonesia dan membuat gebrakan dengan surat kabar *Sin Tit Po* yang didirikan pada tahun 1929, secara terang-terangan menganggap kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan. *Sin Tit Po* juga meneguhkan dirinya sebagai pers Melayu Tionghoa yang berorientasi ke Indonesia

dan merupakan pers nasional Indonesia sebagai corong Partai Tiongoa Indonesia (PTI) yang berdiri tahun 1932.[12]

Perselisihan yang berujung pada pemboikotan tersebut, berawal dari seorang yang bernama Bekker, wartawan koran mingguan olahraga *d'Orient*. Koran ini dipimpin oleh A. Zimmerman, seorang anggota *Vadelandsch club* yang militan dan terkenal sebagai kolonialis tulen di Surabaya. Bulan Mei 1932 diadakan acara *steden wedstrijden* (pertandingan antar kota) dan Bekker pada waktu itu menjabat sebagai *commite lid* Nederlands Indische Voetbal Bond (NIVB). Saat itu, NIVB sangat rasis dalam *press release* perencanaan pertandingan *steden wedstrijden*. Wartawan bangsa kulit berwarna (Bumiputera dan *Vreemde Oosterlingen*) tidak boleh datang dan meliput pertandingan. Alasan pelarangan tersebut dikarenakan wartawan kulit berwarna seringkali menjelek-jelekkan NIVB dan segala kegiatan NIVB. Jadi, apabila orang kulit berwarna diundang akan buat *kisruh* (kekacauan).[13]

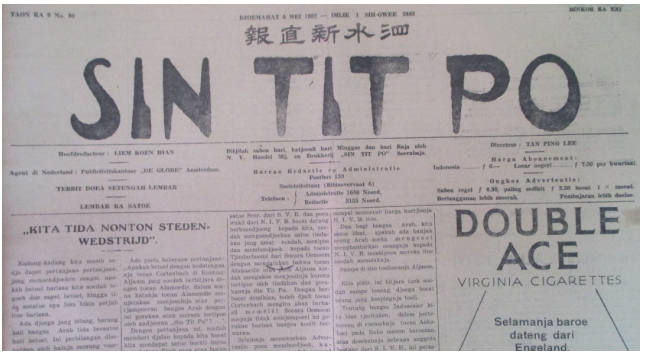

Gambar 1. *Headline* Boikot Sepak Bola SVB (Sin Tit Po, 6 Mei 1932)

Liem Koen Hian yang menduduki jabatan sebagai *Hoofdredacteur* surat kabar *Sin Tit Po* marah. Saat NIVB menyelenggarakan *steden wedstrijden*, Liem koen Hian menyatakan memboikot pemberitaan, semua informasi

[12] R.N. Bayu Aji, *Mewarisi Sepak Bola, Budaya dan Kebangsaan Indonesia* (Lamongan: Pagan Press, 2018), hlm. 6-8.

[13] R.N. Bayu Aji, *Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola 1915-1942* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 13.

dan seruan untuk tidak menonton pertandingan tersebut. Pernyataan pemboikotan pemberitaan dan seruan untuk tidak menonton sepak bola NIVB disampaikan melalui surat kabar *Sin Tit Po*. Tidak disangka semua surat kabar milik orang kulit berwarna yang ada di Surabaya setuju dengan gagasan Liem. Orang-orang terpengaruh atas pemboikotan pemberitaan Liem dan menyatakan tidak akan menonton pertandingan NIVB. PID *(Politieke Inlichtingen Dienst)* pun bergerak untuk mengamankan aktor-aktor pemboikotan. Suasana Kota Surabaya menjadi panas sebelum diselenggarakannya pertandingan antara kesebelasan Soerabaia, Batavia, Bandoeng dan Blitar untuk memperebutkan juara NIVB.[14]

Semangat keindonesiaan ini pada akhirnya ikut mengantarkan peran orang Tionghoa dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Muncul nama-nama seperti The San Liong, Beng Ing Hien dan Phoa Sian Liong, Kwee Kiat Sek, Thio Him Tjiang dan Tan Liong Houw, baik ketika membela Tionghoa Surabaya, Persebaya Surabaya, UMS Jakarta pada tahun 1950-1960an. Mereka semua juga menjadi bagian timnas Indonesia di pertandingan resmi internasional seperti saat menahan Uni Soviet 0-0 di olimpiade Melbourne 1956, *Asian Games* dan Pra Piala Dunia.

Referensi

Sin Tit Po, 6 Mei 1932.

Aji, R.N. Bayu. *Mewarisi Sepak Bola, Budaya dan Kebangsaan Indonesia.* Lamongan: Pagan Press, 2018.

---------- *Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola 1915-1942*. Yogyakarta: Ombak. 2010

Djien, Siauw Tiong, *Siauw Giok Tjhan, Perjuangan Seorang Patriot Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*. Jakarta: Hasta Mitra. 1999.

Ham, Ong Hok. *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Depok: Komunitas Bambu, 2005.

Huzinga, Johan. *Homo Ludens, a Study of The Play-Element in Culture*. London, Boston and Henley: Routledge and

[14] *Ibid*., hlm 115.

Keagan Paul. 1949.
Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang, 1999.
Suryadinata, Leo. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942.* Jakarta: Sinar Harapan. 1994.
----------. *Dilema Minoritas Tionghoa.* Jakarta: Grafiti Pers, 1986.

BAB V

HISTORIOGRAFI DAN SEJARAH LOKAL

Historiografi Etnik Tionghoa Pasca-1998: Suatu Tinjauan Awal [1]

Didi Kwartanada

> PERAN Etnis Tionghoa Indonesia (ETI) dalam pembangunan bangsa Indonesia sebenarnya tidak perlu diragukan lagi. Sejak zaman sebelum merdeka hingga era reformasi saat ini, kontribusinya di berbagai bidang baik ekonomi, politik, sosial dan budaya tidaklah sedikit. Karena itu sudah sewajarnya ETI menjadikan Indonesia sebagai "*diyi ge guxiang*" (kampung halaman pertama), dan menjadi bagian suku bangsa yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia (Legowo 2011: 86)

Pendahuluan

Seperempat abad terakhir ini terjadi banyak sekali perubahan sosial di tanah air, khususnya hubungan antara golongan etnik Tionghoa dengan golongan lain. Di masa Orde Baru, penguasa melarang berbagai hal terkait budaya Tionghoa, mulai dari ditutupnya sekolah Tionghoa, ganti nama, pelarangan perayaan budaya Tionghoa di tempat umum dll. Kelahiran era Reformasi, yang didahului dengan Huru Hara Mei 1998 membawa angin segar bagi kehidupan sehari-hari etnik Tionghoa. Dijadikannya hari raya Imlek sebagai hari libur nasional, diizinkannya perayaan ekspresi kebudayaan Tionghoa di ranah publik, hadirnya kembali bahasa Mandarin, tampilnya beberapa sosok Tionghoa sebagai kepala daerah (di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Jawa) serta

[1] Disampaikan dalam seminar nasional "Peringatan 60 Tahun Seminar Sejarah Nasional" di Universitas Gadjah Mada, 14-16 Desember 2017. Berhubung sempitnya waktu, penulis belum bisa meng-*update* karya-karya yang terbit selepas penulisan makalah ini.

dihapusnya istilah "Cina" dan dipakainya lagi "Tionghoa" sebagai istilah resmi bagi kelompok etnik ini, merupakan upaya para pemimpin nasional--mulai dari Presiden Habibie, Gus Dur, SBY dan Jokowi-- yang layak diapresiasi dalam bingkai pembangunan bangsa (*nation building*), karena semakin merekatkan hubungan antara berbagai kelompok etnik sebagai sesama elemen bangsa. Pengangkatan Laksamana Muda John Lie --salah satu pembangun TNI AL-- sebagai pahlawan nasional dan sekaligus penerima Bintang Mahaputera Adipradana (2009) semakin memperkaya taman bunga kebangsaan. Lima tahun kemudian, nama pahlawan asal Minahasa ini dijadikan nama *light frigate* TNI AL terbaru dengan nama "KRI John Lie 358". Redaksi sebuah jurnal akademik terkemuka menyimpulkan fenomena ini sebagai berikut:

> Kini, dengan maraknya wacana reformasi dan kesempatan untuk mengartikulasikan diri dalam tradisi kebudayaan masing-masing kelompok etnik, orang-orang Tionghoa di Indonesia pun kembali menggali akar budayanya, memodifikasinya sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini, dan mengenali jati dirinya. Apa pun yang telah terjadi pada masa lampau, kini bersama-sama dengan segenap warga Indonesia, orang-orang Tionghoa menghadapi berbagai kemelut bangsa. Wacana multikulturalisme sebagai wujud masyarakat Indonesia di masa depan tentu tidak mungkin terlepas dari keberadaan orang-orang Tionghoa di tengah-tengah beragamanya kelompok-kelompok kebudayaan yang lain" (Redaksi 2003: i).

Semakin jelas bahwa masyarakat dan pemerintah semakin memandang etnik Tionghoa sebagai bagian integral bangsa Indonesia. Namun, dalam beberapa waktu terakhir ini --yang mencapai puncaknya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI 2017--tenunan kebangsaan yang sudah susah payah dijalin itu menjadi terancam keberadaannya. Pesan-pesan bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) yang terkait pe-liyan-an (*othering*) etnik Tionghoa berseliweran dengan deras di media sosial.

Hasil kajian para pakar demografi atas sensus terbaru tahun 2010, menemukan bahwa etnik Tionghoa berjumlah 1,2% (2,83

juta) dari seluruh penduduk Indonesia, sekaligus menempatkan mereka dalam ranking ke-15 kelompok etnik terbesar --dari 600 etnik-- yang ada di Indonesia.[2] Namun dibalik temuan akan pentingnya posisi kelompok ini secara demografis tadi, pada umumnya orang Indonesia kurang mengenal orang Tionghoa dengan mendalam. Kebanyakan hanya sebatas hubungan bisnis belaka, tidak lebih dari itu. Padahal hasil penelitian panjang sejarawan Prancis Denys Lombard (1996), menunjukkan adanya empat budaya besar (nebula) yang memiliki pengaruh mendasar terhadap kebudayaan Nusantara. Salah satunya nebula Tionghoa, yang berperan dalam penciptaan teknologi yang meningkatkan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pertanian, tanaman, bahan makanan, alat dapur, teknologi kuliner, alat-alat teknologi dasar, pakaian, teknologi kelautan dan pertambangan.

Jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998 membawa angin segar dalam wujud semakin banyaknya tulisan tentang Tionghoa yang bermunculan, mulai dari karya di lingkup akademik, karya fiksi, memoar, hingga tulisan dan opini di media massa.[3] Fenomena ini menurut Ariel Heryanto adalah "suatu kebangkitan yang dramatis" (*a dramatic resurgence*). Namun ironisnya, sejauh pengetahuan penulis, adanya *"booming"* kajian tentang Tionghoa di masa Reformasi yang begitu melimpah ini, justru belum dicatat dengan baik. Hampir tidak ada bibliografi yang merekam karya-karya tulis yang muncul dalam dua puluh tahun belakangan ini, baik di Indonesia maupun manca Negara. Sebelum 1998 kajian tentang Tionghoa secara relatif sudah didokumentasikan dengan baik dalam karya-karya Nagelkerke (1982), maupun Oetomo (1989) dan Brown (1989).

Subject Matter

Tulisan pendahuluan ini membatasi kajiannya atas karya-karya yang terbit dalam bahasa Indonesia, dan agak mengabaikan karya terjemahan. Perkecualian adalah masuknya karya-karya

---

[2] Arifin, Hasbullah dan Pramono (2016).Terima kasih kepada Dr Evi Nurvidya Arifin atas sumber yang *up to date* ini. Angka sebenarnya diyakini lebih besar, karena tidak semua orang Tionghoa mengklaim dirinya sebagai "Tionghoa" di depan petugas sensus.

[3] Perlu disebut juga adanya jurnal-jurnal terkemuka yang mengambil tema khusus "etnik Tionghoa", misalnya *Antropologi Indonesia* Th. XXVII no 71, Mei-Agustus 2003; *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, vol 18 no 1 dan no 2 (2017) bertema "Chinese Indonesians in Historical Perspective I-II".

penulis dalam bahasa asing di sini. Karya yang dibahas hanyalah yang bisa diakses oleh penulis langsung.[4] Dalam keterbatasannya, penulis mencoba melakukan pemetaan (*mapping*) atas topik-topik yang sudah terbit pasca-1998 mengenai etnik Tionghoa dalam dua belas *subject matter* (kategori) berikut ini: [5]

1. Karya umum
2. Biografi dan memoar (termasuk penyintas 1965)
3. Komunitas di berbagai daerah
4. Ekonomi dan Bisnis
5. Agama dan Ritual
6. Kajian Genealogis & Penerbitan sumber
7. Gender
8. Politik, Kewarganegaraan dan Identitas
9. Kekerasan
10. Seni Budaya dan Olahraga
11. Silang Budaya
12. Pendidikan

Perlu disampaikan di sini, bahwa pengkategorian ini tidak dilakukan secara ketat dan muncul beberapa *overlap* antara satu golongan dengan lainnya. Berhubung keterbatasan waktu, tidak semua karya yang ada masuk ke dalam dua belas kategori ini. Misalnya, hubungan dengan RRT belum diikutsertakan, karena bagi penulis, topik itu lebih dekat ke masalah diplomasi G to G.

Dalam tulisan ini dibahas singkat juga, sumber apa saja yang dipakai, dan bagaimana metodologinya? Dan terakhir, *trend* atau ke arah nantinya kajian tentang etnik Tionghoa ini akan menuju? Tantangan apa yang dihadapi ke depannya dalam bidang ini? Diharapkan kajian pendahuluan ini akan dilanjutkan dengan upaya yang lebih serius dan mendalam dari peneliti lainnya, mengingat semakin diperhitungkannya etnik Tionghoa dalam wacana kehidupan berbangsa di abad XXI ini.

1. Karya Umum

[4] Sumber asal bahan-bahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah Perpustakaan Yayasan Nabil dan koleksi pribadi penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua rekan yang telah menghadiahkan buku-buku kepadanya, sambil memohon maaf tidak bisa menyebut nama mereka satu per satu di sini.

[5] Di tahun 2009 penulis pernah mencoba membuat *mapping* atas karya-karya fiksi bertema Tionghoa yang terbit di masa Reformasi, lihat Kwartanada (2009).

Segera sesudah memasuki masa Reformasi, dirasakan kebutuhan tinggi akan adanya buku atau referensi tentang sejarah kehadiran dan peran etnis Tionghoa di Indonesia. Buku pertama yang dirasakan bisa menjawab kebutuhan itu akhirnya terbit hasil karya Benny Setiono (2003) yang cukup monumental, sekitar 1.100 halaman yang meringkaskan sejarah dari abad XVI sampai XX. Buku karya tokoh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) ini kemudian mendapatkan Wertheim Award dari Belanda (2008) karena dianggap telah berkontribusi terhadap usaha emansipasi nasion Indonesia dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam menulis bukunya, Setiono berpegang teguh pada diktum "peranan etnis Tionghoa agar ditulis dengan tidak mengkotak-kotakkan atau memisahkannya dari perkembangan sejarah bangsa Indonesia", maka didalamnya ada beberapa bab yang tidak terkait sama sekali dengan Tionghoa, misalnya "Peristiwa 17 Oktober 1952", demikian pula buku ini mengabaikan peran perempuan Tionghoa.

Rekan Benny di Perhimpunan INTI, Drs. Eddie Lembong juga memiliki gagasan untuk menyusun buku yang komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis mengenai peran dan kontribusi etnis Tionghoa bagi pembangunan bangsa. Gagasan tersebut terwujud dalam karya Suryadinata dan Kwartanada (2016), yang menghimpun 129 naskah hasil karya 73 penulis, 14 di antaranya dari mancanegara. Dengan ketebalan 1,500 halaman, buku ini dibagi ke dalam tiga jilid. Adapun ringkasan isi buku *Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa* tersebut adalah sebagai berikut.

RINGKASAN ISI BUKU TIONGHOA DALAM KEINDONESIAAN

Jilid	Bagian	Jumlah Artikel
I	Pengantar	1
	1. Esai Pendahuluan	8
	2. Agama, Sosial dan Pendidikan	15
	3. Bahasa, Sastra dan Media Cetak	21
II	4. Budaya, Seni dan Olahraga	40
III	5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	19
	6. Ekonomi, Industri dan Perdagangan	8
	7. Politik, Pemerintahan dan Kemiliteran	17
TOTAL		129

Dapat dikatakan dengan luasnya cakupan yang ada dalam buku ini, hampir semua *subject matter* yang akan diuraikan di bawah ini sudah termuat dalam di dalam buku ini.

Walaupun diakui masih banyak kelemahannya, a.l. terlalu "Jawa Sentris", namun buku ini mendapatkan sambutan positif, bahkan seorang peneliti muda Belanda, Tom Hoogervorst dalam *Bijdragen tot de-Taal-, Land- en Volkenkunde* (173, 2017)" menulis "....*the book is a remarkably exhaustive standard work on Indonesia's Chinese diaspora, surpassing most, if not all, earlier scholarship"* [Buku ini adalah karya standar yang sangat lengkap mengenai diaspora Tionghoa di Indonesia, yang melampaui sebagian besar, jika tidak semua, karya sebelumnya "].

Ada satu lagi karya yang layak ditambahkan di sini, yakni dari Krisno Legowo (2011). Tulisan ini menarik karena penulis dan tim risetnya berasal dari instansi intelejen Lembaga Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Badan Intelejen Negara (LP2KB-BIN). Instansi ini sebagian stafnya adalah lulusan Sastra Cina UI. Sesuai dengan judulnya, buku ini kaya dengan berbagai fakta dan data mengenai apa yang mereka sebut "Etnis Tionghoa Indonesia" (ETI), mulai dari sejarah, keberagaman serta "Pelajaran ke Depan: Stereotip dan Kerusuhan Anti-Tionghoa di Indonesia". Lampiran yang diberikan juga cukup berguna, memuat berbagai organisasi ETI serta "simbol budaya ETI yang menjadi kontroversi". Terakhir, bisa ditambahkan di sini kumpulan karangan sosiolog senior Mely G. Tan (2008) mengenai etnis Tionghoa.

2. Biografi dan Memoar

Dapat dikatakan, didalam *subject matter* ini terjadi *booming*, dengan munculnya biografi dan memoar bukan hanya dari kalangan *businessmen* saja, misalnya Mochtar Riady yang menulis otobiografinya (2015); Burhan Uray, pengusaha HPH (Pai 2012); pengusaha realestat terkemuka Sutjipto Nagaria (Li 2012); pengusaha tekstil terkemuka H.M. Lukminto (Tamara 2013, 2015), pengusaha ritel *Alfamart*, Djoko Susanto (Endah 2013), namun juga muncul memoar mereka dari kalangan yang sama sekali jauh dari citra Tionghoa, yakni kemiliteran.

Bisa disebut memoar Brigjen Tedy Jusuf (2014, 2015) seorang almuni Akademi Militer Nasional 1965; serta salah satu tokoh pembangun TNI AL, Laksamana Muda John Lie (Nursam, 2008). Memoar seorang peranakan Tionghoa yang masuk wajib militer ke TNI AL pun layak disebut di sini (Winata 2013). Untuk karya umum tentang Tionghoa dalam sejarah kemiliteran Indonesia bisa disebut karya Santosa (2014).

Para politisi Tionghoa yang sebelumnya sudah muncul sejak akhir masa Sukarno, seperti Harry Tjan Silalahi dan Jusuf Wanandi pun tidak ketinggalan menerbitkan memoar atau biografinya. Karya Sudarmanto tentang Silalahi (2004) dan memoar Wanandi (2014) merupakan sumbangan penting, walau masih banyak sisi lain yang belum diungkapkan. Politisi generasi berikutnya, seperti Sofyan Tan asal Medan, Sumatera Utara dapat dibaca kisahnya dari tulisan Anto (2009), demikian pula Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menuliskan visi misinya dalam memoarnya sebelum dia menjabat gubernur DKI (Purnama 2008).

Dari kalangan profesional Tionghoa, karya Myra Sidharta (2001) tentang desainer senior Peter Sie perlu disebutkan. Biografi dokter cukup banyak muncul, diantaranya adalah Lie Kian Joe asal Sukabumi, yang merupakan doktor/guru besar termuda dari FK UI yang kemudian menjadi peneliti yang mendunia (Japaries, 2005), karya Ravando (2017) tentang Dr Oen Boen Ing, dokter filantropis legendaris dari Surakarta, biografi Dr Eka Julianta, dokter bedah kelas internasional (Daslani 2010), serta memoar Arif Haliman (2010), dokter terkemuka dari kota Yogyakarta. Memoar Dr Han Hwie-Song kelahiran Surabaya yang kemudian menjadi dokter ternama di Belanda juga perlu dicatat (Han 2010).

Kisah mereka yang menjadi korban "Tragedi 1965" dan bagaimana mereka bisa "*survive"* sebagai penyintas di tengah rezim yang tidak bersahabat, bisa dibaca antara lain dari tulisan Lanny Anggawati (Djie 2004), 6 jilid dan adiknya Harry Adiyono Alexander (Adipriyanti 2013). Biografi Amung Tjandra (Sofyan 2011) yang memainkan peran penting lintas budaya dalam melahirkan provinsi Bangka Belitung perlu juga

disebut di sini. Karya kolaborasi Setyautama dan Mihardja (2008) memberikan satu volume *who's who* yang cukup handy dan berguna. Namun buku ini mesti dipakai dengan hati-hati karena rupanya sumber yang dipakai kadang tidak akurat, sebagai akibatnya ada nama-nama non-Tionghoa yang juga ikut masuk ke dalam buku ini.

3. Komunitas di berbagai daerah

Satu karya umum dalam format yang lebuh kecil adalah karya jurnalisme Iwan Santosa (2012) tentang komunitas peranakan di berbagai pelosok Nusantara. Tulisan-tulisan Erniwati (2007) tentang Tionghoa di Sumatera Barat; Hendri Gunawan (2014a, 2014b, 2016) mengenai etnik Tionghoa di Sulawesi Utara dan Gorontalo; serta Malagina dan Latief (2015a, 2015b) tentang Timor, serta Suroso (2010) tentang Papua memberikan banyak masukan informasi tentang komunitas-komunitas yang sebelumnya tidak banyak diketahui. Tulisan-tulisan Theo dan Lie (2014) tentang Bangka, Bahrum (2003 dan 2008) tentang Makassar, Bariarcinur (2005) tentang Tionghoa Singkawang. Dua karya Sio Hong Wai (2012, 2015) memperkaya kita mengenai etnis Tionghoa di Tarutung, di pelosok Sumatera Utara. Disertasi Usman (2009) mengetengahkan komunitas Tionghoa di Aceh, namun dengan konsep yang sudah kadaluwarsa, yakni "etnis Cina perantauan". Kajian historis dari Wirawan (2013) mengenai komunitas Tionghoa di Makassar dalam masa tiga abad layak untuk disebut secara khusus. Menarik juga untuk dikemukan adanya kajian mengenai komunitas Tionghoa yang kurang mampu (miskin), misalnya karya Rahoyo (2010), serta tulisan kerjasama Harsono dan Triharyanto (2008) mengenai perempuan Cina Benteng korban diskriminasi di wilayah Tangerang.

4. Ekonomi dan Bisnis

Sebagian dari karya tentang ekonomi dan bisnis bisa ditemukan dalam bagian biografi dan memoar yang sudah disebut di atas. Namun masih ada pula kajian-kajian lain,

misalnya karya Kurnia dan Wong (2003) tentang grup Hero sebagai perintis ritel modern Indonesia, serta Wibowo et al (2006) tentang bisnis berbasis plastik "Pioneer" yang pernah menguasai pasar tanah air tahun 1970-an dari Pandji Wisaksana. Kajian-kajian historis karya Winarni (2009) tentang jaringan bisnis Tionghoa di pesisir utara Jawa Timur abad XVIII, Wahid (2009) tentang komunitas Tionghoa Cirebon dan upaya mereka bertahan di tengah depresi ekonomi 1930-an; serta Nawiyanto (2010) tentang persaingan dagang Jepang-Tionghoa pada dekade 1930-an serta Jepang-RRC di awal abad XXI di Indonesia, semuanya merupakan sumbangan penting bagi kajian sejarah ekonomi Indonesia.

5. Agama dan Ritual

Kajian-kajian mengenai agama Konghucu dan agama tradisional Tionghoa sudah banyak dihasilkan oleh Ikhsan Tanggok (2000, 2005, 2017). Shinta Devi (2005) telah menulis tentang kelenteng Boen Bio di Surabaya yang penting perannya bagi komunitas Tionghoa di kota terbesar di Jawa Timur tersebut. Di pihak lain, topik Muslim Tionghoa semakin populer, yang nampak dari banyaknya karya jenis ini yang bermunculan, misalnya Adrian Perkasa (2012) tentang Orang Tionghoa Islam di masa Majapahit; komunitas Muslim Tionghoa di Yogyakarta muncul beberapa kali dalam karya Perdana (2008), Maulana (2010), dan Sunano (2017). Karya Elizabeth (2009) dan Afif (2012) perlu juga untuk disebutkan. Untuk topik Protestan bisa disebut karya Darmawan (2014). Kajian Yusuf (2005) mengenai iklan duka etnis Tionghoa memberikan perspektif teoretis yang baru.

6. Kajian Genealogis & Penerbitan sumber

Perlu disebut karya Haryono (2017) yang menyuguhkan banyak data kawin mawin dan terjalinnya hubungan kekerabatan di antara keluarga-keluarga elit peranakan di Jawa, yang disusunnya dari hasil "berburu" sejumlah besar silsilah. Berawal dari hobi mengumpulkan silsilah (*family tree*) keluarga besarnya sendiri, minat Steve lalu meluas ke berbagai keluarga Tionghoa di Indonesia (khususnya Jawa). Dari sini

rasa keingintahuannya mendorong ke pelacakan lebih lanjut, bagaimana keluarga satu saling terkait dengan keluarga-keluarga lainnya. Buku penting ini membahas 55 klan, 52 dari Jawa dengan "bonus" 3 klan dari luar Jawa (Bangka), yang akan "membantu membukakan pintu pada kajian Tionghoa perantauan di Indonesia, khususnya sejarah keluarga Tionghoa dan kewiraswastaan, etnisitas dan pembangunan satu wilayah, serta sejarah ekonomi, lebih fokusnya, sejarah bisnis" (Kwartanada 2017b). Sumbangan penting datang dari seorang kolektor, Baswedan (2017) yang menerbitkan koleksinya berupa surat-surat bisnis Kapiten Tionghoa Bandung pada awal abad XX.

7. Gender

Subject matter ini masih terbuka luas, karena masih belum banyak dilakukan. Satu sumbangan penting adalah karya Lim (2009) ruang sosial baru bagi perempuan Tionghoa. Tulisan biografi kolektif karya Anggraeni (2010) dan Dawis (2010b) perlu disebut di sini. Adapun untuk tulisan historis bisa disebut karya Kwartanada (2017a) tentang perempuan elit Tionghoa selaku pelopor modernitas di Hindia Belanda, termasuk pengaruh mereka kepada saudari-saudarinya dari kalangan non-Tionghoa, termasuk R.A. Kartini yang termashur.

Politikus senior Titi Sumbung telah dituliskan biografinya (Sumbung dan Soedarmanta 2015). Pemikiran dan keluh kesah perempuan Tionghoa dari kalangan generasi muda dan milenial bisa dibaca dari karya Margareta Astaman (2010, 2011) serta Maria Audrey Lukito, yang kemudian dikenal dengan nama Audrey Yu Jia Yui (2011, 2014, 2015).

Trafficking di kalangan perempuan Tionghoa di Kalimantan Barat (Yentriyani 2004) serta laporan jurnalistik Usman dan Din (2010). Dalam hal ini biografi Susianty Kawira, seorang perempuan Tionghoa asal Kalimantan Barat, penting juga untuk dicatat (Kawira dan Suradi 2015). Dari periode sebelumnya, memoar Hu Siu Ing (2004) yang lama tinggal di Banjarmasin juga memberikan informasi yang kaya mengenai aktivitas perempuan pengusaha di luar Jawa.

8. Politik, Kewarganegaraan dan Identitas

Sebagian kajian tentang politik bisa ditemukan dalam bagian biografi di atas, di samping itu beberapa kajian juga memfokuskan kajiannya pada politik, abik di tingkat "nasional" (Kusuma dan Dharma 2006; Machfud 2013), maupun di tingkat lokal, misalnya karya La Ode (2012) mengenai Kalimantan Barat. Tulisan-tulisan Nyoto (2002a, 2002b, 2005) yang berasal dari Riau memberikan pandangan Tionghoa muda dari luar Jawa. Isu-isu kewarganegaraan bisa ditemukan dalam karya Indradi Kusuma (2002) dan Prasetyadji (2011) serta Setiawan et al (2017). Studi Suryomenggolo (2005) meninjau berbagai perturan disriminatif di masa Orde Baru. I. Wibowo telah menyunting tiga buku sehubungan dengan "Masalah Cina" (1999, 2000) dan (2010 bersama Thung Ju Lan), yang merupakan sumbangan penting bagi kajian isu Tionghoa di masa Orde Baru dan awal masa Reformasi.

Kwartanada (2013a, 2016) meninjau secara historis dokumen-dokumen keimigrasian. Adapun soal identitas bisa ditemukan dalam karya Dawis (2010a). Kajian kepustakaan Santoso (2000) memberikan gambaran singkat mengenai "kecinaan". Refleksi "kecinaan" dari seorang budayawan terkemuka Sindhunata (2006) merupakan bacaan wajib bagi mereka yang hendak meneliti apa arti "menjadi Cina" di masa Orde Baru.

9. Kekerasan

Kajian historis Asy'ari (2008) tentang konflik rasial di Kudus 1918 merupakan karya lama yang baru diterbitkan di masa Reformasi. Wasino (2006) membandingkan dua konflik rasial di Surakarta di masa kolonial dan masa runtuhnya Orde Baru. Karya Sjamsudin (2004) juga merupakan tinjauan historis atas huru hara rasial 5 Agustus 1973 di Kota Bandung. Adapun kajian tim yang dipimpin Mulyadi dan Soedarmono (1999) menjelaskan mengapa terjadi kerusuhan di Kota Surakarta pada masa pergantian rezim 1998. Tim Solidaritas Nusa Bangsa pimpinan Ester Jusuf menyuguhkan fakta dan data kerusuhan Mei 1998 di berbagai wilayah tanah air (Jusuf dan Simanjorang 2005, 2008) dan menjadikan buku ini sumber yang kaya akan data mengenai masa transisi kekuasaaan tersebut.

10. Seni Budaya dan Olahraga

Di bidang ini sumbangan orang Tionghoa cukup besar, mulai dari seni beladiri (Lo 2013; Cheung et al. 2016); arsitektur (Pratiwo, 2010; Handinoto 2015a, 2015b; dan Widayati 2008), seni tari (Janarto 2005), kuliner (Ganie dan Sidharta 2008; Bromokusumo et al 2013) hingga ke seni lawak (Anwari 1999) dan seni rupa (Dermawan T 2016). Surtihadi (2008) mendokumentasikan sosok Tan Thiam Kwie, seorang violinis asal Yogyakarta. Biografi Chisye, salah satu icon musik pop masa Orde Baru yang ternyata adalah Tionghoa, perlu dipakai dalam kajian identitas (Endah 2007, 2010). Dua jenis wayang yang khas Indonesia, Wayang Potehi dan Wayang Cina- Jawa Yogyakarta, sudah menjadi kajian Purwoseputro (2014); Mastuti (2007, 2014) serta Kuardhani (2011, 2012). Karya Rustopo (2007) mengenai orang Tionghoa dan kebudayaan Jawa di Surakarta menampilkan aspek silang budaya yang unik. Sosok maestro batik dan tosan aji. Go Tik Swan Hardjonagoro telah menjadi subjek kajian Rustopo (2008) dan Iskandar (2008). Keunikan keseharian peranakan dari sisi linguistik di Surakarta telah dikaji oleh Markhamah (2000).

Di bidang olahraga, kajian historis Aji (2010) tentang Tionghoa dan sepakbola di Surabaya masa kolonial bisa membuka jalan ke kajian ke cabang-cabang olahraga lainnya. Karya KSP (2009) tentang pemain bukutangkis legendaris Liem Swie King, serta Pratiwi (2008) mengenai riwayat Juana Wangsa Putri, primadona taekwondo telah memperkaya kepustakaan tentang kontribusi etnis Tionghoa di bidang gerak badan. Diharapkan akan muncul biografi atlet legendaris lainnya seperti Chris John (tinju) atau Lidswell Kwok dari cabang wushu.

11. Silang Budaya

Karya Aziz (2014) menunjukkan kehidupan silang budaya di kota tua Lasem. Idi (2009) tentang asimilasi Melayu-Bangka. Kajian Gunawan (2014a) merupakan kajian penting praktek silang budaya di mana warga etnis Tionghoa di Sitaro dan Nusa Utara mempekerjakan warga setempat untuk kemudian diajari berdagang. Kajian mengenai pernikahan campuran, misalnya

di Bali (Beratha et al 2010), pernikahan Tionghoa-Jawa (1999) serta Islam-Konghucu (Nurcholish 2004) telah memperkaya kita mengenai aspek tersebut.

12. Pendidikan

Biarpun tidak banyak, namun kajian-kajian Jusuf (2013) tentang sekolah Tiong Hoa Hwee Koan Batavia yang kini menjadi sekolah terpadu Pa Hoa; Kwartanada (2008) tentang pendidikan Tionghoa di Yogyakarta masa 1900-1950; serta karya yang layak dipuji dari Shinta Devi (2014) tentang pendidikan Tionghoa di kota Surabaya masa kolonial Belanda bisa menjadi acuan bagi mereka yang hendak melakukan kajian tentang aspek pendidikan. Memoar Liem Sioe Siet (2013) yang banyak mencurahkan perhatiannya dalam dunia pendidikan, memberikan kisah-kisah tantangan membangun institusi perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Katolik Atma Jaya.

Tren ke Depan

Sekilas membahas karya-karya yang muncul dewasa ini, nampak adanya pendekatan baru semakin banyak bermunculan, Selama ini kajian Tionghoa masih didominasi "tradisi besar", yakni berfokus pada mereka yang hidup di perkotaan (kaum urban), "elite" (golongan kaya dan terdidik) dan golongan "politis", dan masih mengabaikan mereka yang tinggal di pelosok "desa", "wong cilik" maupun "Tionghoa sosial". Kajian atas mereka yang diabaikan tadi cukup penting, karena merekalah yang secara historis telah membangun realitas sosio-kultural yang membentuk silang budaya di berbagai wilyah Nusantara.[6]

Kajian tentang "Cino ndeso" ini masih sangat terbuka lebar, apalagi sudah mulai bermunculan memoar mereka yang lahir dan besar di pedesaan Jawa, seperti karya Singgih Gunarsa (2011); Gunawan (2012) dan Widagdo (2016). Kajian-kajian Sinuhaji (2004) mengenai peran pedagang Tionghoa yang mengajari orang Karo berdagang pasca revolusi dan Gunawan (2014a) mengenai pola "induk semang" dan "anak dagang" antara etnis Tionghoa

[6] Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Bambang Purwanto atas masukan-masukannya yang penting ini melalui email, 15 Desember 2016.

dengan penduduk setempat di Kabupaten Sitaro dan Nusa Utara (Sulawesi Utara) mampu menjadi acuan akan kemungkinan adanya pola silang budaya dalam praktek bisnis di daerah-daerah lain.

Penggunaan teori-teori ilmu sosial maupun *cultural studies*--di luar pola penulisan konvensional deskriptif maratif-- juga nampaknya akan semakin bertambah, misalnya kajian Yusuf (2005) tentang iklan dukacita yang memakai teori *necro cultura* (budaya kematian) yang relatif masih baru. Karya Kwartanada (2011) yang menggunakan teori *cultural studies* dalam membahas pencarian identitas peranakan Tionghoa di akhir abad XIX,[7] demikian juga Kwartanada (2013b) memakai pendekatan "transnational" yang melampaui batas teritorial satu negara, semakin memperkaya jenis kajian Tionghoa pasca 1998. Topik mengenai Representasi juga masih belum banyak dikerjakan. Salah satu karya yang sudah muncul adalah dari Purwoseputro (2015) mengenai Museum Hakka Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Menjamurnya masjid bernama "Cheng Ho" di berbagai wilayah tanah air di masa Reformasi ini juga bisa menjadi topik yang menarik dalam kajian "representasi diri/self representation".

Di masa depan nampaknya akan semakin banyak pula kajian atas komunitas Tionghoa di berbagai pelosok Nusantara, khususnya di Indonesia Tengah dan Timur. Kajian-kajian silang budaya dalam konteks budaya daerah seperti karya Gunawan (2014a) diharapkan akan semakin banyak dilakukan, Demikian juga penerbitan sumber-sumber primer seperti yang sudah disusun Baswedan (2017) akan semakin banyak bermunculan. Akhirnya, apa yang dibahas dalam kajian pendahuluan ini masih jauh dari lengkap dan pula belum mewakili secara utuh fenomena "booming" yang ada, maka penulis mengusulkan adanya adanya bibliografi tentang kajian etnik Tionghoa, baik yang umum maupun khusus. Tiadanya bibliografi yang lengkap, akan memperlambat langkah para peneliti.

---

[7] Tulisan ini diresensi oleh Dr. Jennifer Linday, sebagai berikut: "Kwartanada's essay on the Indies-born Chinese in Java in the late nineteenth century and their rediscovery of Chineseness via the Malay language and romanised script is an important contribution to postcolonial studies". Lihat resensi atas buku *Translation in Asia: Theories, practices, histories*, dalam *JSEAS* 44 (2013), h. 174

Penutup

Kejadian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa "Cina", "Tionghoa" itu masih merupakan "liyan" (*the other*) yang belum menjadi bagian integral dalam bangsa yang bersemboyan "Bhinneka Tunggal Ika" ini. Keterkaitan satu sosok dengan isu tersebut akan menjadikannya berstatus "liyan", "non-pribumi", dengan kata lain, "Cina" menjadi "stigma" yang bisa mengganggu kredibilitas satu orang kandidat potensial. Ini belum lagi dengan kasus terkait mereka yang memang berlatarbelakang etnis Tionghoa, seperti yang kita lihat dalam kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Maka muncullah pertanyaan-pertanyaan: Mengapa dewasa ini "Cina" muncul sebagai momok, yang bahkan bisa menjadi stigma, baik bagi tokoh non-Tonghoa maupun etnis Tionghoa? Apakah ini sekaligus refleksi bahwa golongan Tionghoa masih dianggap sebagai "liyan"? Mengapa demikian? Mengapa Ahok --sebagai etnis Tionghoa yang masuk ke birokrasi selaku kepala daerah-- dianggap sebagai "anomali"? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab, antara lain, dengan kajian sejarah.

Di hari-hari ini ketika sejarah dimanipulasi dan diobrak abrik oleh beragam hoaks, seharusnya sejarawan bisa lebih banyak tampil. Misalnya kasus uang kertas yang baru, atau yang cukup meresahkan, misalnya "Mendagri meresmikan Monumen Pao An Tui di Taman Mini Indonesia Indah".[8] Bagi mereka yang sudah mempelajari sejarah, akan langsung tahu, bahwa berita semacam itu sudah pasti hoaks.

Akhirnya, masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu negara Indonesia yang demokratis, yang tidak membedakan seseorang atas dasar latar belakang atau asal-usul keturunannya. Sejarah harus selalu dikaji ulang untuk bisa menjawab berbagai permasalahan aktual, termasuk permasalahan integrasi nasional yang dewasa ini dirasakan kian

[8] Penulis hadir langsung dalam acara peresmian monumen "Laskar Tionghoa dan Jawa melawan VOC" oleh Mendagri Tjahjo Kumolo di TMII, 14 November 2015. Laskar Tionghoa-Jawa ini berlatarbelakang perlawanan terhadap Kumpeni (VOC) period 1740-1743. Sedangkan laskar Pao An Tui, yang merupakan semacam pam swakarsa etnis Tionghoa di tengah gejolaknya politik, berlatarbelakang masa revolusi kemerdekaan. Jelas keduanya adalah sosok yang berbeda, dari zaman yang berlainan! Namun hoax memungkinkan apa saja dipelintir. Dalam hal inilah sejarawan harus tampil menjernihkan inti permasalahannya.

rapuh. Untuk itulah, mengutip Bapak Antropologi Indonesia, Prof. Koentjaraningrat, kajian sejarah mengenai hubungan antar etnik akan sangat berguna bagi negara Indonesia yang multi etnik ini.[9] Untuk itulah kehadiran jurusan sejarah sebagai agen pencetak calon sejarawan masa depan, mutlak, sangat diperlukan.

Jakarta, 25 November 2017

Referensi

Adipriyanti, Adeste. 2013. *Mendaki ke Puncak. Biografi Harry Triyono Alexander.* Jakarta: Sunda Kelapa

Afif, Afthonul. 2012. *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia pergulatan mencari jati diri*. Depok, Jawa Barat: Penerbit Kepik.

Aji, R.N. Bayu. 2010. *Tionghoa Surabaya dalam sepak bola, 1915-1942*. Yogyakarta: Ombak.

Anggraeni, Dewi. 2010. *Mereka bilang aku China: jalan mendaki menjadi bagian bangsa*. Yogyakarta: Bentang.

Anto, J. 2009. *Dokter penakluk badai*. Medan: Solidaritas Tionghoa Center.

Anwari. 1999. *Indonesia tertawa: Srimulat sebagai sebuah subkultur*. Jakarta: LP3ES.

Arifin, Evi Nurvidya; M. Sairi Hasbullah dan Agus Pramono. 2016. "Chinese Indonesians: How many, who and where?", *Asian Ethnicity*, h. 1-20.

Astaman, Margareta. 2010. *After Orchard: Margarita's chat*. Jakarta: Buku Kompas.

_____. 2011. *Excuse-moi: Margarita's chat*. Jakarta: Buku Kompas.

Asy'ari, Hasyim. 2006. *Bakar pecinan!: konflik pribumi vs Cina di Kudus tahun 1918*. Kudus: CëRMIN.

Ati, Abigael Wohing. 1999. *Menguji cinta: konflik pernikahan*

[9] Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: UI Press, 1993: 50.

Cina-Jawa. Yogyakarta: Tarawang.

Aziz, Munawir. 2014. *Lasem kota Tiongkok kecil: interaksi Tionghoa, Arab, dan Jawa dalam silang budaya pesisiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Bahrum, Shaifuddin. 2003. *Cina peranakan Makassar: pembauran melalui perkawinan antarbudaya*. Sudiang Raya, Makassar: Yayasan Baruga Nusantara.

_____. 2008. *Berubah: Metamorfosis warga Tionghoa Makassar dalam 10 tahun reformasi*. Makassar: Yayasan Baruga Nusantara.

Bariarcianur, Frino. 2005. *Demi waktu: potret Tionghoa Singkawang*. [Jakarta]: [RAH & Partners Law Firm

Baswedan, Ali Rauf (ed.) 2017. *Surat-surat Tan Joen Liong, Kapiten Tionghoa Bandung. Merajut Relasi Bisnis: Kumpulan Surat-surat Tahun 1900-1903.* Yogyakarta: Quantum.

Beratha, Ni Luh Sutjiati, Wayan Ardika, I Nyoman Dhana, and Made Jiwa Atmaja. 2010. *Dari tatapan mata ke pelaminan, sampai di desa Pakraman: studi tentang hubungan Orang Bali dengan Orang Cina di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.

Bromokusumo, Aji 'Chen', Novie Chen, dan Ennita 'Peony' Wibowo. 2013. *Peranakan Tionghoa dalam kuliner sejarah*. Jakarta Penerbit Buku Kompas

Brown, Iem. 1989. "Religions of the Chinese in Indonesia", dalam Leo Suryadinata (ed.), *The ethnic Chinese in the Asean states: bibliographical essays*. Singapore: ISEAS, h.97-118.

Cheung, Alex, Charly Huang, dan Erwin Tan (ACE). 2016. *Melacak jejak kungfu tradisional di Indonesia: sebuah tradisi dan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi*. Jakarta : Suara Harapan Bangsa

Christina, Mega. 2006. *SBKRI no way: untuk masa depan tanpa diskriminasi*. Jakarta, Indonesia: Yappika.

Darmawan, Darwin. 2014. *Identitas hibrid orang Cina*. Yogyakarta : Gading Publishing

Daslani, Pitan. 2010. *Tinta emas di kanvas dunia: jejak langkah ahli bedah saraf DR. Eka Julianta Wahjoepramono, SPBS*.

Jakarta: Buku Kompas.
Dawis, Aimee. 2010a. *Orang Indonesia Tionghoa: mencari identitas*. Jakarta: Gramedia.
_____. 2010b. *Potret inspiratif perempuan Tionghoa-Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
Dermawan T., Agus. 2016. *Melipat air: jurus budaya pendekar Tionghoa : Lee Man Fong, Siauw Tik Kwie, Lim Wasim*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
Djie Siang Lan [Lanny Anggawati]. 2004. *Di Dalam Derita Manusia Membaja.* 6 Jilid (dengan berbagai judul). Klaten: Wisma Sambodhi.
Effendi, Wahyu dan Prasetyadji. 2008. *Tionghoa dalam cengkeraman SBKRI: mengapa surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia masih saja menjadi masalah?, bagaimana solusinya?, bagaimana etnis Tionghoa mengantisipasi dan menghadapinya?* Jakarta: Visimedia.
Elizabeth, Misbah Zulfa. 2009. *Cina Muslim: studi ethnoscience keberagamaan Cina Muslim*. Semarang: Walisongo Press.
Endah, Alberthiene, . 2007. *Chrisye: sebuah memoar musikal*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
_____. 2010. *The last words of Chrisye*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
_____. 2013/2015. *Dari Warung Menuju Alfamart.* Jakarta: Gramedia.
Erniwati. 2007. *Asap hio di ranah Minang: komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak bekerja sama dengan Yayasan Nabil.
Ganie, Suryatini N. dan Sidharta, Myra. 2008. *Dapur naga di Indonesia: aneka resep hidangan lezat paduan kuliner Tionghoa dan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Gunarsa, Singgih D. 2011. *Melintas batas cakrawala: kisah ketangguhan menembus rintangan & meraih prestasi*. Jakarta: Libri.
Gunawan, Hendri, 2014a. *Resiprositas dan Patronase: Jejaring*

Pengusaha Tionghoa di Kabupaten SITARO Sulawesi Utara 1965-2013. Yogyakarta: Kepel Press.

_____ 2014b. *Yok Tjae & Chung Hwa: Menelusuri jejak-jejak komunitas Tionghoa di Manado*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

_____. 2016. *Jaringan perdagangan masyarakat Tionghoa di Teluk Tomini abad ke-20*. Yogyakarta: Amara-BPNB Manado

Gunawan, Slamet (2012). *Perjalanan Hidup Seorang Anak Desa.* Jakarta: diterbitkan sendiri.

Habib, Achmad. 2004. *Konflik antaretnik di pedesaan: pasang surut hubungan Cina-Jawa*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta

Haliman, Arif. 2010. *Memoar Seorang Arif Haliman [Journey from Banjarnegara to Panti Rapih].* Yogyakarta: diterbitkan sendiri (?)

Hamzah, Alfian. 1998. *Kapok jadi nonpri: warga Tionghua mencari keadilan*. Bandung: Zaman Wacana Mulia.

Han Hwie Song. 2010. *Memoar Prof. DR. Han Hwie-Song: dari pecinan Surabaya sampai menerima bintang Ridder in de Orde van Oranje Nassau*. [Bandung]: Pustaka Sutra.

Handinoto. 2015a. *Komunitas Cina dan perkembangan kota Surabaya: abad XVIII sampai pertengahan abad XX.* Yogyakarta: Ombak

_____. 2015b. *Lasem: kota tua bernuasa Cina di Jawa Tengah.* Yogyakarta: Ombak

Harsono, Rebeka, dan Triharyanto, Basilius. 2008. *Jalan berliku menjadi orang Indonesia: kisah tujuh perempuan Tionghoa korban diskriminasi*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Yayasan TIFA dan LADI.

Haryono, Steve. 2017. *Perkawinan Strategis. Hubungan Keluarga antara Opsir-opsir Tionghoa dan 'Cabang Atas' di Jawa pada Abad ke-19 dan 20.* Jakarta: diterbitkan sendiri .

Hoogervorst, Tom. 2017. "Learning to Love the Unknown: Chinese Indonesians Contrubution to Nation Building", resensi Buku *Tionghoa dalam Keindonesiaan*, *BKI*, 173: 386-91.

Hu, Siu Ing. 2004. *Perjalanan waktu*. Diterjemahkan oleh Pauli Kusumawidjaya. Jakarta: Balai Pustaka.

Idi, Abdullah. 2009. *Asimilasi Cina-Melayu di Bangka*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Iskandar, Neneng. 2008. *Batik Indonesia & sang empu: Go Tik Swan Panembahan Hardjonagoro*. Jakarta, Indonesia: Tim Buku Srihana.

Janarto, Herry Gendut. 2005. *Didik Nini Thowok, menari sampai lahir kembali*. Malang: Sava Media.

Japaries, Willy. 2005. *Lie Kian Joe: Putra Sukabumi, Doktor Termuda, Guru Besar Termuda, Peneliti yang Mendunia dari FKUI.* Jakarta: FKUI

Jusuf, Ester Indahyani, dan Simanjorang, Raymond R . 2005/2008. *Kerusuhan Mei 1998: fakta, data, dan analisa : mengungkap kerusuhan Mei 1998 sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan*. [Jakarta]: Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI).

Jusuf, Iskandar. 2013. *Dari Tiong Hoa Hwe Koan 1900 sampai Sekolah Terpadu Pahoa 2008*. Tangerang: Sekolah Terpadu Pahoa.

Jusuf, Tedy, 2014/2015. *Kacang mencari kulitnya*. Jakarta: diterbitkan sendiri (?)

Kawira, Susianty, dan Suradi. 2015. *Susianty Kawira sang penakluk: romantisme dan perjuangan hidup : sebuah biografi*.

KSP, Robert Adhi, 2009. *Panggil aku King*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Kuardhani, Hirwan . 2011. *Toni Harsono: Maecenas Potehi dari Gudo*. Yogyakarta: Isacbook.

_____. 2012. *Mengenal wayang potehi di Jawa*. Mojokerto] : Yensen Project Network

Kurnia, Nurhajati dan Wong ,Tung To 2003. *Perintis ritel modern Indonesia: memoar pendiri grup HERO*. Jakarta: Yayasan Kurnia.

Kusuma, Eddie, dan S. Satya Dharma. 2006. *Etnis Tionghoa dalam politik Indonesia: sebelum dan sesudah reformasi 1998*.

Jakarta, Indonesia: Suara Kebangsan [i.e. Kebangsaan] Tionghoa Indonesia (SAKTI) dan Asosiasi Wartawan Muslim (AWAM) Indonesia

Kusuma, Indradi. 2002. *Diskriminasi dalam praktek: telaah dan pemikiran Indradi Kusuma*. [Jakarta]: Dewan Pengurus Pusat, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa.

Kwartanada, Didi. 2002a. "Chinese Leadership and Organization in Yogyakarta during the Japanese Occupation", dalam Paul H. Kratoska (ed.). *Southeast Asian minorities in the wartime Japanese empire*. London: RoutledgeCurzon.

_____. 2002b. "Competition, patriotism and collaboration: the Chinese businessmen of Yogyakarta between the 1930s and 1945". *Journal of Southeast Asian Studies.* 33 (2): 257-277.

_____. 2007 'Sekolah dan Identitas: Pendidikan Tionghoa di Yogyakarta, 1900-an-1950-an', in *Buku Edisi Khusus Peringatan 100 Th Tiong Hoa Hak Tong Yogyakarta*. Yogyakarta: n.p, no page number (25 pp).

_____. 2009. 'Dari 'Clara' hingga 'Yin Galema': Tionghoa dalam Fiksi di Masa Reformasi', *Suara Baru: Media Perhimpunan INTI* (Jakarta), 24 (IV), Juli-August: h. 57-67

_____. 2011. "Translations in romanized Malay and the revival of Chineseness among the Peranakan in Java (1870s-1911)", dalam Ronit Ricci dan Jan van der Putten (ed.) *Translation in Asia : Theories, Practices, Histories.* Manchester, UK : St. Jerome Publishing, h. 119-135.

_____. 2013 a. "Segregasi lewat Bukti Registrasi", *Historia* no 12 (I), 2013, pp.72-75

_____. 2013b. "The Tiong Hoa Hwee Koan School : a transborder project of modernity in Batavia, c. 1900s", dalam Sai, Siew-Min dan Chang-Yau Hoon (ed.). *Chinese Indonesians reassessed history, religion and belonging*. London: Routledge.

_____. 2016. "The Papers that Surveilled: Identity Cards and Suspicion of the Chinese", dalam FX Harsono, *Gazing on Identity/Menerawang Identitas* (Singapore: ARNDT Fine Art, 2016), h. 5-14. Diterjemahkan oleh Elly Kent

_____.2017a. "Bangsawan prampoewan: Enlightened Peranakan Chinese women from early twentieth century Java". *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia.* 18 (2): 422-454.

_____. 2017b. "Keluarga, Kekerabatan dan Kuasa: Perkawinan Strategis di Kalangan Elit Peranakan di Jawa (Abad XIX-XX)", Kata Pengantar bagi buku Steve Haryono, *Perkawinan Strategis.*

La Ode, M. D. 2012. *Etnis Cina Indonesia dalam politik: Politik etnis Cina Pontianak dan Singkawang di era reformasi, 1998-2008*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Legowo, Krisno. 2011. *Etnis Tionghoa Indonesia (ETI) Facts.* Jakarta: Lembaga Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Li Zhuohui, 2012, *Pancaran Cahaya Tujuh Generasi.* Jakarta: Menaravisi Commerce.

Liem, A. J. Sioe Siet. 2013. *Memoar A.J. Liem Sioe Siet: pendiri perguruan tinggi yang selalu mengikuti suara hati-nya*. Yogyakarta Cahaya Atma Pustaka

Lim, Sing Meij. 2009. *Ruang sosial baru perempuan Tionghoa sebuah kajian pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lo Siauw Tjun. 2013. *Riwayat Wu Zu Quan, Ngo Co Kun, Siauwlim Ho Yang Phay dari great grand master Tjoa Giok Beng Hokkian, Tiongkok sampai pengembangan di Nusantara oleh Grand Master Sin She Lo Ban Teng*. Jakarta: Yayasan Lo Ban Teng.

Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya* (3 jilid). Jakarta: Gramedia

Mahfud, Choirul. 2013. *Manifesto politik Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Malagina, Agni dan Latief, Feri. 2015a. "Titisan Pemburu Wewangian Surgawi", *National Geographic Indonesia,* Februari, h. 52-69.

_____. 2015b. "Berburu 'Anak Naga' di Tanah Timor", *National Geographic Traveler*, Vol. 6, no. 8, h. 92-103.

_____. 2016a. "Corong Candu di Tepian Jawa", *National*

Geographic Indonesia, Februari, h. 22-35.

_____. 2016b. "Terbit Rindu pada Bekas Kota Candu", *National Geographic Traveler*, Februari, Vol. 8, no. 2, h. 76-83.

Markhamah. 2000. *Etnik Cina: kajian linguistis kultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mastuti, Dwi Woro Retno. 2007. *Klempakan cariyos Tionghwa Sik Jin Kwi ceng see*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

_____. 2014. *Wayang potehi gudo: seni pertunjukan peranakan Tionghoa di Indonesia = Chinese peranakan performing arts in Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan/ Indonesia Shangbao

Maulana, Rezza. 2010. *Tionghoa Muslim/Tionghoa Muslim: selanjutnya--*. Yogyakarta, Indonesia: Institute for Multiculturalism and Pluralism Studies.

Mulyadi, M. Hari, dan Soedarmono. 1999. *Runtuhnya kekuasaan "Kraton Alit": studi radikalisasi sosial "wong Sala" dan kerusuhan Mei 1998 di Surakarta*. Solo: Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan.

Nagelkerke, Gerard A. 1982. *The Chinese in Indonesia: a bibliography, 18th century, 1981*. Leiden, Netherlands: Library of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology.

Nawiyanto, S. 2010. *Mata hari terbit dan tirai bambu: persaingan dagang Jepang-Cina di Jawa pada masa krisis 1930-an dan 1990-an*. Yogyakarta: Ombak.

Nurcholish, Ahmad. 2004. *Memoar cintaku Pengalaman empiris pernikahan beda agama*. Yogyakarta: LKIS.

Nursam, M. 2008. *Memenuhi panggilan ibu pertiwi: biografi Laksamana Muda John Lie*. Yogyakarta: Ombak.

Nyoto. 2002a. *Etnis Cina: antara mengangkat batang terendam dan lahan pemerasan*. Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning Press.

_____. 2002b. *Rekonstruksi problematika minoritas Tionghoa di Indonesia: berbagai kasus, inpres, keppres, undang-undang, dan peraturan diskriminasi*. Pekanbaru:

Penerbit UNRI Press kerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan the Ford Foundation

_____. 2005. *Si "anak tiri" Republik: fenomena kehidupan sosial politik*. Pekanbaru: Unri Press.

Oetomo, Dede. 1989. "The Etnic Chinese in Indonesia", dalam Leo Suryadinata (ed.), *The ethnic Chinese in the Asean states: bibliographical essays*. Singapore: ISEAS, h. 43-96.

Pai, Betty [Bai, Jiali] 2012. *Burhan Uray berbakti untuk Indonesia*. Jakarta Selatan : Universitas Al Azhar Indonesia

Pardede, Andreas et al. (ed.). 2002. *Antara prasangka dan realita: telaah kritis wacana anti Cina di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Inspirasi : Yayasan Partisipasi.

Perdana, Fahmi Rafika. 2008. *Integrasi sosial Muslim-Tionghoa: studi atas partisipasi PITI DIY dalam gerakan pembauran*. Yogyakarta: PITI DIY-Mystico.

Perkasa, Adrian. 2012. *Orang-orang Tionghoa & Islam di Majapahit*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Prasetyadji. 2011. *Semangat perjuangan peranakan idealis: merintis jalan menuju kesetaraan dan penyelesaian kewarganegaraan etnis Tionghoa sejak tahun 1945*. Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa.

Pratiwi, Dewi. 2008. *Tendangan pamungkas sang ap-bal hurigi Indonesia: sejumput kisah Juana Wangsa Putri : plus info & tips berlatih taekwondo*. Jakarta: Pustaka Intermasa.

Pratiwo. 2010. *Arsitektur tradisional Tionghoa dan perkembangan kota*. Yogyakarta: Ombak.

Purnama, Basuki Tjahaja. 2008. *Merubah Indonesia: the story of Basuki Tjahaja Purnama : tidak selamanya orang miskin dilupakan*. Jakarta: Center for Democracy and Transparency.

Purwoseputro, Ardian. 2014. *Wayang potehi of Java*. Jakarta: Afterhours Books.

_____. 2015. *Museum Hakka Indonesia/Indonesian Hakka Museum*. Jakarta: Museum Hakka Indonesia

Rahoyo, Stefanus. 2010. *Dilema Tionghoa miskin*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Ravando. 2017. *Dr. Oen: pejuang dan pengayom rakyat kecil*.

Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
Redaksi, 2003. "Kata Pengantar", *Antropologi Indonesia*, XXVII, no 71, Mei-Agustus.
Riady, Mochtar. 2015. *Mochtar Riady, manusia ide*. Jakarta : Penerbit Buzu Kompas, 2015.
Rustopo. 2007. *Menjadi Jawa: orang-orang Tionghoa dan kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998*. Yogyakarta: Ombak bekerjasama dengan Yayasan Nabil, Jakarta.
_____. 2008. *Jawa sejati: otobiografi Go Tik Swan Hardjonagoro*. Yogyakarta: Ombak.
Santosa, Iwan. 2012. *Peranakan Tionghoa di Nusantara: catatan perjalanan dari Barat ke Timur*. Jakarta: Buku Kompas.
_____. 2014. *Tionghoa dalam sejarah kemiliteran: sejak Nusantara sampai Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
Santoso, Widjajanti M. 2000. *Membaca kembali "kecinaan" etnis Cina di Indonesia: sebuah kajian kepustakaan*. [Jakarta]: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Setiawan, Eddy et al. 2017. *Mengabdi Tak Kenal Henti: Perjuangan Mewujudkan WNI Tunggal*. Jakarta: IKI-ANRI.
Setiono, Benny G. 2003/2008. *Tionghoa dalam pusaran politik*. Jakarta: Elkasa/TransMedia.
Setyautama, Sam, dan Suma Mihardja. 2008. *Tokoh-tokoh etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) : Chen Xingchu Foundation.
Shinta Devi I. S. R. 2005. *Boen Bio: benteng terakhir umat Khonghucu*. Surabaya: JP Books.
_____. 2014. *Etnis Tionghoa dalam sejarah pendidikan masyarakat kota Surabaya*.
Sidharta, Myra. 2001. *Peter Sie: mode adalah hidupku : otobiografi Peter Sie*. Jakarta, Indonesia: Ku/bu/ku.
Sindhunata, G.P. 2006. *Kambing hitam: teori René Girard*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sinuhaji, Wara. 2004. *Aktivitas ekonomi dan entrepreneurship masyarakat Karo pasca-revolusi*. Medan, Indonesia: USU Press
Sio Hong Wai (Frederik Parluhutan) 2012. *Tionghoa di Tarutung*.

Jakarta: Bujana Tirta

_____. 2015. *Menjadi (Tionghoa) Indonesia: Dua Cerita Sio Hong Wai.* Editor Budi Susanto et al. Yogyakarta: Sanata Dharma dan Lembaga Studi Realino.

Sjamsuddin, Helius. 2004. "Rusuh di Bandung: Peristiwa 5 Agustus 1973 dalam Liputan Media Massa", dalam Asmawi Zainul dan Didin Saripudin (ed.), *50 Tahun Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UOI 1954-2004.* Bandung: Historia Utama Press, h. 321-370.

Sofyan, Ahmadi. 2011. *Amung Tjandra (Tjen Hon Liong), inspirator: tokoh pejuang pembentukan Propinsi Bangka Belitung lintas generasi, etnis, dan agama*. Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: Aynat Pub.

Sudarmanto, J. B. 2004. *Tengara Orde Baru: kisah Harry Tjan Silalahi*. Jakarta: Toko Gunung Agung

Sumbung, Titi dan Soedarmanta, J.B. 2015. *Merajut Kebangsaan Indonesia: Suatu Proses Pembauran yang Berkelanjutan. Sebuah Biografi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sunano. 2017. *Muslim Tionghoa di Yogyakarta*. Yogyakarta: Mata Bangsa

Suroso, Lisa. 2010. "Cerita Ciko di Bumi Cendrawasih", *Suara Baru* (INTI) tersedia juga di link: https://lisasuroso.wordpress.com/2009/12/29/cerita-ciko-di-bumi-cendrawasih/#more-162

Surtihadi, R.M. 2008. *Tan Thiam Kwie Sang: celah-celah kehidupan maestro pendidik musik tiga zaman*. Yogyakarta: Panta Rhei Books.

Suryadinata, Leo dan Kwartanada, Didi (ed.) 2016. *Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Yayasan Nabil

Suryomenggolo, Jafar. 2005. *Hukum sebagai alat kekuasaan: politik asimilasi Orde Baru*. Yogyakarta: Galang Press.

Tamara, Nasir. 2013, 2015. *Bakti untuk Indonesia. H.M. Lukminto Pendiri Kelompok Usaha Sritex Perusahaan Tekstil Terbesar se-Asia Tenggara*. Jakarta: KPG & Delta Publisher

Tan, Mely G. 2008. *Etnis Tionghoa di Indonesia: kumpulan tulisan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tanggok, M. Ikhsan. 2000. *Jalan keselamatan melalui agama Khonghucu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____. 2005. *Mengenal lebih dekat "agama Khonghucu" di Indonesia*. Jakarta: Pelita Kebajikan.

_____. 2017. *Agama dan kebudayaan orang Hakka di Singkawang: memuja leluhur dan menanti datangnya rejeki*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas

Tanggok, M. Ikhsan et al. 2010. *Menghidupkan kembali jalur sutra baru: format baru hubungan Islam Indonesia dan China*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Theo, Rika, and Fennie Lie. 2014. *Kisah, kultur, dan tradisi Tionghoa Bangka*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas

Usman, A. Rani. 2009. *Etnis Cina perantauan di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Usman, Syafaruddin Mhd, dan Din, Isnawita. 2010. *"Beli" istri mulai 8 jeti: fenomena amoy Singkawang*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Wahid, Abdul. 2009. *Bertahan di tengah krisis: komunitas Tionghoa dan ekonomi kota Cirebon pada masa depresi ekonomi, 1930-1940*. Yogyakarta: Ombak.

Wanandi, Jusuf. 2014. *Menyibak tabir Orde Baru: memoar politik Indonesia, 1965-1998*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Wasino. 2006. *Wong Jawa dan wong Cina: liku-liku hubungan sosial antara etnis Tionghoa dengan Jawa di Solo tahun 1911-1998*. Semarang: Unnes Press.

Wibowo, I., Clara Wresti, dan Alexander Wibisono. 2006. *Mata hati Sang 'Pioneer' Indonesia: biografi Pandji Wisaksana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, I. (ed). 1999. *Retrospeksi dan rekontekstualisasi "masalah Cina"*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Pusat Studi Cina.

Wibowo, I (ed.). 2000. *Harga yang harus dibayar: sketsa pergulatan etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Pusat Studi Cina di Indonesia.

Wibowo, I., dan Syamsul Hadi (ed.). 2009. *Merangkul Cina:*

hubungan Indonesia-Cina pasca-Soeharto. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, I., dan Thung Ju Lan (ed.). 2010. *Setelah air mata kering: masyarakat Tionghoa pasca-peristiwa Mei 1998*. Jakarta: Buku Kompas.

Wibowo, Ivan (ed.). 2008. *Cokin? so what gitu loh!: pemikiran Tionghoa muda*. Depok: Komunitas Bambu : Jaringan Tionghoa Muda.

Widagdo, Handoko. 2017. *Anak Cino: pencarian jati diri keluarga Cina di pedesaan Jawa*. Jakarta: Gramedia.

Widayati, Naniek Widayati. 2008. *Rumah mayor China di Jakarta = Mansion of the Chinese major in Jakarta*. [Jakarta]: Subur Jaringan Cetak Terpadu.

Winarni, Retno. 2009. *Cina pesisir: jaringan bisnis orang-orang Cina di pesisir utara Jawa Timur sekitar abad XVIII*. Denpasar, Bali: Pustaka Larasan.

Winata, Ghanda 2013. *Bangkit & Pantang Menyerah. Kisah Nyata Inspiratif Seorang Prajurit, Pendidik dan Pebisnis Tionghoa*. Jakarta: Libri.

Wirawan, Yerry. 2013. *Sejarah masyarakat Tionghoa Makassar: dari abad ke-17 hingga ke-20*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan École française d'Etrême-Orient (EFEO) [dan] KITLV-Jakarta,

Yentriyani, Andy. 2004. *Politik perdagangan perempuan*. Yogyakarta: Galang Press.

Yu, Audrey Jia Hui [Maria Audrey Lukito]. *Patriot*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer (BIP).

_____. 2014. *Mellow yellow drama*. Yogyakarta : Penerbit Bentang/Bandung : Mizan Media Utama

_____. 2015. *Mencari sila kelima*. Yogyakarta : Penerbit Bentang/Bandung : Mizan Media Utama

Yusuf, Iwan Awaluddin. 2005. *Media, kematian, dan identitas budaya minoritas: representasi etnik Tionghoa dalam iklan dukacita*. Yogyakarta: UII Press.

A Preliminary Research on Wilson Tjandinegara: A Chinese Writer in the *Reformasi* Era[1]

Yerry Wirawan

Introduction

Anyone who begins his journey into Chinese Indonesian studies, especially during the New Order era, must be familiar with Leo Suryadinata's works. His books are available in Indonesian language in the faculty library that introduces us to the complexities and richness of Chinese Indonesia; topics that were rarely discussed in the classroom. That was my first trajectory in this field. Then, with the help of Mrs. Claudine Salmon, I traveled further to South Celebes. We went to Makassar.

Like most of us from the Chinese community in Indonesia, the Chinese Makassar are stereotyped as having supposedly financial flair and interested only in business. This label is rooted from the colonial period when the government restricted the role of Chinese descendants merely in trade. This took place despite the fact that there are Chinese Makassar individuals with a variety of talents, including in the arts, yet their achievement remained ignored by the larger Indonesian society.

A prominent figure of such artistic individual is Wilson Tjandinegara alias Chen Donlong (陈冬龙) who dedicated his life for literature.[2] Tjandinegara was born in Makassar in 20 December 1946. He lived throughout the Sukarno to the New

[1] Originally, this article was presented in "International Workshop on Making Global Trajectories of Chinese Diaspora Studies in Asia", Kyoto University- LIPI, LIPI Jakarta, 5-6 November 2017. I rewrote some parts of this article.

[2] Wilson Tjandinegara also produced a series of photographic works. But in this article, we will focus on his literary writings.

Order eras. His generation witnessed the rising of anti-Chinese sentiments and the continuation of Chinese exclusion from politics, in particular during the New Order. In the face of these social and political circumstances, Tjandinegara continued to believe that literature is an important medium to bridge the differences and understandings between the Chinese and Indonesian communities. In 1970, he opened a bookshop in Parepare and in 1995, he moved to Jakarta and started his literary career by writing and translating Chinese poems into the Indonesian language. Wilson Tjandinegara passed away in Tanggerang in 10 february 2017.[3]

Wilson Tjandinegara's work has attracted the attention of Indonesian literary critics, even though still few scholars have comprehensively studied his works. There is the extensive study by Pamela Allen who appreciated Wilson Tjandinegara's works of translation.[4] From the literary perspective, she concludes that Tjandinegara translation works are limited in quality but remain important as in to bridge differences and building peace between the Chinese and Indonesians.[5]

However, Tjandinegara is a distinctive figure in the Indonesian literary world and his works deserve to be highlighted. In Makassar history, literature played a key role among the Peranakan by bridging the cultural understanding of classic Chinese literature and Malay language. In this article, I will locate the place of Wilson Tjandinegara and his works in the Chinese Makassar history by comparing him to Chinese Makassar writers in the previous period: Ang Ban Tjiong and Soh Lian Tjie. I argue that Wilson Tjandinegara's choice to be a writer and translator is a return to the long literary tradition among the Chinese Makassar.

---

[3] A brief biography of Wilson Tjandinegara can be found in Leo Suryadinata, *Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches*, 4th edition. Singapore: ISEAS, 2017, pp. 335-336.

[4] Pamela Allen. "Literature and the Media: Contemporary Literature from The Chinese 'Diaspora' in Indonesia", in *Asian Ethnicity*, Vol. 4., 2003, pp. 383-401; Same author, "*Deconstructing the Diaspora: The Construction of Chinese-Indonesian Identity in Post Suharto Indonesia.* In: Edwina Palmer (ed.), *Asian Futures, Asian Traditions.* Folkestone: Global Oriental, UK, 2005, pp. 128-139.

[5] Pamela Allen, "Tak Kenal maka Tak Sayang, Proyek Terjemahan Wilson Tjandinegara" in Henri Chambert-loir (ed.), *Sadur*. Jakarta: KPG, EFEO, 2009, p. 1090.

The origin of Chinese Literature in Makassar

The Chinese Makassar literature is grounded in a long living tradition. Soh Lian Tjie notes that during the colonial period, Peranakan children enjoyed listening to their grandmothers reading Chinese stories in Makassarese. Yo Kao Tjiao (b. 1920), a young writer at that time, also attested that Peranakan women were fond of Chinese fiction. This tradition was supported by the massive work of Liem Kheng Yong (1875-1933) who translated numerous traditional Chinese fiction into Bugis Makassar language written in Lontara script.[6] Liem Kheng Yong's work is an exceptional representation of cross-cultural tradition among the Peranakan Makassar.

During the first decade of 20th c., schools were established in Makassar as part of the modernization process in the Netherlands Indie.[7] A government report in 1936-7, noted that there were two *Holland Chinese School* (HCS), three elementary schools for European and one school for "pribumi" named *Holland Indische School* (HIS). In contrast to this development, the level of literacy seems to still be very low. The census of 1930 (*volkstelling*) indicated that the level of literacy in Makassar was only over 4,5 %. This survey placed Makassar as one region with the lowest literacy rate in the Netherlands Indie. However, this survey seems to focus on the reading skill of the Makassar population in Latin letters. The same survey shares another striking information. It states that 2/3 of the population were able to read (including in lontaraq) without going to the government school. [8]

In terms of the development of Chinese Makassar literature, it is difficult to categorize this progress as the modernity of Sino-Makassarese literature. There were only a few publications in

---

[6] Claudine Salmon and Gilbert Hamonic. "Translation of Chinese Fiction into Makassarese" in Claudine Salmon (ed.), *Literary Migrations Traditional Chinese Fiction in Asia*. Singapore : ISEAS, 2013, p. 361.

[7] Salmon and Gilbert Hamonic. "La vie littéraire et artistique des Chinois Peranakan de Makassar (1930-1950)", *Archipel* 26 (1983), pp. 146. However, a report by a Makasarese government officer in 1921 states that "modern developments and the increase in all races and nationalities" had largely dissolved "customary ties". See Heather Sutherland. "Whose Makassar? Claiming Space in a Segmented City", in *Comparative Studies in Society and History*, vol. 53, No. 4 (October 2011), p. 801.

[8] *Ibid*. For the women, the survey also gives an interesting fact that it was only 1,2 % women who were able to read while there were only 13% female students in government school. It seems that the makassarese women were more able to read lontaraq than the latin. See also the discussion on being modern using the latin among the middle class in Java in Tom Hoogervorst, "Urban Middle Classes in Colonial Java (1900-1942): Image and Language". In *BKI*, vol. 172, 2017, p. 453.

Sino-Malay in Makassar as compared to Java.[9] Despite a growing number of modern readers, readings in lontaraq were still greatly enjoyed among the Chinese Makassar.

Ang Ban Tjiong (1910-1938)

Ang Ban Tjiong was born in 1910 and went to HCS. Later, with the help of his uncle, he worked as a journalist. In Makassar, Ang Ban Tjiong was also famous as a multi-talented artist for being able to play music, to perform dances and to produce literary writings.

Ang Ban Tjiong could have represented the new generation of Sino-Makassarese writers with his collection of poetry published in the 1930s.[10] We still ignore how many collections of poems of his were printed, but he says that they were sold out in just a few days. This statement implies that his poems gained popularity among local readers. Ang Ban Tjiong's poems are bilingual Malay and Makasarese, a fact that shows his attachment to the Makassarese language. This was also a sign of creativity since these two languages originated from completely different traditions. At that time, Malay was the common lingua franca among the traders in Indonesian port towns and was widely used in the Chinese newspapers while Makassarese was a local language in South Sulawesi. Ang Ban Tjiong certainly wrote his poems for the Makassarese including Peranakan readers demonstrating that these two languages could be beautifully compatible to form poems.

Ang Ban Tjiong also retained his poems in the oral tradition

---

[9] Claudine Salmon, *Literature in Malay by the Chinese Indonesian: A Provisional Annotated Bibliography*. Paris: MSH, 1981.

[10] Claudine Salmon and Gilbert Hamonic. "La vie littéraire et artistique des Chinois Peranakan de Makassar (1930-1950)", pp. 154-156 ; Myra Sidharta, *Dari Penjaja Tekstil sampai Superwoman : Biografi Delapan Penulis Peranakan*. Jakarta: KPG, 2004, hal. 109-111. See also Roger Tol. "Malay, Makassar, money and pretty girls; The curious verse of Ang Ban Tjiong". In Harry A. Poeze and Pim Schoorl (eds.)., *Excursie in Celebes; Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal, -Land and Volkenkunde*. Leiden: KITLV, 1991, pp. 271-83. This poetry collection was republished by his family in 2004. See our review Yerry Wirawan. Agnes Kwenang (Dr.) & Ang Heang Tek (Ir.) éds., *In Memorial Ang Ban Tjiong 1910-1938, Buku Pantun Melayu-Makassar*. In: Archipel, volume 68, 2004. pp. 352-354.

of Makassar culture. He wrote:

> *Tapi pantoen jang sekarang saja sadjikan kepada pembatja, telah disoesoen begitoe roepa, sehingga tjotjok kali boeat dinjanjikan menoeroet lagoe Melajoe seperti lagoe Stamboel, Kerontjong d.l.l.*
>
> But these poems that I present to the readers are composed in a certain way so that they can be vocalized into Malay songs in the manner of Stamboel, Kerontjong songs etc.

Ang Ban Tjiong composed his poems so that these could be read or sung.[11]

As a writer and journalist, Ang Ban Tjiong was also concerned by social issues. He wrote an article on the unemployment in Makassar and poems for the poor. Unfortunately, his literary career did not last long, he passed away at the age of 28.

Drastic Transformation in the 1940s and independence era

The Pacific war and the Japanese occupation radically changed the social-cultural structure of Chinese Makassar. Most of the Peranakan and Totok organizations were dissolved in order to form a single Chinese association under the control of the Japanese. The Chinese, especially writers and journalists, went into hiding in the hinterland in order to avoid the Japanese. They returned to the city only after the war was over in 1945.

The first decade after Independence was the most difficult period for the Chinese community. Strong nationalist sentiments were on the rise and anti-Chinese violence increased, while the Chinese were in the midst of struggling to restore their social and economic lives. In 1946, the Peranakan group managed to form their association PERTIP (Perserikatan Tionghoa Peranakan), which focused on economic restoration. It was not easy since

---

[11] In Makassar, this oral tradition called *Kelong* is performed with dance. See Sidharta, Myra. *Dari Penjaja Tekstil sampai Superwoman: Biografi Delapan Penulis Peranakan*, ibid, p. 111; Tol, Roger. "Malay, Makassar, money and pretty girls; The curious verse of Ang Ban Tjiong". In Harry A. Poeze and Pim Schoorl (eds.)., *Excursie in Celebes; Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal, -Land and Volkenkunde*. Leiden: KITLV, 1991.

the Japanese and the war did devastate the economy of the Chinese community. Confronted with capital shortage, PERTIP held cultural nights and theatre performances *(opera derma*) in order to fund raising. In so doing the association managed to gather sufficient resources to initiate economic restoration.

The national identity issue was also a crucial problem for the Chinese at that time. PERTIP attempted to overcome this issue through intensified cross-cultural activities, such as performing Indonesian traditional dance performed by the Chinese, writing about Chinese, Makassar, and Bugis culture and adopting "edjaan Suwandi" for their publications.[12]

Soh Lian Tjie (1914-1994)

Soh Lian Tjie was born in 1914 in Makassar as the eldest daughter of 16 siblings. She received a good education, having studied at HCS *Partikelir* and continued at MULO in Makassar. After finishing her schooling, she wished to continue her study in Batavia. At first, her father was doubtful of her plan. Fortunately, her mother supported her provided she was accompanied by her brothers. Soh Lian Tjie was also a social activist. Before leaving Makassar, she participated in establishing a young women's organization *Nu Tse Lien Ho Hwee* (女子联合会)in 1929. At a very young age, she was the treasurer of this organization.

In Batavia, Soh Lian Tjie went to preparatory school for higher education. She is gifted with languages. During this period, she started to exercise her writing skill for a monthly magazine. In the early 1930s, her name was recorded as a training student for teachers at St. Ursula convent.[13] Soh Lian Tjie also joined girl guides and went to leadership courses in Salatiga.

During the Pacific War, Soh Lian Tjie returned to Makassar. Fluent in English, she worked as a translator for the Japanese. In 1946, Soh Lian Tjie was involved in the foundation meeting of PERTIP. She represented the women's organization *Chie Mey Hui* (姐妹会). In this new organization, she was elected as its

[12] This first Indonesian grammar system was implemented by Suwandi, Indonesian minister of education, in 1947.
[13] *Het Nieuws*, 6-5-1932.

treasurer until 1951. In addition to her social activities, she published various articles on Makassar for magazines in Jakarta.

Working for the Indonesian administration allowed Soh Lian Tjie to travel to many parts of the country and to organize a photo exhibition. This exhibition devoted to East Indonesia was presented in various cities in Java.[14] In 1951, she also gave English lessons for the ministry of information's staff, in Jakarta.[15] Following NIT dissolution, Soh Lian Tjie continued her work in the Indonesian Minister of Information office. With her outward looking and easy-going, Soh Lian Tjie could be seen as the model of modern Chinese woman in post-colonial Makassar.

While she was active in social work, we hardly find her writings discussing politics. She wrote short articles on the Chinese Makassar culture for the media published in Java. Soh Lian Tjie's writings certainly aimed to respond to the marginalization of the Chinese in the 1950s. Her articles demonstrated her commitment to the nation-building project by presenting minority groups in the outer island to the wider audience. Unlike Ang Ban Tjiong, Soh Lian Tjie wrote her articles for readers in Jakarta and elsewhere in Indonesia. Furthermore, her status as a migrant in Java allowed her to compare the Chinese New Year celebration in Makassar and Jakarta.[16] This is an important article that shows the diverse cultures of Chinese Indonesians. In another article, Soh Lian Tjie discusses the influence of Bugis Makassar culture on the Chinese. She emphasized the fact that the Chinese have lived in Makassar for centuries and heavily absorbed Makassar-Bugis culture especially, among the Peranakan women. [17]

The New Order era (1967-1998)

This was a very difficult period because of the prohibition to display forbade the public display of Chinese culture in the public sphere. At the same time the government implemented

[14] *De Locomotief*, 2-2-1950.
[15] *De Nieuwsgier*, 9-10-1951.
[16] Soh Lian Tjie, "Bagaimana orang Tionghoa Makassar Rajakan Taoen Baroe", in *Pantja Warna*, April 1949, pp. 15-16.
[17] Soh Lian Tjie, "Pengaruh Adat Makassar-Bugis atas orang Tionghoa Kelahiran Sulawesi Selatan", *Pantja Warna*, September 1950, pp. 3-4, 38.

an assimilation policy aiming to "indonesianise" the Chinese. But in reality, they banned Chinese organizations, introduced name-changing policies and adopted the word "Cina" that was resented as derogative instead of "Tionghoa". In contradiction with the official objective, for over the 30 years the Chinese were regarded as outsiders. History textbooks hardly mention their contributions, bringing about the Chinese Indonesians losing their historical identity. As a result, the Chinese continued to live under vulnerable conditions. Nearing the fall of Suharto, an Anti-Chinese riot broke out in 1997 in Makassar and in 1998 in Jakarta, Solo and Medan.

According to Sutherland, national governments during the post-Suharto era, in fact, continued to be Java-based, bringing about mutually advantages for Jakarta elites. Popular sentiment has always favored regional autonomy that encouraged local politicians to emphasize the dominance of Muslim Bugis and Makassarese, and Javanese "imperialists", while Chinese immigrants and Christians were considered as outsiders.[18] This uncomfortable position for the Chinese may be the reason for Wilson Tjandinegara to drastically change his career from businessman to writer.

Wilson Tjandinegara (1946- 2017)

Wilson Tjandinegara was born in Makassar in 1946 into a poor family. He was the ninth of 12 siblings. His only education was at the Chinese middle school. At the age of 12, he had to work to help his family. In 1970, he opened a bookshop in Parepare (155 Km. north of Makassar) that seems to have inspired his future career. [19]

Photo source: Wilson Tjandinegara's collection.

[18] Sutherland. "Whose Makassar? Claiming Space in a Segmented City", p. 806.

[19] Pamela Allen, "Tak Kenal Maka Tak Sayang, Proyek Terjemahan Wilson Tjandinegara", p.1085.

The year of 1995 was the turning point for Tjandinegara. He left his business and moved to Tangerang in order to start a new career as a writer. In an interview published in *Cybersastra* online, Wilson Tjandinegara briefly explained that he was inspired by a word of Chairil Anwar "Sekali berarti kemudian mati".[20] In Tangerang, he met Wowok Hesti Prabowo, a worker poet who also lived there. Together, they founded Indonesian Literature Committee (Komite Sastra Indonesia or KSI) in 1995.[21] Tjandinegara explained his choice in one of his early poem[22]:

An idealist writer
Produces masterpieces
Despite the fact that he lives in a mud house

Human life
Is not only concerned with wealth
Satisfaction can be a choice.

Wilson Tjandinegara wrote his poems for non-Chinese readers as well. With his poems, he continued the oral tradition of the Chinese Makassar. This form is convenient to perform in public spaces. His first collection, *Puisi untukmu* (Poems for you), was published by Komunitas Sastra Indonesia (KSI) in 1995. During this period, he also published translations from Chinese to Indonesian such as *Bisikan Hati* (Heart Whisper), an anthology of poetry by a Chinese woman, Teo Un.[23]

The May 1998 event and the fall of Suharto marked a significant change for Chinese Indonesian. Now, they are able, to a certain degree, to represent their cultural identity.[24] Like Soh Lian Tjie and

---

[20] Cybersastra, "Darah dan Daging Sastra Wilson Tjandinegara", https://groups.yahoo.com/neo/groups/budaya_tionghua/conversations/topics/2100 (accessed 5 October 2017).

[21] Pamela Allen, *Ibid*, p. 1085. On Wowok Hesti Prabowo, see also Sumit K. Mandal, "Creativity in protest, Arts workers and the recasting of politics and society in Indonesia and Malaysia", in Ariel Heryanto and Sumit K. Mandal (eds.), *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia, Comparing Indonesia and Malaysia*. London, New York: Routledge, 2012, pp. 191-194.

[22] In Indonesian: Seorang penulis idealis/Melahirkan maha karya/Meski berumah di lorong berselut/Hidup manusia/Bukanlah harta semata/Kepuasan batin bisa jadi pilihan. Wilson Tjandinegara, *Choice*, 1995.

[23] Unfortunately, we are unable to find further information on Teo Un.

[24] For this period, Paul Tickell pointed out that for the first time in Indonesian modern literature, a number of Indonesian writers "*pribumi*" began to address the problem of being Chinese in the political, social and cultural context of modern Indonesia. See Paul Tickell, "Indonesian Identity after the Dictatorship: Imagining Chineseness in Recent Literature and Film". in John H. Walker, Glenn Banks, Minako Sakai (eds.), *The Politics of Periphery in Indonesia, Social and Geographical Perspective*. Singapore: NUS, 2009, pp. 177-178.

Ang Ban Tjiong, Wilson Tjandinegara saw this opportunity to bridge Indonesian and Chinese through literature by publishing bilingual poems in Chinese and Indonesian with the title *Rumah Panggung di Kampung Halaman* (House in the Village) in 1999.[25] In this poem collection, there are 22 poems where Wilson Tjandinegara discusses various issues including social and political issues.

Tjandinegara's decision to be a writer was highlighted in his poems. In "*Pilihan*" (Choice), he stated that his goal was to be an idealist writer and to produce literary masterpieces, but such a goal was not supposed to help him earn much money. He admitted that this choice to be a writer is as risky as becoming a traveler, a racer, and a social worker. However, for him, what is most important in life is happiness. We can also find this theme in some other poems such as: *Perjudian* (Gamble), *Pilihan* (the Choice), *Menuju Stasiun Baru* (Towards the new Stasiun), *Tekadku* (Willpower), *Penyair dan Kunang-kunang* (the Poet and fireflies)*, Kaktus* (cactus), *'Tanah Suci'* (Holy land)*.*

Unlike Ang Ban Tjiong and Soh Lian Tjie, Tjandinegara centered his writings on Chinese Indonesian contemporary issues and translations works rather than on Chinese Makassar culture. He rarely mentioned earlier Chinese Makassar writers such as Liem Kheng Yong, Ang Ban Tjiong and Soh Lian Tjie. His literary career was essentially shaped in Parepare and Tangerang, which may partly explain his distance to his hometown Makassar. However, there were at least two poems in which he makes references to his birthplace. The first poem is "Tekadku" (Willpower) in which he refers to a Makassarese saying: "*Kukalungkan semboyan negeri pelaut ulung"* (I am wearing the slogan of seaman country). In the second poem, *Rumah Panggung di Kampung Halaman* (A Stage House in the Hometown), Wilson Tjandinegara alludes to the time he lived in Makassar near the sea.

Tjandinegara may be seen as a model of Chinese Indonesian in the *reformasi era*. He has little interest in Chinese Makassar writings and cultures but demonstrated his knowledge on the great figure of Indonesian modern literature Chairil

[25] Leo Suryadinata, *Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches*. Singapore: ISEAS, 2015: 335.

Anwar (1922-1945).[26] He was politically engaged and openly condemned the May 1998 tragedy in his three of his poems: *Kita tak Boleh Berdiam Diri!* (We can not be in Silent!), *Kambing Hitam* (Scapegoat), *Di Manakah Nuranimu!* (Where is your heart!).

Concluding Remarks

Wilson Tjandinegara whose life was dedicated to literature represents a continuation of the Chinese Makassar literary tradition. His starting point is the segregation of the Chinese and Indonesians, which provoked the—misunderstanding between both of them. He believed that this misunderstanding needed to be bridged through literature. At this point, Wilson Tjandinegara's life and works remind us of two Chinese Makassar writers from the previous era, Ang Ban Tjiong, and Soh Lian Tjie.

Wilson Tjandinegara was also an example of how unsuccessful was the New Order's anti-Chinese cultural and political approach. By refusing to be a successful businessman and choosing to be a writer, he broke the stereotype of the Chinese as commercial-oriented people. On the other hand, Wilson Tjandinegara's writings indicate his disconnection from the Chinese Makassar local history and culture. He advocated for Chinese Indonesian issues rather than presenting his hometown like Ang Ban Tjiong and Soh Lian Tjie's writings in the previous era. Change and continuity embodied in Wilson Tjandinegara's literary works may represent a model of Chinese Indonesian in the *reformasi era* that he certainly deserves our attention.

A Provisional List of Wilson Tjandinegara's Literary Works[27]

- Original works:

Puisi Untukku. Tangerang: CV Gitakara, 1995.

Menyangga Dunia di atas Bulu Mati. Jakarta: Komunitas Sastra Indonesia, 1998.

Rumah Panggung di Kampung Halaman. Jakarta: Komunitas

[26] Josh Stenberg, "Crossing the Finish Line". *Inside Indonesia,* 13 February 2018. https://www.insideindonesia.org/crossing-the-finish-line (accessed 4 February 2021).

[27] This list was mostly cited from Pamela Allen, "Tak Kenal Maka Tak Sayang, Proyek Terjemahan Wilson Tjandinegara", p. 1090. I added some other references that are still incomplete.

Sastra Indonesia, 1999.

Menyangga Dunia di atas Bulu Mata. Jakarta : Komunitas Sastra Indonesia, 2000.

Rumah Panggung di Kampung Halaman. Jakarta: Komunitas Sastra Indonesia, 2001.

Bersama Xinyu LIang. *Merajut Harapan Anak Pinggiran*. Jakarta: Yinni lian tong shu ju, 2004.

- Translation works:

Teo Un, *Bisikan Hati*. Jakarta: Komunitas Sastra Indonesia, 1996.

Kumpulan Cerpen Mini Yin Hua. Jakarta : Komunitas Sastra Indonesia, 1999.

101 Puisi Mandarin. Jakarta : Komunitas Sastra Indonesia, 2000.

Resonansi Indonesia (bilingual in Indonesian and Chinese). Jakarta: Komunitas Sastra Indonesia, 2000.

Jeanne Yap, *Lelaki adalah Sebingkai Lukisan*. Jakarta: Komunitas Sastra Indonesia, 2001.

Ming Fang, *Janji Berjumpa di Kota Pegunungan*. Jakarta: Komunitas Sastra Indonesia, 2001.

Antologi Sajak Klasik Dinasti Tang. Jakarta: Komunitas Sastra Indonesia, 2001.

Bibliography

Allen, Pamela. "Literature and the Media: Contemporary Literature from The Chinese 'Diaspora' in Indonesia", in *Asian Ethnicity*, Vol. 4., 2003, pp. 383-401.

___. "Sastra Diasporik?: Suara-Suara Tionghoa Baru di Indonesia", *Antropologi Indonesia* 71, 2003, pp. 64-74.

___. "*Deconstructing the Diaspora: The Construction of Chinese-Indonesian Identity in Post Suharto Indonesia.* In: Edwina Palmer (ed.), *Asian Futures, Asian Traditions.* Folkestone: Global Oriental, UK, 2005, pp. 128-139.

___. "Tak Kenal Maka Tak Sayang, Proyek Terjemahan Wilson Tjandinegara", in Henri Chambert-loir (ed.), *Sadur*. Jakarta: KPG, EFEO, 2009, pp. 1083-1092.

Derks, Will. "Sastra Pedalaman, Pusat-pusat Sastra Lokal dan

Regional di Indonesia". In Keith Foulcher and Tony Day (eds.), *Sastra Indonesia Modern, Kritik Postkolonial, Edisi Revisi: 'Clearing a Space'*. Jakarta: Obor, KITLV, 2008, pp. 401-430.

Salmon, Claudine and Gilbert Hamonic. "Translation of Chinese Fiction into Makassarese" in Claudine Salmon (ed.), *Literary Migrations: Traditional Chinese Fiction in Asia (17th-20th Centuries)*. Singapore : ISEAS, 2013, pp. 359-374.

___. "La vie littéraire et artistique des Chinois Peranakan de Makassar (1930-1950)", *Archipel* 26 (1983), pp. 143-78.

Sidharta, Myra. *Dari Penjaja Tekstil sampai Superwoman : Biografi Delapan Penulis Peranakan*. Jakarta : KPG, 2004.

Stenberg, Josh. "Crossing the Finish Line". *Inside Indonesia,* 13 February 2018. https://www.insideindonesia.org/crossing-the-finish-line (accessed 4 February 2021).

Suryadinata, Leo. *Prominen Indonesian Chinese: Biographical Sketches*. Singapore: ISEAS, 2015.

Sutherland, Heather. "Whose Makasar? Claiming Space in a Segmented City", in *Comparative Studies in Society and History*, vol. 53, No. 4 (October 2011), pp 791-826.

Tickell, Paul. "Indonesian Identity after the Dictactorship: Imagining Chineseness in Recent Literature and Film". in John H. Walker, Glenn Banks, Minako Sakai (eds.), *The Politic of periphery in Indonesia, Social and Geographical Perspective*. Singapore: NUS, 2009, pp. 274-295.

Tol, Roger. "Malay, Makassar, money and pretty girls; The curious verse of Ang Ban Tjiong". In Harry A. Poeze and Pim Schoorl (eds.)., *Excursie in Celebes; Een bundel bijdragen bij het afcheid van J. Noorduyn als directeur secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal, -Land and Volkenkunde*. Leiden: KITLV, 1991, pp. 271-83.

PENUTUP

Memperkenalkan "NGGOTIO" (NGGOsipin TIOnghoa)

Alex Cheung

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang majemuk dan menjunjung **Bhinneka Tunggal Ika** memiliki banyak sekali identitas, baik secara bahasa, etnis, tradisi dan budaya. Indonesia juga memiliki keanekaragaman suku dan bangsa yang sangat besar, termasuk etnis Tionghoa di dalamnya.

Etnis Tionghoa di Indonesia sebagai salah satu suku bangsa yang telah berdiam di wilayah Nusantara jauh sebelum Indonesia ada, merupakan salah satu etnis yang identitasnya dapat terlihat dengan cukup jelas. Namun sayang, belum banyak yang mengupas isu-isu yang melekat dengan etnis ini.

Acara webinar Nggosipin Tionghoa hadir mengisi kekurangan pembahasan seputar isu ketionghoaan ini. Pada masa pandemi di mana banyak anggota masyarakat tidak dapat keluar rumah dan harus melakukan pertemuan melalui aplikasi tatap muka secara daring (dalam jaringan), serial webinar Nggosipin Tionghoa justru menemukan momentumnya, yaitu antara tahun 2020-2021, masa di mana banyak anggota masyarakat terpaksa melakukan aktivitas mereka di rumah masing-masing.

Pelaksanaan *webinar* Nggosipin Tionghoa yang biasa disingkat NggoTio ini bisa dibilang menjadi jendela tinjauan bagi pembacanya untuk lebih mengenal etnis Tionghoa dan ragam topiknya. Bagi peminat yang terlewat mengikutinya secara langsung dapat menonton rekaman serial acaranya di laman Youtube, tepatnya di channel Roemah Bhinneka.

Cikal Bakal

Terbentuknya NggoTio ini berawal dari kejadian tak terduga. Sekitar April 2020, Evi Lina Sutrisno dikontak oleh seorang sahabatnya, yang juga seorang aktivis dan pendamping/mentor perkumpulan pemuda Khonghucu di Surabaya. Perkumpulan ini sudah berjalan lebih dari tiga tahun di mana setiap bulan purnama (*cap go*), mereka bertemu di salah satu rumah anggota dan berdiskusi tentang berbagai hal, semisal filosofi Khonghucu, perkembangan agama Khonghucu atau pun obrolan santai. Saat wabah Covid-19 mulai merebak di Indonesia, mereka harus menghentikan aktivitas tatap muka itu dan beralih ke pertemuan daring yang dilaksanakan tiap minggu, yang dinamai serial WOW (*the Way of Wisdom*). Evi lalu dimintai tolong untuk menjadi narasumber di salah satu pertemuan daring mereka.

Atas permintaan panitia, pada pertemuan yang diberi judul "Ampyang in Harmony", Evi membawakan topik kolaborasi dan relasi harmonis kelompok Tionghoa dan orang lokal, termasuk etnis Jawa, sebelum mereka menggagas perlawanan terhadap Belanda di Batavia pada tahun 1740. Sebelumnya, Belanda melakukan pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa, yang kerap disebut "Chineezen Moord" dimana setelah pembunuhan itu, etnis Tionghoa dan orang lokal tetap bersatu melawan Belanda. Perjuangan kolaboratif Tionghoa-Jawa di bawah pimpinan Kapitein Souw Pan Chiang merembet hingga ke beberapa kota di Pantai Utara Jawa, Surakarta dan berakhir di Surabaya. Dalam pertemuan itu, ada sekitar 70-an peserta dengan kapasitas Zoom 100 orang. Evi dan panitia tidak menduga bahwa animo dari peserta webinar yang kebanyakan adalah generasi muda Tionghoa Khonghucu sangat antusias. Pada sesi diskusi, mereka aktif bertanya, seolah sangat haus akan sejarah ke-Tionghoa-an di Indonesia.

Menimbang animo peserta muda yang sangat enerjetik, panitia WOW meminta Evi kembali mengisi acara diskusi di bulan Mei dan awal Juni 2020. Di kedua pertemuan itu, Evi menjelaskan tentang sejarah awal agama Khonghucu di Hindia Belanda melalui buku *Hikajat Khonghoetjoe,* karya Lie Kim Hok (1897) dan berdirinya Tiong Hoa Hwee Koan. Tak dinyana,

animo peserta masih tinggi. Menurut beberapa panitia, generasi muda Khonghucu sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang sejarah Tionghoa Indonesia dan Agama Khonghucu yang selama ini tidak pernah disampaikan dalam pelajaran di sekolah.

Menjelang bulan Agustus 2020, panitia WOW mengajak Evi rapat untuk menyiapkan topik Tionghoa dalam kebangsaan Indonesia sebagai bahan diskusi menyambut kemerdekaan Indonesia ke-75. Mereka ingin tahu apakah Tionghoa ikut dalam perjuangan nasionalisme melawan Belanda? Apa saja kontribusi Tionghoa di masa akhir penjajahan Belanda kepada gerakan yang dipimpin oleh Soekarno? Mengapa setelah Indonesia merdeka, Tionghoa masih terus mengalami diskriminasi hingga terjadi arus balik ke Tiongkok di tahun 1959 – awal 1960-an? Merespons keingintahuan itu, Evi lalu mengusulkan agar serial sepanjang bulan Agustus didedikasikan untuk membahas topik-topik tentang:

(1) peran koran *Sin Po* dalam membantu perjuangan Indonesia, dengan pembicara Ravando,
(2) perjuangan Liem Koen Hian sebagai pendiri Partai Tionghoa Indonesia yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, pembicara Didi Kwartanada,
(3) perdebatan tentang kewarganegaraan golongan Tionghoa dalam sidang BPUPK, pembicara Elizabeth Chandra
(4) bedah buku "Ada Aku di Antara Tionghoa dan Indonesia" sebagai upaya membuka ruang perjumpaan antara Tionghoa dan non-Tionghoa di era Reformasi, dengan pembicara Aan Anshori, Surja Giamsjah dan Soka Handinah Katjasungkana.

Awalnya, respons panitia WOW sangat terbuka dan bersemangat sehingga Evi mengontak keenam narasumber untuk melakukan rapat koordinasi dengan panitia. Dari keenam narasumber di atas, Didi Kwartanada awalnya enggan untuk menjadi pembicara. Melalui chat WA dan telpon, Evi menyampaikan pengalamannya menjadi pembicara dan antusiasme generasi muda Khonghucu untuk belajar sejarah. Evi merasa serial webinar ini adalah kesempatan emas di tengah pandemi untuk memperkenalkan versi sejarah yang selama ini ditutup-tutupi oleh Orde Baru dan belum berhasil direvisi di

era Reformasi. Kegigihan Evi berbuah manis, Didi Kwartanada akhirnya berkenan menjadi narasumber.

Tercetusnya NGGOTIO

Di pertengahan Juli 2020 rapat koordinasi dilaksanakan, dimana keenam narasumber dan tiga orang panitia WOW berdiskusi lewat Zoom. Di saat rapat itulah sebagian panitia baru mengetahui bahwa Liem Koen Hian memiliki afiliasi dengan gerakan Kiri. Mereka menjadi ragu dan hanya ingin menampilkan tema *Sin Po* saja. Respons panitia ini dapat dipahami sebagai trauma sejarah. Di mana di antara kelompok Tionghoa, barangkali kelompok Tionghoa Khonghucu adalah salah satu yang mengalami diskriminasi berlapis di saat agama mereka diturunkan statusnya menjadi "aliran kepercayaan" di masa Orba. Kerentanan kelompok "aliran kepercayaan" yang distigma negatif sebagai "belum/ tidak beragama" dan berkemungkinan adalah "pendukung PKI" menjadikan luka sejarah yang lebih mendalam dibandingkan kelompok Tionghoa Kristen, Katolik dan Buddha yang mendapatkan pengakuan penuh dari negara sebagai "kelompok beragama".

Suasana rapat menjadi tegang dan serba tidak enak. Ravando yang rencananya membawakan topik *Sin Po* menjadi enggan bila ia harus tampil sendiri. Ravando menginginkan keempat topik dapat ditampilkan semua. Akhirnya, panitia WOW menarik rencana awal serial diskusi kebangsaan di bulan Agustus. Evi dan keenam pembicara melanjutkan rapat dan memutuskan untuk membuat acara sendiri, yang akhirnya diberi nama **"Nggosipin Tionghoa, Yuk!"**

Proses pemberian nama yang tidak lazim adalah strategi untuk menarik perhatian dan minat kalangan muda agar bersedia belajar sejarah dengan format yang lebih santai. Untuk memfasilitasi diskusi, Gus Aan Anshori mengusulkan untuk menggandeng Roemah Bhinneka agar menjadi host acara ini. Karena kesamaan visi untuk memperjuangkan anti diskriminasi, Bpk. Iryanto, pendiri Roemah Bhinneka segera dikontak dan bersedia memfasilitasi dalam bentuk Zoom (kapasitas 100 orang) dan pembuat flyer. Selain itu, Michael Andrew, aktivis muda Roemah Bhinneka juga mendukung dan

selalu mengoperasikan Zoom hampir di semua acara webinar NggoTio. Semua pihak yang terlibat melakukan tugas ini secara sukarela, tanpa ada bayaran apa pun.

Awalnya, panitia NggoTio mengalokasikan waktu hanya 5 pertemuan saja di bulan Agustus. Namun, karena animo publik yang cukup menggembirakan dan juga karena Didi Kwartanada --yang awalnya enggan menjadi pembicara -- malahan berubah menjadi sangat bersemangat dan menjadi penggerak utama pertemuan NggoTio di bulan-bulan berikutnya. Maka akhirnya acara mingguan NggoTio bisa berlanjut terus sampai pada episode ke-50.

Panitia NGGOTIO

Terbentuknya panitia NggoTio berawal dari beberapa kawan lama yang dikumpulkan oleh Evi Lina Sutrisno pada pertengahan Juli 2020. Latar panitianya sangat beragam, ada Jawa, Tionghoa, Tionghoa Jawa, Tionghoa Makassar, Tionghoa Bangka, Muslim, Kristen, Katolik dan Konghucu. Lengkap, komplit, bagaikan "Indonesia mini".

Rencana yang semula direncanakan untuk menyambut HUT RI Ke-75 ternyata gagal, karena ketidaksesuaian dengan panitia awal. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan panitia. Mereka tidak menyerah, bahkan mencari "patron" baru lewat Gus Aan Anshori. Lewat Gus Aan inilah kemudian ditemukan "Roemah Bhinneka" yang berkenan menyediakan akses Zoom dan channel Youtube mereka bagi kegiatan "tanpa bentuk" ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah (kemudian) uluran bantuan fasilitas zoom 300 orang dari Universitas Ciputra, Surabaya.

Untuk menggodog episode perdana dengan baik, Panitia pernah melakukan rapat persiapan via Zoom sampai selama 5 jam. Rapat yang dihadiri peserta yang berdomisili di sembilan kota lintas benua ini berlangsung dengan akrab dan seru, lengkap dengan debat panas yang berkepanjangan, candaan, serta saling berbagi materi dan tentu saja bergosip ria. Rapat ini membahas format acara, judul (mencari yang "gaul"), juga materi diskusi pertemuan 1-5.

Keenam pembicara yang batal tampil di acara WOW dan Evi

menjadi panitia inti NggoTio. Aan Anshori menjadi sosok yang berperan penting menghubungkan dengan Bpk. Iryanto Susilo (*founder* dan pengampu "Roemah Bhinneka") hingga kemudian mengajak Johan Hasan dari Universitas Ciputra. Kemudian R.N. Bayu Aji dari Unesa dan Shinta Rahayu dari Unair, juga terlibat sebagai panitia.

Episode NGGOTIO

Serial webinar Nggotio mencakup beragam topik mulai dari Sejarah, Diaspora Tionghoa, Budaya, Agama dan Kepercayaan, Sastra, Politik, Media, Ekonomi, Isu Gender, bahkan topik Kungfu, Cerita Silat sampai Masakan pun ada!

Pemilihan topik yang beragam ini tentunya merupakan inisiatif para panitia (menyesuaikan kesiapan narasumber) untuk menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai kalangan termasuk generasi muda. Penting untuk dicatat juga bahwa hampir 80% pembicara di acara NggoTio adalah kenalan dari Didi Kwartanada. Bisa dibilang serial NggoTio tidak akan bertahan hingga 50 episode tanpa Didi.

Berikut adalah tabel serial webinar Nggosipin Tionghoa episode 1-50 lengkap dengan judul, pembicara, dan moderatornya yang diselenggarakan selama tahun 2020-2021; Episode Perdana 3 Agustus 2020 – Episode Penutup 2 Agustus 2021:

TABEL EPISODE NGGOTIO 1-50

Episode	Judul	Pembicara / Penanggap / Narasumber	Moderator
01	Kepo'in Bahasa Melayu-Tionghoa Yuk!	Tom Hoogervorst, Sutrisno Murtiyoso	Evi Lina Sutrisno
02	Koran Sin Po: Disayang Lalu Ditendang?	Ravando, Yunantyo Adi S	Esthi Susanti
03	Liem Koen Hian: Bapak Bangsa Yang Ditolak	Didi Kwartanada, R.N. Bayu Aji	Evi Lina Sutrisno

Episode	Judul	Pembicara / Penanggap / Narasumber	Moderator
04	Membincang Nasib Tionghoa Di BPUPK	Elizabeth Chandra, Aan Anshori	Dinah Katjasungkana
05	Integrasi Wajar, Apaan Tuh? Tanya Siauw Giok Tjhan Yuk!	Siauw Tiong Djin, Christianto Wibisono	Esthi Susanti
06	Matahari Terbit: Pelindung Atau Penindas Tionghoa?	Didi Kwartanada, Tsuda Koji	R.N. Bayu Aji
07	Negara Republik Menjamin Golongan Tionghoa?	Ravando, FX Harsono	Johan Hasan
08	Bertahan di Tengah Gejolak (1950an-1960an)	Yerry Wirawan, Siauw Tiong Djin	Evi Lina Sutrisno
09	Darah dan Air Mata Mei '98 "Cukup Sudah"	Ita F. Nadia, Andri Yentriyani, feat Cindy Creator Chinese Whisper	Aan Anshori
10	Tionghoa Milenial, Ngapain Aja Sih?	Margareta Astaman, Sylvie Tanaga	Michael Andrew
11	Romantika Jawa-Tionghoa, Bisa Kok! Belajar dari Surakarta dan Yogyakarta	Prof. Peter Carey, Daradjadi Gondodiprodjo	Shinta Devi I. S,R.
12	Sumpah Pemuda, Tionghoa Ikut?	Truman Simanjuntak, Udaya Halim	Dinah Katjasungkana
13	Mbiyen Jothakan, Saiki Wawuhan Menggalang Upaya Perdamaian	Tedi Kholiludin, Astuti Parengkuh, Pdt. Surya Samudera Giamjah	R.N. Bayu Aji
14	Gak Cuman Dagang, Lho! Tionghoa di Bidang Hukum & Ilmu Sosial	Yu Un Oppusunggu, Thung Ju Lan	Aan Anshori

15	Belajar dari Pionir Dua Era	Leo Suryadinata, Asvi Warman Adam	Didi Kwartanada
16	Gak Cuman Dagang, Lho! Tionghoa dalam Alunan Musik Klasik, Pop, & Jazz	Addie MS, Alfred Ticoalu	Didi Kwartanada
17	Gak Cuman Dagang, Lho! Arsitek dan Arsitektur Tionghoa	Sutrisno Murtiyoso, Widya Wijayanti	Johan Hasan
18	Gak Cuman Dagang, Lho! Tionghoa dalam Dunia Olahraga	Tan Joe Hok, R.N. Bayu Aji	Ravando
19	Perempuan Tionghoa dalam Sastra dan Diaspora	Naning Pranoto, Widya Fitrianingsih	Evi Lina Sutrisno
20	Perempuan Tionghoa Pejuang Kemanusiaan: Dulu dan Kini	Bobby Pathyradja, Stella Satyadi, Pauline Boedianto	Soka Handinah Katjasungkana
21	Menyingkap Isi Dapur Peranakan Tionghoa	Fadly Rahman, Ari Budhy (berhalangan, PPT saja yang dibacakan)	Michael Andrew
22	Menjadi Tionghoa di Masa Orde Baru	Harry Tjan Silalahi, Melani Budianta	Evi Lina Sutrisno
23	Menganalisis Survei Relasi Tionghoa-Non Tionghoa	Charlotte Setijadi, Aan Anshori	Shinta Devi
24	Menjadi Tionghoa di Masa Reformasi	Johannes Herlijanto, Iryanto Susilo	Michael Andrew
25	Tionghoa Muslim: Dulu dan Kini	Rezza Maulana, Hew Wai Weng	Yerry Wirawan
26	“Ragam Agama Tionghoa di Indonesia: Khonghucu, Buddha, Tridharma	Evi Lina Sutrisno, Yulianti	Ravando

27	Tionghoa Pran Soeh dan Teosofi di Indonesia	SD Darmono, Iskandar Nugraha	Eka Budianta
28	Tionghoa Katolik dan Kristen Dewasa Ini	Yumi Kitamura, Hoon Chang Yau	Didi Kwartanada
29	Batik: Warisan Budaya Peranakan	Yohannes Somawiharja, Widianti Widjaja	Ravando
30	Jejak Kungfu di Indonesia	Alex Cheung, Charly Huang, Erwin Tan	Rojil Nugroho Bayu Aji
31	Kho Ping Hoo Dalam Dunia Cerita Silat	Leo Suryadinata, Tina Asmaraman, Seno Gumira Ajidarma	Sutrisno Murtiyoso
32	Membaur Lewat Wayang Potehi	Ardian Purwoseputro, Toni Harsono	Aan Anshori
33	Bicara Sastra Melayu Tionghoa	Dwi Susanto, Danny Tjia	Evi Lina Sutrisno
34	Keliling Indonesia, Yuk! Tionghoa di Sumatera Utara	Dirk Aedsge Buiskool, Sio Hong Wai	Heriyanto Yang
35	Keliling Indonesia, Yuk! Ring Of Fire Adventure	Youk Tanzil	Udaya Halim
36	Keliling Indonesia, Yuk! Tionghoa di Makassar	Yerry Wirawan, Arwan Tjahjadi, Farida Angliadi	Dias Pradadimara
37	Keliling Indonesia, Yuk! Tionghoa di Sulawesi Utara	Hendri Gunawan, Denny Wulaan, Jenane Manalib	Ivan R.B. Kaunang
38	Gerakan Buruh Tionghoa	Erwiza Erman, Jafar Suryomenggolo, Handoko Wibowo	FX Domini BB Hera

39	Kerusuhan Mei 1998: Kita Bisa Belajar Apa?	Stanley Adi Prasetyo, N.K. Endah Triwijati	Evi Lina Sutrisno
40	Pengabdian Kemanusiaan Dokter Tionghoa	Michael Leksodimulyo, Ravando, Lie A. Dharmawan	Johan Hasan
41	Berapa sih Jumlah Tionghoa? Data dan Problematikanya	M. Sairi Hasbullah, Evi Nurdya Arifin, Aris Ananta	FX Domini BB Hera
42	Keliling Indonesia, Yuk! Tionghoa Sumatera Barat	Erniwati, Riniwaty Makmur, Andreas Sofiandi	Didi Kwartanada
43	Keliling Indonesia, Yuk! Tionghoa Singkawang dan Ketapang	Hasan Karman, Lidya Christin Sinaga, Yi Ying	Heriyanto Yang
44	Keliling Indonesia, Yuk! Cina Timor	Douglas A. Kammen, Jafar Suryomenggolo, Feri Latief, Alowisya Ikis	FX Domini BB Hera
45	Diaspora Tionghoa di Tiga Benua	Butce Lie, Wiwi Tjiook, Siauw Tiong Djin	Rojil Nugroho Bayu Aji
46	Seabad Jejak Tionghoa di ITB	Dali S. Naga, Djoko T. Iskandar, Djoko S. Gabriel	Sutrisno Murtiyoso
47	Pelajari Tiongkok, Yuk!	Natalia Soebagjo, Novi Basuki	Didi Kwartanada
48	Ngobrolin Sekolah Tionghoa Tiga Zaman, Yuk!	Shinta Devi ISR, Nouval Murzita	Yerry Wirawan
49	Pri-Nonpri? Cek DNA-mu, Yuk!	Herawati Supolo- Sudoyo, Bonnie Triyana	Ravando
50	Tionghoa dalam Praktik Kewarganegaraan Indonesia	Bambang Purwanto, Grace Natalie	Aan Anshori

Suka Duka

Menyelenggarakan sebuah acara secara daring dengan konsep serial yang mengundang banyak narasumber dan peserta tentunya bukan hal mudah, banyak suka dan duka yang dilalui. Belum lagi faktor x berupa kesalahan teknis saat *live* yang berdampak gangguan siaran atau penampilan pembicara menjadi kurang maksimal.

Sebagai acara daring yang sangat bergantung pada jaringan internet, tentunya masalah kualitas jaringan dan sinyal internet yang bisa terjadi sewaktu-waktu baik di pihak panitia maupun narasumber, menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap saat selama acara berlangsung.

Walaupun anggota panitianya sudah saling kenal dan cukup akrab, namun bukan berarti proses persiapan berjalan dengan lancar. Beberapa kali perselisihan dan perbedaan pendapat terjadi saat menentukan topik, judul atau narasumber. Namun, biasanya bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada yang sakit hati bila pendapat atau masukannya tidak disetujui anggota lain. Johan Hasan dari Universitas Ciputra sampai-sampai mendapatkan julukan "Ketua" dari teman-teman panitia lainnya karena wibawanya selalu menjadi pemersatu, terutama pada momen-momen di mana terjadi perselisihan pendapat di antara panitia.

Beragam narasumber yang diundang yang datang dari berbagai latar dan karakter juga menjadi tantangan tersendiri bagi panitia, terutama bila harus berhubungan dengan narasumber yang memiliki kepribadian yang kaku dan dominan. Namun hanya 1-2 narasumber yang demikian. Hampir seluruh narasumber NggoTio memiliki kepribadian yang menyenangkan dan mudah diajak bekerjasama. Meskipun penuh tantangan, serial webinar NggoTio bisa dibilang termasuk yang sangat diminati selama masa pandemi, bersanding dengan serial webinar lainnya yang sama-sama membahas tentang topik terkait ketionghoaan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari adanya segolongan "fans fanatik/setia", maupun jumlah peserta tiap episode dan antusiasme saat sesi tanya jawab berlangsung. Peserta yang hadir bukan hanya di dalam Zoom saja, tetapi juga via channel Youtube.

Tanggapan dari para peserta yang dirangkum melalui kuesioner daring yang dibagikan usai setiap episode juga diterima panitia. Rata-rata berisi respons positif dari audiens, di samping masukan-masukan konstruktif, yang mana hal ini menunjukkan kepedulian audiens. Sayangnya tidak semua ide dapat terakomodasi karena berbagai keterbatasan.

Ada tiga hal yang dicatat Didi Kwartanada karena berkesan, "Pertama, perasaan suka saya selama pelaksanaan NggoTio ini adalah "ilmu" yang saya peroleh selama hidup ini (khususnya sewaktu bekerja dengan alm. Pak Eddie Lembong/Yayasan Nabil) bisa diaplikasikan utk kemaslahatan umum."

Kedua, NggoTio juga memberikan kesempatan kepada para peneliti yang relatif "baru" dan belum dikenal publik untuk tampil dan mempresentasikan temuannya. Bagaimana cara "menjaring" mereka ini? Didi Kwartanada menuturkan, bahwa dia juga mengikuti akun-akun Facebook yang terkait sejarah dan budaya Tionghoa Indonesia, dan bertemulah dia dengan postingan-postingan bermutu dari Danny Tjia (aka Mawar Merah) tentang sastra Melayu Tionghoa dan Nouval Murzita (aka Long Fa) tentang sekolah Tionghoa Perantauan di era pasca kemerdekaan. Keseriusan mereka dalam meneliti topiknya perlu dikenalkan lebih luas. Untuk itu NggoTio berfungsi sebagai medium.

Ketiga, dengan segala kekurangannya, NggoTio menurut Didi sudah memberikan legitimasi ilmiah (lewat sumber-sumber yang valid) bahwa etnis Tionghoa adalah *stake holder* di negara ini, bukan sekedar numpang atau menjadi *economic animal*.

Kesan dan Harapan

NggoTio memiliki daya tarik tersendiri bagi penggemarnya selain karena titelnya yang unik dan "gaul", juga karena dipenuhi oleh berbagai tokoh maupun praktisi yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya.

Di satu sisi hal ini menunjukkan animo masyarakat untuk belajar sejarah ternyata cukup tinggi. Diperlukan fakta-fakta sejarah yang akurat untuk membongkar narasi diskriminatif Orba. Hal ini yang menjadi penyemangat tim panitia NggoTio.

Selain itu, dukungan dari Leo Suryadinata, Asvi Warman Adam dan berbagai narasumber yang luar biasa sangatlah berarti bagi panitia semua. Bahkan beberapa pemirsa yang berada di luar negeri rela mengorbankan waktu istirahat mereka untuk mengikuti acara ini. Hal ini benar-benar dirasakan sebagai dukungan kuat bagi kerja keras panitia.

Sedikit kritik dan evaluasi diri adalah panitia belum dapat merangkul generasi muda karena lebih dari 60% peserta setia NggoTio berusia di atas 60 tahun. Rupanya acara NggoTio lebih banyak diminati usia dewasa dan senior; padahal sebetulnya panitia memliki keinginan acara ini dapat menjangkau banyak anak-anak muda, itu sebabnya panitia memilih nama yang "gaul", yaitu Nggosipin Tionghoa. Mengapa lebih banyak orang dewasa yang tertarik? Bisa juga untuk nostalgia, bisa untuk menjawab pertanyaan yang sejak lama dipendam tentang sejarah Tionghoa, maupun faktor-faktor lainnya.

Mengapa kaum milenial tidak begitu berminat dengan acara NggoTio? Mungkin karena topik-topiknya "berat" dan juga penyampaiannya dilakukan secara ilmiah (walaupun panitia sudah mencoba mengusahakan penyampaian secara populer). Nah, di sini panitia merasa salah satu tujuan awal bisa dibilang yang terkait menjangkau kaum muda, belum tercapai maksimal.

Namun, dengan dijadikannya webinar NggoTio sebagai dokumen publik di YouTube dan buku yang sedang ditulis oleh Alex Cheung, kami berharap bahwa generasi muda dapat belajar sejarah kapan saja dan dimana saja.

Penutup

Melalui penyelenggaraan NggoTio, panitia berhasil membuktikan:

1. Semangat berbagi: baik panitia dan pengisi acara semuanya tidak mendapatkan imbalan (*pro bono*). Inilah semangat tulus dalam rangka memberikan pendidikan secara gratis kepada masyarakat.
2. Bencana pandemi global ini tidaklah terus menerus diratapi, tapi kita justru bisa memanfaatkannya untuk sesuatu yang positif.

3. Kegiatan literasi tidak boleh berhenti di masa pandemi. Dukungan panitia ditunjukkan dengan cara memperkenalkan buku-buku karya pembicara pada saat moderator membacakan CV mereka, lengkap dengan foto cover-cover bukunya. Panitia juga menampilkan Perpustakaan Medayu Agung Surabaya dalam beberapa episode dengan koleksi buku-bukunya yang terkait topik yang dibahas.

   Di samping itu, beberapa kali panitia mengundang penerbit untuk mempromosikan buku mereka yang "nyambung" dengan topik yang dibahas di episode tertentu. Perlu dicatat, panitia tidak memungut biaya atau meminta apapun dari penerbit.

   Panitia mendukung tetap hidupnya nafas dunia penerbitan di tengah pandemi, ketika banyak toko buku gulung tikar karena masyarakat tidak bisa mendatanginya. Beberapa penerbit yang pernah diundang antara lain: Penerbit Buku Kompas, Penerbit Ombak, Penerbit Larasan dan Yayasan Obor Indonesia.
4. Teknologi pertemuan daring melalui aplikasi Zoom dan sejenisnya, memungkinkan kita belajar dan berbagi secara jarak jauh, tanpa dibatasi jarak (otomatis tidak ada yang namanya terlambat "kena macet"). Audiens bisa datang dari berbagai belahan dunia.

   Arsip rekaman bisa diakses di channel Roemah Bhinneka https://www.youtube.com/playlist?list=PLPpX8GxZOm73Jsf2maKojNgdpnPsK3W3T

BIODATA KONTRIBUTOR

Aan Anshori, sapaan akrab dari Mohammad Anshori, lahir 8 Juni di Jombang, mengajar matakuliah Religion dan Pancasila Universitas Ciputra Surabaya. Ia menamatkan D3 Informatika Komputer di AMIK Jombang, S1 Ilmu Hukum di Universitas Darul Ulum Jombang dan S2 Hukum Keluarga Islam Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Selama kuliah ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Jombang, dan pernah menjabat sebagai sekretaris umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (NU) Jombang. Ia juga berkegiatan di lembaga swadaya masyarakat seperti ICDHRE, LINK dan Lakpesdam NU untuk isu HAM, agama, dan kelompok minoritas agama dan gender-seksualitas.

Pada Agustus 2017 ia terpilih mengikuti International Visitor Leadership Program dari Pemerintah AS untuk belajar singkat tentang multikulturalisme di Washington DC, Philadelphia, Detroit dan Los Angeles. Mengisi beberapa kuliah tamu terkait Islam dan Indonesia, misalnya di kelas Antropologi Singapore Management University (2021). Aan pernah menjabat sebagai kordinator Jaringan GUSDURian Jawa Timur hingga 2015 dan kordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi/JIaD sampai sekarang. Saat ini menjadi pengajar matakuliah Religion dan Pancasila di Univ. Ciputra Surabaya dan mengisi kelas katekisasi dan pendalaman teologi di kalangan Katolik dan Kristen. Ia aktif menulis di media massa dan onlen, serta menjadi penulis dan editor buku "Narasi Memori; Ada Aku di antara Indonesia dan Tionghoa," "Jalan Lain Perdamaian, Derap Perlawanan di Kaki Semeru," "Kota Santri Kota (in)toleransi," dan "Jilbab dan Salib; Kisah Para 'Pelanggar Batas' di GPIB Tiberias," (akan terbit)

Ia juga menulis salah satu judul di buku "Siapakah Sesamaku?" (STFT Jakarta) dan "Berebut Kontrol atas Kesejahteraan," (Polgov UGM), "Tafsir Progresif Islam & Kristen; Keragaman Gender dan Seksualitas" (GAYa Nusantara). Ia bisa dikontak lewat aan.anshori@gmail.com; Twitter @aananshori dan IG @gantengpolnotok

Alex Cheung merupakan nama pena dari **Alexander Raymon (Lim Kim Hwat/林金發)**, yang lahir di Jakarta 1978. Alex memiliki ketertarikan meneliti dan menulis tentang tokoh, tradisi dan budaya, silsilah keluarga serta sejarah dan peranan etnis Tionghoa di Indonesia, terutama di bidang seni beladiri tradisional. Tujuannya meneliti dan menulis adalah agar serpihan sejarah Tionghoa di Indonesia dapat terdokumentasikan dan menjadi catatan serta inspirasi positif bagi masyarakat dan generasi penerus.

Saat ini Alex merupakan seorang penulis buku, penelusur tentang ketionghoaan di Indonesia, Pemerhati dan Praktisi TCMA (Traditional Chinese Martial Arts), Entrepreneur (2002-Now). Sudah banyak buku yang ditulisnya, antara lain: (1) *Melacak Jejak Kungfu Tradisional di Indonesia* yang merupakan karya kolaborasi "Team ACE" (Alex Cheung – Charly Huang – Erwin Tan); (2) *Silsilah Keluarga Karet Lineage Thio Tjoei Seng;* dan (3) *Silsilah Keluarga Senen Lineage Liem Tjin Hay* serta (4) *Tionghoa di Quora – Kumpulan Jawaban Tentang Tionghoa di Quora Indonesia* Sarjana komputer lulusan Univ.Binus Jakarta (2000) ini juga pendiri dan chef Kedai Vegetarian "Siti Fang-Fang Vegetarian" (2018-kini) serta pendiri Penerbit Buku "Tiong Gie" dan "Toedjoeh Delapan". Alex Cheung dapat dihubungi melalui *e-mail*: 7kg8kb@gmail.com

Didi Kwartanada dilahirkan di Yogyakarta (1968) dari pasangan Peranakan Tionghoa generasi ketujuh (ayah) dan Jawa (ibu) . Ia menempuh pendidikan sejarah di Universitas Gadjah Mada dan National University of Singapore, dengan fokus utama sejarah sosial etnik Tionghoa di Jawa. Kini ia adalah sejarawan independen, setelah sebelumnya pernah bekerja di Institute of Asia Pacific Studies, Waseda University (WIAPS), Tokyo dan di Yayasan Nation Building (NABIL) di Jakarta. Karya utamanya adalah (1) *Tionghoa dalam Keindonesiaan: Peran dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa* (3 jilid 2016; cetak ulang 2017) sebagai editor pelaksana (bersama Leo Suryadinata) dan kontributor. (2) *Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (Leiden: E.J. Brill, 2010), selaku ko-editor dan kontributor. Buku ini telah memenangkan penghargaan

"Choice's Outstanding Academic Title 2010". Salah satu karya terbarunya "Diingat sekaligus Dilupakan: 'Cina' dalam Memori Kolektif dan Historiografi Orde Baru", terbit di jurnal *Prisma* di masa pandemi corona (Juni 2020). Didi Kwartanada dapat dikontak lewat email: kwartanada@gmail.com

Evi Lina Sutrisno meraih pendidikan S1 Psikologi dari Universitas Gadjah Mada (1995) dan meneruskan S2 Social Sciences di Universiteit van Amsterdam (2002). Ia menyelesaikan gelar Ph.D dalam bidang Antropologi di University of Washington, Seattle (2018). Disertasinya membahas tentang sejarah perkembangan agama Konghucu di Indonesia dari tahun 1890-an hingga 2010 dan umat Khonghucu dalam mengembangkan ritual dan konsep keagamaan yang unik sebagai hasil dari negosiasi dengan pemerintah Indonesia pasca-kolonial. Sejak 2019 Evi bekerja sebagai dosen dan peneliti di FISIPOL dan Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM. Evi Lina Sutrisno dapat dihubungi di: evi.sutrisno@gmail.com

Johan Hasan, dosen Universitas Ciputra Surabaya sekaligus Dekan Fakultas Entrepreneurship dan Humaniora di Universitas Ciputra Surabaya. Saat ini, ia sedang menempuh studi S3 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dalam bidang Ilmu Filsafat, yang dimulai sejak tahun 2017. Pendidikan S2 dalam bidang Filsafat diperolehnya dari Universitas Indonesia tahun 1999, sementara Sarjana Komputernya diperoleh tahun 1994 dari STMIK Budi Luhur yang sekarang bernama Universitas Budi Luhur. Johan Hasan dapat dihubungi di: johan.hasan@ciputra.ac.id

Michael Andrew adalah seorang Tionghoa milenial kelahiran Surabaya pada tahun 1995. Sehari-hari ia aktif sebagai pengajar PPKn, Sosiologi, dan Geografi di SMAK St. Hendrikus Surabaya dan SMA Little Sun Surabaya. Selain aktif mengajar, Michael Andrew juga anggota aktivis Roemah Bhinneka yang bergerak di dunia kebhinnekaan dan keberagaman bersama dengan jaringan kebhinnekaan lain seperti Jaringan GUSDURian Jawa Timur. Selain itu juga, Michael Andrew sedang studi

mengambil Magister Administrasi Publik di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG Surabaya). Ia dapat dihubungi di *e-mail* severusmike95@gmail.com

Ravando lahir di Jakarta 1988. Lulus dari Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan beasiswa S2 di jurusan Colonial and Global History, Universitas Leiden. Pada 2017 ia mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan S3-nya di University of Melbourne, Australiam dengan disertasinya mengenai surat kabar Sin Po. Ia memiliki minat yang luas pada sejarah etnis Tionghoa, khususnya yang terkait dengan revolusi Indonesia, kesehatan dan olahraga. Tulisan ilmiah dan populernya tersebar di berbagai jurnal dan media massa. Ia telah menulis tiga buku tentang sejarah kesehatan dan yang terbaru berjudul *Perang Melawan Influenza: Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial* (2020) yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas. Ravando dapat dihubungi melalui *e-mail* : revandolie@gmail.com

Rojil Nugroho Bayu Aji dilahirkan di Surabaya tahun 1985. Penulis adalah dosen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Unesa. Aktif di organisasi kemasyaratan Nahdlatul Ulama (NU) dan juga alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Airlangga, Surabaya. Beberapa tulisan dan resensinya pernah muncul di media massa seperti *Kompas, Jawa Pos, Majalah Konstitusi, Sindo*, *Surya*, *Koran Jakarta* dan *tirto.id*. Penulis sempat bekerja menjadi penulis dan editor di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2009-2010). Sempat juga menjadi guru sejarah dan humanities (IPS Terpadu) di Sekolah Ciputra Surabaya (2012), dosen luar biasa (DLB) di Universitas Ciputra dan Unair. Tulisannya yang berjudul "Budaya Adu Doro dalam Masyarakat Surabaya" diterbitkan bersama dalam buku *Tempoe Doeloe Selaloe Aktoeal* (2007), "Dari Bung Karno menjadi Senayan: Penamaan Gelanggang Olahraga dan Politik Memori" diterbitkan dalam buku *Sejarah dan Memori : Titik Simpang dan Titik Temu* oleh Penerbit

Ombak (2013), skripsinya tentang sepak bola diterbitkan menjadi buku *Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola 1915-1942* oleh Penerbit Ombak (2010), *Mewarisi Sepak Bola, Budaya dan Kebangsaan Indonesia* diterbitkan Pagan Press (2018). Saat ini penulis juga aktif dalam riset dan penerbitan tulisan tentang dinamika sosial sepak bola di komunitas *Bonek Writer Forum* (BWF). Penulis dapat dihubungi di email: rojil_history@yahoo.com dan rojilaji@unesa.ac.id

Shinta Devi Ika Santhi Rahayu, adalah Dosen di Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, dan Dosen LB di Universitas Ciputra. Dia meraih gelar Sarjana Sastra (Universitas Airlangga 2003) dan meraih gelar M.A (Universitas Gadjah Mada 2010). Saat ini sedang menempuh program doktor sejarah di Universitas Diponegoro. Karya skripsi telah diterbitkan pada tahun 2005 dengan judul *Boen Bio: Benteng Terakhir Umat Khonghucu.* Thesisnya telah diterbitkan dengan judul *Etnis Tionghoa dalam Sejarah Pendidikan Masyarakat Kota Surabaya* (2014). Pada tahun 2010-2018 menjadi salah satu peneliti di Unit Kajian Kebudayaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga (UK2JT). Bersama dengan beberapa dosen di Program Studi Ilmu Sejarah dan anggota peneliti lainnya, melakukan penelitian dan menerbitkan beberapa buku sejarah dan kebudayaan masyarakat Jawa Timur. Beberapa buku yang dihasilkan adalah (1) *Peternakan di Jawa Timur : Sejarah, Lembaga, dan Perannya dalam Pembangunan Nasional* (2) *Karakter Bangsa dan Kearifan Lokal* (3) *Dinamika, dan Perubahan Sosial Budaya Kota-Kota di Jawa Timur;* (4) *Ruang Publik, Ekopolitik, dan Budaya Jawa Timur*. (5) *Sejarah Lamongan dari Masa Ke Masa* dan (6) *Kota dan Jejak Aktivitas Peradaban.* Shinta Devi Ika Santhi Rahayu dapat dihubungi melalui *e-mail*: shinta.devi.ika@gmail.com

Surya Samudera Giamsjah Lahir di Surabaya 1976. Setamat dari SMA Katolik St. Albertus Malang pada tahun 1994, ia menempuh studi teologi di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, meraih gelasr Sarjana Theologia (S.Th.) dan Master of Arts

in Religious Studies (M.A.R.S) pada tahun 1999. Ditahbiskan sebagai pendeta GKI dengan basis di jemaat GKI Sangkrah Solo pada tahun 2004 dan diteguhkan di jemaat GKI Taman Majapahit Semarang pada tahun 2009. Menekuni bidang teologi sosial dan transformasi sosial sejak menjadi Ketua Moderamen Gereja-gereja pendiri Yayasan Bimbinga Kesejahteraan Sosial (YBKS) Solo pada tahun 2002 - 2004 serta anggota Yayasan Pendidikan Kristen "Widya Wacana" Solo pada tahun 2006 - 2007. Ketertarikan dan pengalaman dalam pelayanan generasi muda dan jurnalistik sejak masih remaja membawanya menjadi Ketua Dewan Redaksi Majalah "MITRA GKI" GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah (2008 - 2012); ketua program pelatihan transformasi sosial "Leadership Capacity Building" di Center for Development and Culture, Solo (2013 - 2016); peserta Asian Students and Youth Gathering di Manila, Filipina (2013); awak media Sidang Raya X Dewan Gereja Dunia di Busan, Korea Selatan (2013); awak media Sidang Raya XIV Dewan Gereja Asia di Ancol, Jakarta (2015); dan peserta temu raya teolog dan aktivis pemberdayaan rakyat dalam rangka peringatan 500 tahun Reformasi Martin Luther pada tahun 2017 di Wittenberg, Jerman. Pdt. Surya S. Giamsjah memiliki istri bernama Rosmeiwarni Zega dan putra bernama Gifford Kara Samudera Giamsjah, dapat dihubungi di alamat surel giamsjah@gmail.com

Sutrisno Murtiyoso tinggal di Bandung. Dikenal luas sebagai salah satu pakar di bidang cerita silat, walaupun minatnya secara profesi meliputi Sejarah Arsitektur serta Arsitektur Tradisional dan Vernakular, dan terkait pada mata kuliah yang diajarkannya saat ini di Jurusan Arsitektur, Universitas Tarumanagara, Jakarta. Pada tahun 1989, ia dan empat koleganya mengundang 40 sarjana dan peminat sejarah arsitektur lainnya untuk mendirikan Lembaga Sejarah Arsitektur Indonesia yang mempercayainya selaku ketuanya sejak tahun 2012. Bisa dihubungi di email sumur@yahoo.com

Yerry Wirawan Lahir di Jakarta. Sejak Agustus 2014 menjadi dosen di Jurusan Sejarah, Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta. Minatnya meliputi bidang-bidang Sejarah, Diaspora Tionghoa, Budaya, Sastra, Politik, dan Media. Yerry meraih S1 nya dari Departemen Sejarah Universitas Indonesia. Ia melanjutkan pendidikannya ke Prancis, baik untuk S-2 nya (DEA, 2003-2005) dan S3 (2008-2011), keduanya ditempuh di École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris di bawah bimbingan Claudine Salmon. Disertasinya telah diterbitkan dengan judul *Sejarah Tionghoa Makassar abad ke-17 hingga ke-20* (Jakarta: KPG, EFEO, KITLV, 2014). Ia banyak menyajikan tulisannya dalam seminar maupun publikasi ilmiah dan populer, diantaranya "Independent Woman in Postcolonial Indonesia: Rereading the Works of Rukiah", dalam *Southeast Asian Studies*, Vol. 7 No. 1, h. 85-101 serta "Tiga Menentang Stigma: Liem Koen Hian, Siauw Giok Tjhan, Soe Hok Gie" *Basis.* No. 03-04. Yerry Wirawan dapat dihubungi melalui: yerry.wirawan@gmail.com

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Siapapun yang meneliti etnik Tionghoa Indonesia, dipastikan pernah membaca karya-karya Leo Suryadinata, setidaknya mengenal namanya. Dengan publikasinya dalam berbagai bahasa, pria kelahiran Jakarta ini telah memberikan pengetahuan mengenai etnik Tionghoa dalam berbagai aspeknya. Terlebih di masa Orde Baru, tulisan Leo berkontribusi memberikan perspektif yang berbeda dari versi penguasa.

Pada 2021, peneliti senior ISEAS Singapura ini merayakan ulang tahunnya ke-80. Keluarga besar NGGOTIO (Nggosipin Tionghoa, Yuk!) tidak mau melewatkan momen istimewa ini. Hasilnya adalah *festschrift* yang berisi persembahan dari 12 penulis:

- Aan Anshori
- Alex Cheung
- Didi Kwartanada (Editor)
- Evi Lina Sutrisno
- Johan Hasan
- Michael Andrew
- Ravando
- Rojil Nugroho Bayu Aji
- Shinta Devi Ika Santhi Rahayu
- Surya Samudera Giamsjah
- Sutrisno Murtiyoso
- Yerry Wirawan

PENERBIT
UNIVERSITAS
CIPUTRA

Universitas Ciputra
Citraland CBD Boulevard
Surabaya 60219
penerbit@ciputra.ac.id

ISBN 978-623-7636-81-6 (PDF)